



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

# **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**RKPD  
2013**



RTRW - RPJMD - RENSTRA SKPD - RKP - MP3EI  
MP3KI - MP3ESB - RENJA SKPD - PERMENDAGRI 54 2010



.....DHARMASRAYA BERSEMI 2015

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
PULAU PUNJUNG, JULI 2012**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara teknis RKPD ini mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/1369/II/Bangda Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 tertanggal 25 Maret 2011.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 didasarkan kepada arah kebijakan dan target program prioritas yang terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 ini disusun sebagai rencana aksi untuk tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kami mohon tanggapan dan koreksi dari semua pihak.

**BUPATI DHARMASRAYA**

**H. ADI GUNAWAN**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-3
	1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>II-1</b>
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
	2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-53
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012.....</b>	<b>III-1</b>
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-13
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012.....</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2012.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>

**DAFTAR TABEL**

	Tabel
1. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya .....	II-1
2. Rekapitulasi Rencana Program dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 .....	II-2
3. Perkembangan Ekonomi Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya .....	III-1
4. Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 s.d Tahun 2012 .....	III-2
5. Realisasi Dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 s.d Tahun 2012 .....	III-3
6. Realisasi Dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung (Pagu Indikatif) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 s.d Tahun 2012 .....	III-4
7. Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan (Pagu Indikatif) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 s.d Tahun 2012 .....	III-5
8. Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 s.d Tahun 2012 .....	III-6
9. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012	IV-1
10. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 .....	V-1
11. Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Seluruh Renja SKPD .....	V-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam menyusun Rancangan awal RKPD 2013 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up*, dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kenagarian, kecamatan, dan kabupaten.

RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya RKPD tahun 2013 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Dharmasraya ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang (Peraturan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
15. Surat Edaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2011 dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2012.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2015. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya, dilakukan melalui penyesuaian, sebagai berikut:

- a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten;
- b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.



Mengacu pada RPJMD Provinsi, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi. Mengacu pada RPJMN, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2012, sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

### BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2012

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

### BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

### BAB VI. PENUTUP

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai:

- a. Untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. Pedoman SKPD Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- c. Instrumen untuk menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka sasaran RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 adalah menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Dharmasraya, yang sumber dananya berasal dari APBD maupun non APBD. Selanjutnya fungsi RKPD adalah :

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2013;
- c. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;



- d. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD;
- e. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- f. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
- h. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

---

### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1.1 Karakteristik Wilayah**

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" Lintang Selatan dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" Bujur Timur. yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha .

Pada awal pemekaran (tahun 2003), kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru, dan Sitiung dengan 21 Nagari dan 109 Jorong. Pada tahun 2009, berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan,

jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan menjadi 11 Kecamatan. Dari 11 kecamatan tersebut, kecamatan yang paling luas adalah Koto Besar dengan luas 473, 40 Ha, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Padang Laweh dengan 59,76 Ha. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2011**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 - 2008	2009 - 2012	2005 - 2008	2009 - 2012
1	Sungai Rumbai	5106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan*	48541	-	5	-	22
3	Koto Besar*	56057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22120	7	4	38	26
5	Koto Salak**	12145	-	5	-	27
6	Padang Laweh**	6062	-	4	-	17
7	Tiumang**	13443	-	4	-	17
8	Sitiung	12457	3	4	20	22
9	Timpeh***	32301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44316	5	6	25	31
11	IX Koto****	50050	-	4	-	21
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>302599</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>109</b>	<b>260</b>

Sumber : Perda No.4 Tahun 2009.

Ket :  
\* : Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai  
\*\* : Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru  
\*\*\* : Pemekaran dari Kecamatan Sitiung  
\*\*\*\* : Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan

bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Daerah dengan dataran paling tinggi berada di kecamatan Sungai Rumbai yaitu 1.525 m d.p.l. sedangkan dataran yang paling rendah berada di kecamatan Koto Baru dengan ketinggian 97 m d.p.l.

Kabupaten Dharmasraya memiliki sumber daya air yang cukup melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 60 buah dan panjang sungai mencapai sekitar 96 km. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Dharmasraya dialiri oleh Sungai Batang Hari yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Sumatera. Sumber daya air yang potensial ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya. Berikut adalah beberapa sungai yang telah dimanfaatkan, yaitu:

**Tabel 2.2**  
**Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
3	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan. Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2010 dapat dilihat curah hujan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2007 dengan curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361, dari kurun waktu 5 tahun terakhir curah hujan rendah terdapat pada

tahun 2009 mengalami penurunan curah hujan yaitu 6412,2 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 398 hari.

Komposisi lahan Kabupaten Dharmasraya terbanyak adalah hutan dan pertanian/perkebunan. Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Sementara itu, luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.755 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 5.586 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%). Sedangkan luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya**

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Eksisting	
		(Ha)	(%)
1	Hutan	172.707	58,29
2	Permukiman	5.070	1,71
3	Perkebunan	89.755	30,29
4	Persawahan	5.586	1,89
5	Pertanian Lahan Kering	3.973	1,34
6	Semak/belukar	19.192	6,48
7	Perairan Darat	1.613	0,54
Luas Total		296.283	100,00

*Sumber : Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031.*



Adapun komposisi peruntukan lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan**

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
<b>Kawasan hutan</b>		
- Hutan Lindung (HL)	11958	3,95
- Hutan Produksi (HP)	25986	8,59
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	12839	4,24
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	30821	10,19
- Kaw. Suaka Alam/Pelest. Alam (KSA/KPA)	5410	1,79
Perkebunan Besar	52944	17,50
Rencana Kawasan Transmigrasi	1312	0,43
Kawasan Pertambangan	11747	3,88
Area Penggunaan Lain	149582	49,43
<b>Total Luas</b>	<b>302599</b>	<b>100</b>

Sumber: BPN Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011; SK MenHut No 304 Tahun 2010

Berdasarkan status penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh perusahaan dan penduduk. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut: Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi seluas 177.109 Ha (58,73% dari luas wilayah kabupaten). Kawasan hutan berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten). Perkebunan besar seluas 75.840 Ha (25,15% dari luas kabupaten). Kawasan pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan seluas 9.014 Ha (2,99% dari luas wilayah kabupaten). IUP Pertambangan lain berimpit dengan peruntukkan lain seperti berada dalam kawasan hutan seluas 2.774 Ha dan dalam kawasan perkebunan besar seluas 9.351 Ha. Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 124.445 Ha (41,27% dari luas wilayah).

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini.

**Tabel 2.5.**  
**Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Wilayah	Luas Kawasan Lindung		Luas Kawasan Budidaya		Luas Wilayah
		(Ha)	%	(Ha)	%	
1	Dharmasraya	21.192	7.16%	274.921	92.84%	296.113
Jumlah Provinsi (Ha)		1.516.593	35,86%	2.713.137	64,14%	4.229.730

Sumber: RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029

Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batang Hari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Besarnya potensi pengembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas lahan budidaya adalah sebagai berikut:

#### 1. Peluang Perkembangan Pertanian

##### a. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan.

##### b. Pengembangan pertanian perkebunan

Pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat. Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet.

##### c. Pengembangan pertanian hortikultura

Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar

yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kabupaten Dharmasraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago

## 2. Peluang Perkembangan Pertambangan

Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan eksploitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.

## 3. Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Dharmasraya kaya akan meninggalkan bersejarah terutama situs-situs bersejarah, yang saat ini masih belum tergali. Jika kawasan yang menjadi tempat situs-situs bersejarah tersebut dikembangkan dan dipadukan dengan atraksi wisata lainnya akan dapat menjadi potensi pariwisata Kabupaten Dharmasraya.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dalam laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 – 2031, Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor adalah: Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung. Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut.

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir. Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, dan di Kecamatan Koto Salak. Bencana banjir baru-baru ini juga menerjang Kecamatan Timpeh. Dan dalam hal kerawanan bencana lingkungan, masih bersumber dari Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031 dinyatakan bahwa baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batang Hari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

#### **2.1.1.3 Aspek Demografi**

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu 191.422 jiwa, yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu 2.316 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan dengan laju 2,94%. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 170.441 jiwa dan tahun 2010 meningkat menjadi 191.422 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 20.981 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010**

No	Kecamatan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Sungai Rumbai	16.067	16.551	17.054	17.567	17.989	2,87
2	Koto Besar	20.365	20.979	21.617	22.267	22.876	2,95
3	Asam Jujuhan	9.393	9.676	9.970	10.270	10.539	2,92
4	Koto Baru	25.563	26.333	27.134	27.950	28.796	3,02
5	Koto Salak	13.413	13.817	14.238	14.666	15.076	2,97
6	Tiumang	9.885	10.182	10.492	10.807	11.094	2,93
7	Padang Laweh	4.783	4.927	5.077	5.230	5.368	2,93
8	Sitiung	20.576	21.195	21.840	22.497	23.019	2,85
9	Timpeh	11.990	12.351	12.727	13.110	13.460	2,93
10	Pulau Punjung	31.872	32.831	33.830	34.847	35.861	2,99
11	IX Koto	6.534	6.731	6.936	7.144	7.344	2,96
<b>Total</b>		<b>170.441</b>	<b>175.573</b>	<b>180.915</b>	<b>186.355</b>	<b>191.422</b>	<b>2,94</b>

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011.

Dari tabel di atas, Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dengan persebaran 18,70% atau 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa dengan persebaran 15% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebesar 2,81% atau 2.316 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan kepadatan kotor (bruto) kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah) saat ini yaitu 64,64 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dilihat berdasarkan data perkecamatan, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 344 jiwa/Km<sup>2</sup> dan di Kecamatan Sitiung yaitu 181 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan IX Koto yaitu hanya 14 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jika dilihat kepadatan penduduk Pernagari maka nagari yang rapat penduduknya terdapat di Nagari-nagari Sungai Rumbai, Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai Timur, Kurnia Selatan, Koto Baru, Pulau Mainan, Sitiung, Sungai Duo, Koto Baru, dan Koto Padang.

Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang

cukup tinggi, yakni: rata-rata 3,04 % per tahun. Hal ini disebabkan karena selain peningkatan jumlah penduduk terutama disebabkan adanya pertumbuhan alami dan faktor migrasi netto yang positif, yang berarti bahwa migran masuk (*in migration*) ke Dharmasraya lebih besar dibandingkan yang keluar Dharmasraya, juga dikarenakan Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang dari segi ekonomi cukup kondusif, berada pada posisi yang strategis dan ekonominya sedang berkembang, sehingga banyak penduduk pendatang yang bekerja dan membuka usaha baru.

Kabupaten Dharmasraya juga merupakan daerah transmigrasi yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Minang 62,93%/106.899 Jiwa, Jawa 32,96 %/55.989 Jiwa, Sunda 1,49 %/2.531 Jiwa, Batak 0,88 %/1.495 Jiwa, melayu 0,71 %/1.206 Jiwa dan suku lainnya 1,03 %/1.751 Jiwa (Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2011).

Dari sisi Struktur penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk terbesar jika dilihat berdasarkan kelompok umur yaitu terdapat pada kelompok umur 0 – 4 tahun atau usia balita sebanyak 17.377 jiwa atau 11,78%. Sedangkan dilihat berdasarkan kelompok usia pada umumnya penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah merupakan usia sekolah yang merupakan kelompok umur 5 – 24 tahun sebanyak 79.846 jiwa atau 41,71% dan usia kerja yang berada pada kelompok umur 25 – 59 tahun sebanyak 78.666 jiwa atau 41,10%. Sedangkan usia non produktif (usia balita dan usia lanjut) hanya sekitar 5,42% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010**

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
0 - 4	Usia Balita	20.063	20.667	21.299	21.943	22.540
5 - 9	Usia Sekolah	18.496	19.053	19.634	20.226	20.777
10 - 14	Usia Sekolah	18.168	18.716	19.286	19.867	20.409
15 - 19	Usia Sekolah	17.640	18.171	18.723	19.285	19.809
20 - 24	Usia Sekolah	16.834	17.290	17.816	18.352	18.851
25 - 29	Usia Kerja	16.307	16.798	17.308	17.826	18.310
30 - 34	Usia Kerja	13.311	13.763	14.182	14.608	15.004
35 - 39	Usia Kerja	12.606	12.986	13.380	13.780	14.154

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
40 - 44	Usia Kerja	10.188	10.495	10.816	11.144	11.448
45 - 49	Usia Kerja	7.916	8.154	8.401	8.652	8.887
50 - 54	Usia Kerja	5.590	5.758	5.933	6.111	6.277
55 - 59	Usia Kerja	4.085	4.208	4.335	4.465	4.586
60 - 64	Usia Lanjut	4.019	4.140	4.265	4.393	4.511
65 +	Usia Lanjut	5.217	5.374	5.537	5.704	5.859
Jumlah		170.440	175.573	180.915	186.356	191.422

Sumber : Kab. Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Dari data tabel 2.7. diatas terlihat adanya kelompok produktif yaitu umur 15-64 tahun cenderung meningkat. Kondisi ini sering disebut sebagai *demographic dividend* yang mampu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, pertanahan, dan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah.

#### 2.1.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### a. Pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karakteristik penyebaran dari perekonomian suatu daerah. Demikian juga halnya untuk kabupaten Dharmasraya dengan PDRB yang disajikan berikut terlihat kondisi ekonomi kabupaten Dharmasraya. Dari tahun ke tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan suatu perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan mengalami penurunan melambat menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, namun begitu persentasenya masih di atas angka enam. Baiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tersebut tentu tidak terlepas dari peran para pelaku

ekonomi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonominya yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Jika dilihat dari perkembangan secara nominal yang digambarkan dengan perhitungan nilai tambah bruto berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2011 tercatat sebesar 3.067,93 milyar rupiah atau naik 14,57 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya tercatat sebesar 2.677.79 milyar rupiah. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 1.234,38 milyar rupiah mengalami kenaikan 6,54 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 1.158,56 milyar rupiah. Ini artinya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 sedikit lebih meningkat sekitar 0,03 % menjadi 6,54% dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 kinerja perekonomian Dharmasraya mengalami pertumbuhan sebesar 6,51 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2009 sebesar 6,64%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2008-2010**

PDRB	Nilai (Milyar Rp)			Perubahan (%)		
	2009	2010*	2011**	2009*	2010**	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Atas Dasar Harga Berlaku	2 346.48	2 677.79	3.067,93	11.21	14.12	14,57
Atas Dasar Harga Konstan	1 087.78	1 158.56	1.234,38	6.64	6.51	6,54

Sumber : PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010, 2012

\* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

Laju pertumbuhan setiap sektor pembentuk PDRB Kabupaten Dharmasraya selama rentang tahun 2010 dan 2011 mengalami variasi dan fluktuasi dimana sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar mengalami



pertumbuhan sebesar 5,62% lebih cepat dari tahun sebelumnya yang tercatat 5,50%. Pertumbuhan subsektor perkebunan merupakan pertumbuhan tertinggi untuk tahun 2011 dibanding subsektor lainya mencapai 7,70% naik dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat 5,92%. Dari sembilan subsektor penyumbang PDRB, tercatat ada tiga yang mengalami penurunan atau pertumbuhan melambat yaitu pertama: subsektor pertambangan dan penggalian dari 11,21% tahun 2010 menjadi hanya 7,79% tahun 2011, kedua: subsektor bangunan mengalami penurunan dari 7,62% tahun 2010 menjadi 5,84% tahun 2011, dan terakhir adalah subsektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menurun dari 10,06% menjadi hanya 7,70%. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB ADHK Tahun 2009 – 2010**  
**Tkabupaten Dharmasraya (Dalam %)**

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan <sup>1)</sup>		Distribusi <sup>2)</sup>	
		2010*	2011**	2010*	2011**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	5.50	5,62	35.37	34,89
2	Pertambangan dan Penggalian	11.21	7,79	6.24	6,30
3	Industri Pengolahan	4.99	5,13	5.72	5,52
4	Listrik dan Air Bersih	3.51	6,60	1.04	1,01
5	Bangunan	7.62	5,84	13.68	13,63
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.89	7,24	12.76	13,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.62	6,71	6.87	6,96
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10.06	7,70	4.14	4,14
9	Jasa-Jasa	6.33	8,42	14.18	14,51
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6.64</b>	<b>6.54</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya dalam PDRB tahun 2006 – 2010.

Baiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tersebut tentu tidak terlepas dari peran para pelaku ekonomi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonominya yang produktif.

#### b. Laju Inflasi provinsi

September 2011 di Kota Padang terjadi inflasi sebesar 1,24 persen. Dari 66 kota IHK, 45 kota mengalami inflasi, sementara 21 kota lainnya mengalami deflasi (1 kota di Pulau Sumatera, 5 kota di Pulau Jawa, dan 15 kota di luar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa) . Inflasi tertinggi terjadi di

Singkawang 1,53 persen dan terendah di Bogor 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Palu 2,33 persen dan terendah di Sumenep 0,02 persen. Inflasi kota Padang terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran: kelompok sandang 2,89 persen; kelompok bahan makanan 2,81 persen; kelompok kesehatan 1,74 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,88 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,51 persen; dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,29 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami deflasi 0,09 persen. Laju inflasi tahun kalender kota Padang (sampai dengan September 2011) tercatat sebesar 3,74 persen. Laju inflasi “*year on year*” (September 2011 terhadap September 2010) tercatat sebesar 7,34 persen.

**Tabel 2.10**  
**Nilai Inflasi Year on Year Kota Padang**  
**Tahun 2009-2011.**

NO	URAIAN	2009	2010	2011*	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	INFLASI	3,55	4,83	7,34	1,90

\*)Persentase perubahan IHK bulan September 2011 terhadap IHK bulan September 2010

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 5010/13/Th. XIV, 3 Oktober 2011, BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan inflasi YoY sekitar 1,90%. Jika kita asumsikan rata-rata pertumbuhan tersebut flat, maka pada tahun 2013 nilai inflasi berada pada kisaran 11,14%, suatu nilai yang cukup besar. Hal ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama karena jika kita tak mempertimbangkan laju inflasi maka pertumbuhan ekonomi tinggi agak mubazir karena biaya hidup masyarakat juga semakin tinggi.

#### c. PDRB Per Kapita

Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya PDRB suatu daerah belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena juga sangat tergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Angka-angka perkapita akan menunjukkan

tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk melihat gambaran secara riil keadaan tersebut digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dari tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**PDRB Perkapita dan PDRB Regional Per Kapita Tahun 2007 s.d 2011**  
**Kabupaten Dharmasraya**

Tahun	Nilai PDRB (RP.000)	Jumlah penduduk (Jiwa)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Perubahan (%)	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	1.787.383	175.573	10 180 286.52	14.59	9 678 778.66	14.88
2008	2.109.946	180.915	11 314 964.39	11.14	10 766 881.98	11.24
2009	2.346.484	186.354	12 417 559.87	9.74	11 811 441.54	9.70
2010*	2.677.790	191.422	13 984 040.91	12.62	13 385 696.20	13.33
2011**	3.067.927	197.599	15 838 958,48	13,22	15 115 745,28	13,39

Sumber : PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010, 2011

\* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

Dari tabel di atas, pada tahun 2011 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 13,22 persen dengan nilai sebesar Rp. 15.838.958,48 per orang per tahun sedangkan tahun 2011 hanya 12,65 persen dengan nilai sebesar Rp. 13.984040,91 per orang per tahun.

Peningkatan nilai PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya.

#### d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya masih cukup besar, yaitu sebanyak 20.760 jiwa atau 11, 14% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Jika dibandingkan dengan data tahun 2006 - 2009, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 3,79%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan*) (Jiwa)	Persentase Angka Kemiskinan**) (%)
2006	170441	25400	14,90
2007	175573	23800	13,56
2008	180915	21370	11,81
2009	186355	20760	11,14
2010	191422	20300	10,60

BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011.

Catatan:

- \*) Penentuan "Angka Kemiskinan" mengacu pada definisi kemiskinan menurut BPS (kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya  
\*\*) Persentase Angka Kemiskinan dihitung dari "Jumlah Penduduk Miskin" tahun bersangkutan dibagi "Total Jumlah Penduduk" pada tahun bersangkutan! kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari).

Sedangkan berdasarkan kriteria dari BKKBN, di Kabupaten Dharmasraya dari 46.428 keluarga yang tercatat pada tahun 2009 terdapat sebanyak 5.428 keluarga yang masih berada pada kondisi Pra Sejahtera, atau naik dari 3.345 keluarga pada tahun 2005. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Sejahtera III dan Sejahtera III Plus atau secara umum, jumlah keluarga pada level sejahtera II ke atas juga meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk pada setiap tahun. Keadaan ini mengindikasikan orang miskin semakin bertambah dan orang kaya juga bertambah, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah KK menurut Tingkat Kesejahteraan**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2009**

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pra Sejahtera	3.347	4.997	4.032	5.392	5.428
2	Sejahtera I	7.575	7.204	6.507	6.638	6.860
3	Keluarga Sejahtera					
	- Sejahtera II	21.831	18.319	17.961	16.928	17.745
	- Sejahtera III	6.033	10.652	10.991	14.037	14.137
	- Sejahtera III Plus	1.992	3.094	3.319	3.397	3.840
	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>40.778</b>	<b>44.266</b>	<b>42.810</b>	<b>46.392</b>	<b>48.010</b>

Sumber : BPS Kabupaten DHarmasraya Tahun 2010

e. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebanyak 180 kasus menjadi 262 kasus tahun 2011. Tindak kejahatan yang menonjol selama tahun 2011 adalah kasus

pencurian dengan pemberatan sebanyak 62 kasus, penganiayaan 57 kasus dan curanmor 32 kasus.

Dengan tingkat kasus yang berbeda maka tingkat penanganan kasus yang diselesaikan juga berbeda. Dari seluruh kasus yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2011 terdapat 96 kasus yang belum terselesaikan. Hal ini tentu sangat perlu untuk mendapat perhatian bersama karena jika kita akumulasikan jumlah tunggakan kasus yang tidak terselesaikan maka akan didapat angka yang menakutkan.

#### **2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat**

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah.

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam IPM. Indikator yang dilihat dalam kinerja pendidikan adalah angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka pendidikan yang ditamatkan.

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsipenduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruflainnya). AMH kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, dan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan diaman menurut data BPS/Diknas tahun 2011, proporsi penduduk Dharmasraya usia >15 tahun hampir 100% bisa tulis baca yakni sebesar 99,80%. Dan untuk rata-rata angka putus sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA juga menunjukkan hasil yang emnggembirakan dimana Angka Putus sekolah setiap tahunnya menunjukkan *trend* penurunan.

Nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atasyang bersekolah (dalam tahun), mencapai 7,2 tahun pada tahun 2006. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata

tingkat pendidikan penduduk Dharmasraya adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Dan untuk persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, didapati bahwa 23,2% laki-laki dan 29,4% perempuan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2009 adalah tidak sekolah/tidak tamat SD. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pencapaian RLS maksimal 15 Tahun, masih memerlukan rentang waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

Untuk melihat partisipasi penduduk yang bersekolah digunakan alat ukur Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan data APK yang ada, ternyata APK tertinggi tahun 2010 terdapat di tingkat SD/MI yaitu 103,99 % turun dari tahun 2010 sebesar 113,44 % dan terendah di tingkat SMA/MA, yaitu 69,13 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi tingkat SD sudah sesuai standar, namun partisipasi penduduk tahun 2010 pada tingkat SMP dan SMA masih rendah, dengan kata lain masih terdapat sekitar 28,46% dan 19,29% penduduk yang belum/tidak sekolah SMP dan SMA.

Alat ukur Partisipasi penduduk yang bersekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD, anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini juga berarti kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 94,75% dan yang terendah di tingkat SMA/MA yaitu 44,14% persen, sementara APM tingkat SMP/MTs 59,12% . Dari sisi tren per tahunnya, dapat dilihat bahwa tren peningkatan APM ini sangat kecil sekali dan untuk 2011 semua angka partisipasi sekolah semua jenjang mengalami penurunan.

Dan jika dikaitkan dengan target pencapaian MDGs Kabupaten Dharmasraya maka untuk pencapaian Pendidikan Untuk Semua, hanya AMH dan APM SD saja yang sesuai target, selebihnya masih diperlukan **kerja keras**.

#### **b. Kesehatan**

Kesehatan adalah salah satu hak dasar masyarakat. Namun, pemenuhan hak dasar tersebut kadang dihadapkan pada berbagai macam persoalan baik secara teknis maupun non teknis. Adapun indikator kinerja kesehatan secara makro dapat dilihat dari AKHB, Angka usia harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk.

Kondisi kesehatan masyarakat Dharmasraya secara umum terlihat dari kondisi fasilitas kesehatan yang ada selama ini dianggap cukup berhasil menunjukkan kinerjanya, ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka usia

harapan hidup (UHH), pada tahun 2005 berada pada angka 65 tahun, tapi pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 66,9 tahun. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran juga mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2010 mencapai 56 orang menjadi 26 orang per 1000 bayi tahun 2011. Dengan begitu, dengan penurunan angka kematian bayi tersebut, maka angka kelahiran bayi hidup (AKHB) akan meningkat dari 944/1000 bayi lahir tahun 2010 menjadi 974/1000 bayi lahir tahun 2011.

Prevalensi kurang gizi pada balita naik signifikan menjadi 18,8 pada tahun 2009 dibanding tahun 2008 sebesar 2,2. Hal ini menandakan bahwa program-program mengenai gizi masyarakat perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Dan Pada tahun 2009 proporsi keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat mengalami kenaikan menjadi 4,4 yang sebelumnya tahun 2008 sebesar 2,17.

Kondisi kesehatan masyarakat Dharmasraya secara umum dengan kondisi fasilitas kesehatan yang ada selama ini dianggap cukup berhasil menunjukkan kinerjanya, ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka usia harapan hidup (UHH), pada tahun 2005 berada pada angka 65 tahun, tapi pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 66,9 tahun.

Jika dikaitkan dengan target pencapaian MDGs Kabupaten Dharmasraya maka tingkat kematian bayi dan rawan gizi masih tinggi. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dalam bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya belum menggembirakan. Jika dilihat dari target MDG's tahun 2015 yang menargetkan AKI (angka kematian Ibu melahirkan) sebesar 102 per seratus ribu kelahiran atau 1,02 per seribu kelahiran dan AKB (angka kematian bayi) 19 per seribu kelahiran maka Kabupaten Dharmasraya masih perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena AKB dan AKI yang masih tinggi. Dengan kata lain masih perlu ditingkatkan dan kerja keras.

#### c. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2010 naik menjadi 69,21 persen dari 67,04 persen pada 2009. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis



kelamin, maka tingkat TPAK perempuan hanya 49,21 persen jauh lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 88,00 persen.

Pasar tenaga kerja Dharmasraya ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya lebih dari 90 persen. Kondisi ketenagakerjaan Dharmasraya juga memiliki kecenderungan yang positif dengan ditandainya naiknya persentase jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat terlihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.13**  
**Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2008 - 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

Jenis Kegiatan Utama	2008	2009	2010
Angkatan Kerja	<b>80 911</b>	<b>83 339</b>	<b>90 963</b>
- Bekerja	75 551	77 818	87 419
- Pengangguran	5 360	5 521	3 544
<b>Rasio Kesempatan Kerja (%)</b>	<b>93,38</b>	<b>93,38</b>	<b>96,10</b>

Sumber: BPS Kab. Dharmasraya dalam DDA tahun 2011.

Dan secara tak langsung, tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya juga dapat dilihat dari tabel di atas, dimana tingkat pengangguran turun dari 4,44 persen pada 2009 menjadi 2,70 persen pada tahun 2010. Sementara, berdasarkan data yang sumbernya sama, jika dilihat dari jenis kelamin, maka tingkat pengangguran perempuan sebesar 50,79 persen jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran laki-laki yang hanya 12,00 persen.

Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, secara umum penduduk Kabupaten Dharmasraya bekerja di sektor pertanian yaitu 55.013 jiwa atau 62,93% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Penduduk yang bekerja di sektor jasa sebanyak 24,218 jiwa atau 27,70% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan penduduk yang pekerjaan utamanya dibidang manufaktur hanya 8.188 jiwa atau 9,37% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.

#### **2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Perkembangan seni budaya di Kabupaten Dharmasraya sebenarnya relatif ada geliat-geliat kemajuan, hal ini dapat dilihat dari jumlah grup kesenian baik tradisional maupun non tradisional (modern) mengalami

peningkatan, dimana kondisi pada tahun 2009 jumlah seluruh grup kesenian adalah sebesar 277 grup. Namun sayangnya, perkembangan olahraga di Kabupaten Dharmasraya masih belum menunjukkan geliat perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun animo masyarakat dalam berolahraga ini cukup tinggi baik olahraga rekreasi maupun prestasi yang terlihat dari besarnya klub olahraga pada tahun ini berjumlah 140 buah, namun gedung olahraga yang representatif belum ada satu pun.

Mengingat Kabupaten Dharmasraya akan ditunjuk sebagai tuan rumah pekan olahraga daerah (PORDA) tingkat provinsi, maka mau tak mau pemerintah harus mulai mempersiapkan diri dalam hal sarana & prasarana maupun peningkatan kualitas baik kelembagaan, SDM dan atlet agar bisa sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Agar lebih jelas mengenai pencapaian pembangunan secara makro, dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Capaian Indikator Makro Pembangunan tahun 2008 s/d 2011**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2008	Capaian 2009	Capaian 2010	Capaian 2011	Target Midterm (2012)	Target 2015 (RPJMD)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi</b>							
1	Pertumbuhan PDRB (%) ADHB ADHK	18,05 6,54	11,21 6,67	14,12 6,51	14,57 6,54	<b>7,19</b>	<b>7,45</b>
2	Laju Inflasi Provinsi		3,55	4,83	6,93	9,24	10,15
3	PDRB per kapita (Rp.) ADHB ADHK	11.314.964,39 5.470.357,91	12.417.559,87 5.756.494,54	13.984.040,91 6.050.256,19	15.838.958,48 6.372.782,67	6.900.000	7.580.000
4	<b>Indeks Gini</b>						
5	<b>Pemerataan Pendapatan</b>						
6	<b>Indeks Ketimpangan</b>						
7	Persentase Penduduk (KK/RT ?) miskin	11,81%	11,14%	10,60%	10,51	9,95%	9,44%
8	Angka Kriminalitas yang Tertangani	84,51%	60,16%	70,56%	63,74%		
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat/Sosial</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
1	Angka melek huruf (AMH)	95,54	96,16	96,38			
2	Angka rata-rata lama sekolah	7,2 (thn 2006)	7,54	7,77			
3	APK						
	SD/MI	111,82	113,33	113,44	103,99		
	SLTP/MTs	69,74	70,55	71,54	79,13		
	SLTA/SMK/MA	73,91	79,68	79,71	69,13		
4	APM						
	SD/MI/Paket A	97,62	98,38	98,39	94,75		
	SLTP/MTs/Paket B	56,96	57,83	59,59	59,12		



	SLTA/SMK/MA/Paket C	59,73	60,91	61,19	44,14		
5	Angka pendidikan yang ditamatkan			75% (Tdk Tamat SD, SD & SMP)			
<b>2. Kesehatan</b>							
1	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)/1000 lahir	912	944	944	974		
2	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 lahir	79	59 or (14,98)	56	26 or (14,94)	14,90	14,86
3	Angka Usia Harapan Hidup	65,50	65,75	66	67,28	68,04	68,80
4	Persentase Balita Gizi Buruk	2.2	18,8				
<b>3. Ketenagakerjaan</b>							
1	Rasio penduduk yang bekerja	93,38	93,38	96,10	93,35		
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	67,04	67,04	69,21	68,93		
3	Tingkat pengangguran	6,62	6,62	3,90	6,65		
4.	<b>IPM</b>	67,99	68,60	69,13	69 - 70	70 - 70,10	70,10 - 70,50

Sumber: BukuPDRB, Buku DDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 20006-2010, 2012, RPJMD 2010-2015.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Kabupaten Dharmasraya memperoleh pendidikan yang layak.

Selama periode 2005-2010, berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia sampai dengan tahun 2010, menunjukkan indikator utama dan pendukung pendidikan pada level SD s/d SLTA mengalami kenaikan meski relatif kecil sebagaimana yang telah dibahas pada indikator makro di atas.

Untuk melihat kinerja pendidikan pada sisi penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS). Perkembangan APS SD mengalami peningkatan dan SMP menurun, jika digabung, APS pendidikan dasar (SD dan SMP) mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 sebesar 868,51 menjadi 786,75. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun

2010 angka partisipasi penduduk usia 7 s/d 15 tahun yang bersekolah SD dan SMP hanya sekitar 787 dari 1000 orang, dan sisanya sebesar 213 dari 1000 penduduk usia 7 s/d 15 tahun tidak sekolah SD dan SMP.

Sementara untuk pendidikan menengah (SMA/MA) mengalami peningkatan dari 686,22 tahun 2008 menjadi 693,76 per 1000 penduduk usia 16 s/d 18 tahun. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pada tahun 2009 ini, partisipasi penduduk usia 16 s/d 18 tahun hanya sebesar 694 orang sementara sisanya sebesar 306 dari 1000 penduduk usia 16 s/d 18 tahun tidak sekolah. Atau dengan kata lain sejumlah partisipasi SD sudah cukup memadai yakni sebesar 95,43%, sedangkan partisipasi untuk SMP dan SMA hanya sebesar 53,36% dan 69,38 % sehingga diperlukan upaya yang lebih keras lagi.

Dari sisi Struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA di Dharmasraya sampai dengan tahun 2009 ini belum ideal, yang terlihat dari jumlah sekolah dan siswa SLTP yang tidak berimbang dengan SD maupun SLTA. Berdasarkan data yang ada, Rasio ketersediaan sekolah SD tahun 2009 adalah 5,54 menurun dibandingkan dengan tahun 2008 yakni sebesar 6,48, hal ini mengindikasikan bahwa hanya 5 atau 6 sekolah SD untuk menampung 1000 penduduk usia sekolah SD. Begitu juga halnya dengan SMP dan SLTA yang hanya daya tampungnya sekitar 2,43 dan 1,92 untuk setiap 1000 penduduk.

Dalam hal ketersediaan sekolah/ruang kelas dalam kondisi baik. Rasio ruang kelas SD, SMP, dan SMA dalam kondisi baik hanya 70,87%, 86,42, dan 77,91%. Meskipun ada penambahan baik ruang kelas baru maupun gedung sekolah, jika tidak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk maka diproyeksi pada tahun-tahun mendatang daerah akan mengalami permasalahan ketersediaan sekolah bagi penduduknya.

*Trend* rasio murid dan guru dari tahun ke tahun semakin kecil dan menuju angka ideal proses belajar dan mengajar yang efisien dan efektif. Untuk SMU/SMK, rasio murid dan guru pada tahun 2005 sebesar 12,20 pada tahun 2008 mencapai 10,87. Rasio SMU/SMK mengalami peningkatan yang pada tahun 2005 dari 36,79 menjadi 45,26 tahun 2008. Kondisi ini disebabkan komposisi yang tidak idealnya antara jumlah lulusan TK, SD, dan

SLTP dengan SLTA. Banyaknya lulusan TK, SD, SLTP membuat peranan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kelas penting, untuk menjadikan proses belajar mengajar di sekolah menjadi lebih efektif dimana rasio antara murid dan kelas bisa mencapai titik ideal.

Dari sisi kapasitas tenaga pengajar (guru) tahun 2006-2008, bila dilihat dari Kelayakan Guru Mengajar maka prosentasenya untuk tingkat SD relatif stabil. Untuk SLTP dan SLTA mengalami peningkatan jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2008, SLTP mengalami kenaikan 3%, sedangkan SLTA mengalami kenaikan sekitar 6%. Jumlah guru tersertifikasi pada tahun 2007 yaitu sebanyak 173 orang, sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi 104 orang.

Sementara itu jumlah perpustakaan di kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun terus meningkat. Adapun jenis perpustakaan yang ada, yaitu perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan nagari dan perpustakaan mesjid. Sedangkan data buku perpustakaan per 28 februari 2011 terdiri dari 3.498 judul dan 9.717 eksemplar, namun amat disayangkan data jumlah pengunjung perpustakaan belum tersedia.

Sedangkan untuk indikator Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/Diploma IV, pada setiap jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dalam kurun tahun 2010 adalah guru SD berkualifikasi S1 sebanyak 539 orang dan guru SMP/SMA berkualifikasi S1 dan S2 sebanyak 738 orang S1 dan hanya 7 orang S2. Namun hal ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang. Demikian juga halnya dengan Sertifikasi Guru. Lebih jelasnya mengenai perkembangan indikator penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Indikator Pendidikan tahun 2007 s/d 2011**  
**Kabupaten Dharmasraya**

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011*	Sumber
1	Angka Partisipasi Sekolah/APS (per 1000 penduduk)						DDA Kabupaten Dharmasraya tahun 2011
	SD/MI	98,76	99,12	97,32	97,77	99,30	
	SMP/MTs	85,85	85,85	88,19	80,30	84,68	
	SMA/MA	60,85	60,13	55,51	56,41	54,69	
2	Rasio Ketersediaan Sekolah						tahun 2007-



	SD/MI	6,31	6,48	5,54			2008 Data MDG's, tahun 2009 Data DDA Kab. Dharmasraya tahun 2010
	SMP/MTs	1,56	2,13	2,43			
	SMA/MA			1,92			
3	Rasio Guru/Murid						Kabupaten Dharmasraya tahun 2011
	SD/MI	16,50	16,05	14,78	14,67	13,78	
	SMP/MTs	8,08	12,79	12,58	12,53	11,15	
	SMA/MA	10,84	10,87	6,81	15,71	10,11	
4	Rasio Murid/Kelas						
	SD/MI	23,71	22,54	21			
	SMP/MTs	29,94	26,59	28			Renstra Diknas Kab. Dharmasraya 2011-2015
	SMA/MA	38,47	45,26	28			
5	Rasio Sekolah dalam kondisi baik (%)						
	SD/MI			92,48			BPS/ Dinas Pendidikan 2011
	SMP/MTs			99,07			
	SMA/MA			87,79			
6	Angka Putus Sekolah						Dinas Pendidikan 2011
	SD/MI	0,40	0,33	0,17	0,15		
	SMP/MTs	1,92	2,00	0,94	0,90		
	SMA/MA	1,79	1,50	1,60	1,50		Renstra Diknas 2011
7	Angka Kelulusan						
	SD/MI			99,22			
	SMP/MTs			67,77			Renstra Diknas 2011
	SMA/MA			86,78			
8	Angka Melanjutkan						
	SD/MI			-			Dinas Pendidikan 2011
	SMP/MTs			94,2			
	SMA/MA			95,95			
9	Kualifikasi Guru SD/MI						Dinas Pendidikan 2011
	≤ SLTA				251		
	D1/D2				958		
	D3				29		
	S1				539		
	S2/S3				-		
10	Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK						Dinas Pendidikan 2011
	≤ SLTA				-		
	D1/D2				-		
	D3				18		
	S1				738		
	S2/S3				7		

## 2) Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau

masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2010, jumlah rumah sakit (RSUD tipe C) di Kabupaten Dharmasraya baru sebanyak 1 unit dan ditambah 1 unit lagi rumah sakit rujukan nasional yang dalam proses pembangunan fisik di Pulau Punjung, puskesmas induk sebanyak 12 unit, puskesmas pembantu 43 unit, puskesmas keliling 14 unit, polindes sebanyak 69 unit, dan Poskeri 53 unit. Dan pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 55 orang, dokter gigi 15 orang, bidan (bidan puskesmas+bidan desa) 271 orang, dan paramedis sebanyak 112 orang, serta apoteker 1 orang dan asisten apoteker 12 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RS disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Berdasarkan olahan data yang ada, pada tahun 2010, rasio puskesmas (Puskesmas induk, Pustu dan Pusling) per satuan penduduk adalah sebesar 3,69. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 4 puskesmas, pustu dan pusling, menangani 10.000 penduduk, atau 1 puskesmas melayani sekitar 2.711,3 orang. Kondisi ini sebenarnya jauh lebih baik dari ketentuan yaitu satu Puskesmas seharusnya menangani 30.000 penduduk. Adanya RSUD dengan 12 puskesmas induk dianggap cukup mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung dengan adanya 69 Polindes dan 53 Poskeri. Hal ini diharapkan mampu mengakses pelayanan kesehatan pada daerah-daerah tertentu di Dharmasraya yang memang memiliki akses infrastruktur dan media yang cukup sulit bagi masyarakatnya. Sedangkan untuk rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah sebesar 0,537. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Dharmasraya belum mampu menyediakan 1 rumah sakit per 100.000 penduduknya.

Dan jika dilihat dari sisi aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Pada tahun 2010, rasio dokter persatuan penduduk adalah 0,41. Angka ini menunjukkan bahwa hanya 0,41 dokter untuk 1000 penduduk. Mengacu kepada perhitungan rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk, satu dokter untuk 2.500 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 sebesar 187.079 jiwa, sehingga idealnya dibutuhkan minimal 75 dokter. Sedangkan jumlah dokter yang ada sebesar 75 dokter, sehingga sudah bisa dikatakan mendekati kondisi ideal. Lebih jelasnya mengenai perkembangan indikator penyelenggaraan kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Indikator Kesehatan**  
**Kabupaten Dharmasraya tahun 2007 s/d 2011**

Indikator		2007	2008	2009	2010	2011
I	Sarana dan Prasarana Kesehatan					
	Puskesmas Induk	8	10	10	12	12
	Puskesmas Pembantu	47	47	46	43	43
	Puskesmas keliling	16	18	13	14	12
	Polindes	54	54	62	53	46
	Poskesri	20	23	34	46	53
	Posyandu	190	196	198	207	230
	RSUD type C	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokter	42	59	61	76	90
	- Dokter Spesialis	3	2	3	6	6
	- Dokter Umum	31	43	34	40	63
	- Dokter gigi	8	14	9	13	21
	Jumlah Bidan		140	177	271	285
	Jumlah Perawat		158	283	179	276
	Jumlah Apoteker	5	5	1	7	10
	Jumlah Asisten Apoteker	14	15	12	26	25
	Farmasi	29	20	14	38	35
	Ahli Gizi		6	23	28	32
	Teknisi Medis		25	52	34	27
	Sanitasi		10	15	23	18
	Kesehatan Masyarakat		7	24	24	54





II	Kependudukan					
	Jumlah Bayi (usia ≤ 1tahun)	3.820	3.783	4.005	4.431	4.210
	Jumlah Balita	17.180	13.278	18.204	17.557	15.026
	Jumlah penduduk	175.573	180.915	186.354	191.422	197.599
<b>RASIO</b>						
1	Rasio Posyandu/satuan balita	<b>1,11</b>	<b>1,48</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>	<b>1,53</b>
2	Rasio Puskesmas Per 10.000 Penduduk	0,46	0,55	3,7	3,69	0,61
3	Rasio Polindes Per 10.000 Penduduk	4,21	4,25	3,33	2,83	5,01
4	Rasio Tenaga Medis (seluruh dokter) per 1000 penduduk	0,24	0,33	0,33	0,076	0,46
5	Rasio Tenaga Paramedis (bidan + Perawat) per 1000 penduduk		1,65	2,468	2,405	2,84
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	37,16		69,2	100	100
7	Cakupan Nagari UCI	69,72	91	75,2	75,2	66,4
8	Cakupan penemuan dan penanganan TBC/DBD	85,14	92,31	94,4	38,1	54,2
9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin	100	100	100	100	100
10	Cakupan kunjungan bayi		92,7	86,4	82,9	70

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2011.

### 3) Pekerjaan Umum

Kondisi umum perkembangan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.17**  
**Kondisi Umum Jalan Tahun 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

URAIAN		STATUS (Km)			TOTAL
		NEGARA	PROVINSI	KABUPATEN	
<b>I</b>	<b>Jenis Permukaan</b>				
1	Aspal	62,50	83,50	280,57	426,57
2	Kerikil	-	-	279,77	279,77
3	Tanah	-	-	642,44	642,44
	<b>Total</b>				<b>1.348,78</b>
<b>II</b>	<b>Kondisi Jalan</b>				
1	Baik	20,00	35,00		589,36
2	Sedang	25,00	33,50		180,42
3	Rusak	17,50	10,00		240,56
4	Rusak Berat	-	5,00		192,44
	<b>Total</b>				<b>1.202,78</b>
<b>III</b>	<b>Kelas Jalan</b>				
1	III A	62,50	-	-	62,50
2	III B	-	83,50	-	83,50

3	III C			1.202,78	1.202,78
	<b>Total</b>				<b>1.348,78</b>
<b>IV</b>	<b>Panjang Jalan Menurut Kecamatan</b>				
1	Sungai Rumbai	8,50	8,10	63,12	79,72
2	Koto Besar	0	20,20	84,70	104,90
3	Asam Jujuhan	0	0	92,84	92,84
4	Koto Baru	15,00	26,20	148,70	189,90
5	Koto Salak	-	-	59,20	59,20
6	Tiumang	-	-	68,50	68,50
7	Padang laweh	-	-	68,70	68,70
8	Sitiung	13,00	29,00	90,85	132,85
9	Timpeh	-	-	133,83	133,83
10	Pulau Punjung	26,00	-	266,54	292,54
11	IX Koto	-	-	125,80	125,80
	<b>Total</b>	<b>65,50</b>	<b>83,50</b>	<b>1.202,78</b>	<b>1.348,78</b>

Sumber: BPS Kab. Dharmasraya dalam DDA tahun 2011.

Dari data di atas, terjadi peningkatan total panjang jalan dari 1.394,94 Km tahun 2009 menjadi 1.449,90 Km tahun 2010. Adapun jalan negara dan jalan provinsi tetap sepanjang 62,50 Km dan 83,50 Km, sedangkan jalan kabupaten bertambah dari 1248,94 Km menjadi 1303,90 Km atau jalan kabupaten bertambah sepanjang 54,96 Km pada tahun 2010.

Adapun proporsi jalan per kecamatan dalam kondisi baik berdasarkan olahan data yang ada adalah rasio jalan kondisi baik per total jalan kabupaten di kecamatan dan per total jalan kabupaten yang tertinggi sebesar 56,00% di Kecamatan Sungai rumbai dan terendah di Kecamatan Asam Jujuhan sebesar 45,01%. Sedangkan rasio jalan kondisi baik per total jalan kabupaten yang tertinggi berada di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 11,12% dan terendah di Kecamatan Koto Salak sebesar 2,55%.

Dari hasil olahan data yang ada, terlihat bahwa penambahan panjang jalan dan persentase laju pertumbuhan panjang jalan semakin menurun setiap tahunnya, lebih jelasnya terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Laju Pertumbuhan Jalan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s/d 2010**

No	Kondisi Jalan (Km)	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Total Panjang jalan Kabupaten	929.60	1048.50	1159.06	1248.94	1303.90
	Pertambahan jalan		118,90	110,56	89,86	54,96
	Laju Pertumbuhan jalan (%)		11,34	9,54	7,20	4,22

Sumber: data diolah, 2011

Idealnya, untuk melihat tingkat kemantapan jalan, tentu harus melihat dari aspek kondisi jalan serta aspek kapasitas/pemanfaatan jalan. Suatu jalan bisa dikatakan mantap sempurna jika panjang jalan kondisi baik telah memenuhi kriteria teknis seperti lebar jalan (3,5 m jalan kabupaten, 5 m jalan provinsi dan 6 m jalan nasional) dan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR/lalu lintas harian).

Oleh karena itu, dalam analisis ini, rata-rata jalan Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik tahun 2010 (685,55 Km atau 47,29%) hanya bisa mengacu pada standar minimal lebar jalan kabupaten yaitu sebesar 3,5 m saja dan dari aspek LHR belum didukung oleh data yang akurat dan memadai. Dengan kata lain kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya baru sebatas “Mantap Marjinal”.

Kondisi infrastruktur bidang pengairan pada tahun 2004 setelah pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung belum memadai, dimana Daerah Irigasi baru ada sebanyak 73 buah, yang hanya mampu mengairi areal sawah penduduk seluas 1.678 Ha dengan kondisi saluran sepanjang 57.000 M, dimana 87,19 % kondisinya rusak berat.

Setelah berdirinya Kabupaten Dharmasraya, mulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengairan guna meningkatkan produksi padi masyarakat dan membuka areal persawahan baru lahan produktif yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perkembangan pembangunan prasarana dan sarana pengairan ini sangat signifikan ditandai dengan bertambahnya luas daerah irigasi mencapai 89, semakin luasnya areal sawah penduduk mencapai 3.055 ha dan

lahan potensial yang bisa dijadikan sawah mencapai 2.290 ha, begitu juga dengan saluran irigasi dengan panjang 75.250 M, dimana 24,58 % dalam kondisi baik.

Sesuai dengan potensi Kabupaten Dharmasraya yang memiliki banyak sungai dan lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah, maka salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Saat ini telah ada jaringan irigasi Nasional (Batanghari) ditambah dengan jaringan irigasi kabupaten. Jaringan irigasi tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan potensi lahan yang akan dikembangkan untuk pertanian.

Bendungan dan Daerah Irigasi Batanghari yang dibangun mulai tahun 1997 dan selesai tahun 2008 direncanakan dengan kapasitas untuk mampu mengairi seluas 18.836 Ha lahan persawahan. Luas area daerah irigasi yang telah beroperasi seluas 5.782 Ha. Daerah Irigasi Batanghari terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak. Selain itu terdapat Daerah Irigasi yang dikelola kabupaten seluas 2.411 Ha yang tersebar disemua kecamatan. Masih terdapat potensi pengembangan area irigasi menjadi 3.178 Ha.

#### 4) Perumahan

Proporsi rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak sebesar 72,00 persen pada tahun 2009, naik dari 61,80 persen dari tahun 2008. Tapi anehnya rumah tangga bersanitasi layak malah turun lagi pada tahun 2010 menjadi 68,00%. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tangki septik (Susenas, 2009).

Pelayanan jaringan listrik belum menjangkau seluruh nagari. Rasio elektrifikasi masih 64,78. Masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman yang jauh dari pusat-pusat permukiman dan ada juga karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar biaya pelayanan listrik. Untuk memenuhi kebutuhannya

masyarakat menggunakan energi listrik lainnya baik melalui jasa penyediaan energi listrik swasta maupun secara individu berupa jenset. Untuk itu perlu perluasan jaringan listrik untuk melayani jorong-jorong yang belum mendapatkan pelayanan listrik.

Pelayanan listrik saat ini belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan melalui penambahan gardu induk dan kapasitas terpasang serta mengembangkan sumber energi alternatif, berupa pemanfaatan sumberdaya air (mikro hidro), dengan biaya yang lebih murah dan dapat menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Disamping itu program kelistrikan untuk masyarakat miskin masih dibutuhkan.

Jaringan energi kelistrikan Kabupaten Dharmasraya berasal dari gardu induk di Sungai Langsek dengan trafo 200 MVA dan 10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai. Rencana pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya yaitu di Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan. Pengembangan jaringan sudah dilaksanakan pada tahun 2011 lalu.

Untuk akses air bersih, Sampai tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum merlalui BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 132 pelanggan. Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem penyediaan air minum perpipaan ini ada yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun nagari setempat.

Sistem perpipaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih dibawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum. Sistem non perpipaan pada umumnya dikelola secara individu oleh masyarakat yang pada umumnya tidak dilayani oleh perpipaan melalui sumur gali, sistem penampung hujan (SPAH), sumur pompa tangan, dan lain-lain. Selain itu sistem penyediaan air minum di Kabupaten Dharmasraya dibangun melalui kegiatan PAMSIMAS. Gambaran pelayanan air minum Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.19**  
**Profil Prasarana Air Minum Perpipaan di Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2005-2009**

No	Jenis Data	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>1</b>	<b>Unit PDAM Koto Baru</b>					
	- Sumber Air	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Siat
	- Sistem	Pompa	Pompa	Pompa	Pompa	Pompa (Belum Aktif)
	- Kapasitas (l/dt)	6	5	5	5	5
	- Panjang Jaringan (M)	8708	3,000	3,000	3000	3000
	- Hidran Umum (Unit)	1	5	5	5	5 (Tidak Aktif)
	- Sambungan (SR)	63	65	65	65	65
	- Air Terpakai (M <sup>3</sup> )	4773	3,961	3,961		
<b>2</b>	<b>Unit PDAM Pulau Punjung</b>					
	- Sumber Air	Bt. Deli + Bt. Mimpi	Bt. Deli + Bt. Mimpi	Bt. Deli + Bt. Mimpi	Bt. Deli + Bt. Mimpi	Bt. Deli + Bt. Mimpi
	- Sistem	Gravitasi, Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa
	- Kapasitas (l/dt)	10	10 + 20	10 + 20	10 + 20	10 + 20
	- Panjang Jaringan (M)	142828	18,000	18,000	18,000	18,000
	- Hidran Umum (Unit)	1	4	4	4	4
	- Sambungan (SR)	136	156	156	156	156
	- Air Terpakai (M <sup>3</sup> )	19307	22,501	22,501	22,501	
	Total Pelanggan (SR)	199	221	221	221	

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2005 - 2009 (BPS Kab. Dharmasraya, 2009) dan Dinas Pekerjaan Umum kab. Dharmasraya Tahun 2011.

Sementara itu, untuk status rumah tetap dan terjamin adalah rumah dengan status milik sendiri, sewa atau kontrak. Indikator ini dihitung dari perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap tempat tinggal tetap dan jumlah penduduk atau rumah tangga. Proporsi rumah tangga yang memiliki rumah tinggal tetap terus meningkat selama periode tahun 2005 sampai 2009. Tercatat sekitar 87,10 persen rumah tangga memiliki tempat tinggal tetap tahun 2005, hingga mencapai 88,90 persen pada tahun 2009. Status rumah tetap dan terjamin ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia (papan).

#### 5) Penataan Ruang

Berdasarkan pada Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031, Berdasarkan status penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh perusahaan dan penduduk sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan**  
**Kabupaten Dharmasraya**

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
<b>Kawasan hutan</b>		
- Hutan Lindung (HL)	11958	3,95
- Hutan Produksi (HP)	25986	8,59
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	12839	4,24
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	30821	10,19
- Kaw. Suaka Alam/Pelest. Alam (KSA/KPA)	5410	1,79
Perkebunan Besar	52944	17,50
Rencana Kawasan Transmigrasi	1312	0,43
Kawasan Pertambangan	11747	3,88
Area Penggunaan Lain	149582	49,43
<b>Total Luas</b>	<b>302599</b>	<b>100</b>

Sumber: BPN Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011; SK MenHut No 304 Tahun 2010 dalam Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.

**Tabel 2.21**  
**Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya**

Kategori	Luas (Ha)	
IUP Tambang	9.014	42.64%
IUP Tambang Dalam Kawasan Hutan	2.774	13.12%
IUP Tambang Dalam Perkebunan	9.351	44.24%
<b>Luas Total</b>	<b>21.139</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.

Dari kedua tabel di atas, dapat kita jelaskan sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi seluas 177.109 Ha (58,73% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 75.840 Ha (25,15% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan seluas 9.014 Ha (2,99% dari luas wilayah kabupaten). IUP Pertambangan lain berimpit dengan peruntukkan lain seperti berada

dalam kawasan hutan seluas 2.774 Ha dan dalam kawasan perkebunan besar seluas 9.351 Ha.

- e) Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 124.445 Ha (41,27% dari luas wilayah).

#### 6) Perencanaan Pembangunan

Dalam hal perencanaan pembangunan jangka panjang, Laporan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya telah ada dan tinggal menunggu pengesahan melalui DPRD. Namun sayangnya sampai dengan awal Maret 2012, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya masih belum ada, tahun 2012 ini direncanakan penyelesaian dokumen RPJPD tersebut.

Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah, Kabupaten Dharmasraya telah ada dan mengacu pada dokumen RPJMD yaitu RPJMD 2005 -2010 yang ditetapkan oleh Bupati dan sekarang RPjMD 2011 – 2015 sesuai aturan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dan untuk perencanaan tahunan, Kabupaten Dharmasraya telah merilis dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD setiap tahunnya.

#### 7) Perhubungan

Aspek perhubungan terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan.

Dengan luas daerah Kabupaten Dharmasraya sekitar 2.961,13 Km<sup>2</sup>, tahun 2010 dihubungkan oleh jalan sepanjang 1.449,90 Km, terdiri dari 62,50 Km jalan negara, 83,50 Km jalan provinsi dan sepanjang 1303,90 Km jalan kabupaten. Dilihat dari permukaannya pada tahun 2009, jalan yang diaspal mencapai 372,81 Km, jalan kerikil sepanjang 308.53 Km dan jalan tanah 646.94 Km. Sekalipun ada peningkatan panjang jalan namun untuk Dharmasraya masih harus menambah panjang jalan demi kelancaran



transportasi masyarakat. Masalah yang dihadapi pada tahun 2010 adalah memperbaiki jalan yang tercatat mengalami kerusakan sepanjang 618,35 Km. Dari seluruh panjang jalan yang rusak tampaknya sebagian besar di alami oleh jalan kabupaten, dimana proporsi jalan Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik meningkat sekitar 26,56% tahun 2009 menjadi 47,28% tahun 2010. Sementara jalan negara dan provinsi juga banyak mengalami kerusakan untuk jalan negara 28% dan provinsi 11,97% mengalami kerusakan. Bedanya adalah, jalan provinsi dan nasional dari tahun 2009 s/d 2010 ini tidak ada mengalami perbaikan sama sekali.

Proporsi Panjang jalan tersebut didukung oleh 206 buah jembatan dengan panjang 2743,1 M. Jembatan terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 46 buah sekaligus paling panjang yaitu 622,80 M. Sebagai pendukung kelancaran arus orang dan barang, tercatat adanya berbagai kendaraan bermotor. Pada tahun 2009 jumlah kendaraan tercatat sebanyak 55.924 kendaraan dengan rincian mobil penumpang sebanyak 2008 unit, mobil barang 2.931 unit dan sepeda motor 50.985 unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan umum 234 unit yang terdiri dari 33 unit mobil penumpang dan 201 mobil barang.

Cakupan pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan. Sarana yang tersedia pada jaringan jalan adalah terminal dan Kantor Balai Pemeriksaan dan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Sektor transportasi berhubungan erat dengan sektor ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Kondisi saat ini pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan standar perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada.

Kabupaten Dharmasraya dilayani oleh bermacam jenis moda angkutan penumpang dan barang yang beroperasi. Pergerakan penumpang di dalam wilayah kabupaten saat ini didominasi oleh moda angkutan darat. Pengguna angkutan umum masih memiliki persentase terbesar yaitu kurang dari dua pertiga total pergerakan, diikuti pengguna kendaraan pribadi hampir. Dari berbagai jenis angkutan umum yang digunakan oleh pelaku perjalanan, yang mendominasi adalah bus sedang, sedangkan untuk kendaraan pribadi didominasi oleh pengguna mini bus/van. Apalagi Dharmasraya menghubungkan antar provinsi Jambi dan Riau sehingga jadi jalur yang dilewati oleh kendaraan yang lalu lalang diantara 3 provinsi tersebut.

#### 8) Lingkungan

Proporsi luas lahan yang tertutup hutan selalu konstan pada periode tahun 2005-2007 yaitu sebesar 54,17 persen. Pada tahun 2008 terjadi penurunan luas lahan yang ditutup hutan yang menjadi 50,52 persen. Beberapa faktor penyebab penurunan luas tutupan hutan di Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah perambahan hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), konversi hutan, dan pengelolaan hutan yang tidak lestari. *Illegal logging* merupakan masalah utama dan penyebab kerusakan hutan di Kabupaten Dharmasraya saat ini. Untuk itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih tegas dan efektif untuk menangani masalah *illegal logging* ini karena efek rumah kaca dan pemanasan global semakin besar setiap tahunnya.

Luasan lahan hutan yang tidak boleh digarap untuk kepentingan budidaya itu seluruhnya adalah 52,27%, yang terdiri dari HSAW seluas 8,27%, hutan lindung 6,08%, dan HPT 37,92%. Sisanya seluas 47,73% hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi dan areal hutan lainnya. Artinya, Dharmasraya memiliki hutan yang cukup luas untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan secara baik, sedangkan pada sisi lain keberadaan hutan lindung dan hutan suaka alam dan hutan wisata, HPT merupakan potensi untuk menghasilkan zat carbon yang cukup besar dan potensi untuk manfaat hasil hutan non kayu lainnya. Dalam perkembangan penggunaan fungsi

hutan, maka dari tahun 2005 sampai 2009 telah terjadi alih fungsi hutan yang cukup signifikan, yaitu hutan produksi tetap dan areal hutan lainnya yang telah dikonversi umunya menjadi perkebunan sehingga ketakutan akan penurunan kualitas lingkungan sedikit berkurang.

Sementara itu energi CO<sub>2</sub> yang dipakai selama tahun 2009 di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 29.379,49 ton per tahun. Sektor yang menggunakan emisi CO<sub>2</sub> terbanyak adalah transportasi yaitu sebesar 28.501,46 ton pertahun. Hal ini diakibatkan karena Kabupaten Dharmasraya merupakan jalan lintas sumatera yang menghubungkan berbagai Propinsi sehingga banyak mobil-mobil yang melewati jalan lintas ini. Emisi CO<sub>2</sub> perkapita pada tahun 2009 adalah sebesar 15,76 persen pertahun. Pada tahun 2009 penggunaan bahan bakar padat untuk memasak masih sangat besar di Kabupaten Dharmasraya, tercatat 64,60 persen rumah tangga masih menggunakan bahan bakar padat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak mau untuk beralih pada bahan bakar bukan padat seperti minyak tanah, gas, dan listrik (sumber: Inkesra Kabupaten Dharmasraya, 2010).

Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahan-lahan kosong yang ada pada lingkungan rumah masing-masing, bahkan masih ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai-sungai yang dekat dengan lingkungan permukimannya. Sedangkan untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola masing-masing pasar dan kemudian diangkut dengan truk sampah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya yaitu baru dalam pengangkutan sampah pasar. Daerah pelayanan pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Dharmasraya yaitu pasar Sungai Rumbai, pasar Koto Baru, pasar Sungai Dareh, pasar Pulau Punjung, areal rumah makan Umega dan sekitarnya, serta

daerah pemukiman di Sitiung, sekitar Kantor Bupati, depan RSUD, Perumnas Sikabau, Perumnas Gung Sari, Gunung Medan, Perumnas ONP Sungai Dareh. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya ini masih sangat rendah atau baru 5% dari produksi sampah penduduk. Sampah permukiman pada umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, ditimbun bahkan ada yang membuang sampah ke sungai.

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdapat pada area pasar dan perumahan. TPS terdapat pada 6 lokasi yaitu Koto Nan IV Dibawah, Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru. Pengelolaan sampah oleh nagari dilakukan di Nagari Sungai Rumbai melayani kawasan pasar, pertokoan dan kawasan perumahan. Dengan fasilitas satu unit truk bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 2 becak untuk mengangkut sampah pasar dan sampah perumahan penduduk. Sampah pasar diangkut 2 kali dalam seminggu atau pada hari-hari pasar (Jumat dan Minggu) pada TPS yang berada di kawasan perdagangan dan sampah rumah tangga diangkut 4 kali dalam seminggu. Tempat pembuangan sampah terdapat di Jorong Sungai Kemuning. Tempat pembuangan ini masih bersifat sementara karena merupakan lahan penduduk yang berupa jurang. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kecamatan Sitiung (Sitiung Limo Rambuso) seluas 5 ha. Saat ini TPA Sitiung Limo Rambuso baru menampung sampah-sampah yang bersumber dari sampah pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Pulau Punjung, Pasar Sitiung, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai) dan beberapa kawasan perumahan. Pengoperasian TPA ini dirancang dengan menggunakan metode sanitary landfill, tetapi pada pelaksanaannya saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Peralatan yang ada di TPA saat ini berupa mini bulldozer sebanyak 1 unit, tetapi saat ini tidak beroperasi karena kondisi rusak. TPA ini juga dilengkapi dengan timbangan sampah, dan workshop. Kondisi sarana dan prasarana TPA ini masih sangat kurang. TPA ini belum dilengkapi dengan jalan lingkungan di lokasi TPA, dan jalan masuk TPA masih berupa jalan tanah.

**Tabel 2.22**  
**Kondisi Pelayanan Persampahan s/d Tahun 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Uraian	Satuan	Kondisi Eksisting (Tahun 2010)
1	Jumlah penduduk	(jiwa)	191.422
2	Jumlah penduduk dilayani	(jiwa)	9.571
3	% penduduk terlayani	(%)	5
4	Volume Sampah Kota Kecil	(l/org/hari)	1,8
5	Volume sampah	(m <sup>3</sup> /tahun)	125.764,25
6	Volume Sampah Daerah Pelayanan	(m <sup>3</sup> /tahun)	6.288,21
7	Pengolahan 3R Daerah Pelayanan	%	-
8	Pengurangan Sampah 3R	(m <sup>3</sup> /tahun)	-
9	Volume Sampah Terangkut	(m <sup>3</sup> /tahun)	5.030,57
10	Volume Sampah Terangkut	(m <sup>3</sup> /hari)	13,78
11	Pengumpulan		
	Gerobak	1 m <sup>3</sup>	0
12	Penampungan Sementara		
	Bak Sampah	0.5 m <sup>3</sup>	21
	Transfer Depo	100 m <sup>3</sup>	1
	Kontainer	6 m <sup>3</sup>	8
13	Pengangkutan		
	Mini truk	2 m <sup>3</sup>	0
	Dump truk/truk	6 m <sup>3</sup>	1
	Arm roll truk	6 m <sup>3</sup>	2
	Buldozer	1 buah	1

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk beberapa tahun mendatang cara pengelolaan diatas tidak memungkinkan lagi karena sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi. Maka dari itu cara pembuangan sampah untuk masa yang akan datang diarahkan pengelolaan sampah domestik (rumah tangga, sekolah, kantor) sebaiknya diterapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, dimana masyarakat mengelola sampah sendiri atau yang lebih dikenal saat ini dengan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*), artinya mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sedangkan untuk sampah dari sarana kesehatan (RSU, Puskesmas dan Pustu) perlu dilakukan pemisahan sampah medis dengan sampah domestik.

AdapunTingkat pelayanan pengelolaan limbah hingga akhir tahun 2009 masih sangat rendah. Sesuai dengan data MDGs Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, masih ditemui rumah tangga yang menggunakan WC bersama sebesar 17%, menggunakan WC Umum sebesar 4,30%, dan

terdapat 17,90% rumah tangga yang tidak memiliki WC. Selain itu Kondisi prasarana pengelolaan limbah juga masih sangat kurang. Dimana Kabupaten Dharmasraya belum mempunyai unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sistem penyaluran air limbah. Sementara itu, jumlah rumah yang memiliki *septic tank* baru sekitar 6.336 KK, cubluk sekitar 17.559 KK. Pada tahun 2007 sebenarnya telah dibangun pengelolaan air limbah terpusat di Nagari Koto Baru untuk sekitar 20 KK, namun sayangnya sampai saat ini tidak ada data yang pasti mengenai perkembangannya.

Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2009 sudah memadai walau masih banyak yang harus diperhatikan. Berdasarkan data Susenas 2006-2009, pada tahun 2009 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur terlindung adalah sebesar 62,4 %, sumur tak terlindung 13,3 %, dan rumah tangga yang mengkonsumsi air sungai sebesar 4,8%.

Dilihat dari aspek air sehat, sebagian besar rumah tangga mempunyai jarak sumber air minum ketempat penampungan kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter (68,90%) atau sesuai dengan syarat minimal untuk dikategorikan sebagai sumber air minum sehat. Namun masih ada 16,10%, suatu angka yang cukup besar, yang jaraknya kurang dari 10 meter. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindung di Kabupaten Dharmasraya masih sangat sedikit. Terlihat bahwa hanya 52,11 persen penduduk yang memiliki akses terhadap air minum terlindung. Angka ini naik dari tahun 2008 yang hanya sebesar 50,88 persen rumah tangga yang mengakses air minum terlindung. Kondisi ini memerlukan perhatian dan perbaikan dimasa akan datang.

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

#### 9) Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2009 ke tahun 2010, dimana pada tahun 2009 akte kelahiran yang dikeluarkan berjumlah 5.276 menjadi 14.692 akte pada tahun 2010. Dan proporsi penduduk yang pernah kawin tahun 2010 di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebanyak 56.808 perempuan (BPS Kabupaten Dharmasraya dalam DDA tahun 2011).

#### 10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Angkatan kerja perempuan tahun 2010 berjumlah 31.341 jiwa, yang bekerja sebanyak 29.321 orang atau 32,32% dari total angkatan kerja dan 15,32% dari total penduduk tahun 2010. Tingginya partisipasi kerja kaum perempuan tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dengan ijazah SMA atau lebih tinggi hanya berjumlah 5.410 jiwa atau hanya 0,18% dari seluruh perempuan yang bekerja.

Berdasarkan lapangan usaha, mayoritas perempuan yang bekerja adalah di sektor pertanian yaitu berjumlah 16.574 orang atau 56,53% dari total angkatan kerja perempuan, selanjutnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran berjumlah 7.085 orang, sektor jasa-jasa berjumlah 4.659 dan sisanya di sektor lainnya.

Uniknya, dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dari total jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 sebanyak 4.293 orang, 2.292 orang diantaranya adalah perempuan atau 58,42%. Dilihat dari tingkat pendidikannya, 76,66% atau 1.757 orang diantaranya adalah berpendidikan sarjana (D1 – S3).

Dari sisi perlindungan anak, ada permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yakni tingginya perkawinan usia dini (<16 tahun) yang pada tahun 2010 terjadi sebanyak 15.225 anak perempuan (BPS Kabupaten Dharmasraya dalam DDA tahun 2011).

### 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sarana dan prasarana KB dan KS di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2010 adalah 51 (lima puluh satu) buah klinik keluarga berencana (KKB) dan 109 (seratus sembilan) pos pelayanan keluarga berencana desa (PPKBD). Realisasi KB berjumlah 24.651 atau 69,62% dari 35.410 jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Dharmasraya. Alat kontrasepsi yang paling disukai masyarakat umumnya adalah Pil dan Suntik.

### 12) Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2010 naik menjadi 69,21 persen dari 67,04 persen pada 2009. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat TPAK perempuan hanya 49,21 persen jauh lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 88,00 persen.

Pasar tenaga kerja Dharmasraya ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya lebih dari 90 persen. Kondisi ketenagakerjaan Dharmasraya juga memiliki kecenderungan yang positif dengan ditandainya naiknya persentase jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun.

Tingkat pengangguran turun dari 4,44 persen pada 2009 menjadi 2,70 persen pada tahun 2010. Jika dilihat dari jenis kelamin tingkat pengangguran perempuan sebesar 50,79 persen jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran laki-laki yang hanya 12,00 persen.

Jika diklasifikasikan berdasarkan pendidikan yang ditamatkan ternyata tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja dan semakin rendah tingkat pengangguran.

Berdasarkan perbandingan menurut lapangan usaha, sektor pertanian mendominasi pasar kerja di Dharmasraya dengan persentase 62,93 persen pada tahun 2010. Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran



sebesar 14,64 persen. Sementara jumlah terkecil ada pada sektor transportasi dan komunikasi.

Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 tercatat sebanyak 3.241 orang, dimana jumlah pencari kerja perempuan 2.191 orang lebih banyak dari pada laki-laki yang hanya sebanyak 1.050 orang. Namun untuk jumlah yang ditempatkan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

#### 13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi isu sentral dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem perekonomian dimana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonominya juga berada dibawah pengendalian dan pengawasan anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian ekonomi kerakyatan tersebut diatas, maka diharapkan adanya peningkatan peran dari usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan individu wirausaha dalam kegiatan ekonomi.

Terdapat peningkatan perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2005 jumlahnya tercatat sebanyak 44 koperasi dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 159 koperasi. Kondisi serupa juga terlihat pada UKM yang jumlahnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 122 usaha kecil dan 430 usaha menengah kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi 160 usaha kecil dan 481 usaha menengah.

#### 14) Penanaman Modal

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi/penanaman modal. Kegiatan penanaman modal menghasilkan proyek investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan

penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Dalam pembangunan investasi di Kabupaten Dharmasraya diarahkan untuk tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemerataan pembangunan daerah.

#### 15) Pemuda dan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan Pembangunan Bidang Kepemudaan di Kabupaten Dharmasraya, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan kurangnya kesadaran sosial dikalangan Pemuda. Untuk itu perlu di tingkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepemudaan, memperkecil angka kemiskinan, pengangguran, penyimpangan perilaku dan meningkatkan kesadaran sosial dikalangan Pemuda, dan Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat menjadi rujukan bagi kabupaten lain dalam pembangunan bidang kepemudaan.

Pembinaan dan pengembangan pembangunan Olahraga rekreasi, prestasi maupun Olahraga masyarakat perlu dukungan sarana dan prasarana memadai. Kurangnya sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat perlu segera mendapat pembenahan serius. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XIV tahun 2014 serta perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kepada seluruh *stakeholders* sebagai persiapan pembangunan baik dari teknis dan non teknis sehingga terwujud pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Dharmasraya.

#### 16) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui polisi

pamong praja, Linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2009 dan 2010 adalah sama yakni berjumlah 1.060 orang atau peningkatan terjadi hanya dari tahun 2008 yang hanya berjumlah 800 orang.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2005-2009 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana.

Perhatian pemerintah daerah dalam pelayanan publik sangat tinggi, terbukti dengan pelayanan perizinan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terpadu satu pintu pada institusi Badan Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa (BP2MPBJ).

#### 17) Ketahanan Pangan

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mewujudkan dukungan kelancaran terhadap pelaksanaan program nasional ketahanan pangan B2KP yaitu berupa kunjungan lapangan, sosialisasi, koordinasi di empat kecamatan, terlaksananya pasar murah guna memberikan stimulasi dan dorongan motivasi bagi masyarakat di empat kecamatan, terlaksananya pengadaan dan pendistribusian padi gogo guna mendukung diversifikasi produksi pertanian masyarakat, terlaksananya pembangunan gudang, penyediaan benih dan rantai jamur guna mendukung peningkatan produksi pertanian masyarakat.

Meski telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan ketahanan pangan namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu tidak berjalannya pengembangan kelembagaan ketahanan pangan daerah dan nagari yang mempunyai fungsi penyediaan dan pengelolaan cadangan, penanganan kondisi rawan pangan, dan perdagangan bahan pangan.

#### 18) Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang

merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Nagari juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kondisinya mengalami peningkatan, yaitu dari 36 LSM pada tahun 2009 menjadi 40 LSM pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk membentuk organisasi meningkat serta masyarakat masih memiliki semangat berpartisipasi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan.

#### 19) Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Dharmasraya terutama mengenai dokumen Kabupaten dalam Angka dan dokumen PDRB relatif lancar dan baik, dengan arti kata terhitung semenjak pemekaran tahun 2004, kedua dokumen tersebut selalu dirilis oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya.

#### 20) Komunikasi dan Informasi

Pada aspek telekomunikasi, jaringan telepon yang ada di kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Telkom. Jumlah pelanggan telepon rumah relatif sedikit, karena selain belum seluruh kecamatan mendapat pelayanan jaringan telepon, trend telepon genggam/seluler/HP tahun-tahun terakhir ini meningkat pesat. Dan perkembangan internet semenjak tahun 2009 menunjukkan tren yang cukup pesat, diawali dengan pemasangan sistem *modem*, kemudian *wireless* dan *wi-fi* untuk akses internet bagi kantor-kantor pemerintahan, hal ini diikuti pula mulai menjamur warung internet (warnet) di Kabupaten Dharmasraya.

### 2.3.1.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1) Pertanian

Sektor pertanian tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Dharmasraya adalah tanaman padi. Produksi padi tahun 2010 yaitu 50.544.72 ton yang terdiri dari padi sawah 49.206,72 ton dan padi ladang

1.338 ton dengan total luas sawah 9.165 ha dan luas panen 10.660 ha. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 12.008,76 ha dengan produktivitas 4.58 ton/ha.

Dilihat berdasarkan perkembangan produksi padi dari tahun 2006 – 2010 menunjukkan pertambahan yang sangat berarti yaitu sebesar 67,81%. Begitu juga dengan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya pada 5 tahun terakhir (2006 – 2010) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produktivitas padi sebesar 5.52 ton/ha, sedangkan pada tahun 2006 hanya 3,83 ton/ha. Sementara luas sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 yaitu 9.165 ha, sedangkan luas sawah tahun 2006 hanya 7.869 ha.

**Tabel 2.23.**  
**Perkembangan Produksi Komoditi Padi**

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Produksi Padi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2006	7869	30120	3.83
2	2007	8559	34051	3.98
3	2008	9015	43401	4.81
4	2009	9165	48221	5.26
5	2010	9165	50545	5.52
% Peningkatan		16.47%	67.81%	30.55%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Jenis palawija yang banyak ditanam adalah jagung dan ubi kayu. Produksi jagung terbesar terdapat di Kecamatan Koto Salak sebanyak 1.872 ton, dan tanaman ubi kayu sebanyak 1.953 ton. Sedangkan tanaman palawija yang belum dioptimalkan dalam pengusahaanya adalah tanaman kacang hijau, kacang panjang, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2010, produksi dari tanaman palawijaya ini masih rendah.

Tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain cabe, terung dan ketimun. Diantara tanaman sayuran yang ada, cabe merupakan tanaman yang diusahakan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten

Dharmasraya kecuali di Kecamatan Timpeh dan Kecamatan IX Koto. Berdasarkan data tahun 2010, produksi cabe di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 179,4 ton. Produksi cabe terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 54,6 ton. Sementara untuk terung terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Tiumang, dan Sitiung dengan produksi 96,2 ton, ketimun hanya terdapat di Kecamatan Koto Besar dan Tiumang. Dilihat berdasarkan data tahun 2006 – 2010 produksi masing-masing sayuran ini tidak tetap, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.

Buah-buahan yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, duku, rambutan dan salak. Produksi buah-buahan yang terbesar tahun 2010 adalah durian yaitu 7.890,00 ton dan jeruk sebanyak 1.531,35 ton. Berdasarkan data tahun 2010, produksi mangga terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Durian, pisang, pepaya, duku terbanyak terdapat di Kecamatan Tiumang, dan rambutan terbanyak di Kecamatan Tiumang, jeruk di Kecamatan Sitiung, serta salak terbanyak di Kecamatan Sungai Rumbai.

Sektor perkebunan, terdapat 3 komoditi utama perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat berupa kelapa, kopi, pinang dan lada. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti) dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat yang dibangun melalui P3RSB dan TCSDP, sedangkan kakao banyak diusahakan oleh masyarakat dengan pola pekarangan. Salah satu potensi yang belum tergali dari sektor perkebunan adalah pembentukan pertanian multi-kultur yang dapat menopang ekonomi masyarakat apabila komoditi utamanya mengalami penurunan harga.

Produksi komoditi perkebunan setiap tahunnya cenderung meningkat terutama kelapa sawit, karet, coklat dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan komoditas ini. Untuk perkebunan sawit dan karet terdiri dari

perkebunan swasta nasional dan perkebunan rakyat. Komoditi perkebunan umumnya merupakan komoditi ekspor, sehingga peningkatan produksi mengakibatkan peningkatan ekspor.

Produksi dan produktifitas komoditi kelapa sawit dari tahun 2008 – 2010 menunjukkan angka yang turun naik. Produksi tahun 2008 sebesar 404.252,00 ton dengan produktifitas 14,23 naik menjadi 434.952,00 ton dengan produktifitas 15,29 tahun 2009, lalu produksi dan produktifitas sawit ini turun lagi pada tahun 2010 menjadi 408.054,03 ton dan produktifitas 13,92. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.24.**  
**Luas dan Produksi Komoditi kelapa Sawit dan Karet Tahun 2006 s/d 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

Tahun	Komoditi Kelapa Sawit				
	Luas Belum Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produk-tivitas (Ton/Ha)
2010	25.152,00	4.158,36	29.310,36	408.054,03	13,92
2009	28.453,00	7.468,00	7.468,00	434.952,00	15,29
2008	28.403,00	7.411,00	7.411,00	404.252,00	14,23
2007	27.403,00	7.986,00	7.986,00	420.634,00	15,35
2006	25.848,00	8.633,00	8.633,00	327.115,00	12,66
Tahun	Komoditi Karet				
	Luas Belum Produktif (Ha)	Luas Tidak Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produk-tivitas (Ton/Ha)
2010	28.544,00	7.693,00	38.270,50	28.237,98	0,99
2009	28.453,00	7.468,00	38.102,00	33.055,00	1,16
2008	28.403,00	7.411,00	38.079,00	30.530,00	1,07
2007	27.403,00	7.986,00	37.654,00	29.383,00	1,07
2006	25.848,00	8.633,00	37.464,00	37.464,00	1,45

Sumber:

Untuk subsektor peternakan, berdasarkan data perkembangan tahun 2006 – 2010 populasi ternak selain unggas di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Jenis ternak besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, yang banyak populasinya adalah sapi yaitu 36.293 ekor, sedangkan populasi kerbau hanya 7.143 ekor, dan kambing sebanyak 11.804 ekor. Jika dilihat dari data per kecamatan, populasi sapi paling banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 7.945 ekor dan Kecamatan Koto Besar sebanyak 7.331 ekor, sedangkan populasi kerbau terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 1.559 ekor dan Sitiung sebanyak 1.245

ekor. Untuk kambing populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 2.375 ekor.

Nilai tambah sektor pertanian atas dasar harga berlaku naik dari 827,45 milyar pada tahun 2009 menjadi 947,08 milyar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian yang dihitung atas dasar harga konstan 2000 naik dari 407,39 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 429,80 milyar rupiah pada tahun 2010. Hal ini karena adanya peningkatan di semua sub sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dimana pada tahun lalu nilai tambah sektor ini hanya 244,17 milyar rupiah sedangkan tahun 2010 mencapai 258,63 milyar rupiah.

Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar di sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dimana pada tahun 2009 berdasarkan harga berlaku sebesar 139,609 milyar rupiah mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 158,66 milyar rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar 73,59 milyar rupiah pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 75,97 milyar rupiah.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Dharmasraya. Pada tahun 2007 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 38,31 persen terhadap total PDRB. Kemudian secara bertahap terus menurun setiap tahunnya dengan penurunan yang tidak terlalu besar yaitu menjadi sebesar 35,26 persen pada tahun 2009 dan 35,37 persen pada tahun 2010. Namun sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar disebabkan oleh subsektor tanaman perkebunan dimana penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar adalah lahan perkebunan yang menjadikan Kabupaten ini sebagai salah satu sentral perkebunan di Sumatera Barat yang terutama dimotori oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Subsektor tanaman perkebunan sendiri pada tahun 2010 ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 21,15 persen, meningkat dibanding dengan tahun 2009 yang kontribusinya tercatat sebesar 21,05 persen. Subsektor tanaman pangan tahun 2010 memberikan kontribusinya sebesar 5,92 persen berbeda sedikit dengan tahun 2009 tercatat sebesar 5,95 persen. Sumbangan subsektor



peternakan mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 kontribusi subsektor ini tercatat sebesar 3,21 persen sedangkan tahun 2009 hanya mampu menyumbang sebesar 3,04 persen.

## 2) Kehutanan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Kekritisan lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar

**Tabel 2.25.**  
**Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya**

No	Lahan Kritis	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Kritis	226401	74,82
2	Potensial Kritis	51129	16,90
3	Agak Kritis	17301	5,72
4	Kritis	4062	1,34
5	Sangat Kritis	1897	0,63
6	Tubuh Air	1809	0,60
Luas Total		302599	100,00

*Sumber : BPDAS Batanghari Jambi , 2009 dalam Laporan RTRW Kab. Dharmasraya tahun 2011 – 2031.*

Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan dimana tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 2,92 persen sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,82 persen.

## 3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi yang sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya terhadap PDRB, tahun 2009 sumbangan yang diberikan sektor ini sebesar 6,09 persen dan tahun 2010 ini mencapai 6,24 persen.

## 4) Pariwisata

Kunjungan wisata belum ada datanya

Kontribusi terhadap PDRB belum ada

## 5) Kelautan dan Perikanan

Perikanan yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah perikanan budidaya melalui budidaya kolam, budidaya sawah dan budidaya keramba. Dilihat dari produksi, produksi ikan terbesar di Kabupaten Dharmasraya adalah ikan budidaya kolam. Dilihat dari produksi ikan budidaya kolam dari tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan, begitu juga produksi ikan budidaya sawah dan budidaya keramba/sungai.

Kegiatan budidaya ikan terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, keramba, mina padi, jaring tancap dan keramba jaring apung. Budidaya ikan yang paling banyak diusahakan penduduk yaitu kolam air tenang dan keramba. Usaha perikanan kolam air tenang terdapat diseluruh kecamatan, dan usaha ikan keramba banyak terdapat di Kecamatan IX Koto. Usaha budidaya ikan karamba jaring apung banyak dikembangkan di Kecamatan Pulau Punjung. Kegiatan perikanan jaring tancap tangkap di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat di Kecamatan Sitiung.

**Tabel 2.26.**  
**Jenis Ikan dan Produksi Perikanan Budidaya**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010**

No	Kecamatan	Jenis Ikan (Ton)							Total (Ton)
		Nila	Mas	Lele	Gurame	Patin	Bawal	Lain-lain	
1	Sungai Rumbai	151,00	25,00	5,90	2,30	18,70	0,10	-	203,00
2	Koto Besar	405,00	53,16	7,00	3,10	16,30	1,10	-	485,66
3	Asam Jujuhan	6,00	1,00	-	-	1,00	-	-	8,00
4	Koto Baru	104,00	15,00	3,10	-	2,60	-	-	124,70
5	Koto Salak	56,00	15,00	1,50	-	1,50	-	-	74,00
6	Tiumang	53,00	6,00	-	-	2,00	-	-	61,00
7	Padang Laweh	6,00	3,00	-	-	-	-	-	9,00
8	Sitiung	294,62	15,00	2,00	2,50	3,00	1,30	0,50	318,92
9	Timpeh	43,00	8,00	-	0,25	1,60	-	-	52,85
10	Pulau Punjung	95,00	15,00	8,09	3,60	36,40	-	0,40	158,49
11	IX Koto	25,00	3,00	-	-	-	-	-	28,00
Jumah		1.238,62	159,16	27,59	11,75	83,10	2,50	0,90	1.523,62

Sumber : Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp. 54.018,99 juta atau 2,30 persen menjadi Rp. 60.586,24 juta atau 2,26 persen pada tahun 2010.

#### 6) Perdagangan

Kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 11,40 persen pada tahun 2009 dan sebesar 11,75 persen pada tahun 2010.

Nilai ekspor dihitung berdasarkan jumlah barang dan jasa yang keluar dari wilayah kabupaten Dharmasraya. Dengan kata lain ekspor yang dimaksud adalah antar kabupaten, antar provinsi. Selama tahun 2006 – 2010, nilai ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya sehingga menghasilkan ekspor neto yang positif.

Komponen ekspor neto barang-barang dan jasa atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 50.339 juta rupiah dari tahun sebelumnya pada tahun 2009 sebesar 44.297 juta rupiah. Ekspor neto merupakan penyumbang kontribusi terkecil kedua setelah pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2009 ekspor neto menyumbang kontribusi sebesar 1,89 persen atas dasar harga berlaku dan angka tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2010.

#### 7) Perindustrian

Nilai tambah yang dibentuk sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku naik dari 134,26 milyar rupiah pada tahun 2009 naik menjadi 153,18 milyar rupiah pada tahun 2010. Berdasarkan harga konstan 2000 nilai tambah sektor ini naik dari 72,30 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 75,91 milyar rupiah pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada industri pengolahan menengah/besar lainnya.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terhadap PDRB meningkat dari tahun 2009 sebesar RP. 134.263,94 juta menjadi Rp. 153.184,05 juta tahun 2010, namun dari sisi persentase, kontribusi tahun 2010 sama dengan tahun 2009 yaitu sebesar 5,72 persen.

## 8) Ketransmigrasian

**2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah****Kemampuan Ekonomi Daerah**

Dari perhitungan PDRB Kabupaten Dharmasraya, kelompok sektor yang masih dominan adalah sektor primer, sumbangannya terhadap pembentukan PDRB tahun 2010 sebesar 41,61 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 41,35 persen. Nilai tambah nominal kelompok sektor primer pada tahun 2010 sebesar 1,11 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 970,34 milyar rupiah. Sumbangan terbesar pembentukan nilai tambah kelompok sektor ini diberikan oleh sektor pertanian.

**Tabel 2.27**  
**Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2009 s/d 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

<b>Kelompok Sektor</b>	<b>Nilai Tambah (Milyar Rupiah)</b>		<b>Kontribusi (%)</b>	
	<b>2009*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009*</b>	<b>2010**</b>
1. Primer	970.34	1 114.27	41.35	41.61
2. Sekunder	478.61	547.38	20.40	20.44
3. Tersier	897.53	1 016.14	38.25	37.95
PDRB	2 346.48	2 677.79	100.00	100.00

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010.

Keterangan:

\*) = Angka Diperbaiki

\*\*) = Angka Sementara

Kelompok sektor tersier berada di urutan kedua dalam memberikan sumbangan nilai tambah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010. Kontribusi sektor ini pada tahun 2010 sebesar 37,95 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang tercatat sekitar 38,25 persen. Dimana nilai tambahnya tahun 2010 sebesar 1,02 triliun rupiah, naik dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 897,53 milyar rupiah.

Kelompok sektor sekunder memberikan sumbangan terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 yaitu 20,44 persen. Nilai tambah sektor ini pada tahun 2010 sebesar 547,38 milyar rupiah yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 yang tercatat sebesar 478,61 milyar rupiah.

Struktur perekonomian yang dapat dijelaskan dari nilai PDRB menurut komponen penggunaan penting digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan berdasarkan pemakaiannya. Hal tersebut bisa mengindikasikan banyaknya sumber daya yang digunakan untuk **konsumsi** maupun untuk **pembentukan modal (investasi)**.

Secara nominal, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi nirlaba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari 806.333 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 1.326.230 juta rupiah pada tahun 2010. Secara riil, konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2000 juga meningkat dari 361.645 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 603.103 juta rupiah pada tahun 2010. Demikian juga konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga berlaku meningkat dari 15.738 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 25.886 juta rupiah pada tahun 2010. Secara riil pun nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari 13.039 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 14.841 juta rupiah pada tahun 2010.

Jika dibandingkan terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen penggunaan PDRB yang paling dominan. Nilai konsumsi rumah tanggasebesar 1.326.230 juta pada tahun 2010 menyerap 49,53 persen dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Dharmasraya, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.28**  
**Komposisi penggunaan PDRB ADHB Tahun 2007 s/d 2010 (Persen)**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Jenis Pengeluaran/Konsumsi	2007	2008	2009	2010
1	Konsumsi rumah tangga	50,87	51,13	49,74	49,53
2	Konsumsi lembaga swasta nirlaba	0,99	1,00	0,97	0,97
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23,27	21,32	23,10	22,57
4	Pembentukan Modal Bruto	22,13	23,01	24,84	24,74
5	Perubahan <i>stock</i>	0,81	1,59	-0,54	0,32
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	1,93	1,94	1,89	1,88
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010.

## **Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

### **Perhubungan**

Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat.

Sedangkan ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau – Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru – Tanjung Simalidu, Junction – Koto Baru dan junction – Batas Sangir.

Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data saat ini panjang jalan kabupaten yaitu 1.202,78 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 589,36 Km, kondisi sedang sepanjang 180,42 Km, dan kondisi rusak sepanjang 240,56 Km serta rusak berat sepanjang 192,44 Km.

Dilihat berdasarkan kondisi, jalan mantap (kondisi baik) sepanjang 29,43%, dan persentase jalan tidak mantap (rusak sedang sampai rusak berat) 70,57 %. Untuk lebih jelasnya pengelolaan masing-masing ruas jalan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.29.**  
**Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2010**

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar	Permukaan Jalan	
					Tipe	Kondisi
A. Jalan Nasional						
N.051	Batas Kab. Sijunjung	Sungai Dareh	13,20	7	Aspal	Baik
N.052	Sungai dareh	Junction	28,00	7	Aspal	Baik
N.053	Junction	Batas Kota	21,30	7	Aspal	Baik
	Total Jalan Nasional		62,50			
B. Jalan Provinsi						
No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar	Permukaan Jalan	
					Tipe	Kondisi
P.010	Sikabu	Simp. II Koto Baru	29,00	3,50	Aspal	Rusah
P.011	Simp. III Koto Baru	Tj. Simaladu	21,00	3,50	Aspal	Baik
P.021	Junction	Koto Baru	5,20	3,50	Aspal	Baik
P.054	Junction	Batas Sangir	28,30	3,50	Aspal	Baik
Total Jalan provinsi			83,50			

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya Tahun 2010.

**Tabel 2.30.**  
**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 s/d 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan					%
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Kondisi Baik	149,19	208,78	489,45	238,46	589,36	49,00
2	Kondisi Sedang	273	448,88	287,5	177,34	180,42	15,00
3	Kondisi Rusak	273,01	366,24	405,95	331,04	240,56	20,00
4	Kondisi Rusak Berat	0	0	0	437,44	192,44	16,00
	Panjang Jalan Kabupaten	695,2	1043,9	1162,9	1182,28	1.202,78	100,00
	Panjang Jalan Propinsi	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	
	Panjang Jalan Nasional	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
	Jalan Secara Keseluruhan ( Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota )	841,2	1189,9	1308,9	1328,28	1348,78	

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

### Penataan Ruang

Zonasi arahan fungsi kawasan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis fungsi kawasan dengan mempertimbangkan jenis tanah (erodibilitas lahan), kelerengan, dan intensitas curah hujan (berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980) terbagi atas : 1) Kawasan berfungsi budidaya seluas 106.366 Ha (35,15% dari luas wilayah); 2) Kawasan berfungsi penyangga seluas 161.673 Ha (53,43% dari luas wilayah); dan 3) Kawasan berfungsi

lindung seluas 34.567 Ha 11,42% dari luas wilayah), seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.31.**  
**Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya**

Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	(%)
Kawasan Budidaya	113.365	37,46
Kawasan Lindung	34.569	11,42
Kawasan Penyangga	154.665	51,11
<b>Total Luas</b>	<b>302.606</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Laporan RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031

Kawasan berfungsi lindung terdapat pada perbukitan di kawasan barat dan perbukitan di bagian utara kabupaten pada lahan dengan kelerengan lebih dari 40%. Kawasan penyangga umumnya terdapat pada perbukitan pada lahan dengan kemiringan 25-40%. Kawasan budaya terdapat pada kawasan tengah sepanjang aliran sungai Batanghari.

Pemanfaatan Lahan Berdasarkan status penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh perusahaan dan penduduk. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- 1) Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi seluas 177.109 Ha (58,73% dari luas wilayah kabupaten);
- 2) Kawasan hutan berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten);
- 3) Perkebunan besar seluas 75.840 Ha (25,15% dari luas kabupaten);
- 4) Kawasan pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan seluas 9.014 Ha (2,99% dari luas wilayah kabupaten). IUP Pertambangan lain berimpit dengan peruntukkan lain seperti berada dalam kawasan hutan seluas



2.774 Ha dan dalam kawasan perkebunan besar seluas 9.351 H; dan.

- 5) Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 124.445 Ha (41,27% dari luas wilayah).

**Tabel 2.32.**  
**Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan**

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan hutan		
- Hutan Lindung (HL)	11958	3,95
- Hutan Produksi (HP)	25986	8,59
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	12839	4,24
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	30821	10,19
- Kaw. Suaka Alam/Pelest. Alam (KSA/KPA)	5410	1,79
Perkebunan Besar	52944	17,50
Rencana Kawasan Transmigrasi	1312	0,43
Kawasan Pertambangan	11747	3,88
Area Penggunaan Lain	149582	49,43
<b>Total Luas</b>	<b>302599</b>	<b>100</b>

Sumber: BPN Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011; SK MenHut No 304 Tahun 2010 dalam laporan RTRW Kab. Dharmasraya tahun 2011-2031.

### **Jenis dan Jumlah Perbankan, Asuransi, Restoran dan Hotel**

Dalam menunjang pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibutuhkan sarana perbankan berupa bank dan BPR. Saat ini telah ada sebanyak 25 buah Bank di Kabupaten Dharmasraya yang terkonsentrasi pada kawasan jalur jalan Lintas Sumatera. Seperti terlihat pada tabel

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah dan Daftar Nama BANK Menurut Kecamatan Tahun 2011**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Nama BANK	Jumlah (unit)	Alamat
1	Pulau Punjung	BRI Unit Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
-		BANK Nagari Cabang Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
-		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Pulau Punjung
-		BANK Syariah Mandiri KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
-		BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
-		BPR Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
-		BTPN KCP. Pulau Punjung	1	Pulau Punjung

2	Sitiung	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Agung
3	Koto Baru	BRI Unit Koto Baru	1	Koto Baru
		BRI Cabang Dharmasraya	1	Koto Baru
		BNI 46 KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Koto Baru
		BANK Nagari Cabang Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Sampoerna Sahabat UKMKCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		BTPN KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		SWAMITRA BUKOPIN	1	Koto Baru
		BPR Dharma Nagari Koto Baru	1	Koto Baru
		BPR LPN Tarantang	1	Koto Baru
4 - - -	Sungai Rumbai	BANK Nagari Capem Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BRI Unit Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BANK Mandiri Cab. Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR LPN Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR Gebu Minang Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
5	Koto Besar	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Besar
6	Koto Salak	BRI Unit Ampalu Raya	1	Koto Salak
Jumlah			25	

Sumber : Dinas Koperindag kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya 6 (enam) kecamatan yang memiliki bank, yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Salak. Dan dari 6 (enam) kecamatan tersebut Kecamatan Koto Baru merupakan kecamatan yang paling banyak memilki bank yaitu sebanyak 10 unit dan Bank yang paling banyak beroperasi adalah BRI.

Hal ini menunjukkan tingginya permintaan jasa perbankan pada kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa yang akan datang fungsi perbankan diharapkan tidak hanya sebagai sarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat tetapi sebaliknya diharapkan kehadiran sarana perbankan pada kawasan- kawasan yang belum berkembang akan dapat memicu percepatan perkembangan kawasan-kawasan tersebut yang umumnya berada di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Koto Salak.

**Tabel 2.34.**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007-2009**

Tingkat Pendidikan	2007		2008		2009	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD	25,59	32,43	26,12	33,47	23,2	29,4
SD	32,32	27,79	26,25	24,19	27,1	25,4
SMP	23,26	23,08	23,21	19,56	24,16	21,2
SMA	15,12	12,78	19,45	17,17	20,5	17,21
Diploma	1,54	1,95	2,6	3,45	2,63	3,58
DIV/S1-S3	2,17	1,97	2,37	2,16	2,41	3,21
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2007-2009

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib**

#### **1) Urusan Pendidikan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program pendidikan Wajib belajar pendidikan 9 tahun; 3) Program pendidikan menengah; 4) Program pendidikan luar biasa; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Pendidikan non Formal dan Informal; 7) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 8) Program manajemen pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan; dan 9) Programa kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Dengan anggaran yang disediakan sebelum perubahan APBD sebesar Rp.123.386.269.520,00.

Anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 185.924.149.331,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.945.844.343,00 atau sebesar 97.86 %.

#### **2) Urusan Kesehatan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan; 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan obat dan makanan; 4)

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat; 6) Program pengembangan lingkungan sehat; 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9) Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringan; 10) program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 11) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 12) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 13) program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dan 14) program pelayanan kesehatan perorangan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar **30.206.268.345,00** untuk 2 (dua) SKPD yang melaksanakan yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp. 20.308.880.450,00 dan RSUD sebesar Rp. 9.897.387.895,00.

Adapun anggaran Dinas Kesehatan setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp. 37.867.142.606,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.037.351.360,00 atau sebesar 95.17 %

Anggaran setelah perubahan APBD untuk RSUD yaitu sebesar Rp. 21.756.008.981,00 terealisasi sebesar Rp. 20.530.382.358,00 atau sebesar 94.37 %.

### **3) Urusan Pekerjaan Umum**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ; 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong; 4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Pemeliharaan Rutin Jalan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 9) Program Penataan Kawasan Agropolitan; 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan; dan 11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan anggaran yang disediakan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 133.950.395.816 terealisasi sebesar Rp. 72.818.317.160 atau 54.36 %.

#### **4) Urusan Perumahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah: 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Pengembangan Perumahan; dan 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Urusan Perumahan anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 18.372.314.300,00 realisasi sebesar Rp. 9.441.583.242,00 atau sebesar 51.39 %.

#### **5) Urusan Penataan Ruang**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah: **1)** Program Perencanaan Tata Ruang; dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 2) Program Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan, dengan anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 936.174.750,00 terealisasi sebesar Rp. 565.244.288,00 atau sebesar 60.38 %.

#### **6) Urusan Perencanaan Pembangunan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah: 1) Program Pengembangan Data/Informasi anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp . 88.604.500,00 realisasi sebesar Rp. - atau sebesar - ; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan 6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya . Urusan Perencanaan Pembangunan anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp . 393.759.000,00 realisasi sebesar Rp. 78.898.250,00 atau sebesar 20.04 %.

#### **7) Urusan Perhubungan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah: 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ; 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 6) Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 7) Program Pembukaan Jaringan Line Trayek Transportasi Darat ke Daerah Pedesaan/ Terpencil.

Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.450.336.436,00 terealisasi sebesar Rp. 4.438.066.962,00 atau sebesar 68.80 %.

#### **8) Urusan Lingkungan Hidup**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.432.831.413,00 terealisasi sebesar Rp. 1.971.243.306,00 atau sebesar Rp. 81.03 %.

#### **9) Urusan Pertanahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah: 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Anggaran Rp. 20.259.252 realisasi Rp. Atau %; 2) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Anggaran Rp. 320.285.938 realisasi Rp. 18.779.000 Atau 5.86 %.

#### **10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Urusan Kependudukan dan catatan sipil. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.867.789.804,00 terealisasi sebesar Rp. 2.728.483.274,00 sisa sebesar Rp. 95.14 %.

#### **11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Anggaran Rp. 72.878.000 realisasi Rp. 69.091.000 Atau 94.80 %; 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Anggaran Rp. 45.690.500 realisasi Rp. 44.068.000 Atau 96.45 % 4) Program; dan 5) Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.

Anggaran Rp. 128.030.000 realisasi Rp. 111.728.700 Atau 87.27 % Anggaran BPMPPKB Rp. 6.664.990.976 realisasi Rp. 5.618.064.638 Atau 84.29 %

## **12) Urusan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah: 1) Program Keluarga Berencana. Anggaran Rp. 1.639.684.000 realisasi Rp. 767.805.000 Atau 46.83 % 2) Program Pelayanan Kontrasepsi Anggaran Rp. 15.238.950 realisasi Rp. 14.963.450 Atau 98.19 %.

## **13) Urusan Sosial**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah: 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (BPMPPKB) Anggaran Rp. 602.533.000 realisasi Rp. 593.253.000 Atau 98.46 % SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 183.364.750 realisasi Rp. 182.659.250 Atau 99.62 % ; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 43.510.000 realisasi Rp. 37.504.500 Atau 86.20 % 3) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo; SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 8.768.900 realisasi Rp. 8.691.400 Atau 99.12 % dan 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 51.238.850 realisasi Rp. 51.006.850 Atau 99.55 % Dengan anggaran total SOSNAKERTRANS yang disediakan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 3.043.398.415 terealisasi sebesar Rp. 2.939.965.810 atau sebesar 96.60 %

## **14) Urusan Tenaga Kerja**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 146.501.500 realisasi Rp. 121.894.955 Atau 83.20 % 2) Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 71.923.500 realisasi Rp. 55.306.300 Atau 76.90 % dan 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan SOSNAKERTRANS Anggaran Rp. 113.670.500 realisasi Rp. 107.690.100 Atau 94.74 %.

**15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 1) Program Penciptaan Iklim Koperasi yang Kondusif; dan 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Anggaran Rp. 97.735.000 realisasi Rp. 35.980.500 Atau 36.81 %, **Kopperindag** total Anggaran setelah perubahan APBD Rp. 3.551.624.917 realisasi Rp. 3.311.839.098 Atau 93.25 %

**16) Urusan Penanaman Modal**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Anggaran Rp. 131.121.000 realisasi Rp. 126.439.800 Atau 96.43 %; dan 3) Program Pengembangan Penanaman Modal. Anggaran Total BP2MPBJ Rp. 2.074.173.384,00 realisasi Rp. 1.990.427.888 Atau 95.96 %

**17) Urusan Kebudayaan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Kebudayaan adalah: 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Anggaran Rp. 197.142.925 realisasi Rp. 191.541.000 Atau 97.16 %; 2) Program Pengembangan Nilai Budaya; dan 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Anggaran Rp. 240.347.500 realisasi Rp. 42.411.000 Atau 17.65 %.

**18) Urusan Pemuda dan Olah Raga**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemuda dan olahraga adalah: 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Anggaran Rp. 579.486.500 realisasi Rp. 528.479.000 Atau 92.10 %; 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Anggaran Rp. 358.771.100 realisasi Rp. 335.331.600 Atau 93.47 %; dan 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

**19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.



Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.119.829.956,00 terealisasi sebesar Rp. 1.082.870.614,00 atau sebesar 96.70 %.

Satpol PP anggaran Rp. 3.596.162.749,00 realisasi sebesar Rp. 3.375.552.070,00 atau 93.87 %.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp. 19.950.598.756,00 realisasi sebesar Rp. 17.946.665.023,00 atau 89.96 %.

## **20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah: 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 3) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kkabupaten/Kota; 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat; 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 10) Program Penataan Daerah Otonom Baru; 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 12) Program Pelayanan Perizinan Terpadu; 13) Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat; 14) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 15) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 16) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dengan anggaran yang disediakan untuk Sekretariat Daerah anggaran sebesar Rp. 29.169.509.427,00 Realisasi sebesar Rp. 25.901.233.458,00 Atau 88.80 %. Sekretariat DPRD anggaran sebesar Rp. 14.412.942.847,00 Realisasi sebesar Rp. 12.406.797.841,00 Atau 86.08 %. DPPKD anggaran sebesar Rp. 8.291.300.311,00 Realisasi sebesar Rp. 3.826.243.548,00 Atau 46.15 %. PPKD anggaran sebesar Rp. 39.586.396.000,00 Realisasi sebesar Rp. 16.599.940.336,00 Atau 41.93 %. Inspektorat anggaran sebesar Rp.

2.692.271.847,00 Realisasi sebesar Rp. 2.726.483.274,00 Atau 101.27 %. BP2MPBJ anggaran sebesar Rp. 2.074.173.384,00 Realisasi sebesar Rp. 1.990.427.888,00 Atau 95.96 %. Badan Kepegawaian Daerah anggaran sebesar Rp. 6.005.803.810,00 Realisasi sebesar Rp. 5.393.024.197,00 Atau 89.80 %.

Adapun Kecamatan Pulau Punjung Anggaran Rp. 1.039.658.746 realisasi Rp. 964.793.740 Atau 92.80 %.

Kecamatan Sitiung Anggaran Rp. 982.421.524 realisasi Rp. 954.865.304 Atau 97.20 %.

Kecamatan Kotobaru Anggaran Rp. 1.175.157.224 realisasi Rp. 1.038.774.397 Atau 92.22 %.

Kecamatan Sungai Rumbai Anggaran Rp. 1.277.875.116 realisasi Rp. 1.175.671.894 Atau 92 %.

Kecamatan IX Koto Anggaran Rp. 882.068.950 realisasi Rp. 733.654.365 Atau 83.17 %.

Kecamatan Timpeh Anggaran Rp. 785.969.820 realisasi Rp. 676.135.877 Atau 86.03 %.

Kecamatan Koto Salak Anggaran Rp. 1.149.868.821 realisasi Rp. 416.755.008 Atau 36.24 %.

Kecamatan Asam Jujuhan Anggaran Rp. 910.449.115 realisasi Rp. 754.922.057 Atau 82.92 %.

Kecamatan Koto Besar Anggaran Rp. 899.762.179 realisasi Rp. 891.930.374 Atau 99.13 %.

Kecamatan Padang Laweh Anggaran Rp. 641.549.980 realisasi Rp. 495.681.378 Atau 77.26 %.

Kecamatan Tiumang Anggaran Rp. 923.915.654 realisasi Rp. 881.656.140 Atau 95.43 %

## **21) Urusan Ketahanan Pangan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah: Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh anggaran sebesar Rp. 5.067.372.130,00 Realisasi sebesar Rp. 4.606.661.398,00 Atau 90.91 %.

**22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Nagari**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah: 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin KAT, dan PMKS; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari; dan 5) Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu Padu. Dengan anggaran yang disediakan untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Anggaran BPMPKB Rp. 6.664.990.976 realisasi Rp. 5.618.064.638 Atau 84.29 %.

**23) Urusan Statistik**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah Program pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. anggaran sebesar Rp. 120.253.500,00 Realisasi sebesar Rp. 120.126.000,00 Atau 99.89%

**24) Urusan Kearsipan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah: 1) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 941.311.945,00 Realisasi sebesar Rp. 902.848.309,00 Atau 95.91 %

**25) Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik; 4) Program Peningkatan Partisipasi dan Infestasi Swasta Dalam Pembangunan Komunikasi dan Informasi Melalui Program Public Private Partnership; 5) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; 6) Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa; 7) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

### **2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan**

#### **1) Urusan Pertanian**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan); 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; 5) Pengembangan Agribisnis Pertanian; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 9) Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)-APBD I; 10) PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian)- APBN; 11) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP)- APBN.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura anggaran sebesar Rp. 3.607.905.051,00 Realisasi sebesar Rp. 2.971.604.800,00 Atau 17.64 %.

Dinas Peternakan Dan Perikanan anggaran sebesar Rp. 8.267.936.339,00 Realisasi sebesar Rp. 6.954.360.522,00 Atau 84.11 %

#### **2) Urusan kehutanan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah: 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan anggaran sebesar Rp. 8.164.870.996,00 Realisasi sebesar Rp. 6.174.128.209,00 Atau 75.62 %

#### **3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: 1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan; 3) Program

Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Kelistrikan; 4) Program Pemamfaatan Dan Pengembangan Migas; 5) Program Peningkatan Akses Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Geologi Dan Sumber Daya Mineral; 7) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp. 3.331.891.628,00 Realisasi sebesar Rp. 2.630.287.360,00 Atau 78.94 %.

#### **4) Urusan Pariwisata**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Promosi Pariwisata; 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

#### **5) Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perikanan adalah: 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan; 3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

#### **6) Urusan perdagangan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perdagangan adalah: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 3) Program pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan.

#### **7) Urusan Perindustrian**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah; 2) Program pengembang TTG; 3) Program Pembinaan kemampuan industri kerajinan; 4) Program Revitalisasi dan pengembangan IKM; 5) Program Revitalisasi dan pengembangan IKM berbasis agro; 6) Program Pengembangan kawasan industri potensial.

## **8) Urusan Transmigrasi**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang merata belum terrealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015.

Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini.

#### **2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.**

Permasalahan pada Bidang Ekonomi, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan ekonomi relatif belum tercapai, hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi namun pendapatan perkapita masyarakat relatif rendah;
- 2) Pertumbuhan investasi masih relatif rendah. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Dharmasraya, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung serta relatif sulitnya permasalahan tanah ulayat;

- 3) Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan kompetensi pengusaha lokal dalam meningkatkan daya saing daerah. Ini diindikasikan dengan potensi sektor pertanian dan sektor lainnya yang begitu besar namun masih memproduksi bahan mentah (*raw material*);
- 4) Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- 5) Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- 6) Belum terlaksana sepenuhnya *good governance* dan *clean government*;
- 7) Masih tingginya jumlah RTM
- 8) Pengelolaan Potensi pertambangan belum optimal;
- 9) Potensi budaya dan keindahan alam di Dharmasraya belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata unggulan.

Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya, Kehidupan Beragama dan Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) meski angka melek huruf 99,80%, namun tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Dharmasraya masih relatif rendah, yaitu 7,2 tahun atau baru mencapai kelas 1 SLTP; (b) APK dan APM tingkat SMP dan SMA masih relatif rendah, dimana APK sebesar 71,54% dan 79,71% dan APM sebesar 59,59% dan 61,19%; (c) Angka putussekolah untuk semua jenjang terutama SMA masih relatif tinggi; dan (d) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 2) Di bidang kesehatan, antara lain: (a) belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan (5) masih tingginya penyakit ISPA

- 3) Di bidang tenaga kerja adalah meskipun angka pengangguran berdasarkan data relatif rendah sekitar 4,01%, namun kompetensi tenaga kerja masih relatif rendah. Akibatnya, angkatan kerja yang bekerja hanya bekerja di sektor-sektor informal dan hanya sebagian kecil yang terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
- 4) Di bidang keolahragaan adalah pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjaditulang punggung Kabupaten Dharmasraya dalam pentas kompetisi olahraga daerah maupun nasional. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
- 5) Di bidang kebudayaan adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan modernisasi serta makin terkikisnya moral dan kesenian daerah.
- 6) Penguasaan IPTEK daerah yang masih rendah
- 7) Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat serta konflik kepentingan menyangkut pemanfaatan tanah ulayat dan hutan lindung

Permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana adalah belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur dasar masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun pemerataan.
- 2) Infrastruktur transportasi kabupaten Dharmasraya hingga akhir tahun 2010 masih belum memadai yang ditunjukkan, sebagai berikut: masih rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, dan belum optimalnya terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi;
- 3) Pengelolaan potensi irigasi dan sumber daya air masih relatif rendah dalam mendukung kegiatan pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya;



Jaringan listrik masyarakat sampai dengan tahun 2009 baru mencapai 58,74%, serta masih rendahnya infrastruktur persampahan dan limbah;

- 4) Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah;
- 5) Pengelolaan lingkungan masih relatif rendah, yang diindikasikan masih relatif tingginya penambangan liar (PETI) oleh masyarakat;

Secara umum permasalahan yang akan dihadapi untuk tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut:

1. Belum meratanya infrastruktur dasar masyarakat dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi antar kecamatan;
2. Tidak disiplinnya pengelola dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan serta belum terarahnya pemanfaatan ruang oleh masyarakat;
3. Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat serta konflik kepentingan menyangkut pemanfaatan tanah ulayat dan hutan lindung;
4. Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
5. Masih terbatas peran lembaga keuangan ekonomi mikro dan peran nagari sebagai struktur terbawah pengelolaan pemerintahan daerah;
6. Belum terlaksana sepenuhnya *good governance* dan *clean government* serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
7. Masih tingginya jumlah RTM serta masih rendahnya pencapaian MDG's;
8. Masih rendahnya capaian target kinerja Pemerintah Daerah serta tingginya kecendrungan SILPA daerah;
9. Adanya ancaman pemanasan global (global warming) dan kebakaran hutan dari daerah tetangga;
10. Semakin intensifnya infiltrasi budaya luar melalui akses komunikasi media televisi dan internet;

11. Rendahnya pemahaman agama di masyarakat sehingga menimbulkan efek kenakalan remaja, merebaknya judi, kafe serta penyakit masyarakat lainnya;
12. Belum memadainya regulasi nasional dan propinsi yang dapat mengantisipasi iklim usaha yang kurang kondusif
13. Persaingan kualitas produk Dharmasraya dengan daerah tetangga di tingkat lokal maupun regional yang masih rendah;
14. Terjadinya ancaman konflik dan disharmonisasi;
15. Meningkatnya harga minyak dunia yang berimbas pada masyarakat.

### **2.3.2 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.**

Dari sekian banyak permasalahan yang ada dan yang akan menjadi ancaman pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang, maka ditetapkan Isu-isu strategis untuk tahun 2013 sebagai berikut:

- 1) Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan serta masih rendahnya penguasaan IPTEK;
- 2) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan capaian MDG's;
- 3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan);
- 4) Belum Optimalnya peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat dan banyak nya penyakit masyarakat.;
- 5) Masih rendahnya penguatan ekonomi lokal seperti koperasi dan UMKM serta peningkatan kualitas pengusaha lokal;
- 6) Belum optimalnya kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
- 7) Belum Optimalnya penggalan potensi dan daya saing daerah;
- 8) Masih rendahnya kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.

Adapun keterkaitan antara isu strategis tahun 2013 dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011 -2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.35**  
**Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013**

No	RPJMD 2011-2015	RKPD 2013
1	Belum meratanya infrastruktur dasar masyarakat dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi antar kecamatan	Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan serta masih rendahnya penguasaan IPTEK;
2	Tidak disiplinnya pengelola dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan capaian MDG's;
3	Penguasaan IPTEK daerah yang masih rendah	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan);
4	Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat serta konflik kepentingan menyangkut pemanfaatan tanah ulayat dan hutan lindung	Belum Optimalnya peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat dan banyak nya penyakit masyarakat.;
5	Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Masih rendahnya penguatan ekonomi lokal seperti koperasi dan UMKM serta peningkatan kualitas pengusaha lokal;
6	Masih terbatas peran lembaga keuangan ekonomi mikro dan peran nagari sebagai struktur terbawah pengelolaan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
7	Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya	Belum Optimalnya penggalan potensi dan daya saing daerah;
8	Belum terlaksana sepenuhnya <i>good governance</i> dan <i>clean goverment</i>	Masih rendahnya kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.
9	Masih tingginya jumlah RTM (rumah tangga miskin)	

## **BAB III**

# **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

---

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi 2011 dan perkiraan tahun 2012, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2015. Kerangka ekonomi makro pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2011-2015) dapat memberikan gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dan tahun 2013 adalah tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Dharmasraya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, maka arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Ditengah kondisi daerah yang belum pulih dari tantangan krisis global, krisis finansial global, bencana alam, menurunnya nilai ekspor, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, kabupaten Dharmasraya secara bertahap tetapi pasti, menata dan membangun kembali daerahnya di segala bidang. Pemulihan perekonomian, mencapai pertumbuhan

perekonomian yang tinggi disertai oleh pemerataan, bahkan peningkatan nilai tambah untuk produk perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan yang menjadi komoditi unggulan, merupakan arah pembangunan ekonomi secara makro di kabupaten Dharmasraya.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Dharmasraya diupayakan untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, menjamin pemerataan dan mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga secara simultan/berkelanjutan juga akan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis potensi daerah serta perkembangan dan pertumbuhan PDRB yang menunjukkan kondisi ekonomi daerah serta dengan melihat peluang dan tantangan masa depan maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2013 diprioritaskan pada:

1. Mengintensifkan pengembangan sektor-sektor yang dominan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, seperti:
  - Lebih mengoptimalkan Sektor Pertanian
  - Optimalisasi sektor industri pengolahan dan Perdagangan
  - Optimalisasi sektor infrastruktur dasar pendukung dan bangunan.
  - Optimalisasi sektor pertambangan dan potensi daerah lainnya berbasis lingkungan
  - Optimalisasi sektor jasa-jasa dan sektor lainnya
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang dalam memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku ekonomi serta mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012.**

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya dengan berdasar indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, investasi dan perkembangan keuangan daerah menjadi referensi dalam menentukan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya kebijakan ekonomi.

Dari tahun ke tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan suatu perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan mengalami penurunan melambat menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, namun begitu persentasenya masih di atas angka enam. Baiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tersebut tentu tidak terlepas dari peran para pelaku ekonomi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonominya yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

Jika dilihat dari perkembangan secara nominal yang digambarkan dengan perhitungan nilai tambah bruto berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 tercatat sebesar 2.677,79 milyar rupiah atau naik 14,12 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya tercatat sebesar 2.346,48 milyar rupiah. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 1.158,56 milyar rupiah mengalami kenaikan 6,51 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar 1.087,78 milyar rupiah. Ini artinya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2009, dimana pada tahun 2009 kinerja perekonomian Dharmasraya mengalami pertumbuhan sebesar 6,64 persen.

Lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya relatif tidak mengalami perubahan. Secara umum masing-masing lapangan usaha memiliki perannya dalam pembentukan nilai tambah PDRB suatu daerah. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya menunjukkan trend yang menaik, namun bila diperhatikan dari peranan

masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 tampaknya tidak mengalami perubahan yang berarti. Dari sembilan sektor masih terdapat empat sektor yang mampu memberikan kontribusinya di atas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah PDRB seperti halnya pada tahun 2009 yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Dharmasraya. Pada tahun 2007 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 38,31 persen terhadap total PDRB. Kemudian secara bertahap terus menurun setiap tahunnya dengan penurunan yang tidak terlalu besar yaitu menjadi sebesar 35,26 persen pada tahun 2009 dan 35,37 persen pada tahun 2010. Namun sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar disebabkan oleh subsektor tanaman perkebunan dimana penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar adalah lahan perkebunan yang menjadikan Kabupaten ini sebagai salah satu sentral perkebunan di Sumatera Barat yang terutama dimotori oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Subsektor tanaman perkebunan sendiri pada tahun 2010 ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 21,15 persen, meningkat dibanding dengan tahun 2009 yang kontribusinya tercatat sebesar 21,05 persen. Subsektor tanaman pangan tahun 2010 memberikan kontribusinya sebesar 5,92 persen berbeda sedikit dengan tahun 2009 tercatat sebesar 5,95 persen. Sumbangan subsektor peternakan mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 kontribusi subsektor ini tercatat sebesar 3,21 persen sedangkan tahun 2009 hanya mampu menyumbang sebesar 3,04 persen. Kontribusi subsektor kehutanan mengalami sedikit penurunan dimana tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 2,92 persen sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,82 persen. Subsektor terakhir yaitu subsektor perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 2,30 persen menjadi 2,26 persen pada tahun 2010.

Sektor yang memberikan sumbangan terbesar kedua adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 14,54 persen pada tahun 2009 turun

menjadi 14,18 persen pada tahun 2010. Dilihat dari masing-masing subsektor, tampak bahwa subsektor pemerintahan dan pertahanan masih memberikan kontribusi paling besar yakni 11,41 persen pada tahun 2010, tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2009 yang menyumbang sebesar 11,75 persen. Kenaikan dari subsektor lainnya masih belum bisa meningkatkan kontribusinya secara signifikan dalam pembentukan nilai tambah PDRB Kabupaten Dharmasraya.

Sektor berikutnya yang memberikan sumbangan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah sektor bangunan. Pesatnya pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat dalam penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik di Kabupaten Dharmasraya menempatkan sektor Bangunan (*construction*) sebagai sektor yang memberikan sumbangan terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2010 sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 13,68 persen naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,55 persen.

Disamping ketiga sektor di atas, sektor lainnya yang cukup besar peranannya dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran. Pada tahun 2009 peranan sektor ini tercatat sebesar 12,44 persen dan mengalami kenaikan pada Tahun 2010 menjadi 12,76 persen. Kinerja sektor ini ditunjang oleh subsektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan sumbangan sebesar 11,40 persen pada tahun 2009 dan sebesar 11,75 persen pada tahun 2010. Sedangkan subsektor hotel dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yaitu sebesar 0,01 persen.

Sektor-sektor lainnya juga ikut memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah PDRB Kabupaten Dharmasraya walaupun sumbangannya dibawah 10 persen. Sektor Angkutan dan Komunikasi tidak jauh berbeda dengan tahun lalu memberikan sumbangan sebesar 6,87 persen. Kontribusi sektor ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar 7,07 persen. Sumbangan tersebut masih



didominasi oleh subsektor angkutan darat sebesar 6,48 persen sedangkan kontribusi subsektor yang lainnya hanya di bawah satu persen.

Selanjutnya Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi yang sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, tahun 2009 sumbangan yang diberikan sektor ini sebesar 6,09 persen dan tahun 2010 ini mencapai 6,24 persen.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,72 persen.

Selanjutnya sektor yang memberikan sumbangan paling kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya adalah sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan serta sektor listrik dan air bersih yang memberikan sumbangan masing-masing 4,14 persen dan 1,04 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 4,20 persen dan 1,12 persen, peranan kedua sektor ini mengalami penurunan.

Tahun 2010 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 12,62 persen dengan nilai sebesar Rp. 13.984.040,91 per orang per tahun sedangkan tahun 2009 hanya 9,74 persen dengan nilai sebesar Rp. 12.417.559,87 per orang per tahun. Begitu juga dengan Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 13,33 persen. Secara umum pendapatan regional perkapita Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 13.385.696,20 sedangkan pada tahun 2009 hanya tercatat sekitar Rp. 11.811.411,54.

Peningkatan nilai PDRB Perkapita pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya:

**Tabel 3.1**  
**Ekonomi Makro Kondisi tahun 2009 s/d 2012**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	REALISASI			PROYEKSI	
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB					
	- Harga berlaku	2.346.484,20	2.677.790,01*	3.067.927,06**		
	- Harga konstan	1.087.775,99*	1.158.557,51*	1.234.376,14**		

2	Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB harga konstan)	6,64%	6,51%	6,54%	7,04% ???	7,19% ???
3	Tingkat inflasi (YoY)	10,80%	10,5			
4	<b>PDRB Menurut Sektoral ADHB (Rp. juta)</b>					
	1. Pertanian	827.446,78	947.080,45	1.070.512,84		
	2. Pertambangan dan penggalan	142.895,55	167.186,09	193.432,18		
	3. Industri pengolahan	132.263,94	153.184,05	169.230,15		
	4. Listrik dan air	26.339,82	27.919,21	30.846,92		
	5. Bangunan	318.005,29	366.273,22	418.138,59		
	6. Perdagangan, hotel dan restoran	291.985,85	341.659,35	399.968,82		
	7. Angkutan dan komunikasi	165.835,47	183.997,76	213.550,06		
	8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	98.473,81	110.742,80	126.993,47		
	9. Jasa-jasa	341.237,69	379.747,08	445.254,03		
	<b>Distribusi PDRB menurut sektoral (%) ADHK</b>					
	1. Pertanian	37,45	37,10	453.964,98		
	2. Pertambangan dan penggalan	5,83	6,09	76.057,59		
	3. Industri pengolahan	6,65	6,55	79.801,14		
	4. Listrik dan air	0,95	0,92	11.412,61		
	5. Bangunan	11,26	11,38	139.542,33		
	6. Perdagangan, hotel dan restoran	11,46	11,50	142.855,03		
	7. Angkutan dan komunikasi	6,33	6,28	77.616,01		
	8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4,15	4,28	53.463,06		
	9. Jasa-jasa	15,92	15,90	199.663,39		
5	<b>Pendapatan Per Kapita (Rp.)</b>					
	ADHB	12.417.559,87	13.984.040,91			
	ADHK	5.756.494,54	6.050.256,19			

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, 2011.

Keterangan \*\* angka diperbaiki sementara

Keterangan \*\* angka sementara

Dari perhitungan PDRB Kabupaten Dharmasraya, kelompok sektor yang masih dominan adalah sektor primer, sumbangannya terhadap pembentukan PDRB tahun 2010 sebesar 41,20 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 41,61 persen. Nilai tambah nominal kelompok sektor primer pada tahun 2011 sebesar 1.234,33 milyar rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 1.158,56 milyar rupiah. Sumbangan terbesar pembentukan nilai tambah kelompok sektor ini diberikan oleh sektor pertanian.

Kelompok sektor tersier berada di urutan kedua dalam memberikan sumbangan nilai tambah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Dharmasraya pada tahun 2010. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 sebesar 38,65 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang tercatat sekitar 37,95 persen. Dimana nilai tambahnya tahun 2011 sebesar 1.185,77 milyar rupiah, naik dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 1.016,14 milyar rupiah.

Kelompok sektor sekunder memberikan sumbangan terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 yaitu 20,15 persen turun dari tahun sebelumnya sebesar 20,40%. Nilai tambah sektor ini pada tahun 2011 sebesar 618,22 milyar rupiah yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang tercatat sebesar 547,38 milyar rupiah.

Untuk melihat laju pertumbuhan menurut kelompok sektor PDRB, dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan kelompok sektor yang paling tinggi juga dimiliki oleh kelompok sektor primer, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,89 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 ini sebesar 6,27 persen. Secara riil nilai tambah sektor primer naik dari 470,84 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 500,36 milyar rupiah pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhan sektor sekunder tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, dimana tingkat pertumbuhannya mencapai 6,49 persen, sedangkan pada tahun 2009 hanya tumbuh sekitar 5,82 persen. Begitu juga secara riil nilai tambah sektor ini naik dari 205,15 milyar rupiah menjadi 218,46 milyar rupiah pada tahun 2010. Kelompok sektor tersier tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu dari 6,76 persen pada tahun 2009 menjadi 6,79 persen pada tahun 2010. Secara riil nilai tambah sektor ini naik dari 411,79 milyar rupiah tahun 2009 menjadi 439,74 milyar rupiah pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB**  
**Kabupaten Dharmasraya ADHB**

Kelompok Sektor	Nilai Tambah (Milyar Rupiah) ADHB		Kontribusi (%) ADHB		Pertumbuhan (%) ADHB	
	2009*	2010**	2009*	2010**	2009*	2010**
1. Primer	970.34	1 114.27	41.35	41.61	6.89	6.27
2. Sekunder	478.61	547.38	20.40	20.44	5.82	6.49
3. Tersier	897.53	1 016.14	38.25	37.95	6.76	6.79

<b>PDRB</b>	<b>2 346.48</b>	<b>2 677.79</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6.64</b>	<b>6.51</b>
-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya

Keterangan:

\*) = Angka Diperbaiki

\*\*) = Angka Sementara

Struktur perekonomian yang dapat dijelaskan dari nilai PDRB menurut komponen penggunaan penting digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan berdasarkan pemakaiannya. Misalnya, dengan mengetahui distribusi persentase PDRB, bisa mengindikasikan banyaknya sumber daya yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk pembentukan modal (investasi).

Berikut kondisi perekonomian berdasarkan komponen pengeluaran:

**Tabel 3.3**  
**Distribusi Persentase PDRB Menurut penggunaan Tahun 2009 s/d 2010**  
**Kabupaten Dharmasraya**

No	Jenis Penggunaan	Nilai PDRB ADHB (Rp, milyar)		Nilai PDRB ADHK (Rp, milyar)		Distribusi (ADHB)		Distribusi (ADHK)	
		2009*	2010**	2009*	2010**	2009*	2010**	2009*	2010**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1167,056	1326,23	527,72	602,10	49,74	49,53	48,51	51,97
	Makanan	555,40	631,38	230,86	264,48	23,67	23,58	21,22	22,83
	Non - Makanan	611,65	694,85	296,86	337,62	26,07	25,95	27,29	29,14
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22,78	25,89	12,78	14,84	0,97	0,97	1,17	1,28
3	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	542,08	604,50	298,81	300,59	23,10	22,57	24,58	25,95
4	Pembentukan Modal tetap Bruto	582,87	662,37	228,32	241,86	24,84	24,74	20,99	20,88
5	Perubahan Stock	(12,29)	8,47	24,67	(31,44)	(0,54)	0,32	2,27	(2,71)
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	44,30	50,34	26,92	30,59	1,89	1,88	2,47	2,64

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya

Keterangan:

\*) = Angka Diperbaiki

\*\*) = Angka Sementara

Dari tabel di atas, secara nominal pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi nirlaba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari 806.333 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 1.326.230 juta rupiah pada tahun 2010. Secara riil, konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2000 juga meningkat dari 361.645 juta

rupiah pada tahun 2006 menjadi 603.103 juta rupiah pada tahun 2010. Demikian juga konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga berlaku meningkat dari 15.738 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 25.886 juta rupiah pada tahun 2010. Secara riil pun nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari 13.039 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 14.841 juta rupiah pada tahun 2010.

Jika dibandingkan terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen penggunaan PDRB yang paling dominan. Nilai konsumsi rumah tanggasebesar 1.326.230 juta pada tahun 2010 menyerap 49,53 persen dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Dharmasraya.

Nilai pengeluaran pemerintah selama tahun 2006 – 2010 meningkat dari 368.837 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 604.500 juta rupiah pada tahun 2010. Secara riil, nilai ini juga meningkat dari 262.904 juta rupiah pada tahun 2006 menjadi 300.591 juta rupiah pada tahun 2010.

Apabila dilihat dari tahun 2009, pengeluaran pemerintah sebesar 542.076 juta rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 604.500 juta rupiah pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2009 sebesar 267.371 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 300.591 juta rupiah.

Dengan predikat sebagai stabilisator pembangunan, pemerintah memegang peranan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap seluruh PDRB pada tahun 2010 mencapai 22,57 persen atas dasar harga berlaku, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 kontribusi pengeluaran pemerintah sebesar 23,10 persen terhadap seluruh PDRB kabupaten Dharmasraya.

Selama tahun 2006 – 2010, investasi di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan yang pesat. Nilai PDRB pembentukan modal tetap bruto meningkat dari 582.869 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 662.366 juta rupiah pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku. Begitu juga dengan pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga konstan 2000 dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 sebesar 228.316 juta rupiah menjadi 241.865 juta rupiah pada tahun 2010. Sementara kontribusi dari pembentukan modal tetap bruto terhadap perhitungan PDRB pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan angka yang tetap.

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2009, hal ini dimungkinkan karena di tahun ini aktifitas pembangunan secara fisik lebih besar baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Nilai ekspor dihitung berdasarkan jumlah barang dan jasa yang keluar dari wilayah kabupaten Dharmasraya. Dengan kata lain ekspor yang dimaksud adalah antar kabupaten, antar provinsi. Selama tahun 2006 – 2010, nilai ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya sehingga menghasilkan ekspor neto yang positif.

Komponen ekspor neto barang-barang dan jasa atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 50.339 juta rupiah dari tahun sebelumnya pada tahun 2009 sebesar 44.297 juta rupiah. Ekspor neto merupakan penyumbang kontribusi terkecil kedua setelah pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2009 ekspor neto menyumbang kontribusi sebesar 1,89 persen atas dasar harga berlaku dan angka tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2010.

Selain itu, perkembangan indikator ekonomi daerah bisa juga dilihat dari hasil kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang diukur berdasarkan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator kinerja ekonomi makro tersebut dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Kebutuhan Investasi, Penurunan Tingkat Kemiskinan Dharmasraya, 2010-2015**

Indikator	PROYEKSI				
	2010	2012	2013	2014	2015
A. PERTUMBUHAN EKONOMI	6,93	7,06	7,19	7,23	7,45
<b>Penawaran</b>					
1. Pertanian	6,43	6,50	6,82	7,04	7,21
2. Industri Pengolahan	7,49	7,59	7,92	7,97	8,27
B. STRUKTUR EKONOMI (%)					
<b>Penawaran</b>					
1. Pertanian	33.67	33.49	33.37	33.31	33.24
2. Industri Pengolahan	6.99	7.06	7.42	8.17	8.86
PDRB (Rp milyar)	1,233,765.67	1,320,919.16	1,415,926.17	1,518,357.29	1,631,497.15
PDRB/Kapita (Rpjuta)	6.31	6.60	6.90	7.23	7.58
Penduduk (jiwa)	195.492	200.233	205.078	210.041	215.124
Penduduk Miskin (%)	10.51	10.23	9.95	9.69	9.44
Tingkat Pengangguran (%)	2,70				
IPM	69,13	Sdg dihitung			

Sumber: RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015.

Pada tabel diatas, dari sisi pertumbuhan Sektor-sektor yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi pada periode 2011-2015 sangat dipengaruhi oleh Sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh positif sebesar 6,34% tahun 2011, dan karena perkembangan Sektor pertanian ini akan diiringi oleh perkembangan Sektor industri olahan, maka pertumbuhan Sektor ini akan terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan diperkirakan di tahun 2015 nanti akan mencapai pertumbuhan 7,21%. Pertumbuhan Sektor pertanian yang cukup baik ini, harus diiringi oleh pengembangan industri olahan terutama agro industri dan agro bisnis, dan lebih ditekankan pada sub Sektor perkebunan, sub Sektor peternakan, dan sub Sektor kehutanan. Sementara itu, Industri pengolahan telah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,41% selama RPJM I 2005-2010. Diperkirakan industri pengolahan ini akan terus mengalami pertumbuhan yang cukup positif, sehingga di tahun 2011 diperkirakan pertumbuhannya mencapai 7,49% dan terus tumbuh menjadi 8,27% tahun 2015 nanti, dengan asumsi, industri pengolahan yang dikembangkan adalah industri produk

pertanian yang merupakan komoditi unggulan kabupaten Dharmasraya yang menjadi andalan ekspor selama ini seperti karet, sawit, dan coklat. Sehingga, pengembangan agro industri yang potensial itu adalah industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan peternakan, dan industri pengolahan hasil perkebunan.

Harus diakui, Sumbangan terbesar ekonomi berasal dari Sektor pertanian dengan sub Sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ketiga sub Sektor ini hendaknya dikembangkan terlebih dahulu melalui agro industri dan agro processingnya.

Seelanjutnya pengembangan Sektor pertanian harus sejalan dengan pengembangan Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Sektor industri pengolahan. Sub Sektor perdagangan besar dan eceran masih kurang memiliki prospektif yang baik ke depan dimana pertumbuhan sub Sektor perdagangan besar dan eceran ini selama tahun 2005-2008 lebih kecil dari pertumbuhan Sektor perdagangan, hotel dan restoran Sumatera Barat secara total. Sehingga prospek pengembangan Sektor pertanian akan sejalan dengan prospek sub Sektor perdagangan besar dan eceran yang terlihat dari nilai pergeseran proporsional shiftnya yang cukup positif. Sedangkan sub Sektor hotel memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil dari laju total pertumbuhan Sektor perdagangan hotel Sumatera Barat, dan pertumbuhan sub Sektor restoran memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan sub Sektor hotel Sumatera Barat, sehingga pengembangan sub Sektor restoran ini cukup memiliki prospek yang baik dikembangkan di kabupaten Dharmasraya. Kurang kompetitifnya perdagangan besar dan eceran, hotel, tentu akan berdampak kepada pengembangan industri pariwisata kabupaten Dharmasraya sendiri ke depannya. Oleh karena itu, pembangunan sub Sektor hotel menjadi sangat penting di kabupaten Dharmasraya ke depan.

Dan untuk melihat prospek perekonomian secara aggregate, maka dapat dikemukakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010- 2015 diperkirakan adalah sebesar 7,17% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi periode RPJM I yakni hanya 6,24%. Targetkan



pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 nanti adalah sebesar 7,45% lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dalam RPJM II yang ditetapkan sebesar 7,04%, dan target yang ditetapkan dalam RPJPD Sumatera Barat sebesar 7,21. Besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya akan melampaui target pertumbuhan ekonomi di dalam RPJPD Sumatera Barat, apabila Sektor pertanian dapat terus dikembangkan ke industri pengolahan, dan peran Sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mendominasi sektor-sektor perekonomian kabupaten Dharmasraya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional berkisar antara 6,3 sampai 6,8% selama periode 2011 sampai 2015 nanti, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya tidak akan jauh berbeda dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional yang relatif lebih labil di bandingkan dengan perekonomian Dharmasraya, asalkan saja, pondasi perekonomian semakin diperkuat dengan membangun sistem pertanian yang tangguh dan diperkuat dengan sistem pertanian moderen yang berbasis agroindustri dan agrobisnis, maka optimisme pertumbuhan ekonomi ini akan dapat dicapai.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun ketiga RPJMD 2011 – 2015 meski mengalami sedikit perlambatan namun selalu di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Dalam RPJMD 2011-2015 menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 6,5-7% per tahun dan sampai 2015 mencapai 7,5%, maka Kabupaten Dharmasraya harus dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi, dengan tidak hanya mengandalkan pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah saja. Sudah sepatutnya kita mulai memikirkan peningkatan produksi bukan konsumsi.

Dengan asumsi meningkatkan sisi produksi dan mengurangi konsumsi yang diimbangi dengan kenaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya maka diharapkan akan mengurangi persentase kemiskinan dan persentase pengangguran dan secara keseluruhan akan meningkatkan IPM Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2014.**

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhir 2015 nanti, maka Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya harus melihat tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Tantangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya ke depan tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level daerah, nasional maupun internasional, dalam konteks perekonomian terbuka, Indonesia termasuk negara yang aktif dalam globalisasi sehingga kinerja perekonomian nasional hingga daerah rentan terhadap gejolak eksternal. Tentunya rentan atau tidaknya daerah terhadap pengaruh daerah faktor eksternal tersebut secara konsep daerah otonom, maka tergantung dari kekuatan daerah itu sendiri.

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Dharmasraya sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perekonomian Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2013 diperkirakan adalah :

- 1) Ketergantungan pangan terhadap produk impor, hal ini mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran.
- 2) Terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan harga BBM di dalam negeri yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan substitusi energi.
- 3) Semakin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya.

- 4) Semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upayanya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya penyebaran investasi.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2012 diperkirakan adalah :

- 1) jumlah penduduk, kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi.
- 2) Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor.
- 3) Penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.
- 4) iklim investasi yang kondusif, seperti rendahnya angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi, kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan masalah yang mungkin masih di hadapi tahun 2012 maka tantangan perekonomian yang harus disikapi pada tahun 2013 adalah :

- Perluasan dan pemerataan penyediaan infrastruktur. Pentingnya pemerataan ini terutama jalan dan jembatan bagi daerah yang masih belum bisa terjangkau oleh sarana transportasi. Masih banyaknya daerah yang masih belum memiliki prasarana transportasi ini merupakan tantangan besar pemerintah daerah dalam mengentaskan daerah-daerah yang masih dalam kategori terisolir, agar di masa mendatang mobilitas

perekonomian masyarakatnya tidak terkendala oleh masalah transportasi yang selama ini masih dirasakan.

- Peningkatan *Skill* atau kemampuan tenaga kerja agar menjadi angkatan kerja yang terampil dan siap pakai.
- Mengantisipasi efek negatif dari faktor eksternal seperti perdagangan luar negeri. Pengalaman buruk di tahun 2008, dengan anjloknya harga jual produk perkebunan di luar negeri membutuhkan campur tangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan misalnya perlunya mengundang investor untuk mendirikan industri hilir dari hasil pengolahan karet dan sawit. Mengapa tidak? Dengan potensi hasil produksi perkebunan yang cukup besar, tidak ada salahnya daerah memiliki industri hilir misalnya pengolahan CPO menjadi minyak goreng. Apabila harga CPO dunia anjlok, dengan adanya industri pengolahan CPO menjadi minyak goreng, anjloknya harga CPO dunia tersebut dapat diantisipasi daerah, minimal dampak yang dialami tidak akan seburuk yang terjadi di tahun 2008. Atau dengan kata lain, pemerintah harus memikirkan alternatif-alternatif kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang selama ini telah menjadi pengalaman tidak baik. Di satu pihak berlakunya CAFTA sejak awal 2010 menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemasaran produk lokal ke manca negara, namun di satu pihak apabila tidak hati-hati dalam menerapkan kebijakan untuk melindungi pengusaha lokal/UKM maka akan dapat menjadi bumerang bagi daerah sendiri.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Secara birokrasi telah terjadi kemajuan yang besar dalam perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi seperti kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan. Namun di lain pihak diperlukannya peraturan perundang-undangan serta pentingnya usaha pemerintah untuk menjalin mitra dengan pengusaha besar dan UKM, baik dalam hal pendanaan, kredit serta pemasaran hasil produksi. Untuk ke depannya diperlukannya kajian-kajian yang lebih mendalam tentang investasi/penanaman modal agar potensi-potensi ekonomi lebih cepat tergali dan tepat penanganannya.

- Revitalisasi pertanian, pariwisata dan UMKM
- menyederhanakan prosedur perijinan usaha.

Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2009 dan perkiraan 2010 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka Prospek perekonomian pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,5% - 7%;
- b) Inflasi pada tahun 2012 diperkirakan masih berada kisaran angka 2 digit 9,5-10,5%, hal ini dipicu oleh naiknya tarif dasar listrik dan naiknya naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan komoditi lainnya
- c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2013 diperkirakan masih sekitar 3,01%.
- d) Tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 diharapkan dapat di tekan sekitar 3,47% – 2,96%.
- e) Persentase penduduk miskin tahun 2013 diperkirakan akan menurun sekitar 10,14% - 10,00%.
- f) Dengan kondisi di atas, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 mencapai 70,05 - 70,35.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara

maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas; 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja; 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD); 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Adapun arah kebijakan Keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 masih difokuskan pada:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kecamatan, POLRI dan Stakeholders lainnya;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

#### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007. Maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD diambil kebijakan sebagai berikut : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan pendapatan dua tahun terakhir serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan; b) Dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sementara mempertimbangkan angka sampai dengan tahun 2012/tahun berjalan; c) Lain-lain pendapatan sah sementara dihitung pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Proyeksi Pendanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 masih mengandalkan dana perimbangan yaitu mencapai 76,71%, sedangkan PAD hanya memiliki kontribusi terhadap pendapatan selama dua tahun terakhir rata-rata hanya sebesar 8,7%, angka ini tentunya masih sangat kecil, oleh sebab itu perlu usaha yang lebih intensif untuk meningkatkan PAD, mengingat perbandingan antara PAD dan PDRB masih sangat kecil.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2012 di Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proporsi PAD terhadap Pendapatan APBD Tahun 2008-2011 (Rupiah dan Persen)**

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
01.	2008	22,092,475,689	380,915,532,236	5.80
02.	2009	24,907,435,355	409,357,231,951	6.08
03.	2010	54,670,101,091	440,448,639,452	12.41
04.	2011	45,198,998,800	528,272,300,495	8.56
05.	2012	45,198,998,800	509,460,782,337	8.87

Sumber: APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 - 2012

Melihat kondisi dan tren pendapatan asli daerah yang cenderung menurun, maka akan ditetapkan Arah kebijakan Peningkatan PAD, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kecamatan, POLRI dan Stakeholders lainnya;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;



3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kabupaten dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

b. Dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTP sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2011.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Dharmasraya dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) rata-rata berkisar 80 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD**  
**Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010 (dalam rupiah dan persen)**

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1	2008	314,377,526,035	380,915,532,236	82.53
2	2009	318,986,888,420	409,357,231,951	77.92
3	2010	322,398,989,117	440,448,639,452	73.20
4	2011	337,450,896,000	528,272,300,495	63.88
5	2012	420,335,144,324	509,460,782,337	82.51

Sumber: APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 - 2012

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Dharmasraya. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta

penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 terus mengalami Fluktuasi, dimana pada tahun 2011 proporsi lain0lain pendapatan daerah yang sah mencapai 22,84% adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD**  
**Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2011**

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1	2008	44,445,530,512	380,915,532,236	11.67
2	2009	65,462,908,176	409,357,231,951	15.99
3	2010	63,379,549,244	440,448,639,452	14.39
4	2011	120,670,121,100	528,272,300,495	22.84
5	2012	43,926,639,213	509,460,782,337	8.62

**Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran.  
2. Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2012

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2012-2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2012- 2014 (dalam Satuan Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2012	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2013
-1	-2	-3	-4
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>45,198,998,800</b>	<b>47,458,948,740</b>
1.1.1	Hasil Pajak daerah	9,646,328,860	10,128,645,303
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12,941,011,000	13,588,061,550
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5,121,853,000	5,377,945,650

1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	17,489,805,940	18,364,296,237
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>420,335,144,324</b>	<b>441,351,901,540</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	32,484,068,324	34,108,271,740
1.2.2	DAU	351,295,616,000	368,860,396,800
1.2.3	DAK	36,555,460,000	38,383,233,000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>43,926,639,213</b>	<b>46,122,971,174</b>
1.3.1	Hibah	0	-
1.3.2	Dana Darurat	0	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	23,136,333,453	24,293,150,126
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,387,585,760	21,406,965,048
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	402,720,000	422,856,000
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>509,460,782,337</b>	<b>534,933,821,454</b>

**Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran.  
2. Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2012.  
3. Hasil olah data dan nalisis

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2013, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Dharmasraya berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Dharmasraya antara lain dengan :
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
  - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:

- (i) Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di Kabupaten Dharmasraya yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (ii) Mulai tahun 2011 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD.
  - (iii) Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB.
  - (iv) Pada tahun 2013 secara bertahap akan dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
  - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
  - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
  - f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu / terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
- 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Dharmasraya.
  - 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
  - 6. Menegakkan hukum / *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
  - 7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
  - 8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji

Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sumatera Barat yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Dharmasraya, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

#### **3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja

Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2012, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.9**  
**Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2012**

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2008	161.064.326.094	227.389.016.464	388.453.342.558
02.	2009	204.247.752.477	236.639.804.092	440.887.556.569
03.	2010	238.332.594.627,00	280.239.044.825,00	518.571.639.452,00
04.	2011	273.280.314.183	297.312.141.955	570.592.456.138
05.	2012	280.319.765.861,00	260.855.295.809,00	541.175.061.670,00

**Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran.  
2. Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2012

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2010**

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)		Total Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = ((4) / (5))
1	2008	BTL	135.203.642.094	135,203,642,094	388,453,342,558	34.81
		BL				
2	2009	BTL	158.117.565.268	158,117,565,268	440,887,556,569	35.86
		BL				



3	2010	BTL	202.687.317.192,09	230,833,745,192	518,571,639,452	44.51
		BL	28.146.428.000,00			
4	2011	BTL	226.334.979.819	253,868,046,619	570,592,456,138	44.49
		BL	27.533.066.800			
5	2012	BTL	236.591.517.177,00	266,347,011,360	541,175,061,670	49.22
		BL	29.755.494.183,00			

- Sumber:**
1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2008-2012 merupakan realisasi anggaran.
  2. Perda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2012

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama

kurun waktu 2011-2015 sesuai dengan payung visi-misi dari WaliKabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Dalam Konteks belanja daerah Kabupaten Dharmasraya, Belanja tidak langsung pada tahun 2011 adalah Rp 274,280 milyar naik pada tahun 2012 menjadi 280,32 milyar. Melihat tren tersebut, untuk tahun 2013 diproyeksikan naik menjadi Rp. 287,873,089,022,-. Perhitungan kenaikan gaji ini berpedoman pada Permendagri 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum APBD 2012, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai, maka dihitung acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Adanya kenaikan BTL ini juga disebabkan oleh adanya kemungkinan penerimaan formasi CPNS baru yang akan ditempatkan di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melengkapi formasi yang masih dibutuhkan, dan adanya rotasi, mutasi maupun promosi eselonering.

Sedangkan untuk belanja langsung, berdasarkan tren belanja daerah serta dengan memperhatikan berbagai kondisi baik internal maupun eksternal maka diprediksi belanja langsung (BL) untuk tahun 2013 sebesar Rp. 267,455,330,527,-. Untuk lebih jelasnya mengenai tren belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir serta proyeksi untuk tahun 2013 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja (Pagu Indikatif)**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d tahun 2013**

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		Realisasi		Proyeksi	
		2010	2011	2012	2013
5	<b>BELANJA</b>	<b>519.527.488.413</b>	<b>571.671.704.634</b>	<b>541,175,061,670</b>	<b>555,328,419,550</b>
5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>255.542.128.187</b>	<b>274.280.681.654</b>	<b>280,319,765,861</b>	<b>287,873,089,022</b>
5.1.1	BELANJA PEGWAI	216.759.631.107	226.452.812.451	236,591,517,177	246,859,589,022
5.1.2	BELANJA BUNGA	0	755.494.839	2,658,000,000	2,658,000,000
5.1.4	BELANJA HIBAH	19.800.000.000	22.813.676.000	19,390,000,000	20,000,000,000
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.700.000.000	3.838.500.000	3,338,500,000	3,338,500,000
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KABUPATEN DAN PEMERINTAHAN DESA	14.635.960.000	17.602.720.000	16,926,720,000	17,000,000,000
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	646.537.080	2.817.478.364	1,415,028,684	15,000,000,000
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>263.985.360.226</b>	<b>297.391.022.980</b>	<b>260,855,295,809</b>	<b>267,455,330,527</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.931.574.200	27.523.996.800	29,755,494,183	31,960,376,301.96
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.752.615.438	86.754.718.277	85,494,954,226	85,494,954,226
5.2.3	BELANJA MODAL	156.301.170.588	183.112.307.903	145,604,847,400	150,000,000,000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>519.527.488.413</b>	<b>571.671.704.634</b>	<b>541,175,061,670</b>	<b>555,328,419,550</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(63.610.246.895)</b>	<b>(42.072.615.784)</b>	<b>(31.714.279.333)</b>	<b>(20,394,598,096.00)</b>

Sumber : APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2012 dan data diolah.

Sedangkan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD tahun 2012, diperoleh pagu indikatif/kebutuhan tahun 2013 sebesar Rp. 786,543,938,524. Hasil proyeksi belanja langsung tahun 2013 secara umum terdiri dari belanja langsung yang diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2013 menurut urusan wajib, urusan pilihan, serta belanja kesekretariatan/operasional masing-masing, diperoleh BTL sebesar Rp. 282,967,104,000,- dan BL sebesar Rp. 503,576,834,524,-. Untuk lebih jelasnya Kebutuhan/Pagu Indikatif untuk tahun 2013 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Rkpd Tahun 2013**  
**Berdasarkan SKPD Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2012**

NO	SKPD	BTL (Rp)	BL SKPD (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	149,246,250,000	29,646,508,200	178,892,758,200
2	Dinas Kesehatan	22,063,241,000	31,615,301,011	53,678,542,011
3	RSUD	10,156,760,000	19,436,765,000	29,593,525,000
4	Dinas PU	3,136,846,000	267,162,421,770	270,299,267,770
5	Bappeda	1,380,764,000	4,448,444,000	5,829,208,000
6	BKD	2,678,450,000	7,092,117,826	9,770,567,826
7	DPPKD	4,647,524,500	4,667,778,056	9,315,302,556
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2,273,263,000	9,958,876,030	12,232,139,030
9	BLH	1,086,650,000	1,481,171,000	2,567,821,000
10	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	1,943,465,000	3,388,698,100	5,332,163,100
11	Dinas Sosnakertrans	2,035,467,000	4,077,129,700	6,112,596,700
12	Dinas Koperindag dan UMKM	1,806,475,000	3,612,566,645	5,419,041,645
13	Kantor Satpol PP	1,312,850,000	2,553,309,000	3,866,159,000
14	Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	627,463,000	1,689,200,050	2,316,663,050
15	BPBD	361,453,000	5,103,350,700	5,464,803,700
16	PPKD	41,273,604,000		41,273,604,000
17	DPRD	4,401,265,800		4,401,265,800
18	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	461,205,800		461,205,800
19	Sekda	5,476,453,000	27,509,891,782	32,986,344,782
20	Sekretariat DPRD	1,627,346,000	13,860,250,750	15,487,596,750
21	Inspektorat Daerah	1,746,745,000	3,673,892,000	5,420,637,000
22	BP2MPBJ	1,076,460,000	4,279,500,000	5,355,960,000
23	BPML2NPPKB	1,967,453,000	6,502,962,750	8,470,415,750
24	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	531,362,500	6,315,737,750	6,847,100,250
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1,806,710,000	4,341,644,850	6,148,354,850
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3,236,475,000	7,533,726,500	10,770,201,500
27	Dinas Peternakan dan Perikanan	2,234,482,000	11,484,033,450	13,718,515,450
28	BKP3	3,124,654,000	4,576,952,280	7,701,606,280
29	Dinas ESDM	1,292,575,000	13,369,772,125	14,662,347,125
30	Kecamatan Pulau Punjung	776,453,000	381,618,000	1,158,071,000
31	Kecamatan Sitiung	764,865,000	377,518,000	1,142,383,000

32	Kecamatan Koto Baru	753,253,000	498,588,000	1,251,841,000
33	Kecamatan Sei. Rumbai	1,057,352,000	386,744,000	1,444,096,000
34	Kecamatan IX Koto	672,435,600	282,425,750	954,861,350
35	Kecamatan Timpeh	567,350,000	330,474,699	897,824,699
36	Kecamatan Koto Salak	756,435,000	413,121,850	1,169,556,850
37	Kecamatan Asam Jujuhan	670,764,000	368,062,025	1,038,826,025
38	Kecamatan Koto Besar	661,684,500	385,036,375	1,046,720,875
39	Kecamatan Padang Laweh	558,431,800	316,540,500	874,972,300
40	Kecamatan Tiumang	714,367,500	454,704,000	1,169,071,500
	<b>Jumlah</b>	<b>282,967,104,000</b>	<b>503,576,834,524</b>	<b>786,543,938,524</b>

Sumber: Data diolah dari Renja SKPD dan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2012.

Dari data dan penjelasan di atas, dapat diperoleh beberapa tingkat selisih antara proyeksi yang berdasarkan kemampuan daerah serta “KEINGINAN” *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.13  
Selisih Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 Kabupaten Dharmasraya  
(Dalam RP.)

Jenis Belanja	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013	Pagu Indikatif Tahun 2013 (Hasil Musrenbang)	Selisih
<b>Belanja Daerah</b>	<b>555,328,419,550</b>	<b>786,543,938,524</b>	<b>(231,215,518,974)</b>
Belanja Tak langsung	287,873,089,022	282,967,104,000	<b>(4,905,985,022)</b>
Belanja langsung	267,455,330,527	503,576,834,524	<b>(236,121,503,997)</b>

Sumber: Data diolah tahun 2012.

Dari tabel di atas, didapat selisih sekitar Rp. 231,2 Milyar, suatu angka yang cukup besar mengingat tren kemampuan APBD Kabupaten Dharmasraya per tahun yang meningkat tidak signifikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, selain mengelola APBD dengan baik, optimal dengan tidak menyalahi aturan yang ada.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Dharmasraya diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah

diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2015 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2012 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melekat Huruf dan Rata-rata Lama, APK, APM dan angka pendidikan yang ditamatkan
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja *daerah* secara terukur dan terarah, yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor, Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; serta Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi janji-janji politik.

5. Meningkatkan alokasi dana transfer nagari demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/Kabupaten, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
7. Dan lain-lain

### **3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dalam struktur APBD, selain adanya pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Maka sumber penerimaan yang berasal dari SILPA tahun lalu, transfer dari dana cadangan, pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan.

Selama 3 tahun terakhir. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA terlihat tren penurunan, hal ini dapat kita lihat dari jumlah SILPA yang pada tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp 81,63 milyar, Rp. 74,09 milyar dan Rp 42,56 milyar. Adanya penurunan SILPA tersebut menggambarkan semakin tingginya penyerapan belanja. Untuk tahun 2012 ini diperkirakan SILPA yang akan terjadi untuk selanjutnya dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2013 berkisar Rp 0,-.



**Tabel 3.14**  
**Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d tahun 2012**

NO	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Pagu indikatif tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	42.563.016.496	21.910.155.643	47.489.279.333	0
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	22.150.000.000	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		42.563.016.496	42.320.155.643	47.489.279.333	0

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2012.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu 2010-2013 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan

daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.

c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:

- Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.

d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

## 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2012-2013 diarahkan untuk:

- a. Penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

## BAB IV

### PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

---

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya berbagai fenomena baik sosial kemasyarakatan maupun keadaan iklim dunia (*global warming*), evaluasi pembangunan tahun 2010 dan tahun berjalan 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2012 yang merupakan tahun kedua masa RPJMD 2011-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015:

***Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman,  
Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada  
tahun 2015***

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 diperlukankerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda dan Prioritas pembangunan jangka menengah Dharmasraya 2011-2015.**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada tahun 2015</i>	Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”	Meletakkan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai ‘warga Dharmasraya’ dalam bingkai NKRI
	Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu, pengetahuan dan menguasai teknologi	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau.
		Meletakkan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional.	Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
	Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik.
		Memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat.	Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan
		Memeratakan Pembangunan di Seluruh Wilayah Dharmasraya	Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.
		Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa.	Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

		Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup
		Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.	Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi
		Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah.	Terjaminnya keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya

Tujuan dan Sasaran Misi pertama, yaitu: ***Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”***, terkait dengan isu perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pendidikan keagamaan, toleransi beragama, penerapan budaya Minangkabau, dan apresiasi pengembangan budaya daerah serta isu tanah ulayat.

Tujuan dan Sasaran Misi kedua, ***Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi***, terkait isu strategis infrastruktur pendidikan, aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, infrastruktur kesehatan, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta isu-isu perkembangan IPTEK.

Tujuan dan Sasaran Misi ketiga, ***Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat. karena mencakup banyak aspek, seperti; penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan dan membina suasana kondusif buat pengembangan usaha berbasis pertanian dan input teknologi***, terkait dengan isu keamanan dan ketertiban umum, kelembagaan politik,

ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat, pemerataan pembangunan, tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa, potensi daerah, dan pengembangan perekonomian

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2013 yang merupakan tahun ketiga masa RPJMD seperti disajikan pada Bab II, maka dapat dilihat keterkaitan isu-isu strategis pada RPJMD, RKPD 2012, dan RKPD 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Dharmasraya**

<b>RPJMD</b>	<b>RKPD 2012</b>	<b>RKPD 2013</b>
Belum meratanya infrastruktur dasar masyarakat dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi antar kecamatan	Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan)	Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan serta masih rendahnya penguasaan IPTEK;
Tidak disiplinnya pengelola dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan	Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan capaian MDG's;
Penguasaan IPTEK daerah yang masih rendah	Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan);
Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat serta konflik kepentingan menyangkut pemanfaatan tanah ulayat dan hutan lindung	Peningkatan kualitas angkatan kerja serta menurunkan angka pengangguran terbuka	Belum Optimalnya peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat dan banyaknya penyakit masyarakat;
Masih lemahnya penanganan pasca panen	Peningkatan kualitas pelayanan sektor	Masih rendahnya penguatan ekonomi lokal

dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian	pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik	seperti koperasi dan UMKM serta peningkatan kualitas pengusaha lokal;
Masih terbatas peran lembaga keuangan ekonomi mikro dan peran nagari sebagai struktur terbawah pengelolaan pemerintahan daerah	Peningkatan kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Belum ditetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya	Penguatan ekonomi koperasi dan UMKM serta peningkatan kualitas pengusaha lokal	Belum Optimalnya penggalian potensi dan daya saing daerah;
Belum terlaksana sepenuhnya <i>good governance</i> dan <i>clean goverment</i>	Peningkatan pencapaian target MDGs 2015	Masih rendahnya kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.
Masih tingginya jumlah RTM	Optimalisasi potensi dan keunggulan daerah	
	Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur	
	Optimalisasi peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat ( <i>adaik basandi syara', syara basandi kitabullah</i> ).	

Adapun isu-isu maupun permasalahan strategis Kabupaten Dharmasraya jika dikaitkan dengan isu dan permasalahan strategis provinsi Sumatera Barat maupun Nasional dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 4.3**  
**Keterkaitan Isu dan Masalah Strategis**  
**Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi dan Nasional**

No.	Nasional	Provinsi	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial	Dampak krisis ekonomi global terhadap pengangguran dan kemiskinan	Masih terdapatnya penduduk miskin sebanyak 11,14%
			Masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka

No.	Nasional	Provinsi	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Masih belum pulihnya kestabilan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi	Masih kurang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam kawasan pembangunan pertanian terpadu	Belum optimalnya sektor pertanian dan agroindustri dan industri pengolahan berbasis IPTEK dalam meningkatkan daya saing daerah.
			Belum meratanya jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah, serta masih kurangnya infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan);
		Belum optimalnya dukungan pengelolaan pariwisata	Masih belum tergalinya potensi wisata sejarah dan budaya sebagai objek wisata
3	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim	Krisis energi listrik, kerusakan infrastruktur dan lingkungan hidup serta bencana alam	Belum terintegrasinya program pembangunan secara lintas bidang
		Kurangnya koordinasi dan keterpaduan program antar SKPD dan provinsi dengan kabupaten/kota	
4	Masih rendahnya kualitas sebagian besar SDM	Belum meratanya kesempatan dan kualitas pendidikan	Masih relatif rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan dan kesehatan
		Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk/KEP	Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah dan adat dalam rangka penerapan ABS-SBK
		Penyalahgunaan obat terlarang, pornografi, pornoaksi, penyakit masyarakat dan etika sosial	
5	Masih belum mantapnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penegakan hukum serta pengembangan nilai-nilai demokrasi dan keamanan nasional	Masih belum terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Belum efektif dan efisiennya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
		Belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan yang berbasis nagari	Relatif masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta relatif rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam tata kelola pemerintahan;



## 4.2 Prioritas dan Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2012 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 beserta sasaran prioritas pembangunan tahun 2013.

**Tabel 4.3**  
**Prioritas Pembangunan Dharmasraya Tahun 2013**

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD 2010-2015)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2013)
1	Peningkatan pembangunan agama dan budaya serta pemberdayaan nagari.	Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan kebudayaan serta penguasaan IPTEK;
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencapaian target MDG's;
3	Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta penguasaan IPTEK.	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian masyarakat.
4	Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.	Peningkatan pembangunan agama dan budaya serta pemberdayaan nagari;
5	Pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat.	Meningkatkan penguatan ekonomi lokal (koperasi dan UMKM) dan peningkatan kualitas pengusaha lokal;
6	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.	Optimalisasi kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
7	Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.	Optimalisasi penggalan potensi dan daya saing daerah;
8	Perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM..	Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.
9	Peningkatan ketahanan pangan dan	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD 2010-2015)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2013)
	penurunan jumlah masyarakat miskin.	
10	Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri.	
11	Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK untuk meningkatkan daya saing daerah.	

**Tabel 4.4**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2013	Sasaran Pembangunan Tahun 2013
1	Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan kebudayaan serta penguasaan IPTEK;	Mewujudkan Penuntasan wajib belajar 9 tahun, Perintisan wajib belajar 12 tahun, Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, Lahirnya sentra pendidikan unggul, Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, serta Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan seni serta olah raga.
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencapaian target MDG's;	Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi dengan indikator: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya angka harapan hidup, Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, Menurunnya tingkat kematian bayi, Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, dan Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat.
3	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang	Meningkatkan akses transportasi penunjang ekonomi, Melancarkan akses antar nagari; nagari dan pusat

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2013	Sasaran Pembangunan Tahun 2013
	perekonomian masyarakat.	ibukota;dan dengan daerah tetangga; Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian; Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat; Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Semua ini didukung oleh <i>Rencana Tata-Ruang Wilayah</i> (RTRW) yang memiliki legalitas formal.
4	Peningkatan pembangunan agama dan budaya serta pemberdayaan nagari;	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, Terbina pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, dan menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat melalui optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga keagamaan.
5	Meningkatkan penguatan ekonomi lokal (koperasi dan UMKM) dan peningkatan kualitas pengusaha lokal;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan koperasi dan usaha skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah.</li><li>2. Menurunkan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam dari 11.14 % tahun 2009 sampai 10% tahun 2012; mengurangi angka pengangguran; dengan pengendalian kependudukan; Meningkatkan ketersediaan lembaga dan upaya penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan akses dan produktivitas usaha mikro; dan menghindari dari kekurangan pangan dan gizi buruk pada semua kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan nagari.</li></ol>
6	Optimalisasi kelembagaan serta iklim investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Usaha pertanian sehingga memberikan keuntungan tambahan yang tinggi; mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi wilayah; Mewujudkan Dharmasraya</li></ol>

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2013	Sasaran Pembangunan Tahun 2013
		sebagai kabupaten agraris yang lebih sejahtera; dan Mewujudkan pola pembangunan <i>kawasan sentra produksi dan balai alih teknologi (technopark)</i> . 2. Menerapkan teknologi tepat guna dalam proses produksi dalam meningkatkan daya saing produk industri dan jasa serta meningkatkan kesempatan kerja.
7	Optimalisasi penggalan potensi dan daya saing daerah;	Terkelolanya sumber daya alam secara terpadu dan optimal; Konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan; dan Penurunan pencemaran lingkungan. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam berbasis lingkungan.
8	Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur.	1. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan prima untuk mewujudkan: Pemerintahan yang bersih dan profesional; transparan dan akuntabel; aspiratif dan partisipatif; mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN; Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi; serta mewujudkan kemitraan dan sinergi positif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 2. Menyelesaikan persoalan tapal batas dan pencegahan ancaman konflik antar kelompok masyarakat sehinggadiharapkan terwujud:Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban sosial; Terhindarnya konflik antar etnis maupun agama; dan tetap terpeliharanya solidaritas sosial di

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2013	Sasaran Pembangunan Tahun 2013
		tengah keberagaman yang tinggi.

### **Tema Pembangunan Tahun 2013**

Tema pembangunan untuk mewujudkan visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015 akan difokuskan sebagai daerah Perkebunan, dan Perdagangan/Jasa ini berlandaskan Iman dan Taqwa sertaadat, akan dicapai dalam 5 tahun, sehingga diperlukan pentahapan tahunan. Dalam pentahapan fokus ini akan mengkombinasikan tiga unsur utama sebagai tersirat dalam visi Bupati/Wakil Bupati, yaitu unsur Pembangunan akhlak, pembangunan kesehatan, Pembangunan ekonomi, dan Pengembangan tata pemerintahan (*Governance*).

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2011-2015, atau dengan kata lain perencanaan tahun 2012 untuk dilaksanakan tahun 2013. Fokus prioritas dalam pentahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan, di mana Tema Pembangunan untuk Tahun 2013 dengan memperhatikan Agenda tahunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2015 adalah:

**“Melalui Perluasan Jangkauan Infrastruktur Dasar dan Penunjang  
Ekonomi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Percepatan  
Masyarakat Dharmasraya yang BERSEMI”.**

Diharapkan pada tahun 2013 dengan tema dasar tersebut diasumsikan sudah akan memulai penataan daerah yang dilihat dengan:

- a. Dengan telah selesainya pembahasan RTRW diharapkan dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh sesuai aturan yang berlaku. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya regulasi daerah (perda) yang memberi *reward* dan *punishment* pada upaya swasta dan masyarakat untuk mengembangkan daerah di Kabupaten Dharmasraya.

- b. Sudah ada kajian detail tentang rencana pengembangan tata ruang dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghidupkan jalur perdagangan.
- c. Sudah ada kajian profil pelaku ekonomi dan potensial investor lokal Kabupaten Dharmasraya.
- d. Sudah ada kajian potensi unggulan dan andalan daerah yang akan dikembangkan industrialisasinya.
- e. Sudah dimulai perluasan pembangunan (fisik dan non fisik) yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dioptimalkan bagi pengembangan masyarakat maupun daerah.

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

---

Dalam Bab V ini mengemukakan rincian program dan Kegiatan pokok

RKPD tahun 2013 menurut pembagian urusan Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana setiap program dan kegiatan dimuat secara jelas kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal, pagu indikatif, lokasi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab dan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan yang dirangkum dalam usaha rencana program dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengklasifikasian urusan wajib dan urusan pilihan seperti terlihat dalam Tabel V.1.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai urusan yang diberikan kewenangan padanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, pada tahun 2012 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang mulai dari Musrenbang Nagari,

Musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang (Forum SKPD) sampai pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Dari matrik rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan menurut bidang urusan pemerintahan daerah diperoleh belanja urusan wajib dan urusan pilihan masing masing sebesar Rp. 301.962.230.657 ,- dan Rp. 41.462.499.625,-. Dan diperoleh total belanja sebesar Rp. 765.290.108.924 ,- terdiri dari Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) masing masing sebesar Rp. 282.967.104.000,- dan Rp. 482.323.004.924,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel V.I sebagai berikut:



## BAB VI

### PENUTUP

---

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebelum dituangkan dalam RAPBD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, setiap Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh peran serta segenap *stakeholders* yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. sikap mental, tekad, disiplin dan kejujuran adalah salah satu hal penentu dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih baik. Disamping itu dalam tahap pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan jalannya program/kegiatan pemerintah daerah. Sehingga hasil nyata dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan selain dapat mengurangi/mengatasi permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**H. ADI GUNAWAN**

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

SKPD : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							7.819.515.800	2.099.160.000	-		
1 01 1 01 01 16 01	Pembangunan Gedung Sekolah Baru	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan unit sekolah baru SD	Terlaksananya pembangunan unit sekolah baru SD	2 unit	Tersedianya unit sekolah baru SD	2 unit	1.710.660.000			Km.4 Pl.Punjung, dan Sungai Baye	
1 01 1 01 01 16 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan unit sekolah baru SD	Terlaksananya pembangunan unit sekolah baru SD	2 unit	Tersedianya unit sekolah baru SD	2 unit		1.710.660.000		Koto Beringin dan Sikabau	
1 01 1 01 01 16 03	Pembangunan Ruang Kelas baru lengkap dengan mobiler	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	8 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SD	8 lokal	1.200.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 03	Pembangunan Ruang Kelas baru SD Satu Atap	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	2 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SD	2 lokal		300.000.000		IX Koto, Kampung Surau	
1 01 1 01 01 16 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan perpustakaan sekolah	Terlaksananya pembangunan pustaka sekolah	8 lokal	Tersedianya pembangunan pustaka sekolah	8 unit	1.760.000.000			SDN 04 Pl.Punjung, SDN 3 IX Koto, SDN 11 Koto Baru dan SDN Sungai Rumbai	
1 01 1 01 01 16 17	Pengadaan Pakaian Olah Raga/ Alat Olahraga SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengadaan Alat olahraga SD	Tersedianya alat praktik/ peraga siswa SD	12 paket	Lancarnya kegiatan pbm olahraga SD	12 paket	240.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik/ peraga siswa SD	22 paket	Lancarnya kegiatan pbm sd	22 paket	471.350.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 19	pengadaan Mobiler sekolah (DAK SD DAK 2011)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Mobiler sekolah	Terlaksananya pengadaan mobiler sekolah	10 paket	Lancarnya kegiatan PBM SD	10 paket	467.916.900			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Anak putus sekolah setingkat SD	Terselenggaranya Paket A setara SD	1 tahun	Menurunnya angka putus sekolah seusia SD		120.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Anak putus sekolah tk. SMP	Terselenggaranya Paket B setara SMP	1 tahun	Menurunnya angka putus sekolah seusia SMP		45.087.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 74	Penyediaan Beasiswa Keluarga Miskin (BKM) bagi Siswa SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD dari keluarga miskin	Tersalurkannya beasiswa bagi siswa Sd dari keluarga miskin	8 lokal	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sd dari keluarga miskin	2620 siswa	943.200.000			Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 16 79	Penguatan Pemberdayaan TPK Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Tim TPK kabupaten	Terlaksananya pemberdayaan TPK Kabupaten	1 paket	TPK Kabupaten melaksanakan verifikasi KTSP	1 paket		88.500.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 80	Lomba Olympiade Science (OSN) dan Mata Pelajaran SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pelaksanaan OSN bagi siswa SD	Terlaksananya lomba OSN bagi siswa SD	5 matpel	Lahirnya siswa yang berprestasi secara akademik	5 matpel	164.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 16 81	Pelaksanaan Pra UN / US, Pra US/ US SD/MI	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Terlaksananya Pra UN, UN dan US SD	Terlaksananya Pra UN, UN dan US SD	3342 orang	Meningkatnya prestasi UN SD	3342 orang	467.916.900				
1 01 1 01 01 16 82	Rintisan sekolah layanan unggul SMP 6 Pulau Punjung	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SMP	Lahirnya sekolah dengan layanan unggul tl. SMP di Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SMP	1 paket	Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya	1 paket	229.385.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17	Program Pendidikan Menengah							2.965.358.900	8.598.299.000	2.400.000.000	Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 01	Pembangunan SMA Boarding School Kab. Dharmasraya	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	SMA Boarding School	Terlaksananya pembangunan boarding school	1 unit	Tersedianya bangunan SMA Boarding School	1 unit		1.500.000.000		Koto Padang	
1 01 1 01 01 17 01	Sharing Pembangunan SMA Unggul (Boarding School)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Dana Sharing SMA Boarding School	Tersedianya dana sharing untuk bangunan SMA Boarding School	1 unit	Tersedianya dana sharing untuk bangunan SMA Boarding School	1 unit	1.500.000.000				
1 01 1 01 01 17 01	Pembangunan SMK Pertambangan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan unit sekolah baru SMK	Terlaksananya pembangunan unit sekolah baru SMK	1 unit	Tersedianya unit sekolah baru SMK	1 unit	138.069.900	1.380.699.000		Sitiung	
1 01 1 01 01 17 03	Penambahan/ Pembangunan Ruang kelas SMP	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMP	6 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SMP	6 lokal		660.000.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 03	penambahan ruang kelas SMA lengkap dengan mobiler	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	6 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SD	6 lokal		960.000.000		Pulau Punjung	
1 01 1 01 01 17 03	Pembangunan Ruang Kelas baru SMA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru SMA	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMA	6 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SMA	6 lokal		900.000.000		Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 17 03	Pembangunan Ruang Kelas baru SMK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru SMK	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMK	4 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SMK	4 lokal		600.000.000		SDN 20 Sitiung dan SMPN 02 Koto Besar	
1 01 1 01 01 17 03	Pembangunan Ruang Kelas baru SMA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru SMA	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMA	14 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SMA	14 lokal			1.680.000.000	Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 03	Pembangunan Ruang Kelas baru SMK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan ruang kelas baru SMK	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SMK	6 lokal	Tersedianya ruang kelas baru SMK	6 lokal			720.000.000	Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru	
1 01 1 01 01 17 12	pembangunan perpustakaan sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan perpustakaan sekolah	Terlaksananya pembangunan pustaka sekolah	2 unit	Tersedianya pembangunan pustaka sekolah	2 unit		440.000.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 14	Pembangunan Sanitasi sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan sanitasi sekolah	Terlaksananya pembangunan sanitasi sekolah	4 paket	Terbangunnya sanitasi sekolah	4 paket		200.000.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 44	Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang kelas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pelaksanaan rehab ruang kelas SMA	Terlaksananya rehab ruang kelas baru SMA	16 lokal	Tersedianya ruang kelas yang representatif dan nyaman	16 lokal		1.440.000.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan berprestasi	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD dari keluarga miskin	Tersalurkannya beasiswa bagi siswa Sd dari keluarga miskin	1294 siswa	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sd dari keluarga miskin	1294 siswa		517.600.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 63	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Anak putus sekolah tk. SMA	Terseleenggaranya Paket C Setara SMA	60 kelompok	Menurunnya angka putus sekolah seusia SMA		254.975.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 72	Lomba Olympiade Science (OSN) dan Mata Pelajaran SMP, SMA, SMK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pelaksanaan OSN bagi siswa SD	Terlaksananya lomba OSN bagi siswa SD	SMA 8 matpel SMP 4 Matpel	Lahirnya siswa yang berprestasi secara akademik	6 matpel	186.347.500			Pulau Punjung	
1 01 1 01 01 17 73	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US tingkat SLTP/ SLTA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Terlaksananya Pra UN, UN dan US SLTP dan SLTA	Terlaksananya Pra UN, UN dan US SLTP dan SLTA	sma/ma 1413 smk 369 smp/ mtsn 2742	Meningkatnya prestasi UN SLTP/SLTA		789.466.500			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 17 74	Pembangunan pagar sekolah SMA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pagar SMAN 1 dan SMAN 2 Pulau Punjung	Terlaksananya pembangunan pagar sekolah SMA	1220 meter (2 sekolah)	Tersedianyanya pagar sekolah SMA	1220 meter (2 sekolah)	96.500.000			Pulau Punjung	
1 01 1 01 01 18	Program Pendidikan Non Formal							1.455.568.000	-	-	Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 18 04	Pengembangan Pendidikan keaksaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Penduduk buta aksara	Beroperasionalnya dan berkembangnya kelembagaan keaksaraan fungsional	25 Kelompok	Menurunnya angka buta aksara di Kabupaten Dharmasraya	25 Kelompok	95.000.000				
1 01 1 01 01 18 09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model pembelajaran Pendidikan Non Formal (Keaksaraan Fungsional Responsif Gender)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Bahan ajar KF Resfonsif	Tersedianyabahan ajarKFResfonsif	1 paket	Menurunnya angka buta aksara		120.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 18 14	Operasional mobil pintar	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Masyarakat putus sekolah dan buta aksara	Beroperasionalnya Mobil pintar	1 paket	Meningkatnya motivasi minat baca		94.393.500			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 18 15	Pembangunan Asrama SKB	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan Asrama SKB	Terlaksananya pembangunan asrama SKB	1 unit	Tersedianya asrama SKB	1 unit	1.080.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 18 16	Operasional SKB Kab. Dharmasraya	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		tersedianya dana operasional kegiatan SKB	1 paket	tersedianya dana operasional kegiatan SKB	1 paket	47.094.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 18 17	mengikuti kegiatan HAI	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya kegiatan HAI Tk. Prop. Sumbar	1 paket	Terlaksananya kegiatan HAI Tk. Prop. Sumbar	1 paket	19.080.500			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa							248.856.000	-	-		
1 01 1 01 01 19 17	Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembelajaran kreatif	Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktik SLB		Tersedianya pengadaan alat peraga/ praktik SLB		71.356.000				
1 01 1 01 01 19 60	Operasional SLB	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengelola SLB	Tersedianya dana Operasional SKB	1 paket	Beroperasinya SKB dengan baik		96.500.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 19 61	Pembangunan Pagar SLB	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pembangunan pagarSLB	Terlaksananya pembangunan pagarSLB	1 unit	Tersedianya pagar SLB	1 unit	81.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							2.056.401.500	220.680.000	155.500.000		

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 20 04	Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Kelompok kerja Guru	Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG)	17 KKG	Meningkatnya kompetensi Guru	17 KKG	375.000.000				
1 01 1 01 01 20 13	Pemberdayaan MGMP SLTP/ SLTA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pelaksanaan kegiatan MGMP tingkat SMP. SMA dan SMK	Terlaksananya kegiatan MGMP tingkat SMP. SMA dan SMK	29 kelompok	Meningkatnya mutu pendidik (guru) SMP, SMA dan SMK)	29 kelompok	555.000.000			Umea, Gunung Medan	
1 01 1 01 01 20 14	Bimtek Pendidikan Karakter bagi guru	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Guru padajenjang pendidikan dasar	Terlaksanya Bimtek pendidikan karakter bagi guru	80 orang		80 orang	176.000.000				
1 01 1 01 01 20 15	Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pelaksanaan kinerja guru/ Pengawas	Terlaksananya penilaian kinerja guru/ pengawas	1 paket	Diperolehnya gambaran tentang kinerja guru/ pengawas	1 paket		76.680.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 16	Penyediaan bantuan biaya pendidikan S1 untuk guru SD RSBI	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Guru SDRSBI yang belum S1	Tersalurkannya bantuan pendidikan S1 bagi guru SD RSBI	12 orang	Meningkatnya kualifikasi guru menjadi S1	12 orang		144.000.000		Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 17	Penyediaan bantuan biaya pendidikan S2 untuk guru SMP RSBI	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Guru SMP RSBI yang belum S2	Tersalurkannya bantuan pendidikan S2 bagi guru SMP RSBI	8 orang	Meningkatnya kualifikasi guru menjadi S2	8 orang	99.000.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 18	Lomba Karya Ilmiah Guru	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya lomba karya ilmiah guru	1 paket	Termotivasinya guru untuk membuat karya ilmiah	1 paket	163.394.500			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 19	Pemantapan sistem manajemen sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya pemantapan sistem manajemen sekolah	1 paket	Meningkatnya profesiomalitas manajemen sekolah	1 paket	140.407.000			Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 20	Program Induksi Guru Pemula	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya program induksi guru pemula	1 paket	Lahirnya guru pemula yang profesional	1 paket	127.500.000				
1 01 1 01 01 20 21	Lomba Guru Berprestasi	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya lomba guru berprestasi	1 paket	Terpilihnya guru-guru berprestasi	1 paket	154.000.000				
1 01 1 01 01 22	Penguatan Pemberdayaan TPK Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya penguatan pemberdayaan TPK Kabupaten	40 orang	Meningkatnya kinerja tim TPK Kabupaten	40 orang	89.600.000				

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 20 23	Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya penilaian kinerja guru/ pengawas sekolah	1 paket	Meningkatnya kinerja guru	1 paket	176.500.000				
1 01 1 01 01 20 24	Jaringan penelitian pendidikan nasional	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya Jaringan penelitian pendidikan nasional	3 kegiatan	Tersedianya dokumen hasil penelitian dalam bidang pendidikan	3 kegiatan			89.000.000	Dharmasraya	
1 01 1 01 01 20 25	Pelatihan Operator Pedati web	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksanya Pelatihan Operator Pedati web		Lahirnya operator yang handal dalam menjalankan pedaTI Web	1 paket			66.500.000	Dharmasraya	
1 01 1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							6.029.192.500	-	-	Malaysia	
1 01 1 01 01 22 10	Bantuan Pendidikan Profesi Guru	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Guru-guru yang melanjutkan ke Pendidikan Profesi	Tersedianya dana bantuan untuk Pendidikan Profesi Guru	80 orang	Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik	80 orang	880.000.000			Malaysia	
1 01 1 01 01 22 11	Pertukaran Pelajar dengan Malaysia	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	PelajarSMP dan SMA yang berprestasi	Terlaksananya pertukaran pelajar dengan Malaysia	10 orang	Terbangunnya karakter baru hasil perbandingan dengan sekolah Malaysia	10 orang	49.000.000				
1 01 1 01 01 22 12	Magang Guru SD,SMP dan SMA ke sekolah-sekolah di Malaysia	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Guru SD, SMP dan SMA yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksanya magang guru ke sekolah Malaysia	40 orang	Meningkatnya wawasan keprofesionalitasan guru	40 orang	450.000.000				
1 01 1 01 01 22 13	Penguatan Pemberdayaan Kepala Sekolah/ Pengawas	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya Penguatan Pemberdayaan Kepala Sekolah/ Pengawas	1 paket	Semakin optimalnya pelaksanaan tugas kepala sekolah dan pengawas sekolah	1 paket	190.000.000				
1 01 1 01 01 22 14	Rekrutmen calon Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya Rekrutmen calon Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah	50 orang	Terpilihnya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	50 orang	286.500.000				
1 01 1 01 01 22 15	Penunjang Operasional PBM SMP	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terpenuhiya operasional PBM SMP	1 paket	Lancarnya operasional PBM SMP	1 paket	809.505.500				
1 01 1 01 01 22 16	Penunjang Operasional PBM SMA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terpenuhiya operasional PBM SMA	1 paket	Lancarnya operasional PBM SMA	1 paket	616.033.000				
1 01 1 01 01 22 17	Penunjang Operasional PBM SMK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terpenuhiya operasional PBM SMK	1 paket	Lancarnya operasional PBM SMK	1 paket	300.195.000				



NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 01 01 22 18	Penunjang Operasional PBM SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terpenuhinya operasional PBM SD	1 paket	Lancarnya operasional PBM SD	1 paket	1.184.120.000				
1 01 1 01 01 22 19	Penunjang Operasional PBM TK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terpenuhinya operasional PBM TK	1 paket	Lancarnya operasional PBM TK	1 paket	383.990.000				
1 01 1 01 01 22 20	Penyusunan Profil dan Data Pokok Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya penyusunan profil Dapodik	1 paket	Tersedianya Profil dan Data Pokok Pendidikan	1 paket	29.943.000				
1 01 1 01 01 22 21	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya bantuan operasional pengawas	1 paket	Lancarnya operasional pengawas sekolah	1 paket	110.370.500				
1 01 1 01 01 22 22	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional PTK	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya kenaikan pangkat jabatan guru, pengawas, penilik dan tenaga teknis	1 paket	Tersedianya dokumen kenaikan pangkat fungsional	1 paket	61.443.000				
1 01 1 01 01 22 23	Penunjang Operasional UPT pendidikan Pra sekolah dan SD Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi		Terlaksananya Operasional UPT, TK dan SD di Kecamatan	11 UPT	Lancarnya operasional UPT Pendidikan Pra sekolah dan SD Kecamatan	11 UPT	678.092.500			Dharmasraya	
1 18 1 01 01	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA							4.080.211.000	1.680.000.000	-		
1 18 1 01 01 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda							598.572.500	-	-		
1 18 1 01 01 15 11	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Terpilihnhya Tim Penggerek Bendera di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Tersedianya siswa Penggerek Bendera di tingkat Kabupaten dan Provinsi	100 orang	Tersedianya siswa Penggerek Bendera di tingkat Kabupaten dan Provinsi	100 orang	598.572.500			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							868.127.500	-	-		
1 18 1 01 01 16 07	Pemilihan Pemuda Pelopor dan Pemuda Berprestasi, pertukaran pemuda nusantara dan mancanegara	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pemuda berprestasi	Tersedianya Pemuda berprestasi	2 orang	Terpilihnya Pemuda berprestasi	2 orang	71.627.500			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 16 10	Pelatihan Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Sasaran para Pembina Pramuka di Gugus Depan	Tersedianya Pembina Pramuka	40 orang	Terciptanya Pembina Pramuka	40 orang	76.000.000			Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 18 1 01 01 16 12	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pengurus Osis SLTP dan SLTA se-Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya Osis yang memiliki keterampilan Manajemen dan Organisasi	60 orang	Terciptanya Osis yang memiliki keterampilan Manajemen dan Organisasi	60 orang	41.500.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 16 13	Pelatihan Gladian Pramuka	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pimpinan-pimpinan regu pramuka di Gugus Depan	Tersedianya Pembina Pramuka	60 orang	Terciptanya Pembina Pramuka	60 orang	83.000.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 16 15	Karang Pamitran Pembina Pramuka	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Sasaran para pembina Pramuka	Tersedianya Pembina Pramuka	75 orang	Terciptanya Pembina Pramuka	75 orang	56.000.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 16 19	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N SD, SMP, SMA)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD/SMP/SMA/K se Dharmasraya	Tersedianya siswa terbaik ke tingkat Provinsi	120 orang	Terpilihnya siswa terbaik ke tingkat Provinsi	120 orang	220.000.000				
1 18 1 01 01 16 20	Bantuan Pengembangan Usaha Pemuda Mandiri dan Produktif	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Pemuda Mandiri dan Produktif	Tersedianya Pemuda Mandiri dan Produktif	4 kelompok	Terlaksanya Pemuda Mandiri dan Produktif	4 kelompok	320.000.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga							933.511.000	-	-		
1 18 1 01 01 20 04	Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi di tingkat daerah/ nasional	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD/SMP/SMA/K se Dharmasraya	Tersedianya Reward dan terfasilitasinya kegiatan Olahraga yang telah meraih prestasi di tingkat Propinsi dan Nasional	5 cabang olahraga	Reward dan terfasilitasinya kegiatan Olahraga yang telah meraih prestasi di tingkat Propinsi dan Nasional	5 cabang olahraga	54.000.000				
1 18 1 01 01 20 17	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia ( <b>LPI</b> )	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SLTP/SLTA se Dharmasraya	Tersedianya Tim Utusan Kabupaten ke Propinsi	750 orang	Terpilih nya Tim Utusan Kabupaten ke Propinsi	750 orang	224.100.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 20 18	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD/ SMP/SMA/K se Dharmasraya	Tersedianya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	600 orang	Terpilihnya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	600 orang	186.142.000				

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 18 1 01 01 20 19	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SD se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	480 orang	Terpilihnya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	480 orang	138.879.500				
1 18 1 01 01 20 20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTP	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SMP se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	420 orang	Terpilihnya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	420 orang	125.000.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 20 21	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTA	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SMA se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	320 orang	Terpilihnya siswa terbaik untuk mewakili /utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional	320 orang	120.000.000			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 20 22	Penyelenggaraan Kejuaraan Pelajar Daerah (KEJURDA)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Siswa SLTP/SLTA se Dharmasraya	Tersedianya atlit yang akan mewakili Kabupaten Dharmasraya ke tingkat Provinsi	40 orang atlit	Terpilih nya atlit yang akan mewakili Kabupaten Dharmasraya ke tingkat Provinsi	40 orang atlit	85.389.500			Dharmasraya	
1 18 1 01 01 21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga							1.680.000.000	1.680.000.000	-		
1 18 1 01 01 21 02	Pembangunan sarana olahraga sekolah (Lapangan basket, badminton, volly dan futsal)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Sekolah SMA/K,SMP di Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya tempat berlatih olahraga bagi siswa.	20 SMP/ SMA/SMK	Terlaksananya tempat berlatih olahraga bagi siswa.	20 SMP/ SMA/SMK	880.000.000	880.000.000		Dharmasraya	
1 18 1 01 01 21 04	Pengadaan Peralatan olahraga untuk pemuda	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Organisasi Pemuda se- Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya sarana olahraga untuk latihan.	28 cabang Olahraga	Terlaksananya sarana olahraga untuk latihan.	28 cabang Olahraga	800.000.000	800.000.000		Dharmasraya	
				Jumlah				29.646.508.200	16.286.139.000	2.555.500.000		

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 02 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							1.609.600.000	-	-		
0 00 1 02 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							5.800.000.000	-	-		
0 00 1 02 01 02 02	Pembangunan rumah dinas			Terlaksananya pembangunan rumah dinas dokter dan paramedis	22 unit	Peningkatan sarana	22 unit	4.320.000.000			Dinkes & puskesmas	Dinkes & puskesmas
0 00 1 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	90%	25.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan Dinas operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional Dinas Kesehatan&puskesmas	1 Tahun	Kelancaran Tugas	100%	350.000.000			Dinas kesehatan, puskesmas	Dinas kesehatan, puskesmas
0 00 1 02 01 02 26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Kelancaran Tugas	100%	25.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 02 28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Kelancaran Tugas	100%	10.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 02 29	Pemeliharaan rutin / berkala mobeuler		Mobeleur kantor	Tersedianya pemeliharaan mobeuler kantor	1 Tahun	Kelancaran Tugas	100%	20.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 02 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas							950.000.000			Dinkes & puskesmas	Dinkes & puskesmas
0 00 1 02 01 02 42	Pembangunan pagar keliling Puskesmas koto baru				360 m			100.000.000			Dinkes & puskesmas	Dinkes & puskesmas
0 00 1 02 01 02 43	Pembangunan ruang UGD Puskesmas Koto Baru				1 unit						Dinkes & puskesmas	Dinkes & puskesmas
0 00 1 02 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur							168.000.000	-	-		
0 00 1 02 01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Aparatur Dinas kesehatan dan Puskesmas	Terlaksanya pengadaan pakaian dinas	1 Paket	Peningkatan disiplin aparatur	560 orang	168.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							65.000.000	-	-		
0 00 1 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							50.000.000	-	-		
0 00 1 02 01 06 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program		Petugas puskesmas	Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Dinkes & Puskesmas	12 Puskesmas	Peningkatan kinerja	100%	30.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
0 00 1 02 01 06 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keuangan		Bendahara puskesmas	Terlaksananya monitoring&evaluasi laporan keuangan puskesmas	12 Puskesmas	Peningkatan kinerja	100%	20.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 01 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat							3.025.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 19 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	terlaksananya pengadaan media penyuluh kesehatan	100%	Tersedianya media	80%	250.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat	100%	Masyarakat sadar dan mampu melaksanakan pola hidup sehat	50%	200.000.000			Masyarakat Kab. Dharmasraya	Masyarakat Kab. Dharmasraya
1 02 1 02 01 19 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pengelola program promkes	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan	100%	Meningkatnya stratifikasi posyandu, poskesri	50%	275.000.000			Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan Kab. Dharmasraya	Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan Kab. Dharmasraya
1 02 1 02 01 19 06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka survey perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pengembangan nagari siaga	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rumah tangga	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pengembangan nagari siaga	75%	Terlaksananya kegiatan survey PHBS dan meningkatnya persentase nagari siaga aktif	65%	500.000.000			Rumah tangga dan nagari	Rumah tangga dan nagari
1 02 1 02 01 19 07	Pemberdayaan kelompok dasawisma	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Kelompok Dasawisma	Terlaksananya pemberdayaan kelompok dasawisma	75%	Menurunnya AKI dan AKB	15%	1.800.000.000			2000 Kelompok di Kab. Dharmasraya	2000 Kelompok di Kab. Dharmasraya
1 02 1 02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							290.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 20 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (gangguan akibat kekurangan yodium)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Wanita usia subur	Terlaksananya pemetaan informasi GAKY	100%	Diketuahuinya status gizi	100%	80.000.000			11 Kecamatan	11 Kecamatan
1 02 1 02 01 20 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas	terlaksananya penanggulangan KEP, AGB, GAKY	100%	Menurunnya kasus malnutrisi	5%	65.000.000			Posyandu	Posyandu
1 02 1 02 01 20 08	Penimbangan masal pemantauan status gizi balita (PSG)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Balita di wilayah kerja puskesmas	Terlaksananya penimbangan masal	100%	Diketuahuinya status gizi balita	95%	70.000.000			Posyandu	Posyandu
1 02 1 02 01 20 09	Pelatihan konselor ASI/MP-ASI	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pengelola gizi dinas dan puskesmas	Terlaksananya pelatihan konselor ASI/MP-ASI	100%	Tersedianya ASI / MP - ASI	27 konselor	75.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							2.280.000.000	-	500.000.000		
1 02 1 02 01 21 01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pengelola depot sanitarian	Terlaksananya pemantauan kualita air minum masyarakat dan pelatihan PDAM	82%	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	82%	337.500.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 21 02	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pengelola TTU dan TPM	Terlaksananya pemantauan TTU, TPM dan pelatihan TTU dan TPM	82%	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	82%	300.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 21 03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Kader Kesehatan lingkungan	Terlaksananya pemantauan inspeksi rumah sehat dan terbentuknya kader kesehatan lingkungan	85%	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	85%	300.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 21 05	Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat dan jorong	Terbentukan jorong Open devacation free	50 Jorong	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	50 Jorong	480.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 01 21 06	Pelaksanaan Kab/kota sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat dan Kabupaten	terlaksananya kegiatan forum kabupaten/kota sehat	1 Paket	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	1 Paket	675.000.000			Bappeda	Bappeda
1 02 1 02 01 21 07	Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan KLB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya pemantauan angka kejadian KLB di Kabupaten DharmaSraya terutama penyakit berbasis lingkungan	85%	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	85%	187.500.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						1.691.692.980	-	-		
1 02 1 02 01 22 01	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pemukiman penduduk yang teresang demam berdarah dan malaria dan terputusnya perkembangbiak vektor	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	20 lokasi	Terputusnya rantai penularan DBD dan malaria	80%	41.784.000			Jorong	Jorong
1 02 1 02 01 22 02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging (Semprot Malaria & Bahan-Bahan Peptisida)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	perusahaan peralatan kesehatan dan bahan kimia/farmasi dan vektor penular malaria	Terlaksananya pengadaan alat dan bahan	1 paket	Tersedianya bahan insektisida	100%	57.420.000			Dinkes	Dinkes
1 02 1 02 01 22 05	Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pencegahan warga di serang penyakit menular	Terlaksananya penanggulangan penyakit menular	5 paket	Menurunnya Angka Kesakitan	50%	265.845.480			Jorong, Puskesmas, Dinkes	Jorong, Puskesmas, Dinkes
1 02 1 02 01 22 06	Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantauan jentik	1 paket	Teridentifikasi angka bebas jentik di wilayah pemantauan	80%	70.478.580			Dinkes	Dinkes
1 02 1 02 01 22 08	Peningkatan Imunisasi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Seluruh bayi, anak sekolah dasar kelas 1-2, balita dan wanita usia subur yang mendapatkan imunisasi dan terhindar dari PD3I	Terlaksananya imunisasi pada masyarakat utuk mencegah penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi	7 antigen	Menurunnya Kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	90%	691.663.200			Jorong, Dinkes	Jorong, Dinkes
1 02 1 02 01 22 09	Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Puskesmas dan kelompok masyarakat yang berpotensi penyakit menular dan tidak menular	Terlaksananya kegiatan pengamatan penyakit potensial wabah (Surveilans )	12 bulan	Terdeteksinya kemungkinan berjangkitnya wabah penyakit	100%	286.646.760			Jorong, Dinkes	Jorong, Dinkes
1 02 1 02 01 22 10	Peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Steakholder kabupaten, kecamatan dan kenagarian	Terlaksana dan tercapainya komunikasi, informasi dan evaluasi (KIE)	80%	Komunikasi, informasi dan evaluasi yang dibutuhkan tercukupi	80%	29.722.800			Dinkes	Dinkes
1 02 1 02 01 22 13	Penanggulangan Kasus KLB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penduduk yang teresang KLB sehingga tidak terjadi penyebaran pada masyarakat	Terlaksananya penangulangan KLB di daerah rawan	15 kejadian	Tertangulangi seluruh daerah KLB	100%	33.493.080			Jorong, Puskesmas	Jorong, Puskesmas
1 02 1 02 01 22 14	Pelayanan Kesehatan Matra	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Calon jemaah haji dan petugas yang melakukan kegiatan pemeriksaan dalam kondisi sehat	Terlaksananya pembekalan dan operasional petugas pelayanan serta pemeriksaan/pembinaan kesehatan CJH serta Terlaksananya Kegiatan P3K/Posko Hari Khusus	4 paket	Meningkatnya kemampuan oprasional petugas dan status kesehatan CJH serta Tertanganinya situasi krisis pada Masyarakat	80%	121.063.380			Jorong, Padang, Dinkes	Jorong, Padang, Dinkes



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 01 22 15	Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat yang berpotensi tertular penyakit bersumber binatang dan tidak berdampak kecacatan dan kematian	Terlaksananya pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang pada manusia	5 paket	Menurunnya jumlah penderita	50%	93.575.700			Jorong, Dinkes	Jorong, Dinkes
1 02 1 02 01 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						500.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 23 07	Standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan (ISO 9001:2008)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pimpinan puskesmas dan tata usaha	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	10%	Terciptanya petugas kesehatan yang terampil, profesional dan mandiri	25%	500.000.000			Dinkes	Dinkes
1 02 1 02 01 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						250.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 24 11	Pelayanan sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat kurang mampu	Memberikan pelayanan kesehatan secara cepat terhadap masalah-masalah kesehatan yang dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat	80%	Terlayannya masalah masyarakat yang dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat	80%	250.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						11.380.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 25 01	Pembangunan puskesmas	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya Pembangunan puskesmas	2 puskesmas	Peningkatan pelayanan publik	2 puskesmas	5.000.000.000			Koto Baru dan Beringin Sakti	Koto Baru dan Beringin Sakti
1 02 1 02 01 25 02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya pembangunan puskesmas pustu	3 pustu	Peningkatan pelayanan publik	100%	600.000.000			Puskesmas Sungai Limau	Puskesmas Sungai Limau
1 02 1 02 01 25 03	Pembangunan Poskesri	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya pembangunan poskesri	10 unit	Peningkatan pelayanan publik	40%	3.500.000.000			Kec. Pdg Laweh, Koto Baru, Timpeh, IX Koto, Sungai	Kec. Pdg Laweh, Koto Baru, Timpeh, IX Koto, Sungai
1 02 1 02 01 25 04	Pengadaan puskesmas keliling	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	3 kendaraan roda empat	Peningkatan pelayanan publik	50%	1.200.000.000			Puskesmas Tiumang, Koto Besar dan Sialang	Puskesmas Tiumang, Koto Besar dan Sialang
1 02 1 02 01 25 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya rehab puskesmas&pustu	4 pustu	Peningkatan pelayanan publik	50%	1.080.000.000			Jati salam, Sopan Jaya, Banjar Makmur, Tabek Maju	Jati salam, Sopan Jaya, Banjar Makmur, Tabek Maju
1 02 1 02 01 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatam	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						1.367.712.500	-	120.000.000		
1 02 1 02 01 28 07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu (program jamkesda)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat kurang mampu	Untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat	90%	Terlayannya pengobatan bagi pasien kurang mampu yang tidak termasuk dalam jamkesmas	90%	1.322.712.500			Puskesmas	Puskesmas
1 02 1 02 01 28 09	Kemitraan bidan dan dukun	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dukun yang menolong persalinan dan bidan di jorong	Terlaksananya kerjasama bidan dan dukun dalam penanganan persalinan yang di tolong oleh dukun	100 Kasus	Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan	10%	45.000.000			Jorong	Jorong

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 01 28 10	Pelatihan resusitasi neonatal	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dokter dan bidan	Terlaksananya pelatihan resusitasi neonatal	12 Puskesmas (Dokter, Bidan desa)	Menurunnya AKI dan AKB	5%				Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 28 11	Pelatihan APN (Asuhan Pelayanan Kebidanan)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dokter dan bidan	Terlaksananya pelatihan APN (Asuhan Pelayanan Kebidanan)	1 Paket	Menurunnya AKI dan AKB	5%			120.000.000	Jakarta	Jakarta
1 02 1 02 01 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						165.000.000	-	45.000.000		
1 02 1 02 01 30 08	Pembinaan & Pembentukan kelompok lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Kelompok lansia, kader lansia	terlaksananya pembinaan &pembentukan kelompok lansia	12 Puskesmas	meningkat nya umur harapan hidup dan berprilaku hidup sehat	12 puskesmas	125.000.000		25.000.000	Kabupaten Dhrmasraya	Kabupaten Dhrmasraya
1 02 1 02 01 30 09	Peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas santun lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dokter pengelola dan lansia	Terlaksananya puskesmas santun lansia	40%	menurunnya angka kesakitan pada lansia dan mewujudkan lansia yang produktif	40%	40.000.000		20.000.000	Kabupaten Dhrmasraya	Kabupaten Dhrmasraya
1 02 1 02 01 31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						45.408.000	-	-		
1 02 1 02 01 31 01	Pengawasan Keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Makanan hasil industri rumah tangga dan produsen industri rumah tangga pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan,diperolehnya sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) bagi Produsen P-IRT	70%	Persentase industri rumah tangga pangan (IRT-P) yang telah memahami tentang bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat	20 orang	32.718.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 31 05	Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Keracunan Pangan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Petugas Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan petugas tentang KLB Pangan	30%	Persentase keberhasilan petugas surveillance KLB Pangan dalam penagulangan kasus- kasus KLB pangan	12 orang	12.690.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						80.000.000	-	90.000.000		
1 02 1 02 01 32 04	Audit maternal perenatal (AMP) dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal prenatal	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Ibu hamil dan neonatus resiko tinggi	Terlacaknya kasus resiko tinggi dan kematian pada ibu dan bayi di jorong	200 Kasus	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi	5%	50.000.000			Jorong	Jorong
1 02 1 02 01 32 05	Pelatihan puskesmas PONED	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dokter dan bidan	Terlaksananya pelatihan untuk tenaga kesehatan (dokter dan bidan) dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas poned	4 Puskesmas	Menurunnya AKI dan AKB	5%			90.000.000	Jakarta	Jakarta
1 02 1 02 01 32 06	Monitoring dan evaluasi program KIA	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pengelola KIA puskesmas	Monitoring dan evaluasi program KIA	12 Puskesmas	Tercapainya sasaran program yang ditargetkan	1 Tahun	30.000.000			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 1 02 01 33	Program Pengembangan Data / Informasi Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						20.000.000	-	-		
1 02 1 02 01 33 01	Monitoring, Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Petugas SIK	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan SIK	10 orang	Peningkatan program&kegiat	100%	20.000.000			Dinas kesehatan & puskesmas	Dinas kesehatan & puskesmas
1 02 1 02 01 34	Program kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						318.320.000	-	110.000.000		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 01 34 01	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah (TK s.d SLTA)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Anak baru masuk sekolah	terlaksananya penjaringan anak baru masuk sekolah	350 sekolah	Diketahuinya status kesehatan anak baru masuk sekolah (TK s.d SLTA)	100%	133.750.000		75.000.000	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
1 02 1 02 01 34 02	Pembinaan sekolah sehat & kader kesehatan di sekolah (dokter kecil, KKR & kader kesehatan lainnya)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Dokter kecil, KKR, kader kesehatan, TK sampai dengan SLTA	terlaksananya pembinaan sekolah sehat & terbentuknya kader kesehatan disekolah	280 sekolah	Diketahuinya jumlah sekolah sehat & jumlah sekolah yang mempunyai kader kesehatan	80%	105.570.000		-	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
1 02 1 02 01 34 03	Pembentukan & Pembinaan Sekolah PKPR & Peer Konselor (Konselor Sebaya) dan Puskesmas PKPR	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peer konselor ( Konselor remaja )	terlaksananya pembentukan & pembinaan puskesmas & sekolah PKPR serta Peer Konselor	10 puskesmas, 20 sekolah	Diketahuinya jumlah puskesmas mampu PKPR serta jumlah Peer Konselor yang menjalankan program PKPR	75%	79.000.000		35.000.000	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
0 00 1 02 01 07	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat</b>							<b>935.000.000</b>	-	-		
0 00 1 02 01 07 01	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Dareh		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	40.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 02	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sialang		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	40.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 03	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Silago		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	75.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 04	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sitiung I		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	75.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 05	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Gunung Medan		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	40.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 06	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Timpeh		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	75.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 07	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Padang Laweh		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	75.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 08	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Koto Baru		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	75.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 09	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sitiung II		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	40.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 10	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Rumbai		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	100.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 11	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Koto Besar		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	40.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 12	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Sungai Limau		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional puskesmas	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	80.000.000			Puskesmas	Puskesmas
0 00 1 02 01 07 13	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Labkesda		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional Labkesda	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	100.000.000			Puskesmas	Puskesmas

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
0 00 1 02 01 07 14	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Instalansi Gudang Farmasi		Peningkatan pelayanan publik	Lancarnya operasional Instalasi gudang farmasi	1 Tahun	Peningkatan pelayanan publik	50%	80.000.000			Puskesmas	Puskesmas
				JUMLAH				31.715.301.011	-	865.000.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.02.02 RSUD

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							4.824.800.000	-	-		
0 00 1 02 02 02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur							2.270.000.000	-	-		
0 00 1 02 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							71.400.000	-	-	RSUD	RSUD
0 00 1 02 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							149.545.000	-	-	RSUD	RSUD
1 02	BIDANG KESEHATAN							12.121.020.000	-	150.000.000.000		
1 02 1 02 02 19	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						15.570.000	-	-		
1 02 1 02 02 19 01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat		Pasien beserta keluarga	Terlaksananya promosi dan informasi sadar hidup sehat	12 bulan	Meningkatnya pengetahuan pengunjung rumah sakit	40%	15.570.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						150.000.000	-	-		
1 02 1 02 02 24 11	Pelayanan Rujukan Pasien Miskin dan Tidak Mampu		Pasien miskin dan tidak mampu	Terlaksananya pelayanan rujukan pasien miskin dan tidak mampu	200 kali	Terlayaninya pelayanan rujukan pasien miskin dan tidak mampu	100%	150.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						9.745.450.000	-	150.000.000.000		
1 02 1 02 02 26 01	Pembangunan Rumah Sakit (lanjutan)		Gedung baru RSUD							150.000.000.000	RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 01	Pembangunan Lanscap dan askap Rumah Sakit baru		Gedung baru RSUD	Terlaksananya Pembangunan Gedung RSUD yang baru	1 Paket	Lancarnya akses pelayanan kesehatan di RSUD sungai dareh	100%	5.000.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		Alat-alat kesehatan RSUD	Terlaksananya pengadaan bahan habis pakai dan alat-alat kedokteran rumah sakit	1 paket	Tersedianya alat kesehatan rumah sakit	100%	1.000.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 19	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit		Obat-obatan RSUD	Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan bahan laboratorium	12 bulan	Terlayaninya kebutuhan obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium pasien rumah	100%	2.500.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 20	Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah		Ambulance	Terlaksananya pelayanan ambulan	1 Paket	Terlayaninya pasien rujukan RSUD Sungai Dareh	100%	300.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 21	Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit (Hospital Furniture )		Mobiler RSUD	Terlaksananya pengarsipan dokumen	1 paket	Terlayaninya pengarsipan dokumen RSUD Sungai Dareh	100%	100.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 26 23	Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit (Makan & Minum Pasien)		Pasien yang dirawat di RSUD	Tersedianya makanan dan minuman pasien rawat inap rumah sakit	12 bulan	Terlayaninya pemenuhan kebutuhan makan dan minum pasien rawat inap	100%	845.450.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 27	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						110.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 02 1 02 02 27 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		Alat-alat kesehatan RSUD	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat kesehatan	12 bulan	Tersedianya alat kesehatan yang layak pakai dan aman digunakan	100%	110.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						600.000.000	-	-		
1 02 1 02 02 28 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan		Dokter Spesialis	Tersedianya tenaga dokter spesialis untuk pelayanan pengobatan lanjutan	3 orang	Terlayannya pengobatan lanjutan pasien rujukan	100%	600.000.000			RSUD	RSUD
1 02 1 02 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						1.500.000.000	-	-		
1 02 1 02 02 16 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan		Limbah rumah sakit	Terlaksananya pengelolaan lingkungan rumahsakit	1 paket	Terjaminnya lingkungan rumah sakit yang sehat	100%	1.500.000.000			RSUD	RSUD
				JUMLAH				19.436.765.000	0	150.000.000.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							1.964.395.438				
0 00 1 03 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							61.643.216.000	-	-		
0 00 1 03 02 02 01	Pembangunan Rumah Jabatan		Gedung kantor dan rumah dinas	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	1 Pkt	Pembangunan rumah jabatan/dinas	34%	5.250.000.000	-	-	Pulau Punjung	
	Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Bupati			Tersedianya Rumah Dinas Bupati	1 Paket			4.750.000.000			Pulau Punjung	
	Rehab Rumah Dinas Camat Pulau Punjung			Tersedianya Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	12x12 m			500.000.000			Tb. Tinggi	
0 00 1 03 02 02 03	Pembangunan Gedung Kantor		Gedung kantor dan rumah dinas	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan		Lancarnya Kegiatan Perkantoran		56.260.000.000	-	-		
	Lanjutan Pembangunan Sport Centre			Tersedianya Sarana Pendukung Olah Raga yang Representatif	1 paket			30.800.000.000			Kec. Koto Baru	
	Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD Kab. Dharmasraya			Tersedianya Gedung Kantor DPRD	1 Paket			25.300.000.000			Kec. Pulau Punjung	
	Rehab Kantor Camat Koto Baru			Tersedianya Kantor Camat Yang Memadai	100 m2			100.000.000			Ktr. Koto Baru	
	Paving blok Kantor Camat Sitiung				1 Paket			60.000.000			Ktr. Camat Sitiung	
0 00 1 03 02 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Meningkatnya operasional kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	1 Paket	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		133.216.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur		Meningkatnya sumber daya aparatur	Terlaksananya pelatihan formal	1 paket	Pendidikan pelatihan formal	40%	50.000.000				
1 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM							167.701.980.732	39.008.980.650	386.626.847.000		
1 03 1 03 02 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							135.124.969.200	35.600.000.000	319.425.000.000		
1 03 1 03 02 15 03	Pembangunan Jalan		Jaringan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan	77 Ruas	Lancarnya Transportasi	60%	113.844.969.200	25.600.000.000	188.450.000.000		
	Jalan Lingkar Koto Salak - Lubuk Harto			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km	Antar Daerah		3.600.000.000			Koto Salak	
	Jalan Blok E - Sipangkur			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2,5 km			3.000.000.000			Koto Baru	
	Jalan Tiumang - Sipangkur - Sungai Langkok -			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			6.000.000.000			Tiumang	
	Jalan Pulai Mainan - Batas Jambi			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	4 km			4.800.000.000			Koto Salak	

NO REKENING								PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
											URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
								Hotmix Jalan Desa Ke Lubuk Harto			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			777.469.200			Koto Salak	
								Hotmix Jalan Padang Bintungan - Koto Agung Blok B Sitiung I			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1,5 km			2.400.000.000			Sitiung	
								Jalan Sinamar - Sungai Limau			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.400.000.000			Asam Jujuhan	
								Pembangunan jalan masuk kantor			Tersedianya Jalan Kabupaten	0,2 km			400.000.000,00			Pulau Punjung	
								Periodik jalan Pulau Mainan - Batas Jambi			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			4.000.000.000,00			Koto Salak	
								Aur Jaya - Ampang Kuranji			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			750.000.000,00			Koto besar	
								Periodik Simpang Lintas - Koto Padang			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1,3 km			1.040.000.000,00			Koto Baru	
								Periodik Pulai - Simpang Tabek			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	4,2 km			4.200.000.000,00			Sitiung	
								Pengkerekelan Ampang Kuranji - Rimbo Kopung			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			750.000.000,00			Koto baru	
								Simpang Polsek Sei. Dareh - Batas Solok Selatan			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			5.000.000.000,00		5.000.000.000	Pulau Punjung	
								Simpang Microwave - Sei. Duo			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.400.000.000,00			Sitiung	
								Sungai Langkok - Lagan Jaya			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	4 km			4.000.000.000,00			Tiumang	
								Hotmix lingkak Blok D - Padang Bintungan			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.400.000.000,00			Koto Baru	
								Jalan Simpang Lintas - Sitiung V Blok C			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km					5.000.000.000	Koto Baru	
								Jalan Sungai Rumbai - Blok A' Sitiung III			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km					2.000.000.000	Sungai Rumbai	
								Jalan Sungai Limau - Batu Kangkung			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km			6.000.000.000			Asam Jujuhan	
								Banai - Padang Hilalang			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	8 km					8.000.000.000	IX Koto	
								Silago - Banai			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.000.000.000			IX Koto	
								Jalan Sitiung - Pulai			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km					2.000.000.000	Sitiung	
								Lanjutan Simpang Tabek - Pinang Makmur			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km					3.000.000.000	Timpeh	
								Lanjutan Simpang Tabek - Padang Laweh			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km					6.000.000.000	Padang Laweh	
								Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km					5.000.000.000	Asam Jujuhan	
								Simpang Tabek - Padang Laweh			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km					6.000.000.000	Padang Laweh	
								Sungai Rumbai - Telaga Biru			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km			4.000.000.000		6.000.000.000	Sungai Rumbai	
								Lanjutan Blok A Sit IV - Blok C Sit IV - Lubuk Karya			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 km					6.000.000.000	Koto Besar	
								Sungai Rumbai - Blok A ( Aksen ) Sitiung III			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km					2.400.000.000	Sungai Rumbai	
								Hotmix Jalan Simp. Timpeh II (SP3) - Timpeh III (SP2) (Marga Jaya)			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.000.000.000			Timpeh	
								Jalan SP I - SP II - SP III			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1 km					1.200.000.000	Timpeh	



NO REKENING							PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
										URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
							Pulau Mainan - Blok C			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 km					3.600.000.000	Koto Salak	
							Simp. Blok C - Simp. Tiumang			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km					2.000.000.000	Tiumang	
							Sei. Rumbai - Blok D			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	4 km					4.000.000.000	Sungai Rumbai	
							Peningkatan Struktur Jalan Sei Dareh - Junction (Koto Baru)			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	10 Km					30.000.000.000		
							Pelebaran Jalan Junction (Koto Baru) - Batas Provinsi Jambi N.017			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	15 Km					45.000.000.000		
							Pembangunan Jalan Simpang Talao - Teluk Air Putih Abai Siat			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	20 Km					42.500.000.000	Abai Siat	
							Hotmix Ruas Jalan Sei. Langkok - Tiumang			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	7,3 Km				8.500.000.000		Sei. Langkok, Sipangkur - Tiumang	
							Hotmix Ruas Jln. Lagan Jaya Sp I - Banjar Makmur - Bukit Harapan - Harapan Mulya			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3,7 Km				4.400.000.000		Lagan Jaya, Banjar Makmur, Bukit Harapan dan harapan Mulya	
							Hotmix Ruas Jalan Sipangkur ke - SD I			Tersedianya Jalan Kabupaten	2,7 Km				3.400.000.000		Sipangkur, Sei. Kalang	
							Hotmix Ruas Jalan Sei. Langkok Karya			Tersedianya Jalan Kabupaten	3 Km				3.000.000.000		Sei. Langkok, Karya	
							Pengaspalan Jalan Kantor Camat - SMA, Nagari Silago			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1,5 Km			1.837.500.000			Kantor Camat - SMA, Nagari Silago	
							Lanjutan Pengaspalan Jalan Ampang Kuranji - Siraho			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	7 Km			8.575.000.000			Ampang Kuranji - Sei Kapur, Nag. Lb. Karak	
							Pembukaan + Perkerasan Jalan Mudik Lalo, Jorong Koto Baru, Nag. Koto Nan IV Dibawuah			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	5 Km			1.125.000.000			Mudik Lalo, Jorong Koto Baru, Nag. Koto Nan IV Dibawuah	
							Pengaspalan Jalan Ampalu - Padukuan			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km		Prioritas janji Bupati Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	2.000.000.000			Koto Salak	
							Pembangunan Jalan Kantor Camat Koto Salak			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 Km		Prioritas Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	2.400.000.000			Koto Salak	
							Hotmit Pelebaran Jalan Propinsi Pasar Baru Ampalu			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1 km				4.000.000.000		Koto Salak	
							Pengerasan Jalan Jr.Jati Salam Nag.Pl.Mainan			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3 Km		Prioritas Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	500.000.000			Koto Salak	
							Aspal hotmix dari blok B - blok C - Koto Besar Nagari Koto Tinggi			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	4 Km			4.000.000.000			Nagari Koto Tinggi, kec. Koto Besar	
							Pengaspalan jalan Poros II Nagari Koto Ranah			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1,5 Km			1.600.000.000			Nagari Koto Tinggi, kec. Koto Besar	
							Lanjutan hotmix jalan Lingkar Nagari Koto Laweh			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	2 km			2.000.000.000			Nagari Koto Laweh, kec.Koto Besar	
							Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari Bonjol			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	1 km			1.000.000.000			Nagari Bonjol, kec. Koto Besar	
							Aspal Hotmix Dari Belakang Kantor Camat Menuju Pasar Sungai Rumbai Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	500 M			500.000.000			Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai	
							Pengaspalan Jalan Kampung Baru ke Bukit Berbunga			Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	3200 M			3.200.000.000			Sungai Rumbai	



NO REKENING							PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
1	03	1	03	02	15	05				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	03	1	03	02	15	05	Pembangunan Jembatan		Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	20 Paket	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisoliran	45%	21.280.000.000	10.000.000.000	130.975.000.000		
							Pembangunan Jembatan di Jrg Bumi Raya, Jrg Kayu Aro Sopan Jaya			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	9 M					1.000.000.000	Sopan Jaya	
							Jembatan Sungai Pupuk			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			400.000.000			Timpeh	
							Jembatan Sungai Tore			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			400.000.000			Timpeh	
							Jembatan Sungai Busuk			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			400.000.000			Timpeh	
							Jembatan Sungai Bulian			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			430.000.000			Timpeh	
							Pembangunan Jalan Sungai Betung (Junction - Batas Jambi) Bentangan 30 M			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	30 M					20.000.000.000	Sungai Rumbai	
							Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur (Jorong Siguntur II) Menuju Candi Pulau Sawah			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	150 M			800.000.000			Sitiung	
							Jembatan Koto Padang (Rangka Baja, type B), 40 m			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			6.000.000.000			Koto Baru	
							Jembatan Koto Salak - Simpang Abai, 60 m			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 pkt			5.000.000.000			Koto Salak	
							Paket Pembangunan Jembatan Batu Rijal (Tahun Jamak)			Tersedianya Jembatan Yang Memadai					10.000.000.000			
							Jembatan Sei. Dareh (N.015)			Tersedianya Jembatan Yang Memadai						46.475.000.000	Pulau Punjung	
							Jembatan Tanjung Alam Sungai Limau (Rangka Baja, type C), 60 m			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	60 M			2.000.000.000		3.500.000.000	Asam Jujuhan	
							Pembangunan Jembatan Pulau, 220 m			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	220 M					40.000.000.000	Sitiung	
							Rehab jembatan Batang Mimpi			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	30 m			200.000.000			Sikabau	
							Rehab Jembatan Gantung Jorong Lubuk Karak, Nag. Lubuk Karak			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 Unit			300.000.000			Jorong Lubuk Karak, Nag. Lubuk Karak	
							Perbaikan Jembatan Penghubung Jr. Kampung Harapan ke Tanjung Harapan Nag.Simalidu			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 unit		Prioritas Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	150.000.000			Koto Salak	
							Pemb.Jembatan Jalan Produksi Nagari Pulau Mainan (7 M)			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	7 M		Prioritas Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	700.000.000			Koto Salak	
							Pemb. Jembatan Koto Salak			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	6 M		Prioritas Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	600.000.000			Koto Salak	
							Pembangunan Jembatan Semi Permanen Batang Timpeh Trimulya III Nagari Panyubarangan			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	1 Unit			1.000.000.000			Trimulya III Nagari Panyubarangan, Timpeh	
							Pemb. Jembatan Pulau Mainan			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	9 M			900.000.000				
							Pembangunan Jembatan Kuning Tabek Maju - Tabek Jaya			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	25 M			2.000.000.000			Tabek Jaya Timpeh	

NO REKENING								PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
											URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
								Pembangunan Jalan Sungai Betung (Junction - Batas Jambi) Bentangan 30 M			Tersedianya Jembatan Yang Memadai	30 M					20.000.000.000	Sungai Rumbai	
1	03	1	03	02	16			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong							4.675.000.000	258.980.650	-		
1	03	1	03	02	16	03		Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		Kawasan permukiman dan pasar	Terlaksananya pembangunan saluran drainase	14 Pkt	Berkurangnya daerah yang digenangi air	40%	4.675.000.000	258.980.650	-		
								Drainase Pasar Sopan Jaya			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Paket				8.980.650		Padang Laweh	
								Drainase Jalan Nagari Pulau Mainan			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	200 M		Prioritas janji Bupati Dirangkum dalam Renja SKPD PU'	100.000.000			Koto Salak	
								Drainase Perumnas Sikabau			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Paket			100.000.000			Sikabau	
								Drainase Jorong Sei. Kambuik II			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Paket			200.000.000			Sei. Kambuik	
								Draeinase Jalan Labuah Luruih			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Paket			400.000.000			Sei. Kambuik	
								Pembangunan Drainase Jorong Balai Tengah Nagari Sungai Rumbai			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	900 M			175.000.000			Nag Sungai Rumbai Timur, kec.Sungai Rumbai	
								Drainase Jorong Koto Agung Kiri			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1.2 Km			300.000.000			Jr. Koto Agung Kiri, kec.Sitiung	
								Drainase jalan Jorong Siguntur II			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	600 M			200.000.000			Jr. Siguntur II, kec. Sitiung	
								Pembangunan Drainase Jorong Piruko Selatan			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	4 Km			650.000.000			Jr. Piruko Selatan, kec. Sitiung	
								Pembangunan Drainese Tabek Jaya Nagari Tabek			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	4 KM			1.200.000.000			Tabek Jaya Nagari Tabek, Timpeh	
								Drainase Jalan Utama Tiumang (Jorong Tiumang)			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Km				250.000.000		Jorong Tiumang	
								Pembangunan Drainase (Jorong Koto Beringin I dan II)			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	2 Km			600.000.000			Jorong Koto Beringin I dan II	
								Drainase Lingkungan Kantor Wali Nagari Gunung Selasih			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	300 M			250.000.000			Gunung Selasih Pulau Punjung	
								Drainase Jorong Pulau Punjung			Tersedianya Saluran Pembuangan di daerah permukiman	1 Paket			500.000.000			IV Koto Pulau Punjung	
1	03	1	03	02	24			Program Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya							10.276.709.032	2.150.000.000	42.357.000.000		

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 03 1 03 02 24 01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		Jaringan irigasi	Tersedianya sarana irigasi yang optimal	1 Paket	Menguatnya fungsi jaringan irigasi	100%	-	-	500.000.000		
	Studi Penyusunan Manual OP DI Batang Hari				1 Paket					500.000.000		
1 03 1 03 02 24 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Jaringan Irigasi yang rusak	Tersedianya sarana irigasi yang optimal	27 pkt	Menguatnya fungsi jaringan irigasi	60%	2.676.709.032	-	14.805.000.000		
	DI. Batang Timpeh Usau			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	135 Ha			150.000.000			Beringin Sakti, Timpeh	
	DI. Sungai Ngalau			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	20 Ha			150.000.000			Timpeh	
	DI. Sijawi - Jawi			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	40 Ha			180.000.000			Siguntur, Sitiung	
	DI. Sungai Lamak			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	83 Ha			160.000.000			Lbk. Bulang, Pulau Punjung	
	DI.Bugah Kecil			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	35 Ha			150.000.000			Banai, IX Koto	
	DI. Batang Rambah			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	35 Ha			150.000.000			Lbk. Karak, IX Koto	
	DI. Mudik Lago			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	25 Ha			150.000.000			Banai, IX Koto	
	DI. Ampang Ranah			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	15 Ha			150.000.000			Pulau Punjung	
	DI. Lubuk Paraku			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	30 Ha			150.000.000			Lbk. Karak, IX Koto	
	DI. Mudik Banai			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	10 Ha			150.000.000			Banai, IX Koto	
	DI. Suka Tani			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	15 Ha			150.000.000			Sialang Gaung, Koto Baru	
	DI. Tabek Godang			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	15 Ha			150.000.000			Silago, IX Koto	
	DI. Batang Tinjau			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	7 Ha			150.000.000			Silago, IX Koto	
	DI. Sei. Koto Tuo			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	20 Ha			250.000.000			Koto Tuo, Sitiung	
	DI. Labuah Luruiah			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	25 Ha			150.000.000			Sungai Kambut, Pl. Punjung	
	DI.Sungai Bungin			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	25 Ha			200.000.000			Koto Gadang, Koto Besar	
	DI. Batang Lagan Koto Baru Kec. IX Koto			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	11 Ha			41.484.887			Koto Baru, IX Koto	
	DI. Timbulun Buyieh (46.7 Ha) Banai			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	18 Ha			45.224.145			Banai, IX Koto	
	Calau Sawah Tabek			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	60 Ha					250.000.000,00	Sei. Kambut, Pulau Punjung	
	DI. Sei Ambau			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	10 Ha					140.000.000,00	Timpeh	
	Ranah Bayan			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	20 Ha					140.000.000,00	Pl. Punjung, Pl. Punjung	
	DI. Sei. Kamang			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	44 Ha					140.000.000,00	Sei. Kilang, Pl. Punjung	
	DI. Amal bhakti			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	13 Ha					140.000.000,00	Sungai Rumbai	
	Batang Mimpi			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	80 Ha					250.000.000,00	Pulau Punjung	
	OP Bendung DI Batang Hari			Tersedianya Sarana Irigasi yang optimal	1 Pkt					275.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	Pembangunan Trotoar Depan Kantor Bupati			Tersedianya Trotoar Tempat Pejalan Kaki	1 Pkt			500.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Trotoar Depan SD 13 Pulau Punjung			Tersedianya Trotoar Tempat Pejalan Kaki	1 Pkt			500.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Trotoar Depan Komplek Rumah Makan Umega			Tersedianya Trotoar Tempat Pejalan Kaki	1 Pkt			500.000.000			Sitiung	
	Pembangunan Taman											
	Pembangunan Taman Segi Tiga Km.4 Pulau Punjung			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			250.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Taman Segi Tiga Simpang Tesco Pulau Punjung			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			200.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Taman Segi Tiga Sungai Dareh			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			200.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Taman Segi Tiga Sikabau			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			200.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan Taman Kab. Dharmasraya			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			300.000.000				
	Pembangunan Taman Simpang Empat Belas Sialang Gaung			Tersedianya taman untuk persimpangan	1 Pkt			250.000.000			Koto Baru	
1 03 1 03 02 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan							5.045.302.500	-	44.847.000		
1 03 1 03 02 30 02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		Kawasan permukiman perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang memadai	24 pkt	Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan	55%	5.045.302.500	-	44.847.000		
	Pengerasan Jalan Padang Candi			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket			66.503.000			Pulau Punjung	
	Pembukaan Jalan Ranah Baru Rimbo Kebung (P3RSD) 2,5 Km			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket			9.537.000			Koto Baru	
	Pembangunan Drainase di Lokasi Belakang RSUD Sei. Dareh Pulau Punjung			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 paket			67.801.000			Pulau Punjung	
	Rigid Beton Blok B di BKN II			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket			4.879.300				
	Rigid Beton Permukiman Penduduk Sitiung			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket			25.856.000			Sitiung	
	Rigid Beton Lanjutan Jorong Koto Agung Kiri			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket			5.726.200				
	Rigid Beton Pemukiman Penduduk Jorong Lubuk Beringin			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Paket					44.847.000		
	Jalan Rigid Beton Ampang Kualo - Bukit Durian Kubangan, Nag. Silago			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	2 Km			260.000.000			Ampang Kualo - Bukit Durian Kubangan, Nag. Silago, IX Koto	
	Jalan Rigid Beton Mudik Banai, Jorong Banai, Nag. Banai			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 Km			135.000.000			Mudik Banai, Jorong Banai, Nag. Banai, IX Koto	
	Rigid Beton Jalan Lingkar Tepi Koto Mudik Nagari Kurnia Selatan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1500 M			200.000.000			Nagari Kurnia Selatan, kec. Sungai Rumbai	



NO REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	Rigid Beton Jalan A. Razak Jorong Balai Tengah Nagari Sungai Rumbai			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	200 M			100.000.000			Nagari Sungai Rumbai Timur, kec. Sungai Rumbai	
	Rigid Beton Jalan Ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nagari Sungai Rumbai			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	2000 M			175.000.000			Nagari Sungai Rumbai, kec. Sungai Rumabi	
	Regid Beton jalan poros II Nagari Koto Tinggi			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1 paket			250.000.000			Nagari Koto Tinggi, kec. Koto Besar	
	Rigid Beton Jalan Lingkar Menuju Canti Pulau Sawah			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	2 Km			1.200.000.000			Sitiung	
	Rigid Beton dan Paving Blok Jalan Depan Kantor Camat Sitiung			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	300 M			75.000.000			Ktr. Camat Sitiung	
	Pengerasan jalan lingkak jorong (gorong 2) Jorong Bungo Tanjung			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	1.005 M			110.000.000			Jr. Bungo Tanjung, Sitiung	
	Jalan lingkak tabek patah Jorong Koto Tuo			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	600 M			600.000.000			Jr. Koto Tuo, Sitiung	
	Pelebaran jalan lapangan bola kaki Jorong Sitiung			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	500 M			300.000.000			Jr. Sitiung, Sitiung	
	Regid Beton Jalan Taratak (Jorong Koto Beringin II)			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	2 Km			1.000.000.000			Jorong Koto Beringin II	
	Pembangunan Rigit Beton ke TSM Koto Tengah Nagari Timpeh			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	600 M			100.000.000			Koto Tengah Nagari Timpeh, Timpeh	
	Pembangunan Rigit Beton + gorong-gorong + Drainase Sungai Bulian Nagari Timpeh			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	700 M			120.000.000			Sungai Bulian Nagari Timpeh, Timpeh	
	Pembangunan Rigit Beton Pasar-TK Trimulya II nagari Panyubarangan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	250 M			40.000.000			Trimulya II nagari Panyubarangan, Timpeh	
	Pembangunan Rigit Beton Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	100 M			50.000.000				
	Rigid Beton Jalan Kantor Wali Nagari Sopan Jaya			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan yang memadai	150 M			150.000.000			Sopan Jaya Padang Laweh	
1 04	BIDANG PERUMAHAN							1.100.000.000	-	4.000.000.000		
1 04 1 03 02 15	Program Pengembangan Perumahan		Infrastruktur Pengembbangan perumahan	Terlaksananya pembangunan perumahan	1 Dok	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan yang memadai	100%	1.100.000.000	-	4.000.000.000		
1 04 1 03 02 15 10	Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman							400.000.000		4.000.000.000		
	SPPIP Kab. Dharmasraya			Tersedianya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	1 Dok			400.000.000		4.000.000.000		
1 03 1 03 02 15 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat							700.000.000	-	2.500.000.000		

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPDTAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	Kawasan Kumuh Pulau Punjung		Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Kawasan Permukiman Kumuh)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	3 Pkt			500.000.000		500.000.000	Pulau Punjung	
	Perumahan Kawasan Sitiung		Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan (Permukiman RSH yang Meningkatkan Kualitas)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	2 Pkt			100.000.000		1.000.000.000	Sitiung	
	Kawasan Padang Laweh		Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial Yang Meningkatkan Kualitasnya)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	7 pkt	Tersedianya sarana dan prasarana	100%	100.000.000		1.000.000.000	Padang Laweh	
1 08	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							4.149.000.000	-	2.100.000.000		
1 08 1 03 02 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							1.399.000.000	-	2.100.000.000		
1 08 1 03 02 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Kawasan Permukiman dan pasar	Terlaksananya Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA	19 unit	Terkelolanya Timbunan Persampahan	70%	1.399.000.000	-	2.100.000.000		
	Lanjutan Pembangunan Pagar TPA Sitiung V Ragusa			Tersedianya Pagar Pengaman TPA	1 Pkt			200.000.000				
	Pengadaan Travo + Instalasi Listrik TPA Sitiung V Ragusa			Tersedianya jaringan listrik yang memadai	1 Pkt			45.000.000			Koto Besar	
	Pengadaan dan pemasangan pompa Bom/ Dump mobil Amroll Truck serta pemeliharaan			Terpeliharanya mobil Amrol Truck	1 Pkt			25.000.000			Koto Besar	
	Rehab/ perbaikan container sampah			Terpeliharanya Container Sampah	8 Unit			64.000.000				
	Pengadaan Becak Motor (Bentor)			Tersedinaya Bentor untuk penanganan sampah	3 Unit			90.000.000				
	Pembangunan cor beton kedudukan landasan container			Tersedianya tempat kedudukan container sampah	8 Unit			150.000.000				
	Penyusunan masterplan persampahan Kab. Dharmasraya			Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	1 Dok			750.000.000				
	Penyusunan UKL/UPL TPA sampah Sitiung V Ragusa				1 Dok			75.000.000				
	Pembangunan prasarana dan sarana terpadu 3R			Terkelolanya sampah dengan baik	1 Pkt					300.000.000		
	Bantek program sampah terpadu 3R			Terkelolanya sampah dengan baik	1 Pkt					100.000.000		
	Pengadaan Excavator			Tersedianya Prasarana dan Sarana untuk Penanganan Sampah	1 Unit					1.700.000.000		
1 08 1 03 02 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							2.750.000.000	-	-		
1 08 1 03 02 24 05	Penataan RTH		Tersebar di beberapa kecamatan	Penyediaan RTH Yang Memadai	1 paket	Terlaksananya Penataan RTH	100%	2.750.000.000	-	-		
	Pengadaan Mobil Tangki penyiram taman			Tersedianya Sarana dan Prasarana pemeliharaan taman	1 Unit			250.000.000				
	Pembangunan RTH Kawasan Simpang Silago Kec. Pulau Punjung			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 Paket			1.500.000.000			Pulau Punjung	

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	Pembangunan RTH Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 Paket			500.000.000			Pulau Punjung	
	Pembangunan RTH Kawasan Simpang 14 Kec. Koto Baru			Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 Paket			500.000.000			Koto Baru	
					JUMLAH			236.608.592.170	39.008.980.650	392.726.847.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							603.569.500				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							71.784.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur							50.100.000				
1 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM							40.000.000	-	-		
1 03 1 06 01 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							40.000.000	-	-		
1 03 1 06 01 25 05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air			Koordinasi TKK PAMSIMAS		Pelaksanaan Program PAMSIMAS		40.000.000				
1 04	BIDANG PERUMAHAN							60.000.000	-	-		
1 04 1 06 01 15	Program Pengembangan Perumahan							60.000.000	-	-		
1 04 1 06 01 15 06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu			Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Data serta Informasi Penanganan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		Berkurangnya jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2209 unit		60.000.000				
1 05	BIDANG PENATAAN RUANG							1.225.000.000	-	-		
1 05 1 06 01 15	Program Perencanaan Tata Ruang							1.200.000.000	-	-		
1 05 1 06 01 15 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan			Dokumen RDTR Kawasan Koto Baru dan Koridor Sikabau Gunung Medan dengan Peta Skala 1:5.000		2 Dokumen RDTR		800.000.000				
1 05 1 06 01 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			Dokumen RTBL Kawasan Pulau Punjung dengan Peta Skala 1:1.000		1 Dokumen RTBL		400.000.000				
1 05 1 06 01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							25.000.000	-	-		
1 05 1 06 01 17 06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota			Koordinasi pengendalian dan pemanfaatan Ruang		Koordinasi Tim BKPRD		25.000.000				
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN							1.762.990.500	-	-		
1 06 1 06 01 15	Program Pengembangan Data/ Informasi							486.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 06 1 06 01 15 06	Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan			Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, Penyusunan Rencana Strategis Kemiskinan, Penyusunan dan Evaluasi Buku Milenium Development Goals (MDGs)		Dokumen IPM, Dokumen Renstra Kemiskinan, Dokumen Evaluasi MDGs		236.000.000				
1 06 1 06 01 15 07	Bimbingan Teknis Perencanaan			pelatihan penyusunan indikator kinerja RPJMD, dan renstra SKPD	3 paket	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	80%	250.000.000				
1 06 1 06 01 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar							216.990.500	-	-		
1 06 1 06 01 19 09	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Buku Putih 1 dokumen dan Buku Strategi Sanitasi Perkotaan 1 Dokumen		Meningkatnya ketersediaan informasi dan data pembangunan sanitasi pemukiman 76%		216.990.500				
1 06 1 06 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							550.000.000	-	-		
1 06 1 06 01 21 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik			Review Rencana Progran Invetasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan		Dokumen Review RPIJM dan Dokumen Memorandum Program		80.000.000				
1 06 1 06 01 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD			Dokumen RKPD Tahun 2014		Draf RKPD Tahun 2014		90.000.000				
1 06 1 06 01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD		Rekapitulasi Program dan Kegiatan		120.000.000				
1 06 1 06 01 21 10	Penetapan RKPD			Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah		Dokumen RKPD		10.000.000				
1 06 1 06 01 21 13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			Studi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan daerah		mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan daerah		250.000.000				
1 06 1 06 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							360.000.000	-	-		
1 06 1 06 01 22 01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan sektor pertanian		Acuan dalam pembangunan sektor pertanian		225.000.000				
1 06 1 06 01 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi			Pengendalian dan Monitoring kegiatan APBD II, APBD I, APBN & CSR		Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi		50.000.000				
1 06 1 06 01 22 09	Penyusunan Profil Ekonomi Daerah			Gambaran Perekonomian Daerah serta Wadah Informasi Ekonomi		Data penunjang dalam perencanaan bidang ekonomi		85.000.000				
1 06 1 06 01 23	Program Perencanaan Sosial Budaya							150.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 06 1 06 01 23 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Koordinasi Percepatan Pencapaian Milenium Developmnet Goals (MDGs), Koordinasi Percepatan Ketertinggalan Daerah		Sinkronisasi program dan kegiatan lingkup sosial budaya		150.000.000				
1 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							750.000.000	-	-		
1 20 1 06 01 18	Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah							750.000.000	-	-		
1 20 1 06 01 18 04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota			Kajian tentang pelaksanaan perencanaan dengan penggaran pembangunan daerah		Dokumen Hasil Kajian tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		250.000.000				
1 20 1 06 01 18 06	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah			Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 2013 serta KUA & PPAS 2014		Dokumen KUA & PPAS		500.000.000				
1 23	BIDANG STATISTIK							385.000.000	-	-		
1 23 1 06 01 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah							385.000.000	-	-		
1 23 1 06 01 15 01	Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah			Penyusunan Buku Dharmasraya Dalam Angka, dan Buku PDRB		Buku DDA dan PDRB		135.000.000				
1 23 1 06 01 15 02	Penyusunan tabel input/output			Penyusunan buku input/output daerah	1 paket	buku input/output		250.000.000				
				JUMLAH				4.948.444.000	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.24. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							573.231.800				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							59.272.000				
0 00 1 20 24 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							641.250.000	0	0		
0 00 1 20 24 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Penyediaan Pakaian Dinas bagi PNSD dan Tenaga Honoror	Tersediannya Pakaian dinas PNS dan Honoror	1 Paket	Meningkatnya disiplin aparatur	80%	641.250.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							5.818.364.026	0	0		
1 20 1 20 24 28	Program Pendidikan Kedinasan							100.000.000	0	0		
1 20 1 20 24 28 01	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS BKD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terkirimnya PNS BKD untuk mengikuti Diklat Tekhnis dan Fungsional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS BKD	1 tahun	Tersedianya aparatur yang terlatih	90%	100.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							2.117.500.000	0	0		
1 20 1 20 24 29 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggara Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi PNS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNSD	1 paket	Tersedianya CPNSD yang siap kerja	100%	1.600.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 29 03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi PNS Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terkirimnya PNS Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Diklat tekhnis sesuai dengan tugas dan fungsinya	Terlaksananya pengiriman PNS Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Diklat tekhnis sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 tahun	Tersedianya aparatur yang terlatih	90%	280.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 29 05	Diklat Pengelolaan asset daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	terlaksananya Diklat Pengelolaan asset bagi seluruh bendahara barang SKPD	terlaksananya Diklat Pengelolaan asset bagi seluruh bendahara barang SKPD	1 paket	Tersedianya bendahara barang yang terlatih	80%	78.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 29 06	Diklat Bendaharawan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Diklat Bendaharawan bagi bendahara SKPD	Terlaksananya Diklat Bendaharawan bagi bendahara SKPD	1 paket	Tersedianya Bendaharawan yang terlatih	80%	84.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 29 07	Diklat Pengadaan barang dan jasa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaksana pengadaan barang dan jasa SKPD	Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaksana pengadaan barang dan jasa SKPD	1 paket	Terlatihnya Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	80%	75.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							3.600.864.026	0	0		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 24 30 02	Seleksi Penerimaan CPNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS sesuai formasi	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS sesuai formasi	1 paket	Tersedianya CPNS tahun 2013	100%	370.310.176			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pengurusan kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	2 periode	Lancarnya proses pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS	100%	99.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 05	Pembangunan / pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sistem pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, peremajaan data PNS secara on Line	Terlaksananya sistem pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, peremajaan data PNS secara on Line	1 tahun	PNS Kabupaten Dharmasraya	80%	45.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersusunnya analisa jabatan dan beban kerja PNS	Terlaksananya penyusunan analisa jabatan dan beban kerja PNS	2 Paket	Tersedianya data analisa jabatan dan beban kerja PNS	100%	44.690.400			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terfasilitasnya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi penerima tanda jasa satya lencana karya satya / PNS yang berprestasi	1 paket	Tersedianya insentif/penghargaan bagi penerima tanda jasa satya lencana karya satya / PNS yang berprestasi	100%	40.325.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 09	Proses Penanganan Kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terprosesnya Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS	Tersedianya operasional penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1 paket	Tuntasnya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	18.930.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNSD yang mengikuti tugas belajar dan Ikatan dinas	Terlaksananya pengiriman PNS Peserta Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1 Paket	Lancarnya pengurusan ujian dinas dan ujian Penyesuaian ijazah	80%	165.810.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 12	Pemberian bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksannnya bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Tersedianya bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	1 Paket	lancarnya penerimaan Calon Praja IPDN	100%	38.951.950			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 17	Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Pensiun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Pensiun	Terlaksananya Pelayanan SKPP, Pengabdian dan SK Pensiun	1 tahun	Lancarnya pengurusan administrasi kepegawaian PNS	100%	46.475.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 18	Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen	Terlaksananya Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, Nip dan Taspen	1 tahun	Lancarnya Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu, KPE, NIP dan Taspen	100%	46.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 19	Pemberian uang bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pemberian uang bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya dana bantuan sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap	1 tahun	Meningkatnya motivasi kerja dan solidaritas aparaturnya	90%	1.435.250.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 20	Pelantikan dan Sumpah janji PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelantikan Pejabat Eselonering dan Sumpah janji CPNS menjadi PNS	Terlaksannnya Pelantikan dan Sumpah Janji PNS	10 Paket	Tersedianya PNS yang Loyal dalam bertugas	100%	65.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 24 30 21	Sosialisasi Peraturan Perundangan undangan kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang baru	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang baru	5 paket	Meningkatnya pengetahuan PNS	100%	75.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 22	Pelaksanaan Baperjakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya rapat - rapat baperjakat	Tersedianna Operasional baperjakat	1 tahun	Efektifnya pelaksanaan fungsi Baperjakat	80%	7.200.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 23	Evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpantaunya kinerja pejabat struktural dan fungsional	Terlaksananya pemantauan kinerja Pejabat struktural dan fungsional	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan evaluasi kinerja PNS	100%	40.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 24	Pelaksanaan pengiriman ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terfasilitasinya pengiriman Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Terlaksananya pengiriman PNS Peserta Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1 angkatan	LancarnyaPengurusan administrasi kepegawaian	90%	14.390.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 25	Penyusunan formasi CPNS tahun 2013	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Informasi kebutuhan PNS yang akurat pada seluruh SKPD	Tersedianya daftar susunan formasi CPNS tahun 2013	1 paket	Meningkatnya kesesuaian penerimaan CPNS dengan kebutuhan SKPD	100%	27.031.500			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 26	Diklat Kepemimpinan TK, II,III dan IV	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II dan III	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II dan III	1 paket	Pejabat Struktural Esselon II dan III	80%	974.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
			Terlaksananya Diklat PIM IV bagi Pejabat struktural SKPD	Terlaksananya Diklat PIM IV bagi Pejabat struktural SKPD	1 paket	Pejabat Struktural Esselon IV					Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 27	Orientasi Calon PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan orientasi dan pembekalan CPNS Daerah	Terlaksananya orientasi dan pembekalan CPNS Daerah	1 Paket	Meningkatnya wawasan pemerintahan Calon PNS Daerah	80%	29.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 24 30 28	Peremajaan data PNS	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data PNS yang update dan akurat	Terlaksanya peremajaan data PNS secara periodik	1 tahun	Data PNS Kabupaten Dharmasraya	80%	18.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
								7.092.117.826	0	0		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							774.721.800				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							133.740.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur							50.000.000				
0 00 1 20 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							46.145.000	-	-		
0 00 1 20 05 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Tersedianya laporan semester 2012	1 laporan	Tersusunnya laporan semesteran	1 laporan	22.550.000				
0 00 1 20 05 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			tersedianya laporan akhir tahun 2011	1 laporan	Tersusunnya laporan akhir tahun	1 laporan	23.595.000				
1 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							3.663.171.256				
1 20 1 20 05 17	Program Peningkatan dan Pegembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							3.663.171.256	-	-		
1 20 1 20 05 17 05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah			Tersedianya Dasar Hukum untuk Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Daerah	10 Jenis	Ditetapkannya Perda Retribusi Daerah	10 Jenis	60.000.000				
1 20 1 20 05 17 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2014			tersedianya dasar hukum pelaksanaan APBD 2013	1 perda	Tersusunnya perda APBD 2013	1 perda dan 1 Perbup	392.000.000				
1 20 1 20 05 17 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2013			Tersedianya dasar hukum pelaksanaan Perubahan APBD 2013	1 perda	Tersusunnya perda Perubahan APBD 2013	1 perda dan 1 Perbup	429.000.000				
1 20 1 20 05 17 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			tersedianya laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012	1 perda	Tersusunnya perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012	1 perda, 1 Perbup	348.000.000				
1 20 1 20 05 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Tersedianya peraturan KDH Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan KDH Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	32.700.000				
1 20 1 20 05 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah			Peningkatan sumber retribusi daerah	10%	Peningkatan pencampaian retribusi Daerah	5%	84.000.000				
1 20 1 20 05 17 21	Penyusunan Peraturan Perundangan Pajak Daerah			Tersedianya Dasar hukum pengelolaan PBB dan Pajak Daerah	1 perda dan 4 Perbup	tersusunnya Perda PBB dan Perbup	1 Perda dan 4 Perbup	90.695.000				
1 20 1 20 05 17 22	Operasinalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Beroperasionalnya sistem informasi Pengelolaan Keuangan pada SKPD	20 SKPD	Terlakaananya SIPKD	20 skpd	360.000.000				
1 20 1 20 05 17 23	Operasionalisasi Sistem Akutansi Pemerintah Daerah			Tersedianya pedoman kebijakan akutansi Pemerintah Daerah	1 perbup	Tersusunnya perbup kebijakan akutansi Pemerintah Daerah	1 perbup	35.200.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 05 17 24	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah			Terlayannya administrasi keuangan SKPD	37 SKPD	Terciptanya tertib administrasi keuangan Daerah yang benar	37 SKPD	240.000.000				
1 20 1 20 05 17 25	Uji Petik Retribusi Daerah			Terlaksananya uji petik pos Pengelolaan Retribusi Daerah	2 pos dan 4 SKPD	Tertibnya pengelolaan pendapatan pada Pos Retribusi	100%	32.000.000				
1 20 1 20 05 17 26	Penata ulang Objek Pajak			Terlaksananya penataan ulang objek Pajak dan PBB	11 kecamatan	Terselesaikannya permasalahan objek Pajak dan PBB	45%	300.000.000				
1 20 1 20 05 17 27	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pajak			Terlaksananya rapat koordinasi dan Evaluasi Pajak	6 kali	Terealisasi target Pajak	100%	160.000.000				
1 20 1 20 05 17 28	Monitoring Pelaksanaan Belanja PPKD			Terlaksananya penatausahaan PPKD	1 tahun	Tertibnya pengelolaan belanja PPKD	100%	74.600.000				
1 20 1 20 05 17 29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB			Peningkatan sumber pajak daerah	5%	Peningkatan pencapaian pajak daerah	3%	450.000.000				
1 20 1 20 05 17 30	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	PNS Dharmasraya	Lancarnya Proses Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	100%	124.386.256				
1 20 1 20 05 17 31	Sosialisasi Retribusi Daerah			Terlaksananya Sosialisasi Retribusi Daerah	4 Kec	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	100%	60.590.000				
1 20 1 20 05 17 32	Pelaksanaan PBB dengan Sistem IT PBB (Aplikasi)			Tersedianya blanko pajak sistem aplikasi	11 Kec	Peningkatan Penerimaan Pajak	11 Kec	390.000.000				
				JUMLAH				4.667.778.056	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.07.02. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMONUKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							1.007.628.030				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							157.248.000				
0 00 1 07 02 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							100.000.000	-	-		
0 00 1 07 02 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal							100.000.000		-		
1 07	BIDANG PERHUBUNGAN							3.239.000.000	-	5.250.000.000		
1 07 1 07 02 15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan							1.950.000.000	-	-		
1 07 1 07 02 15 02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan		Penyusunan dokumen perencanaan, Norma Standard Pedoman dan Manual dan Penyuluhan angkutan jalan					50.000.000		-		
1 07 1 07 02 15 04	Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan							25.000.000		-		
1 07 1 07 02 15 07	Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat							1.500.000.000		-		
1 07 1 07 02 15 10	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu							375.000.000				
1 07 1 07 02 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							110.000.000	-	-		
1 07 1 07 02 16 01	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor							60.000.000		-		
1 07 1 07 02 16 02	Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor		Kaliberisasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor					50.000.000		-		
1 07 1 07 02 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan							304.000.000	-	-		
1 07 1 07 02 17 01	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang							29.000.000		-		
1 07 1 07 02 17 05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya							50.000.000		-		
1 07 1 07 02 17 09	Optimalisasi pelayanan lalu lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada							170.000.000		-		
1 07 1 07 02 17 14	Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya							55.000.000		-		
1 07 1 07 02 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							450.000.000	-	4.500.000.000		
1 07 1 07 02 18 05	Pengadaan Mobil Derek							100.000.000		1.000.000.000		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 07 1 07 02 18 05	Pengadaaan Moda transportasi angkutan darat	Pembukaan Jaringan Line trayek transportasi darat ke daerah Pedesaan/terpencil						150.000.000		1.500.000.000		
1 07 1 07 02 18 06	Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah							160.000.000		1.600.000.000		
1 07 1 07 02 18 07	Pengadaan ponton penyeberangan angkutan sungai							40.000.000		400.000.000		
1 07 1 07 02 18 08	Pengadaan ponton penyeberangan angkutan Sungai dan Dermaga							v				
1 07 1 07 02 18 09	Rehab/Perbaikan Ponton							v				
1 07 1 07 02 18 10	Sosialisasi Pembangunan jalur rel Kereta api Dharmasraya Solok							15.000.000.		-		
<b>1 07 1 07 02 19</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>							<b>175.000.000</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>		
1 07 1 07 02 19 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu					25.000.000		250.000.000		
1 07 1 07 02 19 02	Pengadaan marka jalan							100.000.000		-		
1 07 1 07 02 19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan							50.000.000		500.000.000		
<b>1 07 1 07 02 21</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas</b>							<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1 07 1 07 02 21 01	Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh							150.000.000		-		
1 07 1 07 02 21 02	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.							50.000.000		-		
<b>1 07 1 07 02 20</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>							<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1 07 1 07 02 20 05	Sistem Informasi Manajemen pengujian kendaraan bermotor							50.000.000		-		
<b>1 25</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							<b>2.530.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000.000</b>		
<b>1 25 1 07 02 15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>							<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1 25 1 07 02 15 01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP							-		-		
1 25 1 07 02 15 03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		(pengembangan nagari informasi/cyber)					50.000.000		-		
1 25 1 07 02 15 21	Pembuatan website berbasis database							150.000.000		-		
<b>1 25 1 07 02 17</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>							<b>190.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1 25 1 07 02 17 03	Pelatihan SDM bidang infrastruktur, komunikasi dan informasi (bagi masyarakat dan sekolah)	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						50.000.000		-		
1 25 1 07 02 17 04	Pelatihan di bidang komunikasi dan informatika (bagi aparatur pengelola)							50.000.000		-		
1 25 1 07 02 17 05	Sosialisasi dan penerapan open source soft ware							90.000.000		-		
<b>1 25 1 07 02 18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>							<b>135.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 25 1 07 02 18 06	Sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat							70.000.000		-		
1 25 1 07 02 18 07	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Pendidikan dan pemberdayaan bagi Masyarakat							65.000.000		-		
1 25 1 07 02 20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik							310.000.000	-	-		
1 25 1 07 02 20 01	Peningkatan Kemampuan Database Sistem Informasi							35.000.000		-		
1 25 1 07 02 20 02	Penyusunan dokumen pengembangan, norma dan standar penyelenggaraan komunikasi dan informatika							45.000.000		-		
1 25 1 07 02 20 03	Penyusunan pola pelayanan dan sistem informasi bagi masyarakat							60.000.000		-		
1 25 1 07 02 20 04	Pemeliharaan Alat-alat telekomunikasi							20.000.000				
1 25 1 07 02 20 05	Pemanfaatan aneka jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas							150.000.000		-		
1 25 1 07 02 21	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informasi							1.275.000.000	-	1.300.000.000		
1 25 1 07 02 21 01	Perluasan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi publik untuk daerah terpencil.							1.000.000.000		1.000.000.000		
1 25 1 07 02 21 02	Pembentukan tim koordinasi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi.							50.000.000		-		
1 25 1 07 02 21 03	Pengadaan SMS Gateway Pengadaun Masyarakat							30.000.000				
1 25 1 07 02 21 04	Peningkatan kemampuan data base							65.000.000				
1 25 1 07 02 21 05	Perluasan bentuk kemitraan pengelola infrastruktur telekomunikasi dan informasi							100.000.000		-		
1 25 1 07 02 21 06	Pengadaan alat komunikasi (Handy Talk)							30.000.000		300.000.000		
1 25 1 07 02 22	Program Peningkatan Partisipasi dan Investasi Swasta Dalam Pembangunan Komunikasi dan Informasi Melalui Program Public Private Partnership							420.000.000	-	-		
1 25 1 07 02 22 01	Penyediaan ruang dan kesempatan partisipasi dan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi.							300.000.000		-		
1 25 1 07 02 22 02	Penyusunan Master Plan Menara Telekomunikasi							95.000.000				
1 25 1 07 02 22 03	Kordinasi dan kerjasama di tingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat							25.000.000		-		
1 17	BIDANG KEBUDAYAAN							300.000.000	-	-		

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 04 1 07 02 17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata							525.000.000	-	-		
2 04 1 07 02 17 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan kepariwisataan daerah		Fasilitasi dan koordinasi lembaga pengembangan kepariwisataan daerah	terbentuk dan terfasilitasinya lembaga/ forum kepariwisataan daerah	1 paket	jumlah kegiatan pembangunan pariwisata yang dimitarakan/dikoordinasikan	1	125.000.000	-		Kab	
2 04 1 07 02 17 10	Fasilitasi dan dukungan event kepariwisataan daerah			Terlaksananya dasilitasi dan dukungan event kepariwisataan daerah	1 tahun			400.000.000			Kab	
								9.958.876.030	-	6.550.000.000		



**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 08 1 08 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi SDA							90.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 17 17	Rehabilitasi lahan kritis daerah tangkapan sungai							90.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup							160.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 19 08	Inventarisasi kerusakan sumber daya lahan untuk memproduksi biomassa							50.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 19 09	Penyusunan data status lingkungan hidup daerah							45.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 19 10	Penyusunan status keanekaragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya							45.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 19 11	Fasilitasi penyusunan Data Menuju Indonesia Hijau							20.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi							35.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 20 08	Pengukuran emisi sumber tidak bergerak dan udara ambient di sekitar industri							35.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 25	Program Penataan Lingkungan Hidup							165.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 25 01	Fasilitasi pembahasan dokumen lingkungan							30.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 25 02	Pembinaan sekolah Adiwiyata							45.000.000	-	-		
1 08 1 08 01 25 03	Monitoring, evaluasi, pelaporan program dan sosialisasi							90.000.000	-	-		
								1.481.171.000	1.000.000.000	3.300.000.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							1.026.187.100				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							154.351.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							50.000.000				
1 10	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							2.158.160.000	-	-		
1 10 1 10 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan							2.158.160.000	-	-		
1 10 1 10 01 15 03	Implementasi Sistim SIAK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tenaga operator teknis	Pelayanan SIAK	tersedia	Terlaksanan SIAK di Kecamatan	75%	200.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 14	Penerapan KTP Elektronik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Wajib KTP	Pengadaan Blangko KTP	tersedia	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	40%	90.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 15	Pembantu Administrasi Kependudukan di Kacamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tenaga Harian Lepas	Honorar Harian Lepas	terwujud	Terwujud data Kependudukan	80%	116.160.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 16	Pendataan Penduduk Rentan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat yang rentan administrasi kependudukan	Penduduk Rentan	terwujud	Penadataan dan Penertiban Penduduk Rentan	40%	49.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 17	Pemasangan Jaringan On Line 4 Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pendekatan pelayanan kepada masyarakat	Jaringan	terwujud	On Line	70%	600.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 18	Pengadaan Sarana dan Pra Sarana SIAK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pendekatan pelayanan kepada masyarakat	Peralatan SIAK	tersedia	Peningkatan Pelayanan	70%	168.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 19	Sosialisasi Perda	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	Informasi Perda Kependudukan	terwujud	Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat	40%	120.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 20	Pengadaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	Cetak, elektroinik Informasi Kependudukan	tersedia	Tersedianya Informasi Kependudukan	75%	80.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 21	Pemeliharaan Mentenen SIAK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peralatan	Softwere dan Hadrtwere	tersedia	Terpeliharaan Peralatanya SIAK	75%	150.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 22	Penataan Arsip Register Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan peralatan	Tertib Arsip Register Pencatatan Sipil	terwujud	Terpeliharanya Arsip Pencatatan Sipil.	60%	95.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 23	Fasilitasi Itsbat Nikah dan Anak Di atas 1 tahun dengan PA dan PN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Miskin	Koordinasi	terlaksana	Fasilitasi Masyarakat	30%	250.000.000			DISDUKCAPIL	
1 10 1 10 01 15 24	MoU Pencatatan Kelahiran dengan Rumah sakit dan Klinik bersalin dan sejenisnya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama RSUD, Puskesmas, Klinik, Bidan Desa	Kesepakatan	terwujud	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	30%	120.000.000			DISDUKCAPIL	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 10 1 10 01 15 25	Pendataan Penertiban dokumen Akta Nikah bagi Non muslim	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Non Muslim	Akte Nikah	terwujud	Penertiban Dokumen	30%	120.000.000			DISDUKCAPIL	
								3.388.698.100	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.13.02. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							985.969.700				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							68.480.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							20.000.000				
1 04	BIDANG PERUMAHAN							370.000.000	-	3.700.000.000		
1 04 1 13 02 15	Program Pengembangan Perumahan							370.000.000	-	3.700.000.000		
	Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.		RTLH	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni Keserasian Sosial	370 Unit	Meningkatnya kualitas rumah tinggal bagi keluarga miskin	370 Unit	370.000.000		3.700.000.000	Dharmasraya	
					Masyarakat	Terfasilitasinya permasalahan di daerah perbatasan	Masyarakat	25.000.000		250.000.000	Daerah Perbatasan	
1 13	BIDANG SOSIAL							1.028.680.000	99.000.000	3.315.000.000		
1 13 1 13 02 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial							421.080.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 13 1 13 02 15 02	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin	Keluarga Miskin	Terlaksananya Pemberian Transportasi PSM, TKSK, Pendamping KUBE dan Tagana	104 org	Lancarnya kegiatan operasional PSM, TKSK, Pendamping KUBE dan Tagana	104 org	173.580.000			Dharmasraya	Sosnakertrans
1 13 1 13 02 15 03	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin		Keluarga Miskin	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan keterampilan bagi keluarga miskin	50 KK	Meningkatnya keterampilan bagi keluarga miskin	50 KK	60.000.000			Tiumang	Sosnakertrans
1 13 1 13 02 15 09	Pengembangan Keluarga Binaan Sosial (KBS) Fakir Miskin		Keluarga Miskin	Terlaksananya pembinaan keluarga binaan sosial fakir miskin	1750 KK	Terbinanya usaha ekonomi Keluarga FM	1750 KK	80.000.000			Padang Laweh, Tiumang, Koto Besar & Pl. Punjung	Sosnakertrans
1 13 1 13 02 15 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin		Keluarga Miskin	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Keluarga Miskin	10 KK	Meningkatnya ekonomi/pendapatan keluarga miskin	10 KK	85.000.000			Padang Laweh	Sosnakertrans
1 13 1 13 02 15 06	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi PMKS		Keluarga Miskin	Terlaksananya Pengiriman Peserta Pelatihan ke PSBR	40 Org	Meningkatnya keterampilan PMKS	40 Org	22.500.000			Padang Panjang Lubuk Alung	Sosnakertrans
1 13 1 13 02 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							80.000.000	49.000.000	90.000.000		
1 13 1 13 02 16 03	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS		Masyarakat	Terlaksananya kegiatan konseling bagi keluarga yang bermasalah	54 Org	Terbantunya solusi pemecahan masalah sosial	54 Org	20.000.000		30.000.000		
1 13 1 13 02 16 04	Pelatihan Keterampilam dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.		Anak Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak Terlantar Anak Cacat, anak Jalanan dan anak nakal	30 Org	Terbinanya anak terlantar, anak cacat, anjal dan anak nakal	30 Org	60.000.000			Dharmasraya	Sosnakertrans

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 13 1 13 02 16 12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat		Penca	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat	100 org	Terbantunya penyandang cacat memahami kondisinya dan terbantunya alat bantu bagi penyandang cacat	100 org				Sungai Rumbai	
				Terlaksananya alat bantu bagi Penyandang Cacat	7 bh	Terbantunya para penyandang cacat	7 bh		49.000.000		Dharmasraya	
1 13 1 13 02 16 13	Bantuan operasional PRSPCBM Tk. Kabupaten		Orgs PRSPCBM	Terlaksananya oprasional PRSPCBM	1 Keg	Lancarnya kegiatan PRSPCBM	1 Keg			30.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 16 14	Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Korban NAPZA		Ex. Napi	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi	1 Keg	Pemberdayaan Korban NAPZA	1 Keg			30.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 16 10	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.		Lokasi Bencana	Terlelelenggaran ya Bantuan untuk	31 Org	Kegiatan Penanganan Korban	31 Org	100.000.000			Dharmasraya	
				Korban Bencana Alam dan Sosial,	6 Kejadian	Bencana, orang dan mayat	6 Kejadian					
				orang dan mayat terlantar.	Luar Biasa	terlantar	Luar Biasa					
				Penyediaan Logistik Bencana	1 Keg	Terbantunya korban bencana	1 Keg			500.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo							80.000.000	-	-		
1 13 1 13 02 19 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo		Panti Asuhan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional dan Perlengkapan Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Panti	4 Panti Asuhan	50.000.000			Dharmasraya	
1 13 1 13 02 19 04	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo.		Panti Asuhan	Terlaksananya Diklat bagi Pengelola dan Penehuni Panti	20 Org Pengurus Panti	Meningkatnya kualitas Panti	20 Org Pengurus Panti	30.000.000			Dharmasraya	
1 13 1 13 02 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							136.000.000	50.000.000	109.000.000		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 13 1 13 02 21 01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha		Dunia Usaha	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping (Pelaku) UKS	1 Keg	Meningkatkan peran Dunia Usaha terhadap UKS	1 Keg	23.000.000		97.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 21 02	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Orsos	Terlaksananya pembentukan Forum Kerjasama Orsos_KSK	1 Keg	Terorganisirnya kegiatan organisasi	1 Keg	28.000.000			Dharmasraya	
1 13 1 13 02 21 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PSM, KT, Orsos	Terlaksananya Penilaian Orsos, PSM, KT dan Pendamping KUBE Berprestasi	1 Keg	Terkirimnya peserta Orsos, PSMKT dan Pendamping KUBE Berprestasi Tingkat Prop.	1 Keg	60.000.000			Dharmasraya	
1 13 1 13 02 21 05	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial		Orsos	Terlaksananya Workshop Pengurus Orsos.	1 Keg	Meningkatnya peran aktif Masyarakat melalui Orsos	1 Keg	25.000.000			Dharmasraya	
1 13 1 13 02 21 06	Penyuluhan Sosial Keliling		Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling	2 Keg	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS dan PSKS	2 Keg		50.000.000		Padang Laweh	
1 13 1 13 02 21 07	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat		WKSBM	Terlaksananya bantuan untuk kelembagaan orsos	4 Panti	Meningkatnya sarana dan prasarana orsos	4 Panti			12.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							111.600.000	-	1.116.000.000		
1 13 1 13 02 22 01	Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia		Lanjut Usia	Terlaksananya Pemberian Jadup untuk lansia	278 Org	Meningkatnya taraf hidup bagi lanjut usia	278 Org	100.800.000		1.008.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 22 02	Jaminan Sosial untuk Penyandang Cacat		Penca	Terlaksananya Pemberian Jadup bagi Penyandang Cacat Mampu Rawat	30 Org	Meningkatnya taraf hidup bagi Penyandang Cacat Mampu Rawat	30 Org	10.800.000		108.000.000	Dharmasraya	
1 13 1 13 02 23	Program Pengelolaan Areal Pemakaman							200.000.000	-	2.000.000.000		



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 13 1 13 02 23 01	Pembangunan Makam Pahlawan		Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Pembangunan Taman Makam Pahlawan	1 Keg	Terselengganya tempat pemakaman bagi pahlawan kusuma bangsa	1 keg	200.000.000		2.000.000.000	Dharmasraya	
1 14	BIDANG TENAGA KERJA							725.000.000	-	7.546.765.000		
1 14 1 13 02 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							480.000.000	-	7.143.620.000		
1 14 1 13 02 15 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		Peningkatan SDM Angkatan kerja melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan berbasis masyarakat	Terlatihnya angkatan kerja	544 org	Meningkatnya keterampilan pencari kerja dan angkatan kerja produktifitas	544 org	360.000.000		6.343.620.000	Kecamatan/nagari Kab.Dharmasraya	
1 14 1 13 02 15 10	Penempatan Tenaga kerja melalui program AKAD, AKL dan AKAN, Penempatan angkatan kerja berbasis masyarakat (padat karya, TTG)		Pencari Kerja / Angkatan kerja pengangguran	Berkurangnya angka pengangguran	240 org	Ditempatkannya tenaga kerja dalam program AKAD, AKL dan AKAN	240 org	120.000.000		800.000.000	Kecamatan/nagari Kab.Dharmasraya	
1 14 1 13 02 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							245.000.000	-	403.145.000		
1 14 1 13 02 17 02	Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengawasan, perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja		Perusahaan dan tenaga kerja	Terawasi dan Terlindungi TK dalam perusahaan	40 prsh	Terjalin hubungan kerja antara Tenaga karja dan Perusahaan secara harmonis dan dinamis	40 prsh	245.000.000		403.145.000	Kab.Dharmasraya	
2 08	BIDANG TRANSMIGRASI							879.000.000	-	41.886.274.000		
2 08 1 13 02 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							879.000.000	-	41.886.274.000		

[illegible]

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							441.537.750				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							93.374.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							7.654.895				
1 15	BIDANG KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH							815.000.000	-	-		
1 15 1 15 01 15	Program Penciptaan iklim Koperasi Yang Kondusif							75.000.000	-	-		
1 15 1 15 01 15 06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Seluruh Koperasi	Terlaksananya rapat Koordinasi Program Pengembangan kelembagaan	90 Koperasi	Berkembangnya kelembagaan koperasi	80%	75.000.000		-	Kab.Dharmasraya	
1 15 1 15 01 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							230.000.000	-	-		
1 15 1 15 01 16 02	Memfasilitasi/ Sosialisasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (MUSRENBANG)		Pelaku Usaha dan Pihak Perbankan serta BUMN	Terlaksananya fasilitasi UMKM dengan BUMN dan Perbankan	200 UMKM	Meningkatnya Jumlah UKM yang bermitra	100%	85.000.000	√		4 Kec. Induk	
1 15 1 15 01 16 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		masyarakat dan Pelaku Usaha	Tersedianya dan munculnya UMKM baru yang terlatih	80 UMKM	Meningkatnya Jumlah pengusaha dan wiraswasta	50%	75.000.000	√		4 Kec. Induk	
1 15 1 15 01 16 07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD, Pelatihan Simpan Pinjam Konvensional bagi Pengelola KSP/USP, Pelatihan Koperasi		Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam dan KUD	Tersedianya Pengelola yang memahami Perkoperasian	80 org, 40 Koperasi	Meningkatnya Tertib Manajemen Koperasi	1	70.000.000			Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							35.000.000	-	-		
1 15 1 15 01 17 05	Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah (KUR) bagi UMKM		Pelaku Usaha dan Pihak Perbankan serta BUMN	Tersedianya laporan perkembangan program sertifikasi tanah, dan realisasi KUR	2 Program	Meningkatnya Jumlah UKM yang mengikuti Program sertifikasi tanah, dan realisasi KUR	75%	35.000.000	√		Dharmasraya	
1 15 1 15 01 17 12	Sosialisasi Skim pengembangan UKM		UKM	Terlaksananya Sosialisasi Skim pengembangan UKM	2 UMKM		75%		√		Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							370.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 15 1 15 01 18 05	Pembinaan, Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		Koperasi yang sehat	terlaksananya Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi	60 Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Berprestasi	100%	90.000.000	√	-	Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kelembagaan Koperasi		Seluruh Koperasi	Meningkatnya koperasi yang aktif	25 Koperasi	Jumlah Koperasi yang aktif	100%	45.000.000		-	Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18 10	Fasilitas Jaringan Kerja Sama Koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya		Koperasi dan Mitra Usaha	meningkatkan peran dan fungsi koperasi dalam peningkatan kemitraan usaha koperasi	10 Koperasi	Jumlah koperasi yang bermitra	100%	40.000.000	√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18 11	Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kesehatan keuangan koperasi	50 Koperasi	Jumlah KSP/USP yang sehat	100%	50.000.000	√	-	Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18 12	Kredit perkuatan modal bagi koperasi (MUSRENBANG)		Koperasi yang memiliki keterbatasan modal	Terlaksananya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi	6 Koperasi	meningkatkan pendapatan bagi para peminjam modal	100%	100.000.000	√		Kec. Sei. Rumbai, Koto Salak, dan IX Koto	
1 15 1 15 01 18 13	Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis			Terlaksananya sosialisai peran koperasi	1 x sosialisasi 1 Koperasi	meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 18 14	Pembenahan Koperasi Tidak aktif		Koperasi yang tidak aktif	Terlaksananya pembenahan koperasi tidak aktif			100%	45.000.000	√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 19	Program Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan aparatur pembina UMKMK							-	-	-		
1 15 1 15 01 19 01	Diklat perkoperasian bagi pengelola LKM		Pengelola LKM	Terlaksananya Diklat perkoperasian bagi pengelola LKM	2 Org	Meningkatnya kualitas para pengelola koperasi	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 19 02	Diklat Sertifikasi pengelola KSP/USP Koperasi		pengelola KSP/USP	Terlaksananya Diklat Sertifikasi pengelola KSP/USP Koperasi	3 Org	Tersedianya Pengelola KSP/USP yang tersertifikasi	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 19 03	Diklat akuntansi bagi koperasi		Pengurus Koperasi	Terlaksananya diklat akuntansi bagi pengurus koperasi	3 Org	Meningkatnya pengurus koperasi dalam membuat laporan keuangan	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 19 04	Pelaksanaan promosi melalui event Harkop Provinsi		Koperasi berprestasi	Terlaksananya Promosi koperasi melalui event Harkop Provinsi	2 Koperasi	Terpromosikannya beberapa koperasi	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 20	Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor Rill							-	-	-		
1 15 1 15 01 20 01	Peningkatan peran Waserda Koperasi		Waserda Koperasi	Terlaksananya peningkatan peran waserda koperasi	1 Koperasi	Meningkatnya peran Waserda Koperasi	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 20 02	Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor pertanian		Usaha koperasi sektor pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor pertanian	2 Koperasi	Meningkatnya pendapatan usaha koperasi sektor pertanian	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 20 03	Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengembangan usaha Koperasi		Koperasi dan Instansi terkait	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengembangan usaha Koperasi	1 Kali	Terciptanya hubungan yang baik antara Koperasi dengan Instansi terkait	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 20 04	Verifikasi Koperasi Calon penerima bantuan perkuatan sarana		Koperasi calon penerima bantuan	Teridentikasi koperasi calon penerima bantuan perkuatan sarana	1 Kali	Meningkatnya kinerja Koperasi	100%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 21	Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan aparatur pembina UMKMK							-	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 15 1 15 01 21 01	Sosialisasi regulasi tentang UMKM		UMKM	Terlaksananya Sosialisasi regulasi tentang UMKM	4 UMKM	Meningkatnya pengetahuan tentang aturan/regulasi UMKM	75%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 21 02	Koordinasi dan Optimalisasi pengembangan UMKM		UMKM	Terlaksananya Koordinasi dan Optimalisasi pengembangan UMKM	2 UMKM	Meningkatnya koordinasi dan perkembangan UMKM	75%		√		Kab. Dharmasraya	
1 15 1 15 01 22	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah							105.000.000	-	-		
1 15 1 15 01 22 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir APBD		UMKM yang meminjam dana bergulir	Tersedianya laporan perkembangan program dan bergulir APBD	200 Usaha Mikro	Jumlah Dana yang dapat ditagih	75%	105.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 07	BIDANG PERINDUSTRIAN							225.000.000	-	-		
2 07 1 15 01 19	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial							100.000.000	-	-		
2 07 1 15 01 19 02	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat diakses masyarakat		Seluruh jenis Industri	Terpromosikannya Produk IKM	30 IKM	Meningkatnya Penjualan Produk Industri Kecil Menengah	1 Galeri	50.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 19 04	Pemutakhiran data base bidang industri		Seluruh jenis Industri	Terdatanya Industri secara tepat waktu	1 paket	Tersedianya laporan Data base Industri Tahunan	90%	50.000.000	√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 19 05	Pembinaan Pengelolaan limbah cair kepada pelaku IKM		IKM Pangan	Teelaksananya Pembinaan Pengelolaan limbah cair kepada pelaku IKM		Meningkatnya pemahaman pengusaha IKM untuk menjalankan aturan pengelolaan limbah industrinya guna mengurangi pencemaran lingkungan			√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 20	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Batik							-	-	-		
2 07 1 15 01 20 01	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Batik		IKM Batik	Tersedianya peralatan dan mesin produksi batik	1 unit	meningkatnya utilitas, efisiensi, produktifitas, kualitas dan penyerapan tenaga kerja industri	100%		√	√	Dharmasraya	
2 07 1 15 01 21	Program Revitalisasi dan Pengembangan IKM Berbasis Agro							50.000.000	-	-		
2 07 1 15 01 21 01	Peningkatan Sarana dan Parasarana Pengolahan Kakao		Petani Kakao dan industri pengolahan kakao	tersedianya mesin pengolahan bahan kakao setengah jadi	1 unit	meningkatnya pendapatan petani kakao	100%		√		Dharmasraya	
2 07 1 15 01 21 02	Pelatihan Pengolahan bagi IKM kakao (MUSRENBANG)		Pelaku IKM Kakao	Meningkatnya motivasi para IKM pangan dalam berwirausaha	10 IKM	Meningkatnya produksi dan pendapatan para IKM Kakao	100%	50.000.000	√		Dharmasraya	
2 07 1 15 01 21 03	Bimbingan Teknis Kewirausahaan makanan Ringan		IKM Pangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kewirausahaan makanan Ringan	1 Orang	Meningkatnya motivasi untuk berwirausaha	200%		√		Dharmasraya	
2 07 1 15 01 22	Program Pembinaan Kemampuan Industri Kerajinan dan Barang Seni							-	-	-		
2 07 1 15 01 22 01	Penyediaan Sarana Produksi Industri Kerajinan Batu Akik		Pengrajin Batu akik	Tersedianya mesin pengolah perhiasan batu akik	3 unit	meningkatnya produktifitas dan kualitas batu akik	100%		√	√	Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 22 02	Pelatihan desain produk/sulaman (MUSRENBANG)		Pengrajin Bordir dan sulaman	Terbinanya IKM kerajinan bordir dan sulaman	10 IKM	Meningkatnya produktifitas para pengrajin bordir	100%		√		Kab. Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 07 1 15 01 23	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan dari Perikanan							0	0	0		
2 07 1 15 01 23 01	Penyediaan sarana produksi industri makanan dari perikanan		Pengrajin industri makanan dan perikanan	tersedianya unit mesin dan peralatan pengolahan makanan dari perikanan	1 unit	ketersediaan dan diversifikasi produk pangan dari hasil perikanan	100%				Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 23 02	Pelatihan motivasi bisnis bagi IKM pangan (MUSRENBANG)		Pelaku IKM pangan	Meningkatnya motivasi para IKM pangan dalam mengembangkan bisnisnya	10 IKM	Meningkatnya produksi dan pendapatan para IKM pangan	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 23 03	Penyediaan sarana produksi industri pengelolaan ikan asap		IKM pengolahan Ikan Asap	tersedianya unit mesin dan peralatan pengelolaan ikan asap	2 unit	ketersediaan dan diversifikasi produk pangan dari hasil perikanan	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 24	Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri							-	-	-		
2 07 1 15 01 24 01	Fasilitasi Pendaftaran Hak Merk ( HAKI ) Produk Makanan Ringan		Produk Makanan Ringan	Terdaftar nya Hak Merek IKM	6 unit IKM	Terlaksananya pendaftaran hak merek IKM	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 24 02	Fasilitasi Sertifikat Label Halal		Produk IKM	Tersedianya Sertifikasi produk halal bagi IKM	15 unit IKM	Terdaftar nya IKM untuk produk halal	100%				Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 24 03	Fasilitasi Pengadaan Kemasan Packing Produk		IKM pangan	Tersedianya kemasan produk bagi IKM	10 unit IKM	Terlaksananya packing dan label kemasan produk IKM	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 24 04	Pelatihan desain packaging produk bordir dan sulaman (MUSRENBANG)		IKM Bordir dan sulaman	Tersedianya desain packaging produk bordir dan sulaman	10 IKM	Meningkatnya mutu produk sulaman dan bordir	100%				Kab. Dharmasraya	
2 07 1 15 01 25	Program pengembang Teknologi Tepat Guna							75.000.000	-	-		
2 07 1 15 01 25 01	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan mesin dan peralatan		Mesin dan peralatan industri serta IKM yang menggunakannya	Terlaksananya Monitoring Pemanfaatan mesin TTG bantuan APBD dan APBN TA. 2009-2010	4 kali	Optimalnya pemanfaatan bantuan alat TTG	90%	75.000.000			Kec. Pulau punjung, sitiung, S. Rumbai, Koto Baru, Koto Besar, Koto Salak	
2 07 1 15 01 25 02	Pengadaan Mesin Extruder		IKM	Terlaksananya Pengadaan Mesin Extruder						√		
2 06	BIDANG PERDAGANGAN							2.030.000.000	-	160.000.000		
2 06 1 15 01 15	Program Perlindungan Konsumen dan Keamanan Perdagangan							-	-	-		
2 06 1 15 01 15 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		Pasar dan usaha perdagangan	Meningkatnya kesadaran pedagang untuk mematuhi tentang barang-	6 kali	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 15 06	Pengawasan Standarisasi pada Industri Distribusi		Produk industri dan perdagangan	Terlaksananya pengawasan pada industri yang ada	4 Kecamatan	Terawasinya produk-produk industri yang sesuai dengan SNI	80%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 15 07	Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian		Alat ukur/Timbang	Terlaksananya pengawasan bidang kemetrologian	4 Kecamatan	Terawasinyanya alat-alat kemetrologian	80%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 15 08	Pelaksanaan Tertib Ukur melalui Tera Ulang Alat ( UTTP )		Alat ukur/Timbang	Terlaksananya pelaksanaan tertib ukur alat ukur	1 Kali	Meningkatkan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat UTTP	92%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 15 09	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pembinaan Distributor / Pengecer Pupuk		Distributor / Pengecer Pupuk	Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi	6 kali	Tersedia data informasi yang lengkap tentang distribusi, pengecer/ kios pupuk	90%		√		Kab. Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 06 1 15 01 15 10	Fasilitasi dan Sosialisasi BPSK dalam Rangka Perlindungan Konsumen Daerah		Konsumen/ pembeli	Terlaksananya sosialisasi BPSK dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	6 kali	Terbentuknya tim BPSK di Kab. Dharmasraya	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah							-	-	-		
2 06 1 15 01 17 13	Sosialisasi Mutu Ekspor Kakao, Gambir, Karet, Cassia melalui Kelompok tani		Kelompok tani	Terlaksananya sosialisasi mengenai mutu ekspor	1 kali	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan para pedagang mengenai ekspor	50%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							2.030.000.000	-	60.000.000		
2 06 1 15 01 18 09	Partisipasi Pameran di Luar Sumatera Barat		Promosi produk daerah	Pengenalan Hasil-hasil/Produk Unggulan daerah ke Nasional dan regional	4 kali	Terciptanya Peningkatan Jaringan Pemasaran Peningkatan Ekonomi masyarakat	80%	210.000.000	√	60.000.000	Regional Nasional	
2 06 1 15 01 18 10	Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya		Pedagang di pasar	Tersedianya informasi harga-harga bagi masyarakat diketahui dengan cepat fluktuasi harga yang terjadi	6 Pasar	Termonitornya fluktuasi harga sembako dipasar	80%	20.000.000			Pl.Punjung, Sitiung, Kt.baru, S. Rumbai, Padlaw, Silago	
2 06 1 15 01 18 11	Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari dan Serikat (MUSRENBANG)		Pedagang di pasar	Pembangunan Pasar pasar nagari dan serikat	8 unit	Terbangunnya Pasar Nagari dan serikat	100%	1.500.000.000			Silago. S. Kalang, S. Limau, Banai, Lawai, Sikabau, Pulau, Marga Makmur	
2 06 1 15 01 18 12	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah		Masyarakat/KK miskin	Terjalinnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan operasi pasar antara daerah dengan provinsi	4 Kecamatan	Terbantunya masyarakat ekonomi lemah terhadap kebutuhan sembako	80%	300.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 20	Program Peningkatan Fasilitas Pasar Lelang dan Rasi Gudang Daerah dan Pengembangan Ekspor Daerah							-	-	-		
2 06 1 15 01 20 01	Pengembangan Kegiatan Pasar Lelang Daerah		Pasar Lelang	Sosialisasi pasar lelang komoditi Daerah	2 kali	Pemahaman akan pengembangan pasar lelang Komoditi Daerah	100%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 21	Program Penataan dan Pemberdayaan PKL							-	-	100.000.000		
2 06 1 15 01 21 01	Menciptakan Lokasi Binaan para PKL di pasar		PKL	Terbentuknya Lokasi Binaan para PKL dipasar	500 PKL	Meningkatnya jumlah PKL yang terbina	100%		√	100.000.000	Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 22	Program peningkatan sarana dan Prasarana pasar							-	-	-		
2 06 1 15 01 22 01	Pendataan sarana dan sarana pasar		Pasar Nagari	Terlaksananya Pendataan sarana dan sarana pasar	4 pasar	Tersedianya data sarana pasar	90%		√		Kab. Dharmasraya	
2 06 1 15 01 23	Program peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan Aparatur Perdagangan							-	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 06 1 15 01 23 01	Pembinaan dan Pengawasan teknis Kepada Aparat tentang SIUP dan TDP		Perusahaan dan pelaku usaha	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan teknis Kepada Aparat tentang Siup dan TDP	4 Kecamatan	Meningkatnya tertib SIUP dan TDP	80%		√		Kab. Dharmasraya	
				JUMLAH				3.612.566.645	-	160.000.000		



RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							1.886.323.000				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							99.302.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							126.800.000				
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							440.884.000	-	-		
1 19 1 19 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							142.442.000				
1 19 1 19 02 15 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya Pelatihan Linmas		Terlatihnya Anggota Linmas		118.442.000				
1 19 1 19 02 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Operasi Pengamanan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Operasional Pengamanan Hari Besar Nasional		Lancarnya Kegiatan Hari Besar Nasional		24.000.000				
1 19 1 19 02 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							142.442.000	-	-		
1 19 1 19 02 16 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Kegiatan Hut Pol PP Se Sumatera Barat	Terikutinya Kegiatan Hut Pol PP Se- Sumbar		Terkoordinirnya Kinerja Satpol PP		35.000.000				
1 19 1 19 02 16 03	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Pelatihan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelatihan/ Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan		Terciptanya Personil Penegak Perda yang mengetahui Hukum dan Peraturan Perundangan		75.000.000				
1 19 1 19 02 20	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)							156.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 19 1 19 02 20 09	Kegiatan Operasi Penertiban Pekat,Perda,Kept.Bupati,IMB dan DMJ	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Operasi Penertiban Perda	Antisipasi Penyakit Masyarakat		Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		156.000.000				
								2.553.309.000				

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							703.244.050				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							44.956.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							29.500.000				
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							831.500.000	0	0		
1 19 1 19 01 15	Program Peningkatan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan							60.000.000	0	0		
1 19 1 19 01 15 07	Rapat koordinasi dan pemantauan keamanan., kenyamanan dan ketertiban lingkungan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Muspida, SKPD, Ormas/LSM, tokoh masyarakat dan siswa	Terlaksananya rapat koordinasi dan pemantauan keamanan, kenyamanan dan ketrampilan lingkungan	4 (empat) kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan	100%	60.000.000			Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten
1 19 1 19 01 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							271.500.000	0	0		
1 19 1 19 01 17 04	Rapat koordinasi dan operasional KOMINDA	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Muspida, KOMINDA	Terlaksananya koordinasi dan operasional KOMINDA	12 (dua belas) kegiatan	Lancarnya koordinasi dan operasional KOMINDA	100%	234.000.000			Ibu Kota Kabupaten	
1 19 1 19 01 17 05	Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Muspida, SKPD, tokoh agama dan ninik mamak	Terlaksanya rapat koordinasi aliran kepercayaan masyarakat	4 (empat) kegiatan	Terwujudnya kerukunan hidup beragama dalam masyarakat	100%	37.500.000			Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten
1 19 1 19 01 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							100.000.000	0	0		
1 19 1 19 01 18 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Generasi muda, tokoh masyarakat, Ormas/LSM	Terlaksananya seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	2 (dua) kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang semangat wawasan kebangsaan	100%	100.000.000				
1 19 1 19 01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat							225.000.000	0	0		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 19 1 19 01 21 06	Pemberdayaan organisasi masyarakat dan LSM	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Pengurus dan anggota Ormas/LSM	Terlaksananya pemberdayaan Ormas/LSM	2 (dua) kegiatan	Meningkatnya peran Ormas/LSM dalam menurunkan tingkat kekerasan dan konflik dalam masyarakat		40.000.000			Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
1 19 1 19 01 21 07	Pembinaan administrasi partai politik	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Pengurus dan anggota partai politik	Fasilitasi administrasi bantuan partai politik	3 (tiga) kegiatan	Terlaksananya dan tersalurnya dana bantuan partai politik	10 Partai Politik	15.000.000			Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
1 19 1 19 01 21 08	Sosialisasi pendidikan politik masyarakat	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Tokoh masyarakat, pelajar dan masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik di masyarakat	4 (empat) kegiatan	Terciptanya keamanan dan sinergisnyua hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat	100%	140.000.000			4 (empat) kecamatan	4 (empat) kecamatan
1 19 1 19 01 21 09	Rapat koordinasi partai politik	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Pengurus dan anggota partai politik	Terlaksananya rapat koordinasi partai politik	3 (tiga) kegiatan	Terpantaunya perkembangan politik daerah dan tertampungnya opini tokoh politik/tokoh masyarakat	100%	30.000.000			Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten
1 19 1 19 01 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)							175.000.000	0	0		
1 19 1 19 01 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Tokoh masyarakat, generasi muda, Ormas/LSM	Terlaksananya sosialisasi penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	4 (empat) kegiatan	Terciptanya generasi muda dan masyarakat yang bebas dari peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	100%	100.000.000			4 (empat) kecamatan	4 (empat) kecamatan
1 19 1 19 01 20 19	Operasional Tim Badan Narkotika Kabupaten Dharmasraya (OPERASI TERTIB NARKOBA-STAF AHLI)	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Tokoh masyarakat, generasi muda, pemakai, pengedar dan penjual narkoba	Terlaksananya operasional Tim Badan Narkotika Kabupaten Dharmasraya	3 (tiga) kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras dan narkoba	100%	75.000.000			Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
1 13	BIDANG SOSIAL							80.000.000	0	0		
1 13 1 19 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							80.000.000	0	0		
1 13 1 19 01 21 05	Monitoring dan evaluasi perekonomian masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Dharmasraya	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Perkembangan ekonomi masyarakat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perekonomian masyarakat dan dunia usaha	4 (empat) kegiatan	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif	100%	80.000.000			Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
				JUMLAH				1.689.200.050	0	0		

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 04	BIDANG PERUMAHAN							2.700.000.000	400.000.000	15.000.000.000		
1 04 1 19 03 18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial							50.000.000	150.000.000	15.000.000.000		
1 04 1 19 03 18 01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam		Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Paket	Terlaksananya pemulihan dan perbaikan Sarana dan prasarana kawasan terkena bencana	100%		150.000.000	15.000.000.000		
1 04 1 19 03 18 03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana				Paket	Terlaksana nya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dharmasraya	100%	50.000.000				
1 04 1 19 03 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							2.650.000.000	250.000.000	0		
1 04 1 19 03 19 02	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran							100.000.000	0	0		
	Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana				Masyarakat Dharmasraya	Pemberian wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang penanggulangan Bencana	100%	50.000.000				
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah				Siswa/Pelajar SMP/SMA	Wawasan siswa/ pelajar tentang kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah	100%	50.000.000				
1 04 1 19 03 19 05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran							200.000.000	250.000.000	0		
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana				65 Orang	Terlatihnya personil yang cepat, Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam penanggulangan bencana	100%		250.000.000			
	Gladi Posko dan Gladi Lapangan				SKPD-SKPD yang terlibat dalam penanggulangan Bencana	Terlaksananya gladi posko dan gladi lapangan (Latihan bersama) antar SKPD yg terlibat dalam penanggulangan bencana	100%	150.000.000				
	Pembentukan Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)				Ormas, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, dll	Terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Dharmasraya	100%	50.000.000				
1 04 1 19 03 19 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran							1.500.000.000	0	0		
	Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran				2 Unit	Tersedianya unit-unit mobil pemadam kebakaran dalam rangka pemadaman kebakaran	100%	1.500.000.000				
1 04 1 19 03 19 11	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran							100.000.000	0	0		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	Simulasi Tanggap Darurat Bencana Banjir				BPBD, Relawan/SAR,Masyarakat Daerah rawan banjir dan potensi tinggi banjir	terciptanya kesiapsiagaan dan pengetahuan terhadap bencana banjir	100%	50.000.000				
	Simulasi Penanganan Kebakaran				Personil Damkar, masyarakat, BPBD	Terciptanya kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran	100%	50.000.000				
1 04 1 19 03 19 12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran							750.000.000	0	0		
	Pembangunan Pos Siaga (Ukuran 4m x 6m)				4 Lokasi	Tersedianya Pos-pos siaga bencana di kecamatan-kecamatan	100%	300.000.000				
	Pembangunan Parkir Mobil (Ukuran 5m x 7 m)				4 Lokasi	Tersedianya tempat parkir mobil di pos pos siaga bencana	100%	400.000.000				
	Pembangunan Bak Penampungan Air				1 Unit	Tersedianya Bak penampungan air untuk pemadam mengisi air mobil damkar	100%	50.000.000				
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN							200.000.000	-	-		
1 06 1 19 03 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana							200.000.000	-	-		
1 06 1 19 03 25 01	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana							200.000.000	0	0		
	Pemetaan dan Pembuatan Peta Resiko Bencana				Terdapatnya Peta dan Data Kawasan rawan bencana dan resiko tinggi bencana	Tersedianya Informasi dan data Kawawsan-kawasan Rawan bencana dan resiko tinggi bencana	100%	200.000.000				
								5.103.350.700	400.000.000	15.800.000.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 20 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							8.470.780.000				
0 00 1 20 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah Terkirim	12 Bulan	Lancarnya proses surat menyurat	100%	23.507.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Pembayaran rekening telp, air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi, informasi, air dan listrik	100%	699.600.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS			Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan	100%	176.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			Adanya asuransi kendaraan dinas	12 Bulan		100%	136.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tersedianya perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	Kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/oprasional	100%	50.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pembayaran honor bendaharawan, staf pengelola keuangan dan KPA	12 Bulan	Tercapainya tertib administrasi keuangan	100%	182.050.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tersedianya kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya ruang/ kantor yang bersih	100%	976.305.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Perbaikan peralatan kerja yang rusak	12 Bulan	Tersedianya peralatan kerja yang baik	100%	42.150.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	227.218.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Lancarnya operasional kantor	100%	132.600.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	12 Bulan	Lancarnya proses kegiatan perkantoran	100%	250.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Tercapainya penggunaan perlengkapan kerja	100%	680.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	Tercapainya kebutuhan alat rumah tangga	100%	134.895.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Buku Perundang-undangan	2 Paket	Tersedianya Buku/ Buku Perundang-undangan	100%	Rp 25.000.000				Bagian Hukum & Organisasi
0 00 1 20 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor	100%	1.638.000.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan
0 00 1 20 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			Terselenggaranya rapat, koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	2.515.975.000			Bag. Umum & Perlengkapan	Bag. Umum & Perlengkapan



[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 06 1 20 03 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							361.594.088	-	-		
1 06 1 20 03 21 11	Koordinasi Penyusunan LAKIP Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	1 Paket	Tersusunnya Buku LAKIP Pemerintah Daerah	55 Buku	150.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 06 1 20 03 21 12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						56.671.638				Bagian Tapem
1 06 1 20 03 21 15	Koordinasi Penyusunan LPPD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						24.922.450				Bagian Tapem
1 06 1 20 03 21 16	Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja	1 Paket	TersusunnyaDokumen Penetapan Kinerja 2012	55 Buku	50.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 06 1 20 03 21 17	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Unit Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Publik	1 Kegiatan	Tersedianya SOP pada masing-masing unit pelayanan publik	80%	80.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 09	URUSAN PERTANAHAN							798.779.000				
1 09 1 20 03 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan							798.779.000	-	-		
1 09 1 20 03 17 01	Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						18.779.000				Bagian Tapem
1 09 1 20 03 17 02	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan			Terlaksananya penyelesaian Administrasi Pertanahan	20 persil, 150 Sertifikat	Terjaminnya keamanan aset daerah dan berkurangnya permasalahan pengelolaan aset daerah	100%	780.000.000				Bagian Aset
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							5.585.000.000	-	-		
1 19 1 20 03 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							4.450.000.000	-	-		
1 19 1 20 03 17 13	Pembinaan Imam Gharin Khatib , Guru Ponpes dan guru TPQ/TPSQ	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Petugas Keagamaaan Masjid dan guru Pondok Pesantren	Terbantunya Pembinaan Imam Gharin, Khatib,Bilal,Guru Pondok Pesntren dan Guru TPQ/TPSQ	1175 orang	Semaraknya Syiar Keagmaan di Dharmasraya.	1175 orang	2.800.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 20	Dukungan Penyelenggaraan MTQ	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Qari Qariah se Kab Dharmasraya.	Terlaksanya MTQ Kab.dan Pengiriman Kafilah ke MTQ Prop.	60 Orang	Meningkatnya minat masyarakat untuk belajar Al Quran	60 Orang	1.200.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 21	Fasilitasi Haji	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	jamaah Calon Haji Kab.Dharmasraya	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Dharmasraya.	250 Orang	Terlaksananya Fasilitasi Haji	250 Orang	125.000.000			Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 19 1 20 03 17 22	Fasilitasi Rapat Koordinasi bidang Kesra	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	SKPD Bidang Sosbud	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesra.	13 SKPD	Tuntasnya Permasalahan Bidang Kesra.	13 SKPD	50.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 23	Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Guru TPQ/TPSQ se Kabupaten Dharmasraya.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru TPQ/TPSQ.	200 Orang	Tersedianya Guru TPQ/TPSQ yang memiliki sertifat Kemampuan Mengajar..	200 Orang	200.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 24	Pelatihan dan Pengelolaan Uang/Barang Ormas	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Pengurus Ormas se Kab.Dharmasraya	Peningkatan pemahamanPengurus Ormas tentang pengelolaan Barang / Uang Ormas.	60 Orang	Terlatihnya Ormas dalam pengelolaan barang Pengelolaan Barang / Jasa	60 Orang	75.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 37	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat							1.135.000.000	-	-		
1 19 1 20 03 17 01	Safari Ramadhan Kabupaten Dharmasraya	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Jamaah masjid pada 52 Nagari	Komunikasi dua arah antara Pemd dengan Masyarakat.	52 Masjid	Terkunjunginya Safari ramadhan di Kabupaten Dharmasraya	52 Masjid	850.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 02	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	petugas penyelenggaraan jenazah.	Meningkatnya kemampuan petugas penyelenggaraan Jenazah.	55 Orang	Tersedianya petugas penyelenggaraan jenazah yang terampil.	55 Orang	65.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 03	Pembinaan Pondok Al Quran	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Qari-Qariah Kab.Dharmasraya.	Meningkatnya Kualitas qari dan qariah di Kabupaten Dharmasraya.	60 Orang	Tersedianya Qari-qariah yang terlatih melalui kegiatan Pembinaan Pondok Al Quran	60 Orang	175.000.000			Dharmasraya	
1 19 1 20 03 17 04	Lomba Lembaga Didikan Subuh Tergiat	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	LDS se Kab.Dharmasraya	Meningkatnya Kualitas LDS di Kabupaten Dharmasraya.	11 LDS	Tersedianya Lembaga Didikan subuh yang berprestasi.	1 LDS	45.000.000			Dharmasraya	
1 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							3.647.550.018	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 03 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah							574.609.018	-	-		
1 20 1 20 03 16 01	Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya komunikasi timbal balik antara Pemerintah dengan Masyarakat, SKPD dan Wartawan	3 kali	Terwujudnya komunikasi yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat	95%	45.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 20 1 20 03 16 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tamu kenegaraan/departemen / lembaga pemerintahan non departemen / luar negeri	Terlayannya tamu daerah dan Pemda secara baik sesuai dengan uu keprotokolan	1 keg	Makin meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tamu - tamu daerah dan Pemda	90%	85.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 20 1 20 03 16 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah							12.720.240				Bagian Tapem
1 20 1 20 03 16 05	Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat, Dinas/Instansi	Terlaksananya kegiatan kunker KDH/WKDH ke daerah-daerah di Kab. Dharmasraya baik masyarakat maupun dinas/instansi	1 Tahun	Adanya kunjungan kerja KDH/WKDH	90%	25.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 20 1 20 03 16 08	Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah/.Wakil Kepala daerah untuk tahun 2012	1 Keg	Adanya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	30.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 20 1 20 03 16 09	Rapat koordinasi pemerintahan kab/kota se Sumatera Barat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						47.388.500				Bagian Tapem
1 20 1 20 03 16 10	Rapat Koordinasi Muspida	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						329.500.278				Bagian Tapem
1 20 1 20 03 17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							150.000.000	-	-		
1 20 1 20 03 17 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.			Terlaksananya Pendataan Aset Daerah yang sudah tidak layak pakai dan terlaksananya pelelangan aset SKPD	10 SKPD	Terkelolanya aset /barang daerah dengan baik	100%	70.000.000			Bagian Aset	
1 20 1 20 03 17 32	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Seluruh Aset Pemda Kab. Dharmasraya	Terkelolanya Aset Milik Pemda Secara Proporsional	100%	80.000.000				
1 20 1 20 03 19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							47.941.000	-	-		
1 20 1 20 03 19 03	Fasilitasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APB dan Pedoman Umum pengelolaan keuangan nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						47.941.000				Bagian Tapem
1 20 1 20 03 20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur							685.000.000	-	-		
1 20 1 20 03 20 10	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya BinteK Legal Drafting bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya BinteK Legal Drafting bagi Aparatur Pemerintah Daerah	2 Paket (100 Orang)	Terlaksananya BinteK Legal Drafting bagi Aparatur Pemerintah Daerah	100 Orang	100.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 03 20 14	Diklat Camat dan Calon Camat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahuan/kompetensi i camat/calon camat	terlaksananya diklat camat/calon camat	15 orang			250.000.000				Bagian Tapem
1 20 1 20 03 20 15	Kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Daaerah	Terlaksananya Bimtek Analisis jabatan bagi Aparatur	1 Kegiatan	Tersedianya Aparatur yang mampu menyusun Anjab	45 Orang	90.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 20 16	Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Penilaian Kinerja Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kinerja Aparatur	Terlaksananya Bimtek Penilaian Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	Terukurnya Kinerja Aparatur Pemda Dharmastraya	1 Kegiatan	75.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 20 17	Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan Pembantu Bendahara barang			Terlaksananya Bimtek Bendaharawan Barang dan Pembantu Bendahara Barang	SKPD se Kab. Dharmastraya	Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD	100%	170.000.000				
1 20 1 20 03 24	Program Mengintensifkan Penganganan Masyarakat Pengaduan							70.000.000	0	0		
1 20 1 20 03 24 03	Kegiatan Penerapan Pakta Integritas bagi Pemangku Stakeholder	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tewujudnya tata pemerintahan yang baik dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelayanan masyarakat secara prima	Tewujudnya tata pemerintahan yang baik dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelayanan masyarakat secara prima	1 Paket	Tewujudnya tata pemerintahan yang baik dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelayanan masyarakat secara prima	1 Paket	70.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							1.175.000.000	0	0		
1 20 1 20 03 26 01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur dan Praktisi Hukum	Terlaksananya Advokasi Hukum bagi Aparatur	3 Paket	Terlaksananya Advokasi Hukum bagi Aparatur masalah TUN dan Keperdataan	3 Paket	400.000.000			SETDA	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26 02	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	10 Ranperda 15 Perbub	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	10 Ranperda 15 Perbub	350.000.000			SETDA	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26 04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmastraya	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmastraya	11 Paket	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmastraya	11 Paket	100.000.000			11 Kecamatan	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26 05	Publikasi Peraturan Perundang -Undangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	JDI 150 Eksemplar Lembaran Daerah 150 Eksemplar	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	JDI 150 Eksemplar Lembaran Daerah 150 Eksemplar	85.000.000			SETDA	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26 06	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	11 Paket	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	11 Paket	100.000.000			11 Kecamatan	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 26 07	Kegiatan Sosialisasi Aksi Nasional HAM/Fasilitasi Aksi Nasional HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) di kabupaten Dharmastraya.	Terlaksananya Sosialisasi Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) dan Pokja di kabupaten Dharmastraya.	2 Paket	Terlaksananya Sosialisasi Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) dan Pokja di kabupaten Dharmastraya.	2 Paket	90.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 03 26 08	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	52 Nagari	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	52 Nagari	50.000.000			Kab. Dharmasraya	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							50.000.000	0	0		
1 20 1 20 03 27 05	Kegiatan Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah Daerah (LHKPN)	Terlaksananya Kegiatan Pelaporan lhkpn	1 Paket	Tersedianya Pejabat yang wajib melaporkan Harta kekayaan	80%	50.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							145.000.000	0	0		
1 20 1 20 03 30 23	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1 Paket	Terlaksananya pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil	40 Orang	50.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 30 24	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penataan Kepegawaian Sekretariat Daerah	1 Paket	Tersedianya DUK, Bezeting Kepegawai Sekretariat Daerah	1 Paket	20.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 30 25	Penyempurnaan Tata Laksana dan Hubungan Kerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Perbub tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasaraya	Terlaksananya Perbub tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasaraya	1 Paket	Terciptanya Keseragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasaraya	1 Peket	75.000.000			Pulau Punjung	Bagian Hukum dan Organisasi
1 20 1 20 03 31	Program pengembangan manajemen pelayanan publik							750.000.000	-	-		
1 20 1 20 03 31 01	Peningkatan etos kerja pelayanan keprotokolan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terakomodirnya proses pelayanan keprotokolan terhadap Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 thn	Terselenggaranya kegiatan sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	95%	750.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							189.966.000	153.526.500	-		
1 22 1 20 03 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari							189.966.000	153.526.500	-		
1 22 1 20 03 18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan nagari dalam bidang pengelolaan keuangan nagari	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan nagari bagi pemegang kas nagari dan sekretaris nagari	104 orang			55.000.000	55.000.000			Bagian Tapem
1 22 1 20 03 18 05	Pembekalan Wali Nagari dalam bidang Manajemem Pemerintahan Nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahuan aparatur lembaga nagari dalam bidang manajemen pemerintahan nagari	Terlaksananya pelatihan bagi Wali Nagari	52 Orang			40.772.500	43.526.500			
1 22 1 20 03 18 06	Pembekalan Bamus Nagari di bidang Manajemem Pemerintahan Nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pengetahuan aparatur lembaga nagari dalam bidang manajemen pemerintahan nagari	Terlaksananya pelatihan bagi Ketua dan Sekretaris Bamus Nagari	104 orang			55.000.000	55.000.000			Bagian Tapem
1 22 1 20 03 18 07	Kompetensi Wali Nagari se Kab.Dharmasraya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						39.193.500				Bagian Tapem

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.280.000.000	-	-		
1 25 1 20 03 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa							1.455.000.000	-	-		
1 25 1 20 03 15 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota Bakohumas	Terlaksananya Pembinaan Bakohumas Kabupaten Dharmastraya Tahun 2012 dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kehumasan per Triwulan	1 Keg	Terbentuknya Bakohumas Kabupaten Dharmastraya yang handal dan profesional serta adanya evaluasi kehumasan setiap triwulannya	100%	125.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 15 08	Pengadaan Media Dharmastraya, kalender Tahunan, Buku Agenda dan leaflet	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemda, Walinagari dan Masyarakat	Terbitnya Media Dharmastraya, Kalender, Buku Agenda , Brosur dan Buku Photo Kegiatan	1 Keg	Tersedianya sarana informasi melalui Media Dharmastraya, Kalender, Buku Agenda , Brosur dan Buku Photo Kegiatan	100%	120.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 15 09	Pembuatan Baliho/ Advertising	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat	1 tahun	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat melalui Baliho dan Spanduk	90%	150.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 15 10	Pengadaan Peningkatan Sarana informasi(Kran, Majalah,dll)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemda	Terlaksananya pengadaan Peningkatan sarana informasi (Koran, Majalah,dll)	1 Tahun	Tersedianya sarana informasi melalui media cetak harian dan mingguan Koran	90%	900.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 15 11	Pekan Informasi Nasional tahun 2012	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kelompok media tradisional Kab. Dharmastraya	Wahana Pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dibidang TI di daerah	1 Keg	Seleksi Tk. Prop untuk ikut sertanya kelompok media tradisional Kab. Dharmastraya pada kegiatan Pekan Informasi Nasional Tahun 2013	100%	60.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 01 1 01 01 22 12	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	1 keg	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2013 melalui SK Bupati	100%	100.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi							115.000.000	-	-		
1 25 1 20 03 17 03	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang keprotokolan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur keprotokolan	Terlaksananya Bimtek Keprotokolan	1 keg	Terciptanya sdm aparatur di bidang keprotokolan yang cakap dan terampil dalam pelaksanaan tugas pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	95%	55.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 17 04	Pelatihan Jurnalistik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik guna meningkatkan skill dan kemampuan dalam bidang penulisan	1 Keg	Terwujudnya Aparatur Pemda yang mampu dalam penulisan berita sesuai dengan kaidah jurnalistik	100%	40.000.000			Dharmastraya	Bagian Humas

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 25 1 20 03 17 05	Operasional publikasi keliling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat	Terlaksananya Penyebaran Informasi kepada masyarakt melalui kendaraan publikasi keliling	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai kebijakan dan pembangunan daerah	90%	20.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media							300.000.000	-	-		
1 25 1 20 03 18 05	Kerjasama dengan Media Elektronik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya Promosi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya melalui Media Elektronik radio dan televisi	1 Tahun	Terwujudnya publikasi dan promosi pembangunan daerah di Media elektronik radio dan televisi	90%	300.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							410.000.000	-	-		
1 25 1 20 03 19 01	Jumpa Pers Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mass Media	Terlaksananya jumpa pers Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Wartawan	1 Tahun	Tersampaiannya informasi / klarifikasi / pemberitahuan kepada masyarakat melalui wartawan	90%	50.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
1 25 1 20 03 19 02	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	Adanya informasi melalui release berita kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan adanya dokumentasi kegiatan Kepala daerah/Wakil kepala Daerah	100%	360.000.000			Dharmasraya	Bagian Humas
		Jumlah						27.509.891.782	413.526.500	-		



**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.04. - SEKERTARIAT DPRD**

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
0 00 1 20 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							916.904.600				
0 00 1 20 04 02 05	Pengadaan kendaraan dinas		Kendaraan operasional	Terlaksananya operasional DPRD dan Sekretariat DPRD	2 unit roda dua dan 1 unit roda empat	Tercapainya keg. operasional kantor	100%	450.000.000				
0 00 1 20 04 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib	5 jenis	Tersedianya peralatan kerja kantor yang baik	80%	30.925.000				
0 00 1 20 04 02 10	Pengadaan mobiler		Mobiler kantor	Terlaksananya mobiler kantor yang baik	3 jenis	Tersedianya mobiler kantor yang baik	80%	29.325.000				
0 00 1 20 04 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	1 tahun	Tercapainya perawatan gedung kantor	80%	8.250.000				
0 00 1 20 04 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Kendaraan dinas Pimpinan DPRD	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pimpinan DPRD	3 unit	Lancarnya kegiatan operasional Pimpinan DPRD	90%	170.200.000				
0 00 1 20 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		Kendaraan dinas roda dua dan roda empat di DPRD dan Setwan	Terlaksananya dengan lancar keg ops Anggota DPRD dan Setwan	7 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	Lancarnya kegiatan operasional di Sekretariat DPRD	90%	228.204.600				
0 00 1 20 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							105.300.000				
0 00 1 20 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Seragam kerja	Terlaksananya seragam kerja kantor	3 jenis pakaian	Tersedianya seragam kerja Anggota DPRD	100%	105.300.000				
0 00 1 20 04 04	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							60.000.000				
0 00 1 20 04 04 01	Pendidikan dan pelatihan formal		Pegawai Sekretariat DPRD	Terlaksananya pendidikan & pelatihan untuk pegawai Setwan	12 kali bimtek	Meningkatnya pengetahuan di Sekretariat DPRD	100%	60.000.000				
1 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							5.031.198.250	-	-		
1 20 1 20 04 14	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							5.031.198.250	-	-		
1 20 1 20 04 14 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Perda Kabupaten	Terlaksananya pembahasan Ranperda	8 kali	Meningkatnya jumlah produk hukum	90%	1.601.300.250				
1 20 1 20 04 14 03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	56 hari	Meningkatnya peran DPRD dalam menyelesaikan masalah pemerintah & Masy.	80%	237.900.500				
1 20 1 20 04 14 05	Kegiatan Reses	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat pemilih / konstituen	Terlaksanaya reses DPRD	18 hari, 11 kecamatan	Terciptanya hubungan silaturahmi masyarakat pemilih dengan wakil rakyat	90%	866.864.250				
1 20 1 20 04 14 06	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Proyek-proyek fisik pembangunan di Kabupaten	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	30 hari	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan proyek-proyek fisik & terjalannya komunikasi dengan masyarakat	80%	291.421.500				
1 20 1 20 04 14 07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya workshop/lokakarya/diklat	4 kali	Meningkatnya pengetahuan Anggota DPRD	80%	1.557.951.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 04 14 09	Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	Terlaksananya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD	11 kecamatan	Terciptanya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD	80%	280.209.000				
1 20 1 20 04 14 10	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan wawasan DPRD	Wawasan Anggota DPRD terhadap suatu masalah dapat lebih terarah	7 orang	Meningkatnya pemahaman Anggota DPRD	90%	195.551.750				
1 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							345.000.000	-	-		
1 25 1 20 04 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media							345.000.000	-	-		
1 25 1 20 04 18 04	Kerjasama dengan TV dan Radio	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama dengan TV & Radio	Terlaksananya publikasi keg DPRD dan Setwan	1 tahun	Terciptanya publikasi keg DPRD dan Setwan	90%	345.000.000				
				JUMLAH				13.860.250.750	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.11 - INSPEKTORAT KABUPATEN

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 20 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							657.250.000	-	-		
0 00 1 20 11 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat		Operasional Kantor	Tersedianya Pranko, Materai dan Kilat Khusus	100 %	Lancarnya Proses Surat Menyurat	100 %	4.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Operasional Kantor	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan internet kantor	100 %	Meningkatnya pelayanan kepada PNS dan masyarakat	50 %	45.300.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Operasional Kantor	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	Meningkatnya pelayanan kepada PNS dan masyarakat	50 %	8.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Operasional Kantor	Terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan dan administrasi pelaporan keuangan	100 %	Meningkatnya pelayanan kepada PNS dan masyarakat	50 %	33.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	100 %	Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor	100 %	65.200.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	85 %	Terjaganya peralatan kerja	85 %	3.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	100 %	Lancarnya administrasi kantor	50 %	21.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 11	Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Operasional Kantor	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Lancarnya operasional kantor	50 %	23.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	100 %	Lancarnya operasional kantor	50 %	3.750.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Lancarnya operasional kantor	50 %	125.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan		Operasional Kantor	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengetahuan SDM	50 %	6.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Operasional Kantor	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu	100 %	Lancarnya pelayanan terhadap PNS dan masyarakat	50 %	25.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
0 00 1 20 11 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		Operasional Kantor	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	90 %	Lancarnya arus komunikasi antar lembaga pengawasan	50 %	275.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 01 19	Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi, Teknis & Fungsional Kantor		Operasional Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji honor daerah	100 %	Lancarnya operasional kantor	50 %	17.500.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							1.355.000.000	-	-		
0 00 1 20 11 02 03	Pembangunan gedung kantor		Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan	Tersedianya gedung kantor	1 Unit	Lancarnya operasional kantor	75 %	1.000.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 02 05	Pengadaan kendaraan dinas		Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan	Tersedianya kendaraan dinas	1 Unit	Lancarnya pelayanan terhadap PNS dan masyarakat	50 %	250.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan	Tersedianya gedung kantor	1 Unit	Lancarnya operasional kantor	75 %	30.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
0 00 1 20 11 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas		Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	Terjaganya kondisi kendaraan dinas	75 %	75.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSEDIAAN							1.661.642.000	-	-		
1 20 1 20 11 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							1.174.430.000	-	-		
1 20 1 20 11 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/ Pemeriksaan Rutin	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	100 LHP	Penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis	75 %	537.151.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan	12 LHP	Penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis	75 %	105.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 04	Penanganan Khusus di Lingkungan Pemda	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedinya Laporan Hasil Pengawasan	12 LHP	Penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis	75 %	120.969.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tertindaklanjuti temuan pengawasan	12 Kali	Berkurangnya hasil temuan	50 %	95.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Pelaksanaan Rakorwas dan Gelar Pengawasan	3 Kali	Berkurangnya hasil temuan	50 %	110.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedianya Laporan Triwulan dan Tahunan	5 Laporan	Meningkatnya mutu pelaporan	50 %	15.750.000			Dharmasraya	Dharmasraya

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 11 20 09	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedianya Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Dokumen	Laporan Keuangan Pemda yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku	50 %	65.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 20 10	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan & Aparatur yang Bebas KKN	Tersedianya laporan hasil monitoring	10 Laporan	Berkurangnya kesalahan pelaksanaan kegiatan SKPD	50 %	125.560.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 21	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>							<b>476.600.000</b>	-	-		
1 20 1 20 11 21 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan SDM Pengawasan	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengawasan	24 Orang	Menigkatnya Kemampuan SDM	50 %	275.600.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 21 03	Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriks dan Aparatur Pemeriksa		Peningkatan SDM Pengawasan	Terlaksananya Sharing Informasi dengan Daerah Lain	24 Orang, 1 Kali	Menigkatnya Kemampuan SDM	50 %	201.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 20 1 20 11 22	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>							<b>10.612.000</b>	-	-		
1 20 1 20 11 22 03	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengawasan yang Terencana Dengan Baik	Dokumen PKPT	1 Dokumen	Tersusunnya PKPT dan terarahnya pengawasan	90 %	10.612.000			Dharmasraya	Dharmasraya
			<b>JUMLAH</b>					<b>3.673.892.000</b>	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.12 - BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 20 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							731.750.000	-	-		
0 00 1 20 12 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase jumlah surat terkirim dengan total surat	Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat	1 tahun	Lancarnya pelayanan operasional administrasi kantor	100%	5.800.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi	1 tahun	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	100%	200.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinal		Pajak Kendaraan Dinas	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	1 tahun	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas	100%	1.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 07	Penyediaan Jasa Administrsi Keuangan		Tenaga pengelola administrasi keuangan	Terlaksananya pembayan honor PPK, PPTK, Bendahara SKPD	1 tahun	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien	100%	50.500.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tenaga K3 dan penjaga kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan penjaga kantor	1 tahun	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	100%	48.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Persediaan jasa mekanik kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 kegiatan	Tersedianya peralatan kerja siap pakai	100%	12.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Persediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Terpenuhinya alat tulis kantor	100%	28.750.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya blanko cetak dan penggandaan (foto copy)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	40.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listri dan komponen listrik	1 tahun	Terpenuhinya instalasi dan komponen listrik	100%	5.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penambahan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	3.200.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penambahan bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	7.500.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Persediaan makan dan minuman rapat kantor dan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	Terpenuhinya makan dan minuman	100%	15.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 18	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Peningkatan kinerja staf SKPD	100%	230.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Kantor		Tersedianya jasa operasional administrasi perkantoran	Tersedianya gaji pegawai honor daerah	1 tahun	Terealisasinya gaji honor daerah di SKPD	100%	85.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							194.000.000	-	-		
0 00 1 20 12 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Penambahan kendaraan dinas ( 2 unit roda 2)	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	2 unit	Tersedianya tambahan kendaraan dinas /operasional kantor	100%	32.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
0 00 1 20 12 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	bertambahnya peralatan gedung kantor	100%	62.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 02 10	Pengadaan Meubiler Gedung Kantor		Penambahan meubiler kantor	Tersedianya meubiler	1 paket	Meningkatnya kinerja SKPD	100%	20.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 02 22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor		Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terawat dan terjaganya kondisi fisik gedung kantor	1 tahun	Meningkatnya kinerja SKPD	100%	35.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 02 24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Service kendaraan dinas	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas	1 tahun	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas	100%	45.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							12.000.000	-	-		
0 00 1 20 12 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Keseragaman dan kelengkapan pakaian dinas	Tersedianya seragam dinas	1 paket	Tersedianya PDH dan pakaian khusus sesuai aturan	100%	12.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
0 00 1 20 12 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							30.000.000	-	-		
0 00 1 20 12 05 01	Pendidikan dan Pelatihan formal aparatur		Teriptanya suatu kapasitas sumber daya aparatur yang handal	Terlaksananya kursus, pelatihan dan Bimtek PNS	1 tahun	Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	30.000.000			BP2MPBJ	BP2MPBJ
1 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							2.631.750.000				
1 20 1 20 12 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							1.951.750.000				
1 20 1 20 12 23 02	Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pengurusan izin masyarakat	Terlaksananya penyediaan dan penyebarluasan informasi perizinan	100%	Tersedia dan tersebarnya informasi perizinan	100%	30.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 03	Pengkajian dan Pengendalian Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya pengkajian dan pengendalian perizinan	Terlaksananya pengkajian dan pengendalian perizinan	100%	Perbaikan prosedur perizinan	100%	40.000.000			Kab.Dharmasraya	Kab.Dharmasraya
1 20 1 20 12 23 04	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi perizinan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan	100%	Peningkatan pengurusan perizinan oleh masyarakat	100%	51.750.000			Kab.Dharmasraya	Kab.Dharmasraya
1 20 1 20 12 23 05	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Honorarium dan Fasilitas Pendukung dalam Pelaksanaan Tender Terpadu	Tersedianya Honorarium dan Fasilitas Pendukung dalam Pelaksanaan Tender Terpadu	100%	Meningkatkan kinerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.000.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 06	Penyelenggaraan Layanan SPIPISE	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya proses perizinan penanaman modal secara elektronik	Pelaksanaan proses perizinan Penanaman Modal secara elektronik	12 bulan	Proses perizinan secara elektronik	100%	60.000.000			Kab,Dharmasraya	Kab,Dharmasraya
1 20 1 20 12 23 07	Operasional LPSE	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya proses lelang secara elektronik	Terlaksananya Operasional e-Procurement	100%	Meningkatnya pelaksanaan e-Procurement	100%	250.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 08	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksanya proses lelang terpadu	Pelaksanaan seluruh proses lelang secara terpadu	100%	Proses lelang terpadu	100%	60.000.000			Sikabau	Sikabau



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 20 1 20 12 23 09	Penataan Reklame	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya penataan reklame dan tertib reklame	Terlaksananya penataan reklame dan tertib reklame	100%	Peningkatan pengurusan reklame oleh masyarakat	100%	25.000.000			Kab.Dharmasraya	Kab.Dharmasraya
1 20 1 20 12 23 10	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Banchmarking	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Adanya peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	Terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan	100%	Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan perizinan	100%	100.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 11	Peningkatan SDM Tim TPP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelatihan/Bintek bagi TIM TPP	Pelatihan/Bintek bagi Tim TPP	100%	Meningkat kualitas/Kinerja Tim TPP	100%	25.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 12	Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terltselenggaranya Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa	Tersedianya Anggaran Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%	Terselesaikannya permasalahan pengadaan barang/jasa	100%	200.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 13	Peningkatan SDM Penyelengara dan Penyedia Barang/Jasa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Sosialisasi/Pelatihan/Bin tek Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Sosialisasi, Pelatihan/Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3 keg	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	100%	25.000.000			Sikabau	Sikabau
1 20 1 20 12 23 14	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Peningkatan SDM Tim pengelola LPSE	Pelatihan, Bimtek, studi banding, Koordinasi dengan Pusat Provinsi dan kab/Kota	100%	meningkatnya SDM Tim Pengelola LPSE	100%	25.000.000				
1 20 1 20 12 23 15	Pelatihan Aplikasi LPSE	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya pelatihan bagi, Sekretariat LPSE, Penyelenggara dan Penyedia Barang/jasa	Pelatihan Bagi Sekretariat LPSE, Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	3 Keg	Terlatihnya Sekretariat LPSE, Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Tender Elektronik	100%	30.000.000				
1 20 1 20 12 23 16	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Penguatan Teknis dan jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pelatihan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem pengadaan Secara Elektronik serta tersedianya perangkat server dan jaringan yang mencukupi dan updtodate	1 keg	Lancarnya Jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	30.000.000				
1 20 1 20 12 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							50.000.000	-	-		
1 20 1 20 12 24 01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya operasional Tim Pengelola Pengaduan (TPP) di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	100%	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	100%	50.000.000			Sikabau	Sikabau
1 16	BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH							680.000.000	150.000.000	-		
1 16 1 20 12 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Informasi							420.000.000	-	-		
1 16 1 20 12 15 05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya koordinasi dengan SKPD terkait	Terkumpulnya data potensi dan peluang investasi yang tersebar pada SKPD terkait	12 bulan	Tersedianya data dan informasi Potensi dan Peluang Investasi	100%	50.000.000			Kab,Dharmasraya	Kab,Dharmasraya
1 16 1 20 12 15 06	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha			Meningkatnya Investor melakukan investasi di Kab. Dharmasraya	12 bulan	Tersedianya peluang pasar kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat	100%	100.000.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 16 1 20 12 15 13	Penyelenggaraan promosi Investasi			Meningkatnya Investor melakukan investasi di Kab. Dharmasraya	12 bulan	Tersedianya peluang kerja dan pendapatan masyarakat	100%	200.000.000				
1 16 1 20 12 15 14	Penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah			Buku dan Vidio Klip (Potensi dan Peluang Investasi)	12 bulan	Terlayannya masyarakat pencari data potensi dan peluang investasi daerah	100%	70.000.000				
1 16 1 20 12 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							260.000.000	150.000.000	-		
1 16 1 20 12 16 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah	Buku dan Vidio Klip (Potensi dan Peluang Investasi)	12 bulan	Terlayannya masyarakat pencari data potensi dan peluang investasi daerah	100%	70.000.000			Kab,Dharmasraya	Kab,Dharmasraya
1 16 1 20 12 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersedianya data hasil monitoring, evaluasi dan laporan	12 bulan	tercapainya pengelolaan arsip dan pelaporan	100%	15.000.000				
1 16 1 20 12 16 10	Analisa dan Uji Kelayakan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya analisa dan uji kelayakan perizinan	Terlaksananya penelitian,pengujian perizinan sesuai kelayakan	1 kegiatan	Tertibnya pelaksanaan perizinan	100%	50.000.000			Kab.Dharmasraya	Kab.Dharmasraya
1 16 1 20 12 16 11	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Perizinan Terpadu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya perbaikan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Terlaksananya penyusunan penyempurnaan perangkat aturan kebijakan dan pelaksanaan operasional	100%	Terlaksananya perbaikan perangkat peraturan	100%	15.000.000			Sikabau	Sikabau
1 16 1 20 12 16 12	Pendataan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pendataan seluruh perizinan di Kabupaten Dharmasraya untuk dilaksanakan secara terpadu	terlaksananya perizinan terpadu	1 Tahun	Seluruh perizinan yang ada dilaksanakan secara terpadu	100%	30.000.000			Seluruh SKPD	Seluruh SKPD
1 16 1 20 12 16 13	Penyusunan Data Base Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data base perizinan	Terlaksananya data base perizinan	100%	Peningkatan kualitas data base perizinan	100%	80.000.000			Sikabau	Sikabau
1 16 1 20 12 16 14	Pendataan investasi			Menghitung Perkembangan nilai investasi	1 paket	tersedianya data Perkembangan Nilai Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN	100%		150.000.000			
			JUMLAH					4.279.500.000	150.000.000	-		

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.22.02 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPd TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 11 1 22 02 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							123.000.000	-	-		
1 11 1 22 02 18 03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun Keluarga Sehat Sejahtera	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		terlaksananya penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tanggadalam meningkatkan Keluarga Sehat Sejahterah	11 kecamatan	meningkatkan kesejahteraaan Bagi Ibu rumah tangga dalam membina Keluarga Sehat Sejahterah	76%	38.000.000				
1 11 1 22 02 18 07	Kegiatan Pengkajian Strategi Pegembangan Lingkungan Sehat Melalui Gerakan Syang Ibu (GSI)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Mempercepat menurunnya AKI dan AKB	11 Kecamatan	Meningkatnya Komitmen Pemerintah dan Masyarakat dalam mekanisme rujukan Abu Hamil dan Melahirkan	50%	30.000.000				
1 11 1 22 02 18 08	Bimbingan manajemen kewirausahaan bagi organisasi perempuan dan industri rumahan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Meningkatkan SDM bagi organisasi dan pelaku usaha industri rumahan	11 kecamatan	adanya pelaku usaha industri rumahan yang bisa memanfaatkan SDM yang ada	65%	55.000.000				
1 12	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							1.914.822.000				
1 12 1 22 02 15	Program Keluarga Berencana							1.859.862.500	-	-		
1 12 1 22 02 15 02	Pelayanan KIE (Advokasi KIE dan Pelayanan KB)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya capaian PPM PB dan PPM PA di Kab. Dharmasraya	1 Paket (1320 orang Akseptor KB Baru di Kab. Dharmasraya)	Terlayannya konsultasi akseptor KB dan calon akseptor baru	90%	189.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Menurunnya angka kelahiran penduduk	1 Paket (3,29%)	Meningkatnya jumlah akseptor KB	80%	1.089.894.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 07	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif	1 Paket (100 orang akseptor implant)	Meningkatnya calon akseptor KB Implant	60%	49.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 08	Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya kreatifitas remaja dalam pengembangan program KB	1 Paket (10 Kelompok Saka Kencana)	Menurunnya masalah kenakalan remaja	50%	64.968.500			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 10	Orientasi Kader BKB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya kemampuan kader BKB dalam pelaksanaan kegiatan BKB	1 Paket (165 Kader KB)	Meningkatnya kualitas pola asuh dan tumbuh kembang anak	80%	92.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 11	Pengadaan buku / modul KIE KIT	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	BKB KIT, BKR KIT, BKL KIT, DAN BLK KIT	meningkatkan pengetahuan kader dan keluarga tentang BKB, BKR, BKL dan BLK	80%	300.000.000			Dharmasraya	Dharmasraya
1 12 1 22 02 15 12	KKG PKK KB Kesehatan	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terselenggaranya kegiatan aterintegrasi SKPD PKK, KB dan Kesehatan di kecamatan kecamatan	52 Nagari	Mengoptimalkan pelayanan KB Kesehatan dan integrasi kegiatan lainnya	100%	75.000.000			52 Nagari	
1 12 1 22 02 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							54.959.500	-	-		
1 12 1 22 02 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya pengetahuan remaja tentang TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Narkoba)	1 Paket (10 Kelompok PIK remaja di sekolah)	Meningkatnya pemahaman siswa terhadap KRR	80%	54.959.500			Dharmasraya	Dharmasraya
1 17	BIDANG KEBUDAYAAN							75.000.000	-	-		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 17 1 22 02 15	Program Pengembangan Nilai Budaya							75.000.000	-	-		
1 17 1 22 02 15 06	Pelatihan Adat Budaya Mnang Kabau	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pelatihan Adat Minang Kabau	85 org, 5 org/ KAN	Meningkatnya SDM unsur KAN dalam pembinaan Lembaga Adat Budaya Minang Kabau	100%	75.000.000			11 Kec.	
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSEDIAAN							50.000.000	-	-		
1 20 1 22 02 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							50.000.000	-	-		
1 20 1 22 02 26 7	Pemberdayaan, Motivasi dan Pembekalan terhadap penyusunan Prodiuk hukmum Nagari	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap nagari dan produk hukumnya	52 Nagari	meningkatnya kemampuan aparatud pemerintahan Nagari dalam melahirkan produk Hukum Nagari	100%	50.000.000			52 Nagari	
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							3.409.089.500	-	-		
1 22 1 22 02 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							434.021.000	-	-		
1 22 1 22 02 15 04	Pembinaan Nagari berprestasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembinaan terhadap nagari dan terfasilitasinya kegiatan gotong royong di tengah-tengah masyarakat	52 Nagari	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	100%	150.000.000			52 Nagari	
1 22 1 22 02 15 05	Koordinasi, pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan koordinasi pembinaan kader-kader pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi LPM	52 Nagari	Meningkatkan SDM bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100%	101.500.000			Dharmasraya	
1 22 1 22 02 15 06	Sosialisasi dan Bimtek Profil Nagari	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Tersedianya Data tentang Nagari dan Pembinaan administrasi program nasional pemberdayaan masyarakat Desa	1 Nagari	Tersedianya data tentang Nagari	100%	150.000.000			Dharmasraya	
1 22 1 22 02 15 07	Monitoring dan Pembinaan ADM Nagari dan Lembaga-Lembaga Nagari	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Tersedianya hasil yang memuaskan dari monitoring dan pembinaan thd ADM nagari dan lembaga nagari	52 Nagari	Tersedianya Adm di Nagari yang memadai	90%	32.521.000			Dharmasraya	
1 22 1 22 02 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan							161.000.000	-	-		
1 22 1 22 02 16 08	Pembinaan/pelatihan kewirausahaan kelompok kerja kredit mikro Nagari (Pokja Nagari)	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kelompok kerja kredit mikto nagari	18 Pokja Nagari	Meingkatkan peran lembaga sosial ekonomni masyarakat dalam menggerakan perekonomian masyarakat	100%	25.000.000			11 Kec.	
1 22 1 22 02 16 09	Pembinaan kelompok masyarakat pengguna tekhnologi tepat guna (TTG)	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pengguna TTG (Posyantekdes)	26 Nag	Mewujudkan peningkatan informasi bagi masyarakat pengguna TTG	100%	36.000.000			26 Nag	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 22 1 22 02 16 10	Pemberdayaan motivasi dan Pembekalan terhadap Nagari dalam Pendirian BUMN	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap nagari dalam mendirikan Badan usaha milik Nagari	52 Nagari	Terwujudnya aparatur pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari	100%	50.000.000			52 Nagari	
1 22 1 22 02 16 11	Pembinaan dan Lomba Inovator Teknologi	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tengah-tengah masyarakat dalam hal penemuan dan penggunaan teknologi tepat guna	11 Kec.	Terwujudnya/ditemukannya benda temuan masyarakat yang dapat memudahkan aktifitas mereka sehari-hari	100%	50.000.000			11 Nagari	
1 22 1 22 02 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							2.739.068.500	-	-		
1 22 1 22 02 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari /Desa	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terjalinnya keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan di nagari	52 Nagari	Adanya kegiatan pembangunan yang baik dinagari	100%	60.000.000				
1 22 1 22 02 17 05	Penunjang administrasi proyek PNPM-MP	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembayaran honor, operasional, ATK dan lain sebagainya	260 Jorong	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	750.000.000			260 jorong-52 Nagari	
1 22 1 22 02 17 06	Koordinasi Dewan Penyantun PKK	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dewan penyantun PKK	11 Kec.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan program pokok PKK dan penguatan Kader PKK	100%	150.000.000			11 Kec.	
1 22 1 22 02 17 07	Rapat koordinasi dan pembinaan pokjanal posyandu	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya rapat-rapat dan pembinaan pokjanal posyandu di nagari-nagari	11 Kec.	Terbinanya pokjanal posyandu di nagari dan menguasai tugas pokok dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat	100%	40.000.000			11 Kec.	
1 22 1 22 02 17 08	Pembinaan dan pemberian honor kader posyandu	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembinaan dan pemberian honor kader posyandu	100 x 12 bln (13.200)	Optimalnya kinerja kader posyandu	100%	990.000.000			220 Posyandu	
1 22 1 22 02 17 09	Pemberdayaan kapasitas pengelola Pasar Nagari	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananaya sosialisasi, evaluasi man minitoring terhadap pengurus dan pasar nagari	20 Pasar	meningkatkan kapasitas dan krmampuan pengelola Pasar Nagari	100%	50.000.000			Nagari	
1 22 1 22 02 17 10	Pembinaan dan pemberian honor Pengelola Raskin	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pemberian beras Miskin kepada masyarakat	260 Jorong	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan	100%	377.875.000			52 Nagari	
1 22 1 22 02 17 11	Sosialisai Pengembangan ABS-SBK Bagi Ninik Mamak Penghulu Suku	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Adanya pengembangan ABS-SBK bagi ninik mamak penghulu suku	52 Nagari	Memberikan Informasi tentang ABS-SBK dan meningkatkan pengetahuan Ninik Mamak	80%	101.193.500			Dharmasraya	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 22 1 22 02 17 12	Pelatihan Bamus Nagari Dalam Tata Cara Penyusunan Peraturan Nagari	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terlaksananya pembinaan terhadap Anggota Bamus nagari	52 Nagari	Meningkatkan kinerja Bamus Nagari yang dapat meningkatkan kemajuan Nagari	100%	90.000.000			Dharmasraya	
1 22 1 22 02 17 13	Koordinasi dan Pembinaan Serta Lomba Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat		Terbinanya dan terpacunya KAN untuk meningkatkan prestasi	52 Nagari	Adanya Kerapatan Adat Nagari yang berprestasi yang mewakili Kab Ke Tingkat Prov	90%	130.000.000			Dharmasraya	
1 22 1 22 02 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah							75.000.000	-	-		
1 22 1 22 02 18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama dan Budaya Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Bintek Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Asset Nagari	Terlaksananya Bimbingan tentang Pengawasan Keuangan Nagari	52 Nagari	Meningkatnya Kinerja Perangkat Nagari	90%	75.000.000			Dharmasraya	
				JUMLAH				15.202.962.750	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							191.486.250				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							60.552.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							30.000.000				
1 24	BIDANG KEARSIPAN							5.413.699.500				
1 24 1 24 01 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan							90.462.500	-	-		
1 24 1 24 01 15 01	Pembangunan data base informasi Kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Data base arsip daerah	1 paket	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	80%	25.000.000			KPAD	
1 24 1 24 01 15 05	Pengadaan Sarana Penyimpan Arsip	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Pengadaan peralatan pengamanan dan penyimpanan arsip	1 paket	Tersedianya Display foto, kotak penyimpan kartu kendali, dll	75%	20.000.000			KPAD	
1 24 1 24 01 15 06	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya BinteK Pengelolaan Arsip Dinamis bagi SKPD	1 Keg (3 Hari)	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Arsip SKPD	50%	45.462.500			Kabupaten	
1 24 1 24 01 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah							5.223.237.000	-	-		
1 24 1 24 01 16 01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpan Arsip	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terealisasinya pengadaan sarana penyimpanan arsip	1 paket	Tertata dan tersimpannya arsip SKPD Kabupaten Dharmasraya	80%	120.000.000			Kabupaten	
1 24 1 24 01 16 02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	2 SKPD	Terdata dan Tertatanya Dokumen/Arsip 2 SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku	75%	20.237.000			Kabupaten	
1 24 1 24 01 16 03	Penduplikatan Dokumen/ Arsip Daerah Kedalam Bentuk Informatika	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Penduplikatan Dokumen/Arsip daerah bentuk informatika	1 paket	Terhimpunnya dokumen/Arsip Pejabat Daerah (Bupati, Wabup, Anggota DPRD & Ex. Pejabat Kab. Dharmasraya)	70%	58.000.000			Kabupaten	
1 24 1 24 01 16 05	Pembangunan Depo Arsip	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terealisasinya pembangunan depo arsip	1 Paket	Tersimpan dan terselamatkannya arsip SKPD Kabupaten Dharmasraya	80%	5.000.000.000			Kabupaten	



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 24 1 24 01 16 06	Akuisis/penarikan Arsip Statis Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terkumpulnya Arsip statis SKPD	1 Paket	Terhimpunnya dan terselamatkannya arsip Statis Daerah	80%	25.000.000			Kabupaten	
<b>1 24 1 24 01 17</b>	<b>Program Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah</b>							<b>20.000.000</b>	-	-		
1 24 1 24 01 17 02	Pemeliharaan rutin/ Berkala arsip daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Pemeliharaan rutin dokumentasi/peta daerah sarana/displai	1 paket	Terpeliharanya arsip daerah yang ada di KPAD	50%	20.000.000			KPAD	
<b>1 24 1 24 01 18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan</b>							<b>80.000.000</b>	-	-		
1 24 1 24 01 18 01	Penyusunan dan Penerbitan naskah Sumber Arsip	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Pembuatan Pedoman jadwal masa simpan dan masa musnah arsip daerah Kab.Dharmasraya	1 paket	terbitnya Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Jadwal Retensi Arsip yang telah disetujui oleh ANRI	80%	25.000.000			Kabupaten	
1 24 1 24 01 18 04	Pembinaan/Supervisi Kearsipan kepada SKPD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pembinaan /supervisi kearsipan kepada SKPD, Camat dan Nagari	1 keg	Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan sistem kearsipan pada SKPD, Camat dan Nagari	50%	25.000.000			Kabupaten	
1 24 1 24 01 18 05	Dokumentasi dan Publikasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya data dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah	1 Keg	Terhimpunnya data dan dokumentasi kegiatan pemerintah untuk disajikan menjadi sebuah bacaan	80%	30.000.000			Kabupaten	
<b>1 01</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>620.000.000</b>	-	-		
<b>1 01 1 24 01 21</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>							<b>620.000.000</b>	-	-		
1 01 1 24 01 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Nagari, sekolah dan taman baca	Peningkatan minat dan budaya baca	1000 orang	Terwujudnya budaya membaca di kalangan pelajar dan masyarakat	1	120.000.000			perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca	perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca
1 01 1 24 01 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	pelajar tingkat SD/MI se-kab. Dharmasraya	Berkembangnya minat dan budaya baca	104 orang	Terpilihnya pemenang lomba	6 orang	85.000.000			kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi
1 01 1 24 01 21 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat /	Pengembangan SDM Tenaga Pengelola Perpustakaan	90 org	Peningkatan SDM tenaga pengelola perpustakaan	0,8	90.000.000			kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1 01 1 24 01 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Tersedia bahan bacaan	5.000 Eksamplar	Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	5.000 Eksamplar	250.000.000			perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca	perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca
1 01 1 24 01 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	perpustakaan nagari, perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Terlaksananya sosialisasi PERDA tentang perpustakaan umum daerah	150 orang / 1 paket	Terciptanya suatu pemahaman peraturan tentang perpustakaan	0,8	50.000.000			kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi
1 01 1 24 01 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	perpustakaan umum daerah Kab. Dharmasraya	Terpenuhinya kebutuhan akan kelengkapan buku	10.000 eksamplar	Terjaganya kondisi buku	10.000 eksamplar	15.000.000			kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi
1 01 1 24 01 21 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	perpustakaan umum daerah Kab. Dharmasraya	Menghitung, reservasi dan konservasi bahan bacaan perpustakaan daerah	15.000 eksamplar	Tersedianya bahan bacaan perpustakaan daerah	15.000 eksamplar	10.000.000			kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi
JUMLAH								6.315.737.750	-	-		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							395.984.850				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							201.861.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							25.000.000				
2 01	BIDANG PERTANIAN							3.718.799.000	300.000.000	21.561.900.000		
2 01 2 01 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							816.855.000	-	3.544.400.000		
2 01 2 01 01 15 12	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)		pupuk subsidi	terlaksananya tugas dan fungsi KP3	1 Paket	Tersalurnya Pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani	1 Paket	35.000.000	0	35.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 15 13	Pengembangan PUAP		agribisnis pedesaan	Meningkatnya Usaha agribisnis di pedesaan	70 Gpktn	berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan	70 Gpktn	90.000.000	0	1.800.000.000	Dharmasraya	
2 01 2 01 01 15 14	SL Iklim		- Kelompok tani pemakai air	meningkatnya PSK petani dalam pengelolaan iklim dan air irigasi	5 paket	termanfaatnya Air secara efektif dan efisien untuk usaha pertanian	5 paket	10.000.000	0	250.000.000	IX Koto, Timpeh	
2 01 2 01 01 15 15	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Tanaman Pangan							145.940.000	0	1.459.400.000		
	- SLPTT Padi Non Hibrida			terlaksananya SLPTT	300 SL	meningkatnya SDM Petani	300 SL				11 Kecamatan	
	- SLPTT Padi Lahan Kering		SDM petani	(Padi,Jagung,Kedelai)	40 SL	dalam pengelolaan Padi	40 SL					
	- SLPTT Jagung Hibrida			di tingkat Petani	50 SL	dan Palawija	50 SL					
	- SLPTT Kedelai				5 SL		5 SL					
2 01 2 01 01 15 16	Pengembangan Penangkar Tanaman Hias		Petani tanaman hias	Terlaksananya percontohan tanaman hias	1 Paket	berkembangnya Usaha tanaman hias di tingkat petani	1 Paket	20.915.000	0	0	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 15 17	Gerakkan Pensejahteraan Petani (GPP)		masyarakat miskin	Terlaksananya pegembangan usaha tani produktif (bibit buah-buahan)	9 Paket/ nagari	Meningkatnya kesejahteraan petani	9 Paket/ nagari	300.000.000			Banai, Sungai Dareh, Sikabau, Gunung Medan, Sitiung, Sialang Gaung, Koto Salak, Pulau Mainan, Kurnia Kt Salak	
2 01 2 01 01 15 18	Koodinasi gerakan terpadu pensejahteraan petani			meningkatnya pendapatan keluarga petani	13 nagari				V			
2 01 2 01 01 15 19	Pengembangan jagung di GPP			berkembangnya penggunaan benih unggul dan tanaman penerapan teknologi jagung					V			
2 01 2 01 01 15 20	Penas Tani		SDM petugas dan petani	terlaksananya Penas tani bagi petugas dan petani		meningkatnya pengetahuan petugas dan petani		125.000.000			Jawa Timur	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 2 01 01 15 21	Data Base komoditi tanaman pangan dan hortikultura		data base lahan	terlaksananya pengumpulan database komoditi tanaman pangan dan hortikultura	1 Paket	tersedianya data base komoditi tanaman pangan dan hortikultura	1 Paket	90.000.000			11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							262.000.000	0	3.218.500.000		
2 01 2 01 01 18 11	Bantuan RP3O (rumah percontohan pupuk organik)		- Peningkatan penggunaan pupuk organik	Terlaksananya Rumah percontohan Pupuk organik	2 Unit	Meningkatnya Penggunaan Pupuk organik	2 Unit	10.000.000	0	200.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 18 12	Bantuan Traktor Roda 2		- Peningkatan penggunaan alsin	Tersedianya Traktor roda 2	10 Unit	Meningkatnya Areal Tanam Tanaman Padi	10 Unit	7.500.000	0	150.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 18 13	Pengembangan UPJA		- UPJA	Terlaksananya pengembangan UPJA	10 Unit	Meningkatnya fungsi UPJA dalam Pelayanan petani	10 Unit	12.500.000	0	12.500.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 18 14	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)		Pupuk Organik	Terlaksananya Pembangunan UPPO (kandang, alat pengolahan pupuk, sapi 35 ekor)	2 Paket	Tersedianya Pupuk Organik di tingkat Petani	2 Paket	35.000.000	0	700.000.000	Koto Salak, Asam Jujuhan	
2 01 2 01 01 18 15	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan				(4 paket)			20.000.000		392.000.000		
	- Bantuan Treser			Tersedianya Alat	12 Unit	Meningkatnya Kualitas	12 Unit				- Tiumang	
	- Bantian Padi Mower		Kualitas hasil panen padi	Pasca Panen di	12 Unit	hasil panen padi	12 Unit				- Timpeh	
	- Bantuan Reafer			Tingkat Petani	8 Unit		8 Unit				- Koto Salak	
	- Bantuan Terpal				64 Lembar		64 Lembar				- Sitiung	
2 01 2 01 01 18 16	Fasilitasi alat pasca panen			tersedianya alat pasca panen					V			
2 01 2 01 01 18 17	Pengembangan RMU, Lantai Jemur dan jemur (Dirjen P2HP)		kualitas beras	terlaksananya pengembangan RMU (Rice Milling Unit), lantai jemur dan bangunan	6 Unit	tersedianya Hasil Produksi yang berkualitas baik	6 Unit	117.000.000	0	1.764.000.000	Pulau Punjung, sitiung, koto baru	
2 01 2 01 01 18 18	Pembinaan dan Antisipasi serangan OPT		sarana pengendalian OPT	terlaksananya pembinaan dan antisipasi serangan OPT	1 Paket	tersedianya sarana pengendali OPT	1 Paket	60.000.000			11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 18 19	Fasilitasi sarana brigade dan pengendalian serangan OPT			terkendalnya serangan OPT utama di daerah eksplosif					V			
2 01 2 01 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							2.639.944.000	300.000.000	14.799.000.000		
2 01 2 01 01 19	Cetak Sawah (dana TP-bansos)		Luas baku lahan sawah	Terlaksananya cetak sawah baru (@10jt perhektar)	1000 Ha	Meningkatnya luas area tanam padi		250.000.000	0	10.000.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 19	Perluasan areal Hortikultura (C11)		Luas baku lahan hortikultura	pengembangan lahan hortikultura	50 Ha	Meningkatnya luas tanaman Hortikultura	50 Ha	12.500.000	0	250.000.000	Koto Besar, IX Koto	
2 01 2 01 01 19	Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian		Produktivitas/optimalisasi lahan	Meningkatnya Produktivitas Lahan	300 Ha	Meningkatnya Produksi Pertanian	300 Ha	30.000.000	0	675.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 19	Metode SRI Mendukung Tanaman Pangan		Produktivitas padi sawah	Terwujudnya Penghematan Pemakaian Air untuk usaha tani padi sawah	300 Ha	Meningkatnya produktifitas padi sawah	300 Ha	30.000.000	0	675.000.000	Tiumang, Koto Salak, Sitiung	
2 01 2 01 01 19	Pemasyarakatan padi tanam sabatang (PTS)			meningkatnya penerapan sistem PTS					V			
2 01 2 01 01 19	Pembangunan Jalan Pertanian (JALAN USAHA TANI)		sarana transportasi petani	Terwujudnya Pembangunan Jalan usaha tani	5 Km	Lancarnya Transportasi di Lahan Usaha Tani	5 Km	25.000.000	0	500.000.000	Koto Baru, IX Koto, Timpeh, Koto Salak	
2 01 2 01 01 19	Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jides)		optimasi pemakaian air irigasi	Terlaksananya Pengembangan dan perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani	1000 Ha (DI)	Terwujudnya Optimasi pemanfaatan Air Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1000 Ha	50.000.000	0	1.000.000.000	11 Kecamatan	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 2 01 01 19	PemberdayaanP3A		P3A	Meningkatnya Pengelolaan sarana Irigasi oleh P3A	5 Paket	Meningkatnya Produksi Padi melalui pengeloaan sarana Irigasi oleh P3A	5 Paket	10.000.000	0	125.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 19	Pembangunan Embung/DAM Parit		- Air irigasi untuk usaha pertanian	terlaksananya pembangunan embung/ dam parit di kawasan pertanian	3 Unit	Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	3 Unit	10.000.000	0	180.000.000	- IX Koto	
2 01 2 01 01 19	Penangkar Benih Padi Sawah		Benih unggul bersertifikat	terlaksananya penangkar benih padi sawah	50 Ha	tersedianya Benih Unggul besertifikat tanaman pangan	50 Ha	23.400.000	0	234.000.000	11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 19	Pengembangan Kawasan Agribisnis hortikultura											
	- Kawasan Manggis			terlaksananya	100 Ha	terwujudnya	100 Ha	18.000.000	0	180.000.000	- IX Koto	
	- Kawasan Jeruk		Kawasan hortikultura	pengembangan	10 Ha	pengembangan kawasan	10 Ha	60.000.000	0	0	- Sitiung	
	- Kawasan Duku			kawasan Hortikultura	10 Ha	Hortikultura yang	10 Ha	120.000.000	0	0	- Koto Baru	
	- Kawasan Salak				20 Ha	produktif	20 Ha	240.000.000	0	0	- Sungai Rumbai	
2 01 2 01 01 19	Agribisnis Cabe		Petani cabe	terlaksananya percontohan tanaman cabe Kopay (pengolahan s/d pemasaran)	1 Paket	berkembangnya Usaha tani cabe di tingkat petani	1 Paket	57.036.000			11 Kecamatan	
2 01 2 01 01 19	Penangkar Bibit Hortikultura		bibit unggul hortikultura	Terlaksananya penangkaran bibit hortikultura				1.590.000.000				
	- Durian Atut				60000 btg	tersedianya bibit horti	60000 btg		0	0	- Sungai Dareh	
	- Duku Koto Baru				60000 btg	bersertifikat di tingkat	60000 btg				- Koto Baru	
	- Salak Kurnia				60000 btg	Petani	60000 btg				- Sungai Rumbai	
2 01 2 01 01 19	Pengawasan mutu dan sertifikasi benih			meningkatnya pengawasan dan pelayanan sertifikasi benih					V			
				Bantuan bibit cabe kopay	1 paket							
2 01 2 01 01 19	Pengembangan pembibitan buah-buahan di nagari			tersedianya bibit buah-buahan				300.000.000				
2 01 2 01 01 19	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan		petani miskin	Terlaksananya pengembangan usaha pertanian di tingkat petani	1 Paket	Terwujudnya Ketahanan pangan di tingkat petani	1 Paket	114.008.000	0	980.000.000	11 Kecamatan	
			JUMLAH					4.341.644.850	300.000.000	21.741.900.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 2.02.01 - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							523.270.500				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							99.376.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							50.000.000				
2 01	BIDANG PERTANIAN							5.246.080.000	2.357.500.000	3.934.475.000		
2 01 2 02 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							330.000.000	2.302.500.000	1.140.000.000		
2 01 2 02 01 15 01	Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis tanaman perkebunan (pengendalian OPT)		Petani perkebunan	Terlaksananya pelatihan OPT	180 Orang	Peningkatan produksi komoditi perkebunan	6 Kali	45.000.000				
2 01 2 02 01 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani		Kelompok UPPB	Terlaksananya pelatihan pada kelompok UPTB	2 UPPB	Peningkatan mutu Produksi bahan Olahan Karet	2 Nagari	60.000.000			Sitiung III dan Koto Padang	
2 01 2 02 01 15 08	Gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan		Petugas lapangan	berkurangnya serangan hama	25 Orang	Peningkatan produksi komoditi perkebunan	1 Kali		140.000.000			
2 01 2 02 01 15 09	Gerakan pemangkasan kakao		Petani kakao	Terlaksananya pelatihan pemangkasan kakao pada kebun kakao masyarakat	100 Ha	Terpangkasnya kakao secara baik dan benar	100 Ha		75.000.000			
2 01 2 02 01 15 10	Pengawalan kegiatan revitalisasi perkebunan		Pengawalan kegiatan APBN	Terkawalnya kegiatan revitalisasi perkebunan	1 Paket	Peningkatan luas Perkebunan karet dan kelapa sawit	1 Paket	25.000.000			Kab.	
2 01 2 02 01 15 11	Pengembangan tanaman karet rakyat		Penyaluran bibit karet	Terlaksananya penyaluran bibit karet pada masyarakat	100.000 bgt	Tersalurkannya bibit karet pada masyarakat	100.000 bgt		1.000.000.000		Kab.	
2 01 2 02 01 15 12	Pengembangan kelapa sawit		Penyaluran bibit sawit	Terlaksananya penyaluran bibit sawit pada masyarakat	15.000 Btg	Tersalurkannya bibit sawit pada masyarakat	15.000 Btg		600.000.000		Kab.	
2 01 2 02 01 15 13	Perluasan areal		Perluasan areal kebun karet	Terlaksananya perluasan areal perkebunan karet masyarakat	100 ha	Meningkatnya luasan kebun karet masyarakat	100 ha			440.000.000	Kab	
2 01 2 02 01 15 14	Optimalisasi lahan		optimalisasi kebun	Terlaksananya optimalisasi kebun masyarakat	100 ha	Meningkatnya produksi kebun masyarakat	50 ha			400.000.000	Kab	
2 01 2 02 01 15 15	Pengembangan agen hayati/Non pestisida		agen hayati	Terlaksananya pengembangan agen hayati	5 kelp.	Terlatihnya petani dalam pembuatan agen hayati	5 kelpk		50.000.000		Kab	
2 01 2 02 01 15 16	Pemeliharaan kebun induk karet sertifikasi/pemurnian kebun induk		biji karet bermutu	Terlaksananya pemurnian kebun induk karet	10 ha	Terpeliharanya kebun induk karet	10 ha		100.000.000		Kab	
2 01 2 02 01 15 17	Pengembangan dan pembinaan nagari model pembangunan kakao			adanya model pengembangan kakao					337.500.000			
2 01 2 02 01 15 18	Peningkatan penerapan pasca panen kakao			meningkatnya biji kakao yang difermentasi					V			

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 2 02 01 15 19	Integrasi tanaman perkebunan dan ternak sapi		Kelompok tani	Terlaksananya integrasi tanaman perkebunan dan ternak sapi	3 Kelp. Tani	Terintegrasinya usaha perkebunan dan perternakan	3 Kel. Tani			300.000.000	Kab	
2 01 2 02 01 15 20	Dana pendamping APBD I		Kelancaran kegiatan APBD I	Terlaksananya pendampingan terhadap kegiatan yg bersumber dari dana APBD I	1 Tahun Anggaran	Terlaksananya kegiatan dg dumber dana dari APBD I	1 Tahun Anggaran	200.000.000			Kab	
2 01 2 02 01 18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN							155.000.000	55.000.000	0		
2 01 2 02 01 18 09	Pemeliharaan kebun karet blok penghasil latek tinggi		karet penghasil Buah untuk batang bawah	Terlaksananya pemeliharaan kebun karet blok penghasil latek tinggi	10 ha	Terpeliharanya Blok Kebun karet penghasil latek tinggi	10 ha	50.000.000			S. Atang, (Kec P.LaweH)	
2 01 2 02 01 18 10	Pemeliharaan kebun entres karet		kebun entres	Terlaksananya pemeliharaan kebun entres karet	3 Ha	Terpeliharanya kebun entres karet unggul	3 Ha	80.000.000			P. Punjung (1 Ha), Sitiung III (3 Ha)	
2 01 2 02 01 18 11	Pemeliharaan kebun induk kakao		Kebun kakao	Terlaksananya pemeliharaan kebun induk kakao	5 ha	Terpeliharanya kebun induk kakao	5 ha		55.000.000		Kab	
2 01 2 02 01 18 12	Pemeliharaan Kebun Demplot Karet		kebun demplot	Terlaksananya pemeliharaan kebun demplot karet	5 ha	Terpeliharanya demplot karet	5 ha	25.000.000			Blok A Sitiung I	
2 01 2 02 01 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN							850.000.000	0	0		
2 01 2 02 01 19 08	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil perkebunan (lanjutan pasar lelang)		Pasar lelang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar lelang	1 unit	Terbangunnya sarana dan prasarana pasar lelang	1 unit	500.000.000			Kec. S. Rumbai	
2 01 2 02 01 19 09	Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan		Perkebunan swasta	Pengumpulan PAD sektor perkebunan target 5 miliar	6 prsh swasta	Berjalanya kerjasama dengan mitra usaha	seluruh mitra usah dan perkebunan swasta	350.000.000				
2 01 2 02 01 30	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SARANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN							2.840.000.000	0	2.794.475.000		
2 01 2 02 01 30 01	Pendampingan kegiatan Dirjen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 2013		Kelancaran kegiatan P2HP sebanyak 1 paket	Terlaksananya kegiatan pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan	1 Paket	Pengawalan kegiatan Dirjen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	1 Paket	65.000.000			Kab.	
2 01 2 02 01 30 02	Pembangunan jalan produksi		jalan kebun masyarakat	Terlaksananya pembangunan jalan produksi dilokasi produksi perkebunan	APBD II 15 km/ APBN 15 km	Meningkatnya pemasaran komoditi perkebunan masyarakat	30 Km	1.500.000.000		1.500.000.000	Kab.	
2 01 2 02 01 30 03	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna, Optimalisasi UPTD dan Laboratorium tanah dan daun		laboratorium tanah & daun 1 unit, dan UPTD 1 unit	Penyediaan sarana dan prasana teknologi perkebuna tepat guna	2 unit	berfungsinya UPTD dan Labotratorium tanah dan daun	2 unit	350.000.000			Kec. Punjung, S.Rumbai.	
2 01 2 02 01 30 04	Peremajaan kebun karet		Kebun masyarakat yang sudah tdk produktif/tua	Terlaksananya peremajaan kebun karet masyarakat seluas 350 ha dg rincian dana APBD I dan II 100 ha dan APBN 250 ha	500 Ha	Teremajakannya kebun karet masyarakat	500 Ha	500.000.000		1.294.475.000	Kab	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 2 02 01 30 04	Pengawasan kegiatan pembangun sarana dan prasarana perkebunan thn 2013 ( Dirjen PSP)		Kelancaran kegiatan Dirjen PSP	Terlaksananya pengawasan kegiatan Dirjen PSP	1 Paket	Terkawalnya kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana perkebunan	1 Paket	75.000.000			Kab	
2 01 2 02 01 30 05	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi (dana DAK)		Kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK	Terlaksananya pengawasan kegiatan DAK	1 Paket	Terkawalnya kegiatan DAK (pembuatan jalan produksi)	1 Paket	350.000.000			Kab	
2 01 2 02 01 31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PERKEBUNAN BERKELANJUTAN							1.071.080.000	-	-		
2 01 2 02 01 31 01	Pembibitan Karet		bibit karet kualitas baik	Terlaksananya pembibitan karet	200.000 btg	Tersedianya bibit karet berkualitas baik	200.000 btg	500.000.000			Kab	
2 01 2 02 01 31 02	Pemetaan wilayah perkebunan swasta/Pengukuran Ulang Lahan Perkebunan Swasta		Perusahaan perkebunan swasta	Terlaksananya pengukuran wilayah perkebunan swasta	1 Paket	Tersedianya peta wilayah perkebunan swasta	1 Paket	500.000.000			Kab	
2 01 2 02 01 31 03	Pendampingan kegiatan Dirjenbun tahun 2013		kegiatan Dirjenbun	Pengawasan kegiatan Dirjenbun	1 Paket	Terkawalnya kegiatan Dirjenbun	1 Paket	71.080.000			Kab	
2 02	BIDANG KEHUTANAN							1.615.000.000	0	3.750.000.000		
2 02 2 02 01 15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN							390.000.000	0	0		
2 02 2 02 01 15 05	Optimalisasi PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak)		2 Perusahaan kehutanan	Terlaksananya optimalisasi PNBP	1 Paket	Optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan	70%	50.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 02 2 02 01 15 08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan		Hasil hutan pada 11 Kec	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan	11 Kec	Terkendalinya peredaran hasil hutan di wilayah Kab. Dharmasraya	70%	85.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 02 2 02 01 15 10	Pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu		Hasil hutan bukan kayu 5 jenis	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu	5 Jenis	Terkelolanya hasil hutan bukan kayu	70%	70.000.000			Kec. P.Punjung, Sitiung, IX Koto	
2 02 2 02 01 15 11	Pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK		IUIPHHK sebanyak 7 Perusahaan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK	7 Persh	Terkendali dan terawasinya IUIPHHK yg ada di Wilayah Kab. Dharmasraya	80%	30.000.000			Kec. P.Punjung, IX Koto, Sitiung, S.Rumbai	
2 02 2 02 01 15 12	Pengendalian dan pengawasan pada IPKL		IPKL sebanyak 5 Perusahaan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IPKL	5 Persh kayu	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IPKL yg ada di Wilayah Kab. Dharmasraya	80%	25.000.000			Kec. P.Punjung, IX Koto, Asam Jujuhan	
2 02 2 02 01 15 1201	Pengendalian dan pengawasan pada IPKT		IPKT sebanyak 12 Perusahaan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IPKT	12 Persh kayu	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IPKT yg ada di Wilayah Kab. Dharmasraya	80%	35.000.000			Kec. P.Punjung, Sitiung	
2 02 2 02 01 15 1202	Pengendalian dan pengawasan pada IUPHHK		IUPHHK sebanyak 2 Perusahaan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IUPHHK	2 Persh kayu	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IUPHHK yg ada di Wilayah Kab. Dharmasraya	80%	20.000.000			Kec. IX Koto, Sitiung	
2 02 2 02 01 15 13	Inventarisasi potensi pemanfaatan kawasan hutan		Kayu rakyat/hutan rakyat pada 11 Kec	Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan potensi kayu rakyat	11 Kec	Terinventarisasinya dan terpetakannya potensi kayu rakyat	80%	75.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 02 2 02 01 16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN							1.010.000.000	0	3.750.000.000		



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 02 2 02 01 16 09	Penyusunan rancangan teknis penanaman bambu hitam di sepanjang DAS Batang Hari		rantek bambu hitam	Terlaksananya penyusunan rancangan teknis penanaman bambu hitam & mahoni di sepanjang DAS Batang Hari	1 dok	Tersusunnya dokumen rancangan teknis penanaman bambu hitam & mahoni di sepanjang DAS Batang Hari	5 buku	10.000.000			Kab. Dharmasraya	
2 02 2 02 01 16 09	Penanaman bambu hitam disepanjang DAS Batang Hari		Penanaman bambu hitam	Terlaksananya penanaman bambu hitam di sepanjang DAS Batang Hari	40 Km	Tertanamnya sepanjang DAS Batang Hari dengan bambu hitam	2 Kec	400.000.000			Tumang, P.Laweh	
2 02 2 02 01 16 10	Penyusunan rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat		rantek hutan rakyat	Terlaksananya penyusunan rancangan rantek pembuatan tanaman hutan rakyat	1 dok	Terlaksananya penyusunan rancangan rantek pembuatan tanaman hutan rakyat	5 buku	10.000.000			Kab.	
2 02 2 02 01 16 11	Pembuatan hutan rakyat		Penanaman diluar kawasan hutan	Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat	25 Ha	Meningkatnya produktifitas lahan diluar kawasan hutan	1	200.000.000			Silago	
2 02 2 02 01 16 12	<i>One Billion Indonesian Trees</i> (OBIT)		Penanaman pohon pada 11 Kec	Terlaksananya penanaman pohon pohon disetiap bentang lahan masyarakat	11 Kec	Tertanamnya lahan masyarakat yang kosong dengan pohon	70%	90.000.000			Kab.	
2 02 2 02 01 16 13	Penghijauan kawasan wisata		Penanaman pada 3 kawasan wisata	Terlaksananya penghijauan pada kawasan wisata	3 Kec	Hijau dan asrinya kawasan wisata	80%	75.000.000			P.Punjung, Sitiung, Koto Baru	
2 02 2 02 01 16 14	Rantek Pembuatan UPSA		Tersedianya buku rancangan UPSA sebanyak 5 buku	Terlaksananya penyusunan rantek pembuatan UPSA	1 dok	Tersedianya dokumen rantek pembuatan UPSA	5 buku	75.000.000			Kab.	
2 02 2 02 01 16 15	Pembuatan UPSA		Areal diluar kawasan hutan seluas 10 ha	Terlaksananya pembuatan UPSA 1 unit	10 Ha	Tersedianya areal percontohan UPSA	1 Unit	150.000.000			Timpeh	
2 02 2 02 01 16 16	Pembuatan areal model jernang		Areal diluar kawasan hutan seluas 10 ha	Terlaksananya pembuatan areal model jernang	1 Unit	Terbangunnya unit percontohan tanaman jernang	10 Ha			500.000.000	Kec. IX Koto, Sitiung	
2 02 2 02 01 16 17	Pembuatan Kebun Bibit Rakyat		Bibit kehutanan	Terlaksananya pembuatan KBR	35 Unit	Tersedianya bibit berkualitas baik untuk masyarakat	100%			1.250.000.000	Kab.	
2 02 2 02 01 16 18	Pembuatan persemaian permanen		Persemaian kehutanan	Terlaksananya pembuatan persemaian permanen	1 Unit	Tersedianya persemaian permanen untuk tanaman kehutanan dan perkebunan	1 Unit			2.000.000.000	Timpeh	
2 02 2 02 01 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM							215.000.000	0	0		
2 02 2 02 01 17 01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		Areal dalam dan luar kawasan hutan	Terlaksananya pemantauan hot spot untuk pencegahan kebakaran	11 Kec	Berkurangnya kawasan hutan yang terbakar	70%	55.000.000			Kab.	
2 02 2 02 01 17 05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan		Masyarakat sekitar kawasan hutan	Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	3 Kali	Berkurangnya luasan hutan yang rusak	70%	70.000.000			Kab.	
2 02 2 02 01 17 06	Operasi pengamanan hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging		Patroli pengamanan kawasan hutan	Terlaksananya patroli dalam rangka pemberantasan beredarnya kayu illegal	11 Kec	Berkurangnya pelaku illegal logging di kawasan hukum Kab. Dharmasraya	70%	90.000.000			Kab.	
			JUMLAH					7.533.726.500	2.357.500.000	7.684.475.000		

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

[illegible]



NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 2 01 03 22 12	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) (DAK)		Melaksanakan dan mengawasi pengamanan produk pangan asal hewan	Terlaksananya kegiatan pengamanan produk bahan pangan asal hewan		Terjaminnya keamanan produk Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	90%	800.000.000			Pasar Se-Kab. Dharmasraya	
				Terealisasinya kegiatan pemeriksaan sampel Bahan Pangan asal Hewan		Terlindunginya mutu produk asal hewan yang ASUH	100%				Pasar Se-Kab. Dharmasraya	
				Termonitornya mutu Bahan Pangan Asal Hewan di tengah Masyarakat		Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram					Kabupaten Dharmasraya	
						Meningkatkan PAD Kabupaten Dharmasraya	60%				Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 22 13	Pelaksanaan embrio transfer (ET) di lokasi pembibitan ternak			tersedianya embrio beku sapi, tersedianya jasa pelayanan IB/ET, tersedianya peralatan laboratorium pakai habis					V			
2 01 2 01 03 25	Program Pencapaian Swasenbada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal							-	1.310.000.000	4.543.750.000		
2 01 2 01 03 25 01	a. Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal											
	- Pengadaan dan Pendistribusian Pejantan Pemacek		Meningkatkan kualitas anak hasil kawin alam	Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian Sapi jantan Pemacek	40 ekor	Meningkatnya anak hasil kawin alam (INKA)	40		460.000.000		Kabupaten Dharmasraya	
	- Pemeliharaan Unggas di Pedesaan		Meningkatkan populasi unggas pada peternak	Terlaksananya Pemeliharaan Unggas (Itik/ Ayam Kampung) di pedesaan	3 klp	Meningkatnya Pendapatan Petani Ternak	3 Klp			405.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengembangan Budidaya Aneka Ternak (Puyuh)		Melakukan pengembangan ternak puyuh	Terlaksananya pengembangan puyuh	2 Klp	Meningkatnya Pendapatan Petani Ternak	2 Klp			120.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengembangan Pembibitan Kambing			Terlaksananya pembibitan kambing	3 klp	Meningkatnya populasi ternak kambing	3 klp			360.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
						Meningkatnya Pendapatan Petani Ternak						
	- Pengembangan Integrasi Tanaman dan Ternak		Memfaatkan lahan dan limbah hasil olahan kelapa sawit intuk ternak	Terlaksananya Integrasi Sapi-Sawit	3 Klp	Meningkatnya Pendapatan Petani Ternak	3 klp			900.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
						Meningkatnya pemanfaatan sisa hasil tanaman perkebunan untuk pakan ternak						
						Meningkatnya pengetahuan petani dalam pembuatan pupuk organik dan penggunaannya dalam usahatani tanaman						

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	- Penguatan Pos IB		Meningkatkan pelayanan IB kepada masyarakat peternak	Terlaksananya pengembangan pos IB		Meningkatnya pelayanan IB pada masyarakat	3 paket			300.000.000	Pos IB Timpeh, Pos IB Koto Baru dan Pos IB Koto Salak	
	- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Petugas IB		Memudahkan petugas untuk pelayanan IB kepada masyarakat	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2	3 paket	Meningkatnya pelayanan IB pada masyarakat	2 unit			32.000.000	Pos IB Timpeh, Pos IB Koto Baru dan Pos IB Koto Salak	
2 01 2 01 03 25 02	b. Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal											
	- Kegiatan Insentif Sapi/Kerbau Betina Produktif		Merangsang peternak dalam perawatan sapi bunting	Terlaksananya insentif sapi/kerbau bunting sebanyak 1.280 ekor	3 klp	Mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak rakyat untuk mengembangbiakkan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan	4 klp			800.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
						Mendorong terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan registrasi sapi/kerbau betina produktif						
	- Kegiatan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif		Menghindari pemotongan sapi betina produktif	Terlaksananya penyelamaataan sapi/kerbau betina produktif sebanyak	120 ekor	Mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif, sekaligus memperbaiki produktivitasnya	2 klp			1.003.750.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengembangan Pembibitan Kerbau		Mengembangkan ternak kerbau	Terlaksananya pengembangan pembibitan kerbau	2 klp	Meningkatnya populasi ternak kerbau	1 klp			623.000.000	Kecamatan Sitiung	
	- Pengadaan Indukan Sapi Potong		Meningkatkan kualitas induk sapi	Terlaksananya peningkatan populasi bibit unggul	1 klp	Meningkatkan Populasi ternak sapi	1 klp		500.000.000		Kabupaten Dharmasraya	
	- GEMARAMPAK		Menyediakan hijauan pakan ternak yang berkualitas	Terlaksananya pengembangan Kebun HMT+Sapi/Kerbau	5 ha	Meningkatnya produksi HMT yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak	5 klp		350.000.000		Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 26	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara berkelanjutan							-	700.000.000	-		
2 01 2 01 03 26 01	- penyebaran ternak Sapi		Penambahan Populasi Ternak sapi	Terlaksananya peningkatan populasi bibit unggul	100 ekor	Meningkatkan Populasi ternak sapi	10 klp		700.000.000		Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 27	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							-	-	2.162.000.000		
2 01 2 01 03 27 01	a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian											
	- Pembangunan Embung		Menjamin ketersediaan air bagi ternak	Terlaksananya pembangunan embung	1 klp	Tersedianya air untuk mendukung usaha peternakan	4 unit			240.000.000		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
	- Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal		Menyediakan sumber air tanah	Terlaksananya pembangunan irigasi tanah dangkal	4 unit	Tersedianya sumber air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan	4 unit			240.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 27 02	b. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian				4 unit						Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengembangan Kebun HMT + Sapi/Kerbau		Menyediakan hijauan pakan ternak yang berkualitas	Terlaksananya pengembangan Kebun HMT+Sapi/Kerbau	3 Klp	Meningkatnya produksi HMT yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak	3 klp			582.000.000		
	- Penyaluran Pupuk Subsidi		Memanfaatkan limbah ternak dan meningkatkan pendapatan petani peternak	Terlaksananya pembangunan UPPO	2 klp	Pemanfaatan limbah/kotoran ternak menjadi pupuk organik	2 klp			700.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengembangan Jalan Produksi		Meningkatkan akses peternak dalam transportasi dan pengangkutan produksi	Terlaksananya pembangunan jalan produksi	4 km	Pembangunan dan peningkatan kapasitas atau rehabilitas jalan di kawasan sentra produksi peternakan	4 km			400.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
											Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 28	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani							-	-	990.000.000		
2 01 2 01 03 28 01	- Pengembangan Ternak Melalui SMD		Menambah wawasan peternak dalam beternak dan berkelompok	Terlaksananya pengembangan ternak melalui SMD	2 unit	Memajukan peternak dan kelompok dalam membangun kelompok agribisnis peternakan	3 klp			990.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
2 01 2 01 03 28 02	- Peningkatan SDM Petani Tentang teknis Peternakan dan Kelembagaan Kelompok ( GPP)		Menambah wawasan peternak dalam beternak dan berkelompok	terlaksananya pelatihan teknis peternakan dan kelompok Tani	1 pkt	Menambah wawasan kelompok dalam meningkatkan kinerja kelompok		√	√		Nagari GPP	
2 01 2 01 03 23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN							1.165.000.000	-	1.260.000.000		
2 01 2 01 03 23 01	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		melaksanakan survei pemetaan jaringan pemasaran produksi hasil peternakan	Terlaksananya survei pemetaan jaringan pemasaran produksi hasil peternakan	75%	Terciptanya jaringan bisnis pemasaran hasil peternakan Regional Sumbar, Riau, dan Jambi	75%	50.000.000			Sumbar, Riau, dan Jambi	
2 01 2 01 03 23 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan		Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pasar ternak	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pasar Ternak	0,75	Terlaksananya Pembangunan sarana penunjang lainnya dipasar ternak	3 Paket	750.000.000		860.000.000	Gunung Medan	
2 01 2 01 03 23 04	Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/ Promosi atas Hasil Produksi Peternakan (DAK)		Melaksanakan pengadaan angkutan daging berpendingin roda 3	Terlaksananya pengadaan angkutan daging berpendingin roda 3	100%	Terwujudnya jaringan bisnis pemasaran daging segar di pasar	100%	100.000.000		400.000.000		
2 01 2 01 03 23 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan		melaksanakan pemeliharaan rutin pasar ternak dan angkutan daging segar	Terlaksananya pemeliharaan rutin pasar ternak dan angkutan daging segar	75%	Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	75%	50.000.000			Pasar Ternak Gunung Medan	

[illegible]

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 05 2 01 03 20	Program Pengembangan Budidaya Ikan							4.150.000.000	150.000.000	500.000.000		
2 05 2 01 03 20 01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)		Meningkatkan populasi ikan	- Peningkatan produksi benih ikan	1 Paket	- Peningkatan produksi ikan konsumsi	1 Paket	3.500.000.000			Koto Baru	
2 05 2 01 03 20 03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)		Meningkatkan luas lahan budidaya perikanan	- Peningkatan luas lahan usaha budidaya ikan	1 Paket	- Peningkatan produksi ikan konsumsi	1 Paket	600.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 20 04	bantuan Induk Ikan Untuk UPR (DAK)		Meningkatkan populasi ikan	- Peningkatan produksi benih ikan	1 paket	- Peningkatan produksi ikan konsumsi	1 Paket	50.000.000	150.000.000		Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 20 05	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya		meningkatkan produksi perikanan	Peningkatan sarana produksi perikanan	7 paket	Peningkatan Produksi Perikanan	7 paket			500.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 24	Program Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air Tawar							2.050.000.000	-	-		
2 05 2 01 03 24 02	Pengembangan Kawasan Minakera (DAK)		Meningkatkan luas lahan budidaya perikanan	- Peningkatan lahan usaha budidaya di kebun rakyat	1 Paket	- Peningkatan pendapatan petani ikan	1 Paket	450.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 24 03	Pengembangan Kawasan Minapolitan (DAK)		Melaksanakan pelatihan bgi peternak dan pembudi dayaikan	Terlaksananya operasional dan Pemeliharaan Alat berat	3 Paket	Meningkatnya pertambahan luas kolam dan jumlah pembudidaya ikan	25 ha	1.550.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 24 04	Forum Pengembangan investasi dan Permodalan usaha		Melaksanakan forum invertasi, modal usaha dan pemasaran hasil perikanan	Terlaksananya peningkatan modal uasaha dan investasi	30%	Meningkatkan akses permodalan usaha	30%	50.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							725.000.000	-	-		
2 05 2 01 03 23 02	Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)		Menyediakan peralatan pengolahan ikan	Terlaksananya penyediaan peralatan pengolahan ikan	40%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Produksi ikan olahan	30%	330.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 23 03	Optimalisasi pemasaran hasil perikanan (DAK)		menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	Terlaksananya penyediaan sarana dan parasarana pemasaran hasil perikanan	40%	Berkembangnya pasar produksi hasil perikanan	30%	330.000.000			Kabupaten Dharmasraya	
2 05 2 01 03 23 04	Pengembangan Jaringan Pemasaran Distribusi Hasil Produksi Perikanan		Melaksanakan perluasan jaringan pemasaran	Terlaksananya jaringan pemasaran hasil produksi perikanan Sumbar-Jambi	20%	Terciptanya peta dan jaringan pemasaranproduk hasil perikanan	2 wilayah	65.000.000			Sumbar - Jambi	
			JUMLAH					11.484.033.450	2.245.000.000	10.618.250.000		



RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							554.091.280				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							177.020.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							25.000.000				
2 01	BIDANG PERTANIAN							3.820.841.000	1.955.000.000	805.000.000		
2 01 1 21 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							260.000.000	500.000.000	40.000.000		
2 01 1 21 01 15 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis (Pendampingan Program GPP-gerakan pensejahteraan petani)		Nagari yang menerima program GPP	Terlaksananya Program GPP Di Kabupaten ( <i>pembinaan lanjutan - 9 nagari</i> )	18 Kelompok	Berkembangnya Program GPP pada 18 Kelompok	18 Klp	100.000.000	500.000.000		5 nagari GPP 2011 + 4 nagari baru : Nagari Sungai Dareh, Gng Medan, Kurnia Selatan, Koto Salak	
2 01 1 21 01 15 07	SL- Agribisnis (diluar lokasi GPP)		Keltan potensial untuk buah naga, ayam broiler dan perikanan	Terlaksananya Sekolah Lapangan Bagi Pelaku Agribisnis	6 Paket	Berkembangnya Agribisnis Hortikultura(2 Klp),Perikanan(2 Klp),Pternakan (2 Klp)	11 Paket	90.000.000			Kec. Pl. Punjung, Sitiung, Sei Rumbai,Koto baru, Koto Salak, Tiumang	
2 01 1 21 01 15 08	Demplot Organik <i>Farming</i>		kelompok tani pada daerah sentra produksi	Terlaksananya Demplot Organik ( <i>pemberdayaan petani membuat pupuk sendiri/kompos</i> )	4 Unit	Meningkatnya Kemampuan Usaha Tani dengan pola Organik Farming	4 Unit	40.000.000		40.000.000	Kec. Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Pulau Punjung	
2 01 1 21 01 15 09	Temu Usaha/Work Shop Agribisnis		pelaku usaha, kontak tani, penyuluh	Terlaksananya Workshop Agribisnis	1 Kali	Meningkatnya Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis	1 Kali	30.000.000			P Punjung, IX Koto, Sitiung, Timpeh, K Baru, P Laweh, K Salak, S Rumbai	
2 01 1 21 01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							537.811.000	355.000.000	420.000.000		
2 01 1 21 01 16 01	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRT)		nagari yang rawan bencana dan banyak KK miskin	Tersedianya kebijakan bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan	11 Kecamatan	Dihasilkan rumusan, kebijakan untuk mewaspadaai situasi pangan dan gizi masyarakat	11 Kecamatan			50.000.000		
2 01 1 21 01 16 01	Penanganan Daerah Rawan Pangan (DANA TP) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan		penyusunan buku SKPG	Tersedianya Kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan	1 Paket	Adanya rumusan kebijakan untuk mewaspadaai kondisi pangan dan gizi masyarakat	1 Paket			40.000.000		
2 01 1 21 01 16 10	Pemantauan dan analisis Akses Pangan Pokok		Penyediaan informasi harga dan aksesibilitas pangan	Terselenggaranya pemantauan harga dan akses pangan pokok	Pasar se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya data harga dan Akses pangan pokok tingkat kabupaten	Pasar se Kabupaten	49.056.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 1 21 01 16 14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)		nagari yang memiliki lebih dari 30% KK miskin	Jumah DMP yang diberdayakan ( <i>UNTUK NAGARI YANG MEMILIKI LEBIH 30% KK MISKIN</i> )	1 Unit	Bekurangnya daerah rawan pangan	2 kelompok		130.000.000			
2 01 1 21 01 16 33	Pendampingan Kelembagaan Ketahanan Pangan dalam Akses Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Masyarakat		Pembinaan Gapoktan penerima Bansos tahun sebelumnya	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kegiatan P-LDPM	4 Gapoktan	Peningkatan kesejahteraan petani	4 Gapoktan	70.000.000				
2 01 1 21 01 16 34	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisa Ketersediaan Pangan		penyusunan buku NBM	Terlaksananya buku NBM kab. Dharmasraya	kabupaten	terealisasinya ketersediaan pangan kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan NBM	Kabupaten	58.755.000				
2 01 1 21 01 16 35	Statistik Ketahanan Pangan		data ketahanan pangan	Tersedianya data ketahanan pangan	11 Kecamatan	Statistik ketahanan pangan	11 Kecamatan	60.000.000				
2 01 1 21 01 16 36	Lumbung Pangan		penyediaan cadangan oangan di tingkat nagari/desa	Pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disemua tingkat wilayah, dikelola secara kelompok	1 Unit	Tersedianya cadangan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan	1 Unit	100.000.000		30.000.000		
2 01 1 21 01 16 37	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) (DANA TP)		pembinaan Gapoktan penerima dana Bansos P-LDPM	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kegiatan P-LDPM	4 Kecamatan	Peningkatan kesejahteraan petani ( <i>MENJAGA HARGA DI TINGKAT PETANI-BANSOS</i> )	4 Kelompok		225.000.000			
2 01 1 21 01 16 38	Pertumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		Gapoktan yang berada pada daerah sentra produksi	Terlaksananya penumbuha P-LDPM	2 Gapoktan			150.000.000		300.000.000		
2 01 1 21 01 16 14	Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)		berfungsinya DKP kabupaten	Lancarnya Operasional Dewan Ketahanan Pangan				50.000.000				
2 01 1 21 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan							935.000.000	300.000.000	120.000.000		
2 01 1 21 01 20 05	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan		optimalisasi dan pemantauan sistem LAKU	Terlasananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan	8 BPP	Berjalan sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertani	8 BPP	40.000.000			Pl.Punjung,IX Koto Silago,Sitiung,Timp eh,Koto Baru,Padang Laweh,Koto Salak,Sungai Rumbai	
2 01 1 21 01 20 06	Workshop KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)		KTNA, penyuluh, pelaku usaha	Terlaksananya Penyebaran Teknologi Pertanian Terapan diantara petani	2 kali	<i>Berkembangnya Teknologi Terapan ditingkat petani</i>	2 kali	40.000.000			4 BPP (pelaksanaanya di BPP Koto Baru dan Sitiung)	
2 01 1 21 01 20 07	Pelatihan Penyusunan Programa dan Monografi Penyuluhan,RKPP Penyuluh		penyuluh pertanian dan kehutanan	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Programa dan Monografi Penyuluhan	1 Paket	<i>Terprogram Programa dan Monografi Penyuluh,RKPP Penyuluh</i>	1 Paket	50.000.000			Kecamatan	
2 01 1 21 01 20 08	Penunjang Operasional BPP Pulau Punjung		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000		60.000.000	BPP	
2 01 1 21 01 20 09	Penunjang Operasional BPP Sitiung		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000			BPP	
2 01 1 21 01 20 10	Penunjang Operasional BPP Koto Baru		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000		60.000.000	BPP	
2 01 1 21 01 20 11	Penunjang Operasional BPP Sungai Rumbai		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000			BPP	
2 01 1 21 01 20 12	Penunjang Operasional BPP Timpeh		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000			BPP	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 1 21 01 20 13	Penunjang Operasional BPP Padang Laweh		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000			BPP	
2 01 1 21 01 20 14	Penunjang Operasional BPP IX Koto Silago		optimalisasi fungsi BPP	persentase kegiatan terlaksana di BPP	1 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi BPP	1 Paket	45.000.000			BPP	
2 01 1 21 01 20 15	Kegiatan PENAS TANI		meningkatkan wawasan KTNA, penyuluh dan petugas	Terselenggaranya kegiatan PENAS TANI Th. 2013	1 Paket	Terlaksananya menghadiri Kegiatan PENAS TANI di Jawa Timur	1 Paket	200.000.000			Jawa Timur	
2 01 1 21 01 20 16	Revitalisasi Kelembagaan Tani		meningkatkan fungsi kelompok tani dan Gapoktan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelompok Tani	60 Klp	Meningkatnya kemampuan kelompok tani ( <i>penigkatan kelas kelompok tani</i> )	120 Klp	150.000.000			Kabupaten, 11 Kecamatan	
2 01 1 21 01 20 17	Penyusunan Programa Penyuluhan		panduan PPL dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan	Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan	1 Paket	Terprogram Programa Penyuluh	1 Paket	50.000.000			Kabupaten, 8 BPP	
2 01 1 21 01 20 18	Temu Teknis Penyuluh dan Peneliti		meningkatkan wawasan dan pengetahuan penyuluh	Terlaksananya Pelatihan bagi Penyuluh	2 Kali	Meningkatnya Pengetahuan Teknis Penyuluh	2 Kali	60.000.000			Kabupaten	
2 01 1 21 01 20 19	Poster dan leaflet		media informasi	Terlaksananya Pembuatan Poster dan Leaflet	5 Unit	Tersedianya Poster dan Leaflet sebagai Sarana Penyuluhan	5 Unit	10.000.000			Kabupaten	
2 01 1 21 01 20 20	Baliho dan Banner		media informasi	Terlaksananya Pembuatan Baliho dan Banner	1 Paket	Tersedianya Baliho dan Banner sebagai media Penyuluhan	1 Paket	20.000.000			Kabupaten	
2 01 1 21 01 20 21	Replikasi BPP Model di Kecamatan		peningkatan peran dan fungsi BPP	Terlaksananya penerapan alih teknologi pertanian terhadap petani	3 Paket	Tersedianya lahan percontohan sebagai media penyuluhan di masing2 kecamatan	3 Paket		300.000.000		Kecamatan	
2 01 1 21 01 25	Program Peningkatan Diversivifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							628.030.000	-	225.000.000		
2 01 1 21 01 25 01	Lomba KWT (kelompok wanita tani) tingkat Kabupaten		KWT pelaksanan program pemanfaatan pekarangan	Terlaksananya Lomba KWT tingkat Kabupaten	KWT	Terlaksananya Lomba KWT tingkat Kabupaten		40.000.000				
2 01 1 21 01 25 02	Cadangan Pangan melalui Dana DAK		penyediaan cadangan pangan kabupaten	Tersedianya cadangan Pangan	Kabupaten	Tersedianya cadangan Pangan Tk.Kabupaten	Kabupaten	350.000.000				
2 01 1 21 01 25 03	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan KKN UNAND		fasilitasi KKN UND dan pemanfaatan pekarangan	Jumlah KWT yang diberdayakan (2,5 jt/kwt-dalam bentuk bibit)	10 Kelompok	Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarkat terhadap konsumsi pangan AB3	10 Kelompok	50.000.000		225.000.000		
2 01 1 21 01 25 04	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dalam Konsumsi Pangan AB3		pemanfaatan pekarangan melalui pembinaan KWT/PKK	Terlaksananya penmbinaan dan pengembangan pekarangan dan konsumsi pangan AB3	KWT	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan	KWT	99.770.000				
2 01 1 21 01 25 05	Lomba Cipta Menu AB3 Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Jambore PKK Tk.Provinsi		PKK Nagari	Terlaksananya lomba cipta menu AB3	KWT	Tumbuh dan berkembangnya produk olahan pangan lokal	KWT	88.260.000				
2 01 1 21 01 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana							1.460.000.000	800.000.000	-		
2 01 1 21 01 26 01	Pembinaan, Penumbuhan POS-IPAH (pos pelayanan agen hayati)		kelompok tani pada daerah sentra produksi	Terlaksananya Pembinaan dan Penumbuhan POS-IPAH	8 Unit	Meningkatnya Peranan POS-IPAH untuk menunjang Pengembangan Organik	8 Unit	40.000.000				
2 01 1 21 01 26 02	Pembangunan Gedung BPP Kec. Asam Jujuhan dan Tiumbang, Sei Rumbai (DAK)		kec yang belum memiliki BPP	Tersedianya gedung BPP untuk menunjang penyuluhan pertanian di kecamatan	3 unit	Tersedianya gedung BPP untuk menunjang penyuluhan pertanian di kecamatan	3 Unit	1.000.000.000	500.000.000			

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 01 1 21 01 26 03	Pengadaan Sarana Penyuluhan		penyediaan media informasi penyuluh	tersedianya media informasi tenaga penyuluhan	7 unit	meningkatnya efektifitas penyuluhan	7 unit	300.000.000	300.000.000			
2 01 1 21 01 26 04	Pengadaan Mobiler BPP IX Koto, Koto Salak, Timpeh dan Padang laweh		mobiler BPP	Penyediaan mobiler di BPP	4 unit	Tersedianya Mobiler di masing-masing BPP	4 unit	60.000.000				
2 01 1 21 01 26 05	Pengadan saung petani/ Pos penyuluh		Pos Penyuluhan	Lancarnya kegiatan penyuluhan berbasis cyber extention dan multi media Dan Mobiler BPP	3 unit	meningkatkan efektifitas penyuluhan		60.000.000				
				JUMLAH				4.576.952.280	1.955.000.000	805.000.000		

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							2.826.533.500				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							80.459.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							50.000.000				
2 03	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL							10.412.779.625				
2 03 2 03 01 15	Progam Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan							2.677.365.000	-	-		
2 03 2 03 01 15 08	Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan Pengawasan Teknis dan K3 Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan		Pengadaan kendaraan double gardan	Terlaksananya pengadaan kendaraan double gardan untuk kegiatan pengawasan teknis penambangan dan K3 lingkungan pertambangan batubara, mineral dan batuan	1(satu) unit kendaraan double gardan	Terawasinya IUP operasi produksi batubara, mineral dan batuan dalam musim penghujan dan jalan yang rusak.	80%	400.000.000				
2 03 2 03 01 15 10	Monitoring dan Pengawasan Produksi dan Penjualan Batubara, Mineral dan Batuan		IUP Operasi Produksi batubara, mineral dan batuan	Terlaksananya Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan batubara, mineral dan batuan.	17 IUP Operasi Produksi	Tercapainya kesamaan laporan produksi dan penjualan dari Pemegang IUP dengan produksi dan penjualan sebenarnya serta memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.	70%	127.365.000				
2 03 2 03 01 15 11	Monitoring dan Pengawasan Teknis dan K3 Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan		IUP Operasi Produksi batubara, mineral dan batuan	Terlaksananya Monitoring dan pengawasan teknis penambangan dan K3 lingkungan pertambangan batubara, mineral dan batuan	17 IUP Operasi Produksi	Tertibnya kegiatan usaha penambangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	70%	25.000.000				
2 03 2 03 01 15 12	Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan		1. Aparatur pemerintah (camat dan Wali Nagari) 2. Pemilik IUP	Bimtek Pertambangan Bagi aparaturn pemerintah dan pemiliki IUP	40 Orang	Meningkatannya wawasan dan pengetahuan bagi aparaturn pemerintah dan pemiliki IUP tentang pengelolaan pertambangan	80%	40.000.000				
2 03 2 03 01 15 15	Monitoring dan Pengawasan kegiatan reklamasi		IUP Operasi Produksi batubara, mineral dan batuan	Monitoring dan Pengawasan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemilik IUP Operasi Produksi batubara dan bijih besi.	4 (empat) IUP Operasi Produksi batubara dan bijih besi	Tertibnya kegiatan reklamasi dan pencairan jaminan reklamasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	80%	50.000.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 03 2 03 01 15 16	Evaluasi kelayakan penerbitan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan		IUP, IPR, IUPK maupun izin stockpile	Keluarnya Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan rakyat dan Izin Kegiatan Penunjang Usaha Pertambangan yang layak secara administrasi, teknis dan ekonomi	Permohonan IUP, IPR, IUPK maupun izin stockpile	Evaluasi kelayakan, pengecekan serta pematokan Izin usaha Pertambangan, Izin Pertambangan rakyat dan Izin Kegiatan Penunjang Usaha Pertambangan	80%	30.000.000				
2 03 2 03 01 15 17	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi PNPB Sektor Pertambangan		Pembayaran PNPB (iuran tetap dan royalti) <penerimaan negara bukan pajak>pemilik IUP Operasi Produksi batubara dan bijih besi	Terlaksananya movev dan rekonsiliasi setoran pembayaran PNPB (iuran tetap dan royalti) dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan	4 (empat) IUP Operasi Produksi batubara dan bijih besi	Meningkatnya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan	80%	95.000.000				
2 03 2 03 01 15 17	Penyusunan Draft Ranperda dan Ranperbup Pengelolaan Pertambangan		Ranperda dan Ranperbup Pengelolaan Pertambangan	Penyusunan Draft Ranperda dan Ranperbup Pengelolaan Pertambangan (Ranperda : batubara dan mineral, Ranperbup :izin pertambangan rakyat)	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	Tersedianya Ranperda dan ranperbup Pengelolaan Pertambangan	80%	50.000.000				
2 03 2 03 01 15 18	Fasilitasi kelayakan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR)		izin pertambangan rakyat (IPR) di darat dan disungai	Pembuatan dokumen study kelayakan, AMDAL, UKL-UPL, reklamasi dan pasca tambang	1. Pembuatan dokumen study kelayakan 7 (tujuh) paket	Terbitnya IPR sesuai peraturan perundangan yang berlaku	80%	1.860.000.000				
2 03 2 03 01 16	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan yang Berpotensi Merusak Lingkungan							60.000.000	-	-		
2 03 2 03 01 16 05	Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI)			Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)		Berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan	60%	60.000.000				
2 03 2 03 01 18	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan							55.861.250	-	-		
2 03 2 03 01 18 01	Pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi pemegang IUP eksplorasi	6 (enam) pemegang IUP Eksplorasi	Terpenuhi seluruh kewajiban pemegang IUP eksplorasi dari segi administrasi dan teknis	80%	55.861.250				
2 03 2 03 01 19	Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM							244.418.375	-	-		
2 03 2 03 01 19 01	Pengawasan pemakaian airtanah		Pemakai air tanah yang bersifat komersil (menengah ke bawah)	Terlaksananya pengawasan pemakaian air bawah tanah pada sektor kommersial, Perusahaan, penginapan,restoran, klinik dll	11 Kecamatan	Meningkatnya pajak air tanah	80%	43.550.500				
2 03 2 03 01 19 02	Evaluasi dan pemetaan wilayah perlindungan serta konservasi air bawah tanah		Peta Hidrogeologi	Terlaksananya kegiatan data dan informasi daerah resapan air bawah tanah dan kawasan konservasi air bawah tanah	1 kecamatan	Tersedianya data dan informasi daerah resapan air bawah tanah dan kawasan konservasi air bawah tanah	70%	73.795.500				
2 03 2 03 01 19 03	Bimtek perizinan dan pamakaian air tanah		Peningkatan perizinan pemakai air tanah dan pajak air tanah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pemakaian dan pajak air tanah	1 Paket	Tertibnya data pemakai air tanah untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak air tanah	80%	47.072.375				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
2 03 2 03 01 19 04	Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya mineral logam		Peta Potensi Mineral Logam, Kualitas dan Sebaran	Terinventarisasi dan terevaluasinya potensi sumber daya mineral logam di kab. Dharmasraya	1 kecamatan	Tersedianya data potensi sumber daya mineral logam	80%	80.000.000				
2 03 2 03 01 19	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Migas							45.000.000	-	-		
2 03 2 03 01 19 01	Sosialisasi MIGAS		Sosialisasi tentang kebijakan migas di Kabupaten Dharmasraya	Sosialisasi Tatacara dan peraturan pendistribusian BBM, LPG dan bahan pelumas	5 unit SPBU dan 40 Unit Pangkalan Minyak Tanah dan 1 unit depot Gas.	Konsumen dan Pelaku usaha memahami tata cara pendistribusian BBM sehingga pendistribusian BBM sesuai peruntukannya.		30.000.000				
2 03 2 03 01 19 02	Pengawasan Monitoring MIGAS		Monitoring terhadap distribusi MIGAS di Kabupaten Dharmasraya	Pengawasan dan Monitoring pendistribusian BBM (Premium & Solar) pada SPBU serta Minyak Tanah pada pangkalan dan Depot Gas Elpiji	5 unit SPBU dan 40 Unit Pangkalan Minyak Tanah dan 1 unit depot Gas.	Terlaksananya pengawasan pendistribusian BBM		15.000.000				
2 03 2 03 01 17	Program Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan							7.330.135.000	-	-		
2 03 2 03 01 17 03	Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan		Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya	Rumah Tangga/KK yang belum mendapat pelayanan kelistrikan mendapatkan energi listrik alternatif	1. terpasangnya jaringan Tenaga listrik di Kab Dharmasraya - JTM=0 - GD=2 unit - JTR=11.608 ms	Perluasan cakupan kelistrikan, serta energi alternatif untuk masyarakat	80%	935.135.000				
				Pengelolaan potensi energi daerah	1. Pembangunan PLTU = 0 Unit.	Terkelolanya potensi-potensi energi daerah	80%	650.000.000				
					2. Pembangunan PLTMh = 1 Unit			1.570.000.000				
					3. Pembangunan BIOGAS = 2 Unit			30.000.000				
				terdatanya study kelayakan terhadap potensial energi daerah	1. Studi kelayakan PLTU = 1 Unit	Potensi energi daerah terinventarisir dalam bentuk studi kelayakan	80%	720.000.000				
2 03 2 03 01 17	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan		Bertambahnya Jumlah Penerangan Jalan untuk Umum, di Kabupaten Dharmasraya	Penambahan PJU untuk jalan dan fasilitas umum yang ada di kabupaten Dharmasraya	Terpasang PJU dengan Tiang dekorasi sebanyak 60 Unit	Terpasangnya tambahan penerangan jalan umum	80%	960.000.000				
					Terpasang PJU dengan Stang Ornamen sebanyak 120 Unit			420.000.000				

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
					Terpasang PJU dengan Tiang Tower sebanyak 4 Unit			2.000.000.000				
2 03 2 03 01 17 04	Pengawasan, Pemeliharaan dan pemeliharaan PJU		Beroperasi, terawasi, terpeliharanya PJU yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Lampu Penerangan Jalan berfungsi sebagaimana mestinya	Terpelihara dan terawatnya PJU sebanyak 4032 unit	Terlaksananya pengawasan,Pemeliharaan dan Perawatan PJU	80%	15.000.000				
2 03 2 03 01 17 05	Monitoring dan Evaluasi Operasi		Terlaksananya pembinaan pengawasan ketenagalistrikan serta operasi PLTS di Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin Ketenagalistrikan	Pemegang izin usaha Ketenagalistrikan sendiri 6 Tempat (PKS)	Tertibnya kegiatan usaha ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	80%	15.000.000				
				Operasional PLTS di Kabupaten Dharmasraya	PLTS di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 578 Unit	Terawasinya PLTS yang ada di Kabupaten Dharmasraya	80%	15.000.000				
				<b>JUMLAH</b>				<b>13.369.772.125</b>	-	-		



**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.13. - KECAMATAN PULAU PUNJUNG**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							258.788.000				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							72.830.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							5.000.000				
1 22	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 13 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 13 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 13 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			<b>JUMLAH</b>					<b>381.618.000</b>				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.14. - KECAMATAN SITIUNG**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							300.238.000				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							27.280.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							5.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 14 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 14 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 14 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					377.518.000				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.15. - KECAMATAN KOTO BARU**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							419.016.000				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							29.572.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							5.000.000				
1 22	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 15 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 15 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 15 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			<b>JUMLAH</b>					<b>498.588.000</b>				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.16. - KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							263.195.500				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							71.548.500				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							7.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 16 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 16 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 16 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					386.744.000				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.17. - KECAMATAN IX KOTO**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							203.663.750				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							23.762.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							10.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 17 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 17 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 17 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					282.425.750				

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.18. - KECAMATAN TIMPEH

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							242.904.699				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							32.570.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							10.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 16 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 16 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 16 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					45.000.000				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.19. - KECAMATAN KOTO SALAK**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							318.657.850				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							34.464.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							15.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 19 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 19 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 19 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					413.121.850				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.20. - KECAMATAN ASAM JUJUHAN**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							191.782.025				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							116.280.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							15.000.000				
1 22	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 20 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 20 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 20 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			<b>JUMLAH</b>					<b>368.062.025</b>				



**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.21. - KECAMATAN KOTO BESAR**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							264.156.375				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							55.900.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							19.980.000				
1 22	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 21 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 21 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 21 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			<b>JUMLAH</b>					<b>385.036.375</b>				

**RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013**

**SKPD : 1.20.22. - KECAMATAN PADANG LAWEH**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							226.264.500				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							20.276.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							25.000.000				
1 22	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 22 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>							<b>45.000.000</b>				
1 22 1 20 22 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 22 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			<b>JUMLAH</b>					<b>316.540.500</b>				

RENCANA KERJA SKPD DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013

SKPD : 1.20.23. - KECAMATAN TIUMANG

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS RKPD TAHUN 2013	SASARAN KEGIATAN	KELUARAN		HASIL		SUMBER DANA			LOKASI	SKPD
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	APBD KAB.	APBD PROP	APBN		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 00 1 01 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran							340.362.000				
0 00 1 01 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							57.342.000				
0 00 1 01 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							12.000.000				
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							45.000.000				
1 22 1 20 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							45.000.000				
1 22 1 20 22 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa							30.000.000				
1 22 1 20 22 17 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							15.000.000				
			JUMLAH					454.704.000				

**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013  
BERDASARKAN SKPD**

NO	SKPD	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)	PAGU INDIKATIF SKPD	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.511.892.300	29.646.508.200	6,15%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	299.042.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	50.000.000		
		Bidang Pendidikan	21.705.362.900		
		Bidang Pemuda dan Olah Raga	4.080.211.000		
2	Dinas Kesehatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.609.600.000	31.715.301.011	6,58%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.800.000.000		
		Program peningkatan disiplin aparatur	168.000.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	65.000.000		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000		
		Bidang Kesehatan	24.022.701.011		
3	RSUD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.824.800.000	19.436.765.000	4,03%
		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	2.270.000.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71.400.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	149.545.000		
		Bidang Kesehatan	12.121.020.000		
4	Dinas PU	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.964.395.438	236.608.592.170	49,06%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.643.216.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	50.000.000		
		Bidang Pekerjaan Umum	167.701.980.732		
		Bidang Perumahan	1.100.000.000		
		Bidang Lingkungan Hidup	4.149.000.000		
5	Bappeda	Program pelayanan administrasi perkantoran	603.569.500	4.948.444.000	1,03%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71.784.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	50.100.000		
		Bidang Pekerjaan Umum	40.000.000		
		Bidang Perumahan	60.000.000		
		Bidang Penataan Ruang	1.225.000.000		
		Bidang Perencanaan Pembangunan	1.762.990.500		
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	750.000.000		
		Bidang Statistik	385.000.000		
6	BKD	Program pelayanan administrasi perkantoran	573.231.800	7.092.117.826	1,47%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59.272.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	641.250.000		
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5.818.364.026		
7	DPPKD	Program pelayanan administrasi perkantoran	774.721.800	4.667.778.056	0,97%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	133.740.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	50.000.000		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.145.000		

NO	SKPD	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)	PAGU INDIKATIF SKPD	%
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3.663.171.256		
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.007.628.030	9.958.876.030	2,06%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	157.248.000		
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000		
		Bidang Perhubungan	3.239.000.000		
		Bidang Komunikasi dan Informatika	2.530.000.000		
		Bidang Kebudayaan	300.000.000		
		Bidang Pariwisata	2.625.000.000		
9	BLH	Program pelayanan administrasi perkantoran	285.131.000	1.481.171.000	0,31%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36.040.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	50.000.000		
		Bidang Lingkungan Hidup	1.110.000.000		
10	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.026.187.100	3.388.698.100	0,70%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154.351.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000		
		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	2.158.160.000		
11	Dinas Sosnakertrans	Program pelayanan administrasi perkantoran	985.969.700	4.077.129.700	0,85%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68.480.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000.000		
		Bidang Perumahan	370.000.000		
		Bidang Sosial	1.028.680.000		
		Bidang Tenaga Kerja	725.000.000		
		Bidang Transmigrasi	879.000.000		
12	Dinas Koperindag dan UMKM	Program pelayanan administrasi perkantoran	441.537.750	3.612.566.645	0,75%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93.374.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.654.895		
		Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	815.000.000		
		Bidang Perindustrian	225.000.000		
		Bidang Perdagangan	2.030.000.000		
13	Kantor Satpol PP	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.886.323.000	2.553.309.000	0,53%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.302.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	126.800.000		
		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	440.884.000		
14	Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	Program pelayanan administrasi perkantoran	703.244.050	1.689.200.050	0,35%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44.956.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	29.500.000		
		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	831.500.000		
		Bidang Sosial	80.000.000		
15	BPBD	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.172.898.500	5.103.350.700	1,06%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.864.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.500.000		

NO	SKPD	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)	PAGU INDIKATIF SKPD	%
		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	920.088.200		
		Bidang Perumahan	2.700.000.000		
		Bidang Perencanaan Pembangunan	200.000.000		
16	DPRD				
17	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah				
18	Sekda	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.470.780.000	27.509.891.782	5,70%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.522.696.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.500.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	390.000.000		
		Bidang Perencanaan Pembangunan	571.620.764		
		Bidang Pertanahan	798.779.000		
		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5.585.000.000		
		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3.647.550.018		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	189.966.000		
		Bidang Komunikasi dan Informatika	2.280.000.000		
19	Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.401.847.900	13.860.250.750	2,87%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	916.904.600		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	105.300.000		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000		
		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	5.031.198.250		
		Bidang Komunikasi dan Informatika	345.000.000		
20	Inspektorat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657.250.000	3.673.892.000	0,76%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.355.000.000		
		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1.661.642.000		
21	BP2MPBJ	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.750.000	4.279.500.000	0,89%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	194.000.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.000.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000		
		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	2.631.750.000		
		Bidang Penanaman Modal Daerah	680.000.000		
22	BPML2NPPKB	Program pelayanan administrasi perkantoran	408.691.000	15.202.962.750	3,15%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.796.360.250		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Perempuan	529.000.000		
		Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.914.822.000		
		Bidang kebudayaan	75.000.000		
		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	50.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.409.089.500		
23	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Program pelayanan administrasi perkantoran	191.486.250	6.315.737.750	1,31%

NO	SKPD	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)	PAGU INDIKATIF SKPD	%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60.552.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30.000.000		
		Bidang Kearsipan	5.413.699.500		
		Bidang Pendidikan	620.000.000		
24	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program pelayanan administrasi perkantoran	395.984.850	4.341.644.850	0,90%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201.861.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.000.000		
		Bidang Pertanian	3.718.799.000		
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Program pelayanan administrasi perkantoran	523.270.500	7.533.726.500	1,56%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.376.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000		
		Bidang Pertanian	5.246.080.000		
		Bidang Kehutanan	1.615.000.000		
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	Program pelayanan administrasi perkantoran	412.829.450	11.484.033.450	2,38%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	141.204.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000		
		Bidang Pertanian	3.485.000.000		
		Bidang Kelautan dan Perikanan	7.405.000.000		
27	BKP3	Program pelayanan administrasi perkantoran	554.091.280	4.576.952.280	0,95%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	177.020.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.000.000		
		Bidang Pertanian	3.820.841.000		
28	Dinas ESDM	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.826.533.500	13.369.772.125	2,77%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80.459.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000		
		Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	10.412.779.625		
29	Kecamatan Pulau Punjung	Program pelayanan administrasi perkantoran	258.788.000	381.618.000	0,08%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.830.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
30	Kecamatan Sitiung	Program pelayanan administrasi perkantoran	300.238.000	377.518.000	0,08%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27.280.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
31	Kecamatan Koto Baru	Program pelayanan administrasi perkantoran	419.016.000	498.588.000	0,10%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	29.572.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
32	Kecamatan Sei. Rumbai	Program pelayanan administrasi perkantoran	263.195.500	386.744.000	0,08%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71.548.500		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		

NO	SKPD	URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF PER PROGRAM (Rp)	PAGU INDIKATIF SKPD	%
33	Kecamatan IX Koto	Program pelayanan administrasi perkantoran	203.663.750	282.425.750	0,06%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23.762.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
34	Kecamatan Timpeh	Program pelayanan administrasi perkantoran	242.904.699	330.474.699	0,07%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	32.570.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
35	Kecamatan Koto Salak	Program pelayanan administrasi perkantoran	318.657.850	413.121.850	0,09%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	34.464.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
36	Kecamatan Asam Jujuhan	Program pelayanan administrasi perkantoran	191.782.025	368.062.025	0,08%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	116.280.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
37	Kecamatan Koto Besar	Program pelayanan administrasi perkantoran	264.156.375	385.036.375	0,08%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	55.900.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19.980.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
38	Kecamatan Padang Laweh	Program pelayanan administrasi perkantoran	226.264.500	316.540.500	0,07%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20.276.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
39	Kecamatan Tiumang	Program pelayanan administrasi perkantoran	340.362.000	454.704.000	0,09%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	57.342.000		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.000.000		
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.000.000		
			482.323.004.924	482.323.004.924	100,00%



**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013**  
**BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF SKPD (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)
<b>A.</b>	<b>Wajib</b>			<b>301.962.230.657</b>
1	Pendidikan	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.705.362.900	22.325.362.900
		- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	620.000.000	
2	Kesehatan	- Dinas Kesehatan	24.022.701.011	36.143.721.011
		- RSUD	12.121.020.000	
3	Pekerjaan Umum	- Dinas PU	167.701.980.732	167.741.980.732
		- Bappeda	40.000.000	
4	Perumahan	- Dinas PU	1.100.000.000	4.230.000.000
		- Bappeda	60.000.000	
		- Dinas Sosnakertrans	370.000.000	
		- BPBD	2.700.000.000	
5	Penataan Ruang	- Bappeda	1.225.000.000	1.225.000.000
6	Perencanaan Pembangunan	- Bappeda	1.762.990.500	2.534.611.264
		- BPBD	200.000.000	
		- Sekda	571.620.764	
7	Perhubungan	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	3.239.000.000	3.239.000.000
8	Lingkungan Hidup	- Dinas PU	4.149.000.000	5.259.000.000
		- BLH	1.110.000.000	
9	Pertanahan	- Sekda	798.779.000	798.779.000
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	- Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	2.158.160.000	2.158.160.000
11	Pemberdayaan Perempuan	- BPML2NPPKB	529.000.000	529.000.000
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- BPML2NPPKB	1.914.822.000	1.914.822.000
13	Sosial	- Dinas Sosnakertrans	1.028.680.000	1.108.680.000
		- Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	80.000.000	
14	Tenaga Kerja	- Dinas Sosnakertrans	725.000.000	725.000.000
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Dinas Koperindag dan UMKM	815.000.000	815.000.000

16	Penanaman Modal Daerah	- BP2MPBJ	680.000.000	680.000.000
17	Kebudayaan	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	300.000.000	375.000.000
		- BPML2NPPKB	75.000.000	
18	Pemuda dan Olahraga	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.080.211.000	4.080.211.000
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	- Kantor Satpol PP	440.884.000	7.777.472.200
		- Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	831.500.000	
		- BPBD	920.088.200	
		- Sekda	5.585.000.000	
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	- Bappeda	750.000.000	23.253.675.550
		- BKD	5.818.364.026	
		- DPPKD	3.663.171.256	
		- Sekda	3.647.550.018	
		- Sekretariat DPRD	5.031.198.250	
		- Inspektorat Daerah	1.661.642.000	
		- BP2MPBJ	2.631.750.000	
		- BPML2NPPKB	50.000.000	
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Sekda	189.966.000	4.094.055.500
		- BPML2NPPKB	3.409.089.500	
		- Kecamatan Pulau Punjung	45.000.000	
		- Kecamatan Sitiung	45.000.000	
		- Kecamatan Koto Baru	45.000.000	
		- Kecamatan Sei. Rumbai	45.000.000	
		- Kecamatan IX Koto	45.000.000	
		- Kecamatan Timpeh	45.000.000	
		- Kecamatan Koto Salak	45.000.000	
		- Kecamatan Asam Jujuhan	45.000.000	
		- Kecamatan Koto Besar	45.000.000	
		- Kecamatan Padang Laweh	45.000.000	
		- Kecamatan Tiumang	45.000.000	
22	Statistik	- Bappeda	385.000.000	385.000.000
23	Kearsipan	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	5.413.699.500	5.413.699.500
24	Komunikasi dan Informatika	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2.530.000.000	5.155.000.000
		- Sekda	2.280.000.000	
		- Sekretariat DPRD	345.000.000	
<b>B</b>	<b>Pilihan</b>			<b>41.462.499.625</b>

1	Pertanian	- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	3.718.799.000	16.270.720.000
		- Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.246.080.000	
		- Dinas Peternakan dan Perikanan	3.485.000.000	
		- BKP3	3.820.841.000	
2	Kehutanan	- Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.615.000.000	1.615.000.000
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	- Dinas ESDM	10.412.779.625	10.412.779.625
4	Pariwisata	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2.625.000.000	2.625.000.000
5	Kelautan dan Perikanan	- Dinas Peternakan dan Perikanan	7.405.000.000	7.405.000.000
6	Perdagangan	- Dinas Koperindag dan UMKM	2.030.000.000	2.030.000.000
7	Perindustrian	- Dinas Koperindag dan UMKM	225.000.000	225.000.000
8	Transmigrasi	- Dinas Sosnakertrans	879.000.000	879.000.000
	Wajib			301.962.230.657
	Pilihan			41.462.499.625
	Program pelayanan administrasi perkantoran			46.974.673.397
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			89.102.926.350
	Program peningkatan disiplin aparatur			1.051.450.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.673.079.895
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			96.145.000
	<b>Jumlah</b>			<b>482.323.004.924</b>

**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013**  
**BERDASARKAN SKPD**

NO	SKPD	BTL (Rp)	BL SKPD (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	149.246.250.000	29.646.508.200	178.892.758.200
2	Dinas Kesehatan	22.063.241.000	31.715.301.011	53.778.542.011
3	RSUD	10.156.760.000	19.436.765.000	29.593.525.000
4	Dinas PU	3.136.846.000	236.608.592.170	239.745.438.170
5	Bappeda	1.380.764.000	4.948.444.000	6.329.208.000
6	BKD	2.678.450.000	7.092.117.826	9.770.567.826
7	DPPKD	4.647.524.500	4.667.778.056	9.315.302.556
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2.273.263.000	9.958.876.030	12.232.139.030
9	BLH	1.086.650.000	1.481.171.000	2.567.821.000
10	Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	1.943.465.000	3.388.698.100	5.332.163.100
11	Dinas Sosnakertrans	2.035.467.000	4.077.129.700	6.112.596.700
12	Dinas Koperindag dan UMKM	1.806.475.000	3.612.566.645	5.419.041.645
13	Kantor Satpol PP	1.312.850.000	2.553.309.000	3.866.159.000
14	Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat	627.463.000	1.689.200.050	2.316.663.050
15	BPBD	361.453.000	5.103.350.700	5.464.803.700
16	PPKD	41.273.604.000		41.273.604.000
17	DPRD	4.401.265.800		4.401.265.800
18	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	461.205.800		461.205.800
19	Sekda	5.476.453.000	27.509.891.782	32.986.344.782
20	Sekretariat DPRD	1.627.346.000	13.860.250.750	15.487.596.750
21	Inspektorat Daerah	1.746.745.000	3.673.892.000	5.420.637.000
22	BP2MPBJ	1.076.460.000	4.279.500.000	5.355.960.000
23	BPML2NPPKB	1.967.453.000	15.202.962.750	17.170.415.750
24	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	531.362.500	6.315.737.750	6.847.100.250
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.806.710.000	4.341.644.850	6.148.354.850
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.236.475.000	7.533.726.500	10.770.201.500
27	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.234.482.000	11.484.033.450	13.718.515.450
28	BKP3	3.124.654.000	4.576.952.280	7.701.606.280
29	Dinas ESDM	1.292.575.000	13.369.772.125	14.662.347.125
30	Kecamatan Pulau Punjung	776.453.000	381.618.000	1.158.071.000
31	Kecamatan Sitiung	764.865.000	377.518.000	1.142.383.000
32	Kecamatan Koto Baru	753.253.000	498.588.000	1.251.841.000
33	Kecamatan Sei. Rumbai	1.057.352.000	386.744.000	1.444.096.000
34	Kecamatan IX Koto	672.435.600	282.425.750	954.861.350
35	Kecamatan Timpeh	567.350.000	330.474.699	897.824.699
36	Kecamatan Koto Salak	756.435.000	413.121.850	1.169.556.850
37	Kecamatan Asam Jujuhan	670.764.000	368.062.025	1.038.826.025
38	Kecamatan Koto Besar	661.684.500	385.036.375	1.046.720.875
39	Kecamatan Padang Laweh	558.431.800	316.540.500	874.972.300
40	Kecamatan Tiumang	714.367.500	409.704.000	1.124.071.500
<b>Jumlah</b>		<b>282.967.104.000</b>	<b>482.278.004.924</b>	<b>765.245.108.924</b>